



# ELITE MUSLIM

# BANJAR

## DI TINGKAT NASIONAL

PERJALANAN HIDUP DAN KIPRAH HASAN  
BASRI, IDHAM CHALID DAN DJOHAN EFFENDI  
ERA ORDE LAMA DAN ORDE BARU (1950-1998)

Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I.  
Drs. H. Abd. Rahman Jaferi, M.Ag.  
Ahmad, S.Ag., M.Fil.I

IAIN ANTASARI PRESS

**Rahmadi**

**Abd. Rahman Jaferi**

**Ahmad**

**ELITE MUSLIM BANJAR DI TINGKAT  
NASIONAL**

**Perjalanan Hidup dan Kiprah Hasan Basri,  
Idham Chalid dan Djohan Effendi Era Orde  
Lama dan Orde Baru (1950-1998)**

**IAIN Antasari Press**

**2013**

# **ELITE MUSLIM BANJAR DI TINGKAT NASIONAL**

## **Perjalanan Hidup dan Kiprah Hasan Basri, Idham Chalid dan Djohan Effendi Era Orde Lama dan Orde Baru (1950-1998)**

Penulis  
Rahmadi  
Abd. Rahman Jaferi  
Ahmad

Cetakan I, November 2013

Desain Cover  
Zainal F

Tata Letak  
Yokke

Penerbit  
IAIN Antasari Press  
Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin  
Telp. 0511-3256980  
E-mail: antasari@iain-antasari.ac.id

Pencetak  
Aswaja Pressindo

V + 266 halaman, 15,5 x 23 cm  
ISBN: 978-979-3377-77-3

**KATA PENGANTAR**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN**  
**IAIN ANTASARI**

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah swt. atas berkat dan hidayah-Nya kepada kita. Begitu juga salawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad saw.

Kami menyambut gembira atas diterbitkannya hasil penelitian dari Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I., Drs. H. Abd. Rahman Jaferi, M.Ag., dan Ahmad, S.Ag., M.Fil.I. dengan judul: *Elite Muslim Banjar di Tingkat Nasional: Perjalanan Hidup dan Kiprah Hasan Basri, Idham Chalid dan Djohan Effendi Era Orde Lama dan Orde Baru (1950-1998)*. Sesuai dengan fungsinya, Penerbit IAIN Antasari Press terus berupaya untuk menerbitkan karya-karya dosen, peneliti dan mahasiswa yang berkualitas.

Penerbitan buku-buku yang ditulis oleh para dosen, peneliti dan mahasiswa ini adalah untuk menyebarluaskan hasil kerja akademis IAIN Antasari. Di samping itu, kami juga berharap penerbitan buku ini dapat menjadikan motivasi dosen dan mahasiswa untuk lebih banyak lagi menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas.

Harapan kami, semoga ini bermanfaat bagi para pendidik, peserta didik dan masyarakat secara umum.

Banjarmasin, 15 Oktober 2013  
Kepala,

Drs. H. Ahdi Makmur, M.Ag., Ph.D.

## DAFTAR ISI

**Halaman Judul | i**

**Kata Pengantar Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN  
Antasari Banjarmasin | iii**

**Daftar Isi | iv**

**Bab I Pendahuluan | 1**

- A. Latar Belakang Masalah | 1
- B. Rumusan Masalah | 3
- C. Penegasan Judul dan Batasan Kajian | 4
- D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian | 5
- E. Kajian Pustaka | 6
- F. Metode Penelitian | 10

**Bab II Perjalanan Hidup Hasan Basri (1920-1998) | 13**

- A. Kelahiran dan Latar Belakang Keluarga | 13
- B. Masa Pendidikan (1928-1941) | 14
- C. Menikah dan Mengabdikan di *Banua* (1941-1950) | 20
- D. Ke Jakarta Sebagai Politisi di Parlemen dan Aktivistis GPII (1950-1960) | 30
- E. Memperjuangkan Masyumi dan Kembali Berdakwah (1961-1970) | 38
- F. YPI, DDII, DMI dan MUI: Wadah Berkiprah untuk Umat (1971-1980) | 43
- G. Menjadi Pimpinan MUI (1981-1990) | 48
- H. Periode Emas Kedua di MUI (1991-1998) | 56
- I. Pengabdian Terakhir (1995-1998) | 62

**Bab III Perjalanan Hidup Idham Chalid dari 1922-1998  
| 67**

- A. Kelahiran dan Masa Kecil | 67
- B. Masa Pendidikan di Amuntai dan Nagara | 69
- C. Mengabdikan dan Berjuang di Banua (1945-1949) | 80
- D. Idham di Jakarta: Menjadi Anggota Parlemen dan Politisi NU (1950-1960) | 96
- E. Idham pada Era Demokrasi Terpimpin dan Awal Orde Baru (1961-1970) | 121

- F. Idham pada Dekade 70-an: Ketua Umum PBNU, Ketua DPR/MPR dan Presiden PPP (1971-1980) | 136
- G. Peristiwa Mei 1982 dan NU kembali ke Khittah (1981-1990) | 149
- H. Menjelang Sakit (1991-1998) | 176

**Bab IV Perjalanan Hidup Djohan Effendi dari Tahun 1939 hingga 1998 | 179**

- A. Masa Kecil dan Masa Belajar (1939-1960) | 179
- B. Dua Tahun Mengabdikan di *Banua* (1960-1962) | 189
- C. Dinamika Intelektual Djohan di Yogyakarta (1962-1970) | 190
- D. Menjadi Staf Pribadi Menteri Agama dan Penulis Pidato (1971-1980) | 198
- E. Djohan Dekade 1980-an: Peneliti, Mentor, Iqbalian, dan Penulis Pidato | 205
- F. Menjadi APU (Ahli Peneliti Utama), Tokoh Pluralis dan Kepala Litbang Depag (1991-1998) | 211

**Bab V Kiprah dan Ketokohan Hasan Basri, Idham Chalid dan Djohan Effendi | 219**

- A. Kiprah di Bidang Politik dan Relasi dengan Kekuasaan | 219
- B. Kiprah di Bidang Sosial Keagamaan (Pendidikan, Dakwah dan Kehidupan Umat Beragama) | 232
- C. Kiprah di Bidang Intelektual | 238
- D. Kiprah di Dunia Internasional | 241
- E. Berbandingan Ketokohan | 243

**Bab VI Penutup | 257**

- A. Simpulan | 257
- B. Rekomendasi | 260

**Daftar Pustaka | 263**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setelah masa-masa yang keras melawan Belanda antara tahun 1945-1950, Indonesia memasuki babak baru yaitu era efektif Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno (w. 1970). Pada era ini, bangsa Indonesia mengalami berbagai peristiwa penting terutama dalam bidang politik dan militer. Pada masa ini terjadi berbagai pemberontakan dari sesama anak bangsa, mulai dari Pemberontakan DI/TII (1951-1962),<sup>1</sup> PRRI Permesta (1958-1961)<sup>2</sup> hingga G 30 S PKI (1965).

Bidang politik pada era ini juga berkembang sangat dinamis. Pemilu pertama pada tahun 1955 berlangsung demokratis. Namun anggota Konstituante yang terbentuk dari hasil pemilu ini mengalami kebuntuan dalam berbagai perdebatan tentang perubahan dan pembentukan undang-undang dasar pengganti UUD 1945 terutama tentang isu dasar negara dan penerapan syariah Islam. Dekrit Presiden 1959 untuk kembali ke UUD 1945 mengakhiri perdebatan itu dan secara bersamaan Konstituante dibubarkan. Puncak krisis politik dan akhir dari kekuasaan Soekarno terjadi pada tahun 1966 ketika terjadi demonstrasi besar-besaran menuntut Tritura (tiga tuntutan rakyat) dan munculnya Supersemar. Kekuasaan Soekarno benar-benar berakhir pada tahun 1967 ketika sidang istimewa MPRS mencabut mandat dari Presiden Soekarno (7 Maret 1967) dan Soeharto dilantik sebagai presiden RI (12 Maret 1967).

---

<sup>1</sup> Di Jawa Barat pemberontakan DI/TII dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo (w. 1962), di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar (w. 1959), di Sulawesi Selatan di pimpin oleh Kahar Muzakar (w. 1965), di Aceh dipimpin oleh Daud Beureuh (w. 1987), dan pemberontakan ini terjadi juga di Jawa Tengah.

<sup>2</sup> Pemberontakan ini terutama terjadi di Sumatera dan Sulawesi Utara. Pemberontakan ini turut pual menyeret sejumlah tokoh-tokoh utama Partai Masyumi seperti Burhanuddin Harahap, M. Natsir dan Sjafruddin Prawira negara. Ketiganya ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Akibat peristiwa ini pula, Partai Masyumi dibubarkan pada tahun 1960 karena dianggap terlibat dalam pemberontakan tersebut.

Setelah Soekarno tumbang, dimulailah era baru yang disebut Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Soeharto yang menggantikan Soekarno melakukan pembersihan unsur-unsur komunis dan berusaha meredam pengaruh soekarno yang besar. Setelah upaya itu berhasil, Soeharto kemudian mengarahkan upayanya untuk mengukuhkan kekuasaan dan menstabilkan negara. Era Soeharto merupakan era di mana bangsa Indonesia bangkit melakukan pembangunan yang gencar di segala bidang. Sayangnya upaya ini dinodai oleh praktik-praktik KKN dan korupsi yang merajalela serta sikap otoritarian pemerintah yang membelenggu kebebasan rakyat. Kekuasaan Orde Baru yang begitu kuat akhirnya tumbang pada tahun 1998 setelah dilanda krisis ekonomi dan krisis politik yang parah.

Pada kedua periode sejarah (Orde Lama dan Orde Baru) ini, banyak tokoh bangsa yang terlibat di tingkat nasional. Mereka merupakan tokoh-tokoh bangsa yang berasal dari berbagai daerah dan suku di Indonesia. Dari sekian tokoh yang terlibat dalam dinamika kehidupan dan sejarah bangsa Indonesia itu terdapat juga tokoh-tokoh yang berasal dari Kalimantan dari kalangan etnis Banjar. Dari sekian orang Banjar yang berkiprah di tingkat nasional, terdapat tiga tokoh yang merupakan tokoh elite agama yang terkenal di Indonesia dan terlibat dalam dinamika sosial-politik era Orde Lama dan Orde Baru, mereka adalah Hasan Basri (1920-1998), Idham Chalid (1922-2010) dan Djohan Effendi (lahir 1939).

Ketiga tokoh ini hidup sejaman dalam rentang waktu lebih setengah abad dan sama-sama memiliki andil dalam bidang kehidupan keagamaan. Mereka juga sama-sama orang Banjar yang meninggalkan kalimantan dan tinggal di Jawa (Jakarta). Meski sama-sama *urang* Banjar dan elite agama, mereka memiliki perbedaan dan kekhasan masing-masing. Hasan Basri berlatar belakang Muhammadiyah, Idham Chalid dikenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama dan tumbuh di kalangan tradisionalis sementara Djohan Effendi merupakan salah satu tokoh intelektual muslim yang dianggap liberal; Hasan Basri diidentikkan dengan MUI, Idham Chalid dikenal sebagai pimpinan NU dan politisi

## Pendahuluan

(dari partai NU hingga PPP), sementara Djohan Effendi dikenal sebagai birokrat, cendekiawan dan tokoh pembaruan.

Tentu sangat menarik untuk mengetahui perjalanan hidup mereka selama masa Orde Lama dan Orde Baru, begitu juga mengenai kiprah mereka di tingkat nasional selama dua periode penting dalam sejarah bangsa Indonesia itu. Untuk itu diperlukan satu kajian khusus mengenai perjalanan hidup dan kiprah mereka selama masa Orde Lama dan Orde Baru (1950-1998) sehingga terlihat bagaimana ketokohan dan kontribusi mereka dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia.

Diakui bahwa telah ada buku-buku biografi<sup>3</sup> yang telah diterbitkan mengenai ketiga tokoh ini. Hanya saja belum ada yang melakukan kajian terhadap ketiga tokoh ini dengan menggunakan pendekatan biografi kolektif terhadap perjalanan hidup dan kiprah mereka masing-masing dalam satu kajian secara bersamaan. Dengan menampilkan ketiga tokoh ini dalam satu kajian diharapkan akan mampu menemukan tentang kesamaan dan perbedaan atau kekhasan mereka sebagai elite muslim Banjar yang berkiprah di tingkat nasional pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan tiga permasalahan penting sebagai rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah perjalanan hidup Hasan Basri, Idham Khalid dan Djohan Effendi sejak masa kelahiran hingga era Orde Baru berakhir?

---

<sup>3</sup> Biografi tentang Hasan Basri diterbitkan oleh Ramlan Mardjoned dengan judul *KH. Hasan Basri 70 Tahun Fungsi Ulama dan Peranan Masjid* pada tahun 1990 dan yang paling mutakhir biografi Hasan Basri diterbitkan pada tahun 2009 yang berasal dari disertasi yang ditulis oleh Hadariansyah pada tahun 2001 dengan judul versi buku *KH. Hasan Basri (1920-1998) Tokoh Majelis Ulama dari Kalimantan*; Biografi Idham Chalid diterbitkan pada tahun 2008 dengan judul *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah* (editor: Arief Mudatsir Mandan); sementara biografi Djohan Effendi ditulis oleh Ahmad Gaus AF yang terbit pada tahun 2009 dengan judul *Sang Pelintas Batas: Biografi Djohan Effendi*.

2. Bagaimanakah kiprah Hasan Basri, Idham Khalid dan Djohan Effendi di tingkat nasional pada era Orde Lama dan Orde Baru (1950-1998)?
3. Apa saja sisi persamaan dan perbedaan ketokohan Hasan Basri, Idham Chalid dan Djohan Effendi di tingkat nasional?

### **C. Penegasan Judul dan Batasan Kajian**

Elite muslim Banjar di sini bermakna individu atau sekelompok muslim yang berada pada posisi sebagai tokoh-tokoh kelas atas atau tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan masyarakat Banjar yang memiliki peran menonjol dan berpengaruh di tingkat nasional. Tingkat nasional pada penelitian ini menunjukkan bahwa aspek yang ditonjolkan dalam penelitian ini ada pada peristiwa-peristiwa nasional dan tidak pada peristiwa lokal. Tetapi aspek lokal (Kalimantan Selatan) tetap diperhatikan dan dilibatkan sebagai bagian dari latar belakang kehidupan tokoh ini sebelum tahun 1950-an.

Yang dimaksud dengan perjalanan hidup pada judul penelitian ini bermakna riwayat hidup ketiga tokoh yang meliputi latar belakang sosial, latar belakang keluarga, masa kelahiran hingga menjadi tokoh, pendidikan, perjalanan karier, karya intelektual, momen-momen penting dalam hidup, jabatan-jabatan penting, dan sejenisnya. Perjalanan hidup ketiga tokoh ini akan dipaparkan secara kronologis sejak mereka lahir hingga masa Orde Baru berakhir (1998). Kajian tentang perjalanan hidup ketiga tokoh ini akan direkonstruksi dalam bentuk biografi kolektif.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kiprah bermakna derap kegiatan, sedang berkiprah berarti melakukan kegiatan dengan semangat yang tinggi di bidang tertentu; bergerak atau berusaha giat di bidang tertentu (politik dan sebagainya).<sup>4</sup> Dengan demikian, kiprah di sini dimaksudkan sebagai kegiatan (aktivitas), usaha yang dilakukan dengan giat dan bersemangat pada bidang-bidang tertentu. Bidang-bidang di sini meliputi bidang sosial keagamaan, politik (termasuk relasi

---

<sup>4</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, 2005), h. 571.

dengan kekuasaan), dan intelektual. Kiprah mereka di dunia internasional juga sedikit disinggung sebagai pelengkap. Kajian tentang kiprah ketiga tokoh ini walaupun dibahas tersendiri dan terpisah dari paparan tentang perjalanan hidup mereka tetap merupakan bagian dari paparan tentang biografi kolektif ketiga elite muslim Banjar ini.

Yang dimaksud dengan Orde Lama adalah periode yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1966 ketika Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno, sementara Orde Baru merupakan suatu periode yang berlangsung dari 1967 hingga 1998 (menjelang era reformasi). Rentang waktu ini (1950-1998) dipilih untuk menempatkan ketiga tokoh ini dalam momen sejarah yang sama. Sebab, ketiga tokoh ini tidak memiliki masa wafat yang sama, Hasan Basri wafat 1998, Idham Chalid wafat tahun 2010, sementara Djohan Effendi masih hidup ketika penelitian ini dilakukan. Perjalanan hidup dan Kiprah Hasan Basri terhenti dengan sendirinya ketika ia wafat, Idham Chalid tidak memiliki kiprah yang berarti setelah tahun 1998 karena sakit dan lumpuh bahkan koma pada tahun-tahun berikutnya. Hanya Djohan Effendi yang tetap berkiprah pasca Orde Baru. Namun karena penelitian ini membatasi diri pada era 1998 maka kiprah Djohan Effendi yang sebenarnya sangat penting pada Era Reformasi tidak dibahas dalam penelitian ini.

#### **D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah (1) merekonstruksi perjalanan hidup Hasan Basri, Idham Chalid dan Djohan Effendi sejak masa kelahiran hingga rentang waktu 1950-1998 dalam bentuk biografi kolektif; (2) mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara historis mengenai kiprah Hasan Basri, Idham Chalid dan Djohan Effendi di tingkat nasional dari tahun 1950 hingga 1998; dan (3) mendeskripsikan secara komparatif sisi persamaan dan perbedaan ketokohan Hasan Basri, Idham Chalid dan Djohan Effendi di tingkat nasional.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai kajian tokoh-tokoh penting dalam masyarakat Banjar dan Kalimantan pada umumnya. Penelitian ini juga diharapkan memperkaya kehadiran penulisan dan kajian biografi elite muslim Banjar terutama mengenai sosok ketiga tokoh ini yang

masih langka di Kalimantan Selatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pelajaran dan suri tauladan bagi masyarakat luas di kalangan masyarakat Banjar berkaitan dengan ketokohan dan kiprah ketiga elite muslim Banjar ini.

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian atau tulisan mengenai ketokohan Hasan Basri, Idham Chalid dan Djohan Effendi telah dilakukan oleh beberapa penulis maupun peneliti. Di antara yang terpenting disebutkan di sini adalah:

### **1. Kajian tentang Hasan Basri**

Terdapat beberapa tulisan tentang Hasan Basri yang penting untuk dikemukakan di sini. Tulisan-tulisan itu adalah tulisan Muhammad Isa Anshary yang berjudul *K.H. Hasan Basri: Ulama Indonesia di Mata Dunia* (terbit 1989). Buku ini berisi laporan spesifik mengenai perjalanan Hasan Basri ke Roma untuk memenuhi undangan Majelis Inter Action yang dihadiri tokoh politik dan tokoh agama pada tahun 1987. Buku ini hanyalah sebuah catatan perjalanan pada momen tertentu (1987), karena itu buku ini hanya fokus pada momen itu saja. Buku berikutnya adalah buku yang disusun oleh Ramlan Mardjoned (editor) berjudul *K.H. Hasan Basri 70 Tahun: Fungsi Ulama dan Peranan Masjid* (terbit 1990). Buku ini berisi biografi, pengalaman dan karya-karya tulis Hasan Basri. Buku ini sebenarnya telah mengupas perjalanan hidup Hasan Basri dan aktivitasnya di beberapa bidang. Hanya saja paparan tentang perjalanan hidupnya belum dibahas secara kronologis dan juga belum ada pembahasan secara khusus mengenai kiprahnya selama Orde Lama dan Orde Baru. Selain kedua buku ini, masih ada lagi beberapa tulisan tentang Hasan Basri, tetapi karena hanya berupa catatan singkat tentangnya, tidak begitu penting untuk disebutkan di sini.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Biodata singkat Hasan Basri dapat ditemui di Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam Jilid I* (halaman 91-93); bagian akhir buku H.M.I. Anshary, *KH. Hasan Basri Ulama Indonesia di Mata Dunia* (h. 117-119); bagian akhir buku *Risalah Islamiyah Rahmat Bagi Alam Semesta*; bagian akhir buku *Etika Bermasyarakat*; Murodi, "K.H. Hasan Basri Pengkader Ulama Penenteram

Kajian serius dan detil tentang Hasan Basri ditulis oleh Hadariansyah melalui disertasinya (2001) yang berjudul *K.H. Hasan Basri (1920-1998): Kajian Biografis Tokoh Majelis Ulama*. Disertasi ini kemudian diterbitkan oleh Antasari Press dengan judul *KH. Hasan Basri (1920-1998): Tokoh Majelis Ulama dari Kalimantan* (terbit 2009). Kajian Hadariansyah terhadap Hasan Basri lebih ditekankan pada sisi biografi dan kiprahnya secara spesifik di MUI, kiprah Hasan Basri di bidang lain kurang mendapat penekanan. Selain itu penulisan disertasi ini bersifat tematis sehingga kronologi perjalanan hidup Hasan Basri dari sejak lahir hingga wafat tidak mengalir lurus, tetapi maju-mundur sesuai dengan tema. Sisi kronologi inilah yang akan ditekankan dalam penelitian ini sekaligus membedakannya dengan disertasi ini. Penelitian berikutnya tentang Hasan Basri adalah tesis St. Rosna yang berjudul *Pemikiran Tasawuf K.H. Hasan Basri* tahun 2003. Tesis ini hanya mengemukakan biografi singkat Hasan Basri dan percikan pemikirannya di bidang tasawuf sama sekali tidak menekankan bahasannya mengenai kiprah Hasan Basri di berbagai bidang sebagaimana yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

Semua tulisan di atas (buku dan disertasi) banyak berkaitan dan lebih mementingkan ketokohan Hasan Basri di Majelis Ulama Indonesia pada era Orde Baru. Kajian mengenai kiprah Hasan Basri pada Orde Lama sebelum dibentuknya MUI belum mendapat kajian yang memadai terutama kiprahnya di bidang politik.

## 2. Kajian tentang Idham Chalid

Kajian dan tulisan spesifik dan detil mengenai ketokohan Idham Chalid cukup sulit ditemukan.<sup>6</sup> Buku biografi (termasuk

---

Ummat” dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.), *Tokoh dan Pemimpin Agama: Biografi Sosial-Intelektual* (h. 71-96); dan lainnya.

<sup>6</sup> Dari sedikit tentang tulisan mengenai Idham Chalid setidaknya terdapat beberapa tulisan biografi singkat tentang dirinya, yaitu: bagian akhir dari buku *Mendajung dalam Taufan* (1966); *50 Tahun Perguruan Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Amuntai Kalimantan Selatan* (1972) (lihat halaman 34-37); *Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia* (*Tempo*, 1981); tulisan Jajat Burhanuddin “KH. Dr. Idham Chalid: Tokoh Politik Akomodasionis” dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed.), *Tokoh dan Pemimpin Agama: Biografi Sosial-Intelektual* (1998); buku Kamarul Hidayat, *Apa dan Siapa dari Utara Profil*

otobiografi) tentang Idham Chalid baru diterbitkan pada tahun (2008) yang berjudul *Napak Tilas Idham Chalid: Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah* (editor: Arief Mudatsir Mandan). Buku ini ditulis dari tiga sumber yaitu (1) tulisan Idham Chalid pada tahun 1982 yang berjudul *Auto Biografi KH. Idham Chalid, Untuk Anak-anakku, Cucu-cucuku, dan Murid-muridku*, (2) naskah-naskah yang berasal dari seminar, riset dan wawancara, dan (3) arsip nasional berupa hasil wawancara M. Dien Madjid dengan Idham Chalid tahun 1985-1986. Buku ini berisi biografi Idham Chalid sejak di Kalimantan Selatan hingga di tingkat Nasional sebagai politisi, ulama, birokrat dan posisinya sebagai pemimpin NU; demikian juga dengan pengalaman hidup dan kariernya sejak era kolonial hingga masa Orde Lama dan Orde Baru.

Sebagai buku biografi, buku di atas tidak menganalisis secara spesifik mengenai kiprah Idham Chalid. Buku ini hanya menyajikan perjalanan hidup Idham Chalid sejak masa kelahirannya hingga ia sakit. Apalagi isi biografi ini sebenarnya mayoritas masih berupa ‘bahan mentah’ karena hanya berisi outobiografi yang ditulis oleh Idham Chalid dan transkripsi hasil wawancara dengan Idham Chalid yang disajikan ‘apa adanya’ tanpa ada studi spesifik yang berarti terhadap bahan-bahan itu.<sup>7</sup>

Tulisan berikutnya tentang Idham Chalid yang berasal dari hasil penelitian (skripsi) adalah tulisan Ahmad Muhadjir yang berjudul *Idham Chalid, Guru Politik Orang NU*. Sebagaimana judulnya, buku ini lebih menekankan sisi politik Idham Chalid pada era Orde Lama. Karena itu, buku ini belum mengupas secara spesifik kiprah Idham Chalid di bidang politik pada era Orde Baru dan bidang lainnya termasuk kiprahnya di bidang pendidikan. Selain itu, buku ini juga hanya memaparkan biografi Idham sampai pada era demokrasi terpimpin. Sementara

---

dan *Kinerja Anak Banua* (h.1-2); dan beberapa buku lainnya tentang NU yang juga memuat biografi singkat Idham.

<sup>7</sup> Lihat dan baca bab II-III (autobiografi) dan bab IV-VI (transkripsi wawancara) pada Arief Mudatsir Mandan (ed.), *Napak Tilas Idham Chalid: Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2008), h. 23-157 dan 159-345.

penelitian ini akan mengupas biografi Idham sampai tahun 1998 dan pergolatan politiknya pada masa Orde Baru.

### 3. Kajian tentang Djohan Effendi

Ada beberapa tulisan mengenai Djohan Effendi yang tersebar.<sup>8</sup> Terkait dengan relevansinya dengan penelitian ini, di sini disebutkan beberapa tulisan yang penting untuk dikemukakan. Buku penting pertama adalah buku yang berasal dari disertasi Greg Barton yang berjudul *The Emergence of Neo-Modernism: A Progressive, Liberal Movement of Islamic Thought in Indonesia* yang kemudian diterbitkan dalam edisi Indonesia (penerjemah: Nanang Tahqiq) dengan judul *Gagasan Islam Liberal di Indonesia Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid* (1999). Buku ini menjadikan Djohan Effendi sebagai salah barisan tokoh Islam neomodernis Indonesia yang diteliti. Kajian ini sebagaimana isinya lebih menekankan pada pemikiran liberal Djohan Effendi dalam rentang tahun 1968-1980 dan tidak berbicara secara spesifik tentang kiprah Djohan Effendi. Demikian juga, penelitian ini tidak berbicara kiprah Djohan Effendi setelah tahun 1980. Berikutnya tulisan mengenai Djohan Effendi dapat dilihat pada dua buku yang diterbitkan untuk menyambut 70 tahun usia Djohan Effendi, yaitu *Sang Pelintas Batas: Biografi Djohan Effendi* (Ahmad Gaus, 2009) dan *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi* (editor: Elza Feldi Taher, 2009). Buku pertama berisi tentang latar belakang kehidupan Djohan Effendi, perkembangan pemikiran, kehidupan keluarga, perjalanan karirnya sebagai birokrat, kesan dan komentar dari para sahabat, dan perannya dalam dialog antariman dan pluralisme. Buku Kedua lebih banyak berisi ulasan yang menyoroti tentang pemikiran Djohan Effendi dan kiprahnya dalam dialog antaragama ditambah dengan sejumlah tulisan tentang toleransi,

---

<sup>8</sup> Diantara sekian tulisan tentang Djohan Effendi adalah Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, (Jakarta: Hujjah Press, 2007), h. 31-35. Di sini Djohan dikelompokkan sebagai tokoh pelopor Islam liberal di Indonesia bersama dengan Mukti Ali, Abdurrahman Nama Djohan juga banyak disebut-sebut dalam buku Ahmad Wahib: Djohan Effendi (ed.), *Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib*, (Jakarta: LP3ES, 1981).

pluralisme, kebebasan beragama, dialog agama, serta agama dan demokrasi yang ditulis oleh sahabat-sahabatnya. Kedua buku ini tidak berbicara secara spesifik tentang kiprah Djohan Effendi dalam rentang waktu 1950-1998, tetapi membahas banyak hal. Karena itu, kajian mengenai kiprahnya di tingkat nasional perlu dibahas secara khusus dan lebih terfokus.

Dari ketiga kajian yang telah dilakukan terhadap ketiga tokoh ini terdapat ruang yang lebar untuk melakukan penelitian secara spesifik mengenai kiprah mereka di tingkat nasional dalam rentang waktu 1950-1998. Apalagi, sebagaimana terlihat, tidak ada satupun penelitian yang mempertemukan ketiga tokoh ini dalam satu kajian. Karena itu, akan sangat menarik jika ketiga elite agama yang berasal dari Kalimantan dan sama-sama beretnis Banjar ini dikaji dalam satu kajian khusus, tidak hanya dibahas secara terpisah tetapi dikaji lintas tokoh secara kolektif-komparatif. Inilah yang akan dilakukan oleh penelitian ini sekaligus membedakannya dengan kajian-kajian yang sudah ada.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini merupakan bentuk studi tokoh<sup>9</sup> yang menekankan pada latar belakang dan perjalanan kehidupan sang tokoh dan kiprahnya dalam berbagai bidang dalam rentang waktu tertentu. Dengan demikian penelitian ini berkaitan dengan penelitian biografis yang masuk dalam kategori penelitian sejarah. Apalagi dengan adanya periode waktu dalam studi tokoh

---

<sup>9</sup> Dalam perspektif filsafat Ilmu, keabsahan studi tokoh sebagai salah satu metode penelitian, dapat dianalisis dari sudut ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologis, studi tokoh bersifat alamiah (dijelaskan apa adanya), induktif (dijelaskan data yang diperoleh dari seorang tokoh), mempertimbangkan etik dan emik, serta *verstehen* (peneliti dapat menggali pikiran, perasaan, dan motif yang ada dibalik tindakan sang tokoh). Dari sudut epistemologi studi tokoh dilakukan dengan pendekatan historis, sosio-kultural-religius (tidak melepaskannya dari konteks sosial kultural dan agama sang tokoh) dan bersifat kritis-analitis. Sedang dari sudut aksiologis studi tokoh dapat dilihat dari nilai gunanya, terutama dari sudut keteladanan, bahan introspeksi bagi tokoh-tokoh belakangan, dan memberi sumbangan bagi perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta/Medan: Istiqamah Mulya Press, 2006), h. 8.

di sini (yakni masa Orde Lama dan Orde Baru, 1950-1998), jelas menunjukkan sebagai bagian dari objek kajian sejarah. Atas dasar ini, penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode sejarah. Mengingat di sini terdapat tiga tokoh terkenal yang mewakili elite muslim Banjar yaitu Hasan Basri, Idham Chalid dan Djohan Effendi, secara spesifik penelitian ini merupakan bentuk penelitian biografi kolektif (prosopography)<sup>10</sup> dengan pendekatan elitis.<sup>11</sup>

### 2. Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber tertulis (bahan-bahan pustaka) sebagai sumber utama. Sumber-sumber tertulis yang akan digunakan di sini adalah sumber kepustakaan yang sebagian isinya, bahkan sebagian besar, berasal dari sumber lisan yakni dari wawancara baik kepada tokoh atau elite yang diteliti maupun orang-orang dekat sang tokoh. Sumber-sumber tertulis yang digunakan mengandalkan sumber tertulis atau dokumen yang terpublikasi (*printed and published*), seperti buku, makalah, artikel, koran, majalah, situs internet dan sejenisnya yang berisi mengenai data yang diperlukan. Sumber tertulis yang digunakan adalah sumber tertulis yang kredibilitasnya tidak diragukan seperti buku biografi tokoh yang memuat otobiografi dan hasil wawancara langsung dengan tokoh; hasil-hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan sang tokoh atau kepada orang-orang terdekat (keluarga, sahabat) dan tulisan-tulisan tentang tokoh yang ditulis oleh penulis yang sejaman dan pernah berinteraksi yang cukup intensif dengan tokoh.

### 3. Tahapan Penelitian

---

<sup>10</sup> Biografi kolektif (prosopography) adalah penelitian tentang sekelompok orang yang mempunyai karakteristik latar belakang yang sama dengan mempelajari kehidupan mereka. Latar belakang yang sama itu berarti zaman (rentang waktu, abad, tahun), persamaan nasib, kedudukan ekonomi, kesamaan pekerjaan, persamaan pemikiran, dan peristiwa yang sama. Dalam serba “persamaan” selain persamaan itu sendiri, pasti ditemukan juga perbedaan, kontras, varian, bahkan pertentangan. Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), h. 212.

<sup>11</sup> Pendekatan elitis dalam biografi kolektif bertujuan untuk mengungkap tokoh-tokoh sejarah yang terkenal dan juga bertujuan memahami kepribadian tokoh-tokohnya, akar perbuatan dan keputusan, dan kepentingan yang tersimpan dibalik retorika. *Ibid.*

Penelitian sejarah yang diaplikasikan dalam penelitian ini menggunakan tahapan penelitian sejarah<sup>12</sup> sebagai berikut: *Pertama*, mengusut semua evidensi atau sumber (heuristika) yang relevan dengan sisi historis perjalanan hidup dan kiprah elite muslim Banjar di tingkat nasional dalam hal ini adalah Hasan Basri, Idham Chalid dan Djohan Effendi, kemudian membuat catatan tentang apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan topik tersebut. *Kedua*, mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan (kritik sumber). *Ketiga*, menyusun hasil-hasil penelitian ke dalam suatu pola atau sistematika tertentu, kemudian menafsirkan dan menyajikannya secara deskriptik-naratif. Model penulisan sejarah (historiografi) yang digunakan adalah bentuk penulisan biografi kolektif atau sejarah kolektif. Penulisan biografi kolektif di sini mengutamakan aspek kronologi (diakronik) sebagai ciri utama penulisan sejarah sementara penulisan yang bersifat tematis hanya menjadi pelengkap dari bagian kronologi itu.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan komparatif. Teknik ini digunakan ketika membahas dan menyajikan tentang masing-masing biografi tokoh sementara analisis komparatif akan digunakan untuk melakukan kajian lintas tokoh untuk melihat kesamaan dan perbedaan (ciri khas atau aspek yang menonjol untuk melihat varian) dalam berbagai aspek dari ketiga tokoh terutama mengenai kiprah masing-masing tokoh.

---

<sup>12</sup> Tahapan ini diadaptasi dari enam tahapan penelitian sejarah yang dikemukakan oleh Helius Suamsuddin. Lihat Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), h. 89.

## BAB II

### PERJALANAN HIDUP HASAN BASRI (1920-1998)

#### A. Kelahiran dan Latar Belakang Keluarga



Hasan Basri lahir pada tanggal 20 Agustus 1920 di Muara Teweh (Kalimantan Tengah). Nama Hasan Basri sendiri diambil dari nama seorang perawi hadis dan ulama asketis yang bernama Hasan al-Basri. Ayahnya bernama Muhammad Darun, seorang petani, sedang ibunya bernama Siti Fatmah, anak seorang staf pegawai pensiunan *landraad* (kantor pengadilan di masa Belanda) yang bernama Abdullah. Hasan Basri merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Saudaranya yang lain adalah Thamrin (kakak) dan Husni Rasyid (adik).<sup>1</sup>

Meski tinggal di Muara Teweh yang banyak dihuni oleh etnis Dayak, Hasan Basri bukanlah orang Dayak. Orangtuanya adalah *urang* Banjar yang berasal dari Banjarmasin. Kakek dan neneknya dari pihak ayah telah menetap di Muara Teweh sejak lama. Ibunya berasal dari Banjarmasin yang kemudian tinggal di Muara Teweh setelah menikah dengan ayahnya, Muhammad Darun.

Hasan Basri tidak lama hidup bersama ayahnya. Sang ayah wafat pada tahun 1923 ketika ia masih berumur tiga tahun. Ia bersama saudaranya kemudian dipelihara oleh ibunya dan dibantu oleh kakeknya, Abdullah. Untunglah sang kakek

---

<sup>1</sup> Hadariansyah, *KH. Hasan Basri (1920-1998) Tokoh Majelis Ulama dari Kalimantan*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), h. 37; Ramlan Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri 70 Tahun Fungsi Ulama dan Peranan Masjid*. (Jakarta: Media Dakwah, 1990), h. 6-7.

memiliki kesanggupan ekonomi untuk membiayai hidup anak dan cucu-cucunya. Sang kakek yang merupakan pensiunan *landraad*, bekerja sebagai petani dan kemudian beralih menjadi pedagang. Profesi sang kakek ini dapat menopang kehidupan mereka bersaudara termasuk biaya pendidikan mereka. Sang ibu sendiri memiliki keahlian dalam ramuan obat tradisional dan menjadi dukun beranak. Ibunya termasuk wanita yang cukup terpelajar pada masanya. Ia mampu membaca tulisan dalam bentuk huruf Arab-Melayu (beraksara Arab berbahasa Melayu). Dengan kemampuannya ini sang ibu dapat membaca karya-karya sastra yang beredar pada masa kolonial seperti karya sastra Abdul Kadir Munsyi.<sup>2</sup>

## **B. Masa Pendidikan (1928-1941)**

Pendidikan awal Hasan Basri dimulai di Muara Teweh. Di kampungnya terdapat Sekolah Rakyat (*volkschool*) dan Sekolah Diniyah Awwaliyah Islamiyah. Di dua lembaga pendidikan yang bersahaja inilah ia menempuh pendidikannya. Pada pagi hari, ia belajar di Sekolah Rakyat dan pada siang hingga sore hari, mulai sekitar pukul dua siang, ia belajar di Sekolah Diniyyah Awwaliyah Islamiyyah. Ia mulai menempuh pendidikannya di kedua sekolah ini pada tahun 1928, ketika berusia delapan tahun.

Dari kedua sekolahnya itu, tampaknya, masa belajarnya di Sekolah Diniyyah Awwaliyah Islamiyyah lebih berpengaruh dan berkesan pada dirinya. Terbukti ketika selesai di *Volkschool* pada tahun 1933, ia tetap meneruskan studinya di Sekolah Diniyyah. Di sekolah ini ia menjadi murid yang menonjol. Selain memiliki penampilan bersih dan berwajah tampan, ia juga merupakan murid terpandai di kelasnya. Karena itulah gurunya, Ustadz Haji Abdullah, sangat menyayangnya. Sang guru bahkan memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengajar juniornya di kelas rendah ketika ia masih berada di kelas tiga. Suaranya yang jelas dan berat ditambah dengan kemampuannya dalam seni baca Alquran sangat mendukung kemampuannya mengajar. Prestasi dan kemampuannya ini

---

<sup>2</sup> Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 7-8.

kemudian membuatnya menjadi murid yang dikenal luas tidak hanya di kelasnya tetapi juga di lingkungan tempat tinggalnya.<sup>3</sup>

Kondisi sekolah dan sistem pembelajarannya pada saat itu sangat sederhana. Sistem pembelajaran yang diterapkan pada waktu itu lebih banyak menggunakan metode hafalan. Metode hafalan ini menuntut setiap murid untuk tekun belajar di rumah. Karena itulah ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk belajar dan menghafal pelajarannya di sekolah. Metode hafalan ini ternyata memiliki daya lekat. Terbukti, apa yang dihafalnya ketika kecil masih melekat hingga ia menginjak usia tua. Termasuk yang pernah dihafalnya adalah sifat dua puluh, yang biasa diajarkan dalam pelajaran ilmu tauhid pada saat itu.

Pada masa studinya di Sekolah Diniyyah, Hasan Basri sangat menyenangkan mata pelajaran sejarah yang mulai didapatnya ketika berada di kelas tiga. Dia sempat membaca sejarah perang. Kesempatan membaca buku semacam ini merupakan kesempatan yang berharga kala itu karena sebelumnya penjajah Belanda melarang bacaan semacam itu.

Tidak hanya di sekolah, ia juga mendapat pendidikan dari internal keluarga. Sang kakek yang selalu memperhatikan perkembangan cucunya dan mendidiknya di rumah. Jika sang kakek berada di rumah, ia selalu melatih cucunya untuk berpidato. Latihan ini dilakukan sang kakek sejak ia berumur 8 tahun. Sang kakek menyuruhnya untuk naik di atas meja dan memintanya untuk melaporkan apa saja yang telah dikerjakannya pada hari itu, termasuk pelajaran yang telah diterimanya pada hari itu. Jamaah pendengarnya, ternyata tidak hanya kakeknya dan internal keluarga tetapi juga terkadang dihadiri oleh tetangga dan teman-teman sebaya. Perasaan grogi, malu bahkan gemeteran terkadang dialaminya jika yang menyaksikan pidatonya cukup banyak, yaitu keluarga, tetangga dan teman-temannya. Latihan ini dimaksudkan agar ia tidak mengalami demam panggung ketika berbicara di hadapan orang banyak. Sang kakek tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga mengajarkan cara berbicara secara kronologis,

---

<sup>3</sup> Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 10-11.

sistematis dan mudah dipahami. Sang kakek juga memperbaiki penampilannya, mana yang salah dan mana yang sudah benar untuk dijaga baik-baik.<sup>4</sup>

Di samping mengajar dan melatih Hasan Basri berpidato, sang kakek juga selalu mengontrol pergaulannya. Sang kakek mengawasi sang cucu agar tidak bergaul dengan anak-anak nakal. Ia juga akan mendapat teguran jika melakukan perbuatan salah. Sang kakek menasihatinya agar tidak bergaul dengan teman yang berperilaku tidak baik, apalagi ikut-ikutan melakukan perbuatan salah. Kakeknya selalu menganjurkan kepadanya agar berteman dengan anak yang baik dan pintar agar berpengaruh positif pada dirinya.<sup>5</sup>

Hasan Basri menyelesaikan pendidikan dasarnya di Madrasah Diniyyah Awwaliyyah pada tahun 1935 dua tahun setelah ia menyelesaikan pendidikannya di *Volkschool* (1933). Namun, ia tidak dapat melanjutkan pendidikannya di Muara Teweh. Pada saat itu belum ada sekolah lanjutan di sana. Untuk mendapat pendidikan lanjutan, sang kakek mengirimnya ke Banjarmasin dan memasukkannya ke Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah di Banjarmasin.

Untuk melanjutkan studi di Banjarmasin Hasan Basri harus meninggalkan kampung halamannya di Muara Teweh. Itu berarti ia harus berpisah dengan ibu, kakek dan teman-temannya. Di Banjarmasin, ia dititipkan pada salah satu kerabatnya yang tinggal di Banjarmasin. Kondisi ini terasa berat olehnya. Di satu sisi, ia merasa berat harus jauh dari keluarga dan kampung halamannya, dan di sisi lain ia juga harus beradaptasi dengan kota Banjarmasin yang kala itu merupakan kota yang ramai, sibuk dan dihuni oleh banyak suku. Kondisi Banjarmasin yang jauh berbeda dengan kondisi kampung halamannya menjadi tantangan tersendiri baginya.

Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah yang menjadi tempat studinya merupakan lembaga pendidikan modern yang membawa misi pembaruan. Masuk ke sekolah Muhammadiyah pada saat itu mengandung konsekuensi. Pada saat itu, konflik

---

<sup>4</sup> Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 13-14.

<sup>5</sup> Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h.. 14.

pemahaman keagamaan antara kaum *tuha* (kalangan tradisionalis) dan kaum muda (pembaru) yang pada saat itu identik dengan Muhammadiyah sedang memanas. Masuk lembaga Pendidikan Muhammadiyah sama artinya memihakkan diri pada kaum muda.

Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah sebagai lembaga pendidikan yang dikelola oleh kelompok gerakan pembaruan Islam tentu memiliki sistem yang berbeda dengan lembaga pendidikan tradisional. Madrasah ini tidak menggunakan kitab kuning yang selama ini beredar di kalangan tradisional dan meninggalkan sistem hafalan. Di sini buku-buku baru diajarkan seperti *Tarikh al-Islamiyyah*, *Tarikh Dirasah al-Islamiyyah* dan fiqih. Di madrasah ini diperkenalkan buku-buku karya intelektual kaum pembaru seperti karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha di samping karya intelektual ulama klasik seperti karya al-Ghazali dan al-Syafi'iy.<sup>6</sup> Literatur keagamaan yang dipelajari dan dibaca oleh Hasan Basri sebagaimana disebutkan sebelumnya memperkenalkannya pada khazanah pemikiran Islam klasik yang diwakili oleh karya intelektual al-Ghazali dan al-Syafi'iy dan pemikiran Islam modern yang berisi ide-ide pembaruan sebagaimana terwakili dalam karya Abduh dan rasyid Ridha. Selain buku-buku itu, ia juga membaca buku sejarah seperti *Kitab Sirah Nabi Muhammad*, *Tarikh al-Tarbiyah al-Islamiyyah*, *Tarikh Durus al-Islamiy* dan *Tarikh Lughah al-'Arabiyyah* dan membaca beberapa kitab tafsir, yaitu *Tafsir Jalalayn* dan *Tafsir Ibn Katsir*.<sup>7</sup>

Di Madrasah ini, Hasan Basri juga mendapat latihan berpidato (*muhadharah*). Baginya berpidato dan berbicara di depan orang banyak bukanlah hal asing. Sejak kecil ia telah mendapat latihan berpidato dari kakeknya dan pengalaman mengajar atas izin gurunya ketika masih duduk di sekolah dasar. Hanya saja, latihan berpidato kali ini lebih menantang karena ia berbicara di hadapan teman-temannya di lingkungan sekolahnya. Tentu pendengarnya lebih banyak. Kesempatan

---

<sup>6</sup> Hadariansyah, *KH, Hasan Basri*, h. 46; Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 15.

<sup>7</sup> Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h.12-13.

berharga untuk meningkatkan kemampuan pidatonya datang ketika Buya Hamka (w. 1981), ulama yang begitu terkenal pada saat itu, pada tahun 1938, berkunjung ke Banjarmasin sebagai utusan Muhammadiyah pusat dan menyampaikan pidato di madrasahny.<sup>8</sup> Inilah kali pertama ia bertemu dan menyaksikan secara langsung pidato Buya Hamka. Ia sangat terkesan dengan gaya pidato Buya Hamka itu. Sejak itu ia bertekad untuk meningkatkan kemampuannya berpidato agar mampu tampil seperti Buya Hamka. Ia sendiri ketika itu didaulat untuk menyampaikan pidato selamat datang kepada Buya Hamka dengan menggunakan teks pidato berbahasa Arab yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ketika bertemu pertama kali dengan Buya Hamka, ia masih berusia 17 tahun dan berada di kelas III Tsanawiyah Muhammadiyah.

Sebagaimana pada pendidikan tingkat dasar, prestasi belajar Hasan Basri di Madrasah Tsanawiyah juga menonjol. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya selama tiga tahun (1935-1938) dengan hasil yang memuaskan. Dengan prestasinya itu, ia dapat meneruskan studinya di Zu'ama Muhammadiyah di Yogyakarta. Pada saat itu, belum ada sekolah lanjutan yang dapat menampung lulusan Madrasah Tsanawiyah. Para lulusan yang ingin meneruskan studi harus menempuh pendidikan di pulau Jawa. Beruntung ia mendapat dukungan dan izin dari kakek dan ibunya untuk meneruskan pendidikannya di Jawa. Atas izin ini, ia berangkat ke Yogyakarta untuk meneruskan studinya di Sekolah Zu'ama Muhammadiyah. Ketika itu usianya telah menginjak usia 18 tahun.

Menempuh pendidikan di Jawa pada saat itu memiliki nilai tersendiri. Pada saat itu, tidak banyak orang yang memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan di pulau Jawa. Menempuh pendidikan yang lebih tinggi di pulau Jawa

---

<sup>8</sup> Pada saat itu, akhir bulan 1938, Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah akan mengadakan ujian kenaikan kelas. Kegiatan semacam ini dan kegiatan lainnya dalam bentuk perayaan sering dimanfaatkan oleh pihak Muhammadiyah Banjarmasin sebagai media dakwah untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Kegiatan semacam ini dilakukan karena pada saat itu, Muhammadiyah baru berkembang di Kalimantan Selatan. Hasan Basri, "Catatan Kenangan Buat Buya Hamka" dalam Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 290-291.

merupakan kesempatan langka bagi anak-anak lainnya dan dianggap sebagai pengalaman luar biasa. Selain itu, Zu'ama Muhammadiyah merupakan lembaga pendidikan Muhammadiyah yang bergengsi dan merupakan satu-satunya sekolah Zu'ama yang dimiliki umat Islam pada saat itu. Para staf pengajarnya pun bukan orang sembarangan. Mereka yang mengajar di sekolah ini diantaranya adalah KH. Mas Mansyur, KH. Farid Ma'ruf, Prof. Kahar Muzakir, KH. Baidhowi, dan Buya A.R. Sutan Mansur.<sup>9</sup>

Sekolah Zu'ama Muhammadiyah sendiri merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan mendidik kader ulama dan pemimpin yang memiliki pengetahuan agama dan pengetahuan umum sekaligus. Kader ulama dan pemimpin yang dibentuk merupakan pemimpin yang diharapkan mampu memimpin secara profesional dalam menggunakan sistem administrasi atau manajemen yang sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>10</sup> Selain dibekali pengetahuan umum, para pelajarnya tentu saja diberikan bekal pengetahuan agama yang lengkap seperti tauhid, fiqih, tafsir, Mushtalah hadis, ushul fiqih, dan ilmu alat (nahw, sharf, balaghah dan mantiq).<sup>11</sup>

Para pengajarnya yang merupakan figur ulama, pemimpin dan aktivis organisasi tentu sedikit banyaknya berpengaruh pada diri Hasan Basri muda. Ketertarikannya pada aktivitas organisasi politik setidaknya tidak lepas dari 'teladan' yang diberikan oleh guru-gurunya itu. Tidaklah mengherankan jika kemudian ia aktif mengikuti rapat-rapat politik yang diadakan oleh Partai Islam Indonesia (PII) yang kala itu

---

<sup>9</sup> KH. Mas Mansur merupakan ketua tarjih Muhammadiyah pertama (1928-1937) dan beberapa kali terpilih sebagai ketua Muhammadiyah (1937-1940). KH. Farid Ma'ruf menduduki posisi Penulis II Muhammadiyah pada era kepemimpinan KH. Mas Mansur dan aktif di organisasi sosial keagamaan dan politik. Abdul Kahar Muzakir merupakan tokoh aktivis Muhammadiyah yang aktif diorganisasi sosial keagamaan dan politik. KH. A. Badawi merupakan salah satu mantan ketua Muhammadiyah yang terpilih pada muktamar ke-35 dan ke-36. Demikian pula dengan Buya A.R. Sutan Mansur juga merupakan ulama yang pernah menduduki jabatan ketua Muhammadiyah dua kali berturut-turut, terpilih pada muktamar ke-32 dan ke-33. Hadariansyah, *KH. Hasan Basri*, h. 48-49.

<sup>10</sup> Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 16.

<sup>11</sup> Hadariansyah, *KH. Hasan Basri*, h. 48.

dipimpin oleh Dr. Sukiman, Wiwoho Purbohadidjoyo, Wali al-Fatah, KH. Taufiqurrahman, Gafar Ismail, dan lainnya.<sup>12</sup> Rapat-rapat politik ini diikutinya di luar jam sekolah. Di sinilah ia belajar politik dan mengenal dunia pergerakan yang sedang marak ketika itu.

Selama belajar di Zu'ama, Hasan Basri rajin belajar secara otodidak. Dia banyak membaca buku atau kitab-kitab tertentu yang diminatinya, sebagaimana dulu dilakukannya ketika menempuh studi di Muara Teweh dan Banjarmasin. Kebiasaan ini meningkatkan dan memperluas wawasan keislaman yang dimilikinya. Itulah sebabnya, meski pendidikannya hanya sampai pada tingkat Zu'ama, namun pengetahuan dan wawasan keislamannya tidak dapat diremehkan.

Setelah tiga tahun menempuh pendidikan di Zu'ama Muhammadiyah, Hasan Basri berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1941. Ketika itu ia berusia 21 tahun. Dengan selesainya studinya, ia kemudian kembali ke Banjarmasin untuk mengabdikan diri di daerahnya.

### **C. Menikah dan Mengabdikan diri di *Banua* (1941-1950)**

Tidak lama setibanya di Banjarmasin, Hasan Basri meminta kakeknya, Haji Abdullah, untuk melamar seorang gadis yang telah dikenalnya di Yogyakarta. Gadis yang dimaksud olehnya bernama Nurhani. Nurhani merupakan gadis Banjar yang berasal dari Kandungan, anak dari keluarga kaya. Ayahnya Thawaf Saleh dan ibunya bernama Antung Imur. Dia lahir pada tanggal 19 Januari 1924. Hasan Basri mengenalnya di Yogyakarta, karena mereka sama-sama *urang* Banjar yang mendapat kesempatan belajar di sekolah Zu'ama/Za'imat Muhammadiyah. Nurhani merupakan adik kelas. Ketika Hasan Basri menamatkan studinya, Nurhani masih duduk di kelas tiga Sekolah Za'imat. Uniknya, Nurhani pada saat diterima di sekolah ini belum bisa membaca dan menulis huruf Arab. Dia diterima karena menjadi wanita pertama yang berasal dari 'seberang' (Kalimantan). Meski demikian, Nurhani memiliki

---

<sup>12</sup> Mardjoned, *KH. Hasan Basri*, h. 16; Hadariansyah, *KH. Hasan Basri*, h. 50.

pendidikan dasar yang baik karena ia berhasil menamatkan studinya di HIS (*Hollands Inlandsche School*) yang didirikan Belanda di Kandangan dan pada sore hari ia belajar di Sekolah Diniyah Muhammadiyah.<sup>13</sup>

Niat dan permintaan Hasan Basri untuk melamar Nurhani ternyata dikabulkan oleh kakeknya. Proses lamaran yang dilakukan oleh sang kakek berjalan lancar. Ini disebabkan keluarga kedua belah pihak sudah saling kenal sehingga proses lamaran yang dilakukan pada bulan awal Nopember 1941 tidak mendapat kendala apa-apa. Acara pernikahan dan ijab kabul dilaksanakan pada tanggal 8 Nopember 1941. Ketika itu Hasan Basri berusia 21 tahun sedang Nurhani berusia 17 Tahun. Menjelang lamaran, sebenarnya Nurhani sedang berlibur di Kandangan, Setelah menikah, ia tidak dapat meneruskan pendidikannya di sekolah Za'imat Muhammadiyah. Selain faktor telah berkeluarga, situasi pada saat itu tidak memungkinkannya untuk meneruskan pendidikan karena tidak lama setelah perkawinannya itu tentara Jepang masuk menggantikan Belanda yang membuat situasi berubah.

Kesamaan Hasan Basri dan Nurhani sebagai pengikut Muhammadiyah dan dididik di lembaga pendidikan Muhammadiyah baik di Kalimantan Selatan maupun di Yogyakarta membuat pasangan ini dapat berkiprah dan berjuang bersama-sama dengan kompak. Kerjasama mereka yang pertama di *banua* tidak lama setelah menikah adalah membangun dan membina Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Marabahan (sekarang ibukota kabupaten Barito Kuala). Sekolah ini dapat bertahan selama beberapa tahun karena mendapat dukungan iuran dana dari anggota Muhammadiyah dan bantuan dari masyarakat (orangtua murid). Pendapatan Hasan Basri dan istrinya sebagai guru pada saat itu adalah 5 rupiah. Ia dan istrinya masing-masing mendapat 2.50 (2 rupiah 50 sen). Dari gaji yang masih kecil ini, mereka dapat menabung separuh pendapatan mereka itu. Kelebihan ini disebabkan bantuan orangtua murid yang pada saat itu bahu membahu membantu kehidupan guru. Tanpa diminta orangtua

---

<sup>13</sup> Mardjoned, *KH. Hasan Basri*, h. 17-18 dan Hadariansyah, *KH. Hasan Basri*, h. 52-53.

murid memberikan bantuan berupa sayur, pisang, kayu bakar, ikan, dan lainnya sementara para murid membantu mereka mengambil air.

Di samping menjadi guru, Hasan Basri juga disibukkan dengan berbagai aktivitas keagamaan lainnya. Diantara kesibukannya adalah menjadi khatib Jumat di sejumlah masjid dan melakukan ceramah keliling di beberapa desa di Marabahan. Tidak jarang dia menjadi pembimbing pengantin yang akan melaksanakan ijab qabul. Dia juga memimpin upacara penyelenggaraan jenazah dan memberi nasihat kepada keluarga yang ditimpa musibah kematian. Kendala yang sering menjadi masalah adalah masalah alat transportasi. Pada saat itu, sepeda merupakan alat transportasi yang paling ‘mewah’ untuk menjangkau desa-desa yang ada. Alternatif lain adalah berjalan kaki atau menggunakan *jukung* (sampai kecil) untuk memenuhi tugas dakwah.

Pengalamannya yang tidak terlupakan ketika menjadi guru dan pendakwah pada tahun 1941 di Marabahan adalah ketika ia mendapat tantangan untuk berdialog mengenai masalah agama dari beberapa guru ngaji dan ustadz yang ada di sana. Kebetulan tantangan ini dipelopori oleh seorang alumni Makkah (pernah belajar di Masjidil Haram) yang namanya sama dengannya, Hasan Basri. Tantangan dialog ini dipicu oleh tuduhan bahwa ia sebagai anggota Muhammadiyah telah membawa agama baru, hukum baru, akidah baru dan berpotensi memutarbalikkan ajaran Islam. Berdasarkan kesepakatan, pertemuan dilakukan di Masjid desa dan dihadiri oleh masyarakat banyak. Ia sendiri didampingi oleh pengurus Muhammadiyah Marabahan.

Dalam pertemuan itu, Hasan Basri diminta terlebih dahulu menyampaikan akidah Muhammadiyah. Permintaan itu dipenuhinya dengan mengemukakan makna dua kalimat syahadat disertai dengan bacaan ayat-ayat Alquran dengan fasih. Ayat-ayat itu kemudian ditafsirkan dengan ringkas dengan teknik penjelasan yang sistematis dan mudah dipahami. Strategi lain yang dilakukannya untuk ‘menjinakkan’ penantangannya adalah melakukan penyampaian pesan agama dengan bahasa yang santun, menunjukkan rasa hormat kepada

guru dan orang yang lebih tua, berbicara dari hati ke hati dan berusaha memperkecil jarak perbedaan antara kedua pihak. Strateginya berhasil. Tokoh agama dan Masyarakat yang menghadiri pertemuan itu yang semula menaruh curiga, ingin marah dan bahkan ada yang mempersiapkan batu dan kayu untuk dilemparkan kepadanya kemudian terdiam bahkan ada yang mencucurkan air mata mendengar penjelasan yang diberikannya. Akhirnya, konflik dapat dihindari dan ia dapat diterima oleh masyarakat. Undangan dakwahpun berdatangan kembali dari berbagai kampung sekitarnya.

Sekolah Muhammadiyah yang dikelola oleh Hasan Basri dan istrinya tidak dapat bertahan lama. Setelah dua tahun berjalan (1942-1944), sekolah ini ditutup akibat situasi perang yang sudah merembet ke wilayah Kalimantan Selatan. Setelah berhenti menjadi guru, ia diangkat oleh Penjajah Jepang menjadi qadi atau *Togoko Guco* (kepala kantor urusan agama setingkat kecamatan) untuk wilayah Muara Teweh. Menjadi qadi di Muara Teweh baginya sama artinya pulang kembali ke kampung kelahiran. Sebagai qadi dia bertugas mengurus masalah-masalah keluarga seperti nikah, talak dan rujuk. Namun pekerjaannya sebagai qadi berlangsung singkat. Setelah satu tahun bekerja (1944-1945), ia tidak lagi menjadi qadi karena Jepang yang mengangkatnya sebagai qadi tidak lagi berkuasa akibat kalah perang dan menyerah pada sekutu.

Setelah berhenti mengajar dan berhenti menjadi qadi di Muara Teweh, ia diminta oleh mertuanya (Thawaf Saleh) untuk tinggal bersama di Banjarmasin. Setelah pindah ke Banjarmasin, pada tahun 1945, ia mendirikan organisasi guru yang bernama Persatuan Guru Agama Islam (PGAI). Tidak ada informasi lebih lanjut mengenai aktivitasnya di PGAI.

Pada tahun 1945 Belanda bersama sekutu datang kembali ke Kalimantan Selatan. Kehadiran Belanda di bawah kendali NICA (*Netherland Indic Civil Administration*) ingin kembali menguasai kawasan ini sebagaimana sebelum kedatangan Jepang. Namun keinginan ini ditentang rakyat Kalimantan. Di mana-mana muncul perlawanan terhadap kehadiran Belanda. Hasan Basri pun ikut gerakan perlawanan terhadap Belanda. Di Marabahan ia terlibat dalam Barisan

Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) yang dibentuk pada tanggal 3 Desember 1945 tidak lama setelah Belanda tiba di kawasan Kalimantan Selatan. Gerakan perlawanan ini dipimpin oleh Abdul Murid sedang ia hanya menjadi anggota, sementara adiknya Husni Rasyid memimpin departemen pertahanan. BPRI segera menghimpun kekuatan untuk mengambil alih kekuasaan NICA di Marabahan. Ia bertugas untuk menghimpun kekuatan massa dan menghubungi kesatuan-kesatuan laskar lainnya di Kalimantan.

BPRI kemudian melakukan penyerangan dan berhasil mengambil alih kekuasaan NICA di Marabahan yang pada saat itu diwakili oleh Anang Kaderi. Pengambilalihan ini tidak menimbulkan pertempuran karena Anang Kaderi menyerah. Bendera Belanda diturunkan dan bendera merah putih dikibarkan. Pekik merdeka dan takbir bergema di jalan-jalan di rumah-rumah rakyat. Kondisi ini hanya mampu bertahan dua hari saja. Serangan balasan Belanda yang dilancarkan pada tanggal 7 Desember 1947 yang datang dari dua jurusan, Banjarmasin dan Kandangan, berhasil mengalahkan gerakan perlawanan ini dalam waktu singkat. Banyak pejuang yang ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda termasuk adiknya yang tertangkap di Tamban. Ia sendiri dengan beberapa pejuang lainnya selamat dengan cara bersembunyi dan berendam di sungai, hanya bagian kepala yang terlihat sehingga mereka lolos dari sergapan Belanda. Setelah seharian berendam perahu penolongpun datang. Dalam perahu itu terdapat perbekalan berupa pisang, gula, kelapa, pakaian dan topi. Dengan perbekalan ini ia menyamar sebagai pedagang hingga tidak dapat terdeteksi oleh Belanda.

Setelah kekalahan di Marabahan, Hasan Basri bergerak di bidang politik untuk melakukan perlawanan. Sementara kawan-kawannya yang lain bergabung dengan pejuang lainnya di hutan-hutan untuk melakukan perang gerilya. Salah satu gerakan perlawanan yang aktif saat itu adalah Barisan Saifullah yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Hasan Basry (namanya sama dengan Hasan Basri). Barisan perlawanan ini didukung oleh Hizbul Wathan (pandu Muhammadiyah) dan Pandu Anshar (dari Nahdhatul Ulama). Meski tidak masuk hutan

untuk bergerilya, ia berjuang melalui jalur politik dan bergabung bersama ulama untuk mengobarkan perlawanan terhadap Belanda.

Sebagai bagian dari kalangan pemuda terdidik, peran Hasan Basri tentu diperlukan untuk perjuangan di tingkat lokal dengan menggunakan cara dan jalur lain. Untuk itu, ia memasuki organisasi Serikat Muslimin Indonesia (SERMI) yang berdiri pada tahun 1946. Organisasi yang berasaskan kerakyatan dan Islam ini didirikan oleh salah seorang sahabatnya, Abdurrahman Siddik yang kemudian menjadi ketuanya. Ia sendiri mendapat posisi penting pada organisasi ini, yaitu sebagai wakil ketua. SERMI pada saat itu merupakan salah satu organisasi yang memiliki pengaruh yang luas. Hal ini disebabkan anggota SERMI terdiri dari kelompok masyarakat menengah ke bawah yang memiliki jaringan ke masyarakat bawah yang jumlahnya besar. Di samping SERMI, ada juga Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) yang pengaruh dan jumlahnya lebih kecil daripada SERMI karena anggotanya terdiri dari kelas menengah ke atas. Organisasi ini berdiri pada tanggal 19 Januari 1946. Kedua organisasi ini membentuk satu badan koordinasi untuk memperkuat persatuan dimana ketuanya adalah Mohammad Sya'ban dari SKI dan Hasan Basri dari SERMI. Kedua organisasi ini kemudian bergabung dalam satu organisasi yang bernama Dewan Banjar. Di Dewan Banjar inilah kemudian ia berjuang secara politik.<sup>14</sup>

Selain di Dewan Banjar, Hasan Basri juga bergabung dengan Masyumi. Ia masuk Masyumi melalui SERMI karena organisasi ini bergabung ke Masyumi. Ia menjalin kontak dengan pemimpin dan tokoh-tokoh Masyumi di Jawa seperti M. Natsir, Prawoto Mangkusawito dan Moh. Roem. Sebagai bagian dari Dewan Banjar dan Masyumi, ia berjuang melalui jalur politik dan menggemakan semangat kemerdekaan ke berbagai pelosok Kalimantan Selatan. Tema pidatonya berisi propaganda untuk terus berjuang di belakang pemerintah RI yang pada saat itu berpusat di Yogyakarta.

---

<sup>14</sup> Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 33 dan 37.

Perjuangan Hasan Basri melalui jalur politik tidak memutuskan hubungannya dengan kelompok-kelompok gerilyawan. Ia beberapa kali melakukan koordinasi dengan kelompok pejuang gerilyawan yang dipimpin oleh Let.Kol Hassan Basry di Kandangan. Kedua pejuang yang memiliki nama mirip ini sudah saling kenal dan akrab serta memiliki kesepahaman dalam perjuangan melawan Belanda. Kemiripan nama keduanya menimbulkan suatu peristiwa berkesan baginya yang terjadi pada tahun 1948. Pertemuan kedua tokoh ini biasanya diatur oleh paman Hasan Basri, Haji Mastur. Untuk mencapai tempat pertemuan, ia dan Haji Mastur mengadakan kamufase, mereka pergi menggunakan sepeda dengan memakai piama dan handuk yang dililit di kepala, seolah-olah hendak mandi. Padahal itu hanya trik agar kepergian mereka tidak dicurigai. Sepanjang jalan telah bersiap sejumlah kurir yang bertugas melindungi kepergian mereka menuju tempat pertemuan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut Hasan Basri, Letkol Hassan Basry memiliki tubuh yang lebih kecil dari dirinya tapi keberaniannya sangat hebat. Bicaranya lembut, berbudi dan memiliki karakter kuat. Dia tidak banyak bicara dan selalu waspada dengan orang yang menemuinya.<sup>15</sup>

Pada tahun 1947, sebagai anggota Dewan Banjar, Hasan Basri bersama dengan Abdurrahman Siddik diutus untuk menghadiri sidang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) di Malang tanggal 15 Februari hingga 6 Maret 1947 sebagai wakil rakyat Kalimantan Selatan. Seusai sidang, Gubernur Kalimantan, Pangeran Ir. Muhammad Noor, yang berkedudukan di Yogyakarta meminta kepada delegasi dari Kalimantan untuk bertemu dengan presiden dan wakil presiden. Keduanya kemudian bertemu dengan Soekarno dan Moh. Hatta. Keduanya melaporkan kondisi Kalimantan Selatan yang tetap mendukung pemerintah RI yang berkedudukan di Yogyakarta. Pendirian dan sikap rakyat Kalimantan Selatan ini mendapat pujian dari Soekarno dan Moh. Hatta.

Sebelum bertemu dengan Soekarno-Hatta di Yogyakarta, pada sidang KNIP di Malang, Hasan Basri bertemu dengan para pemimpin Masyumi seperti M. Natsir, Prawoto

---

<sup>15</sup> Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 43-44.

Mangkusawito, KH. Taufiqurrahman, Burhanuddin Harahap. Ia juga bertemu dengan Achmad Buchari seorang tokoh pemuda Islam GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia).<sup>16</sup> Setelah mendapat penjelasan mengenai GPII dari Achmad Buchari, ia langsung bergabung dengan organisasi ini dan segera mendirikan GPII di Banjarmasin serta mengembangkannya ke berbagai daerah di kawasan Kalimantan Selatan. GPII digunakannya untuk menggelorakan semangat perjuangan gerilya dan politik melawan Belanda.<sup>17</sup>

Di samping mengembangkan GPII, ia juga mendirikan BASMI (Barisan Serikat Muslimin Indonesia) pada tahun 1947. Organisasi ini dibentuk untuk menggalang kekuatan rakyat terutama dari kalangan pemuda untuk mempropagandakan cita-cita kemerdekaan. BASMI menjadikan masjid, langgar dan madrasah Islam sebagai basis gerakannya. Istrinya, Nurhani, saat itu juga terlibat dalam organisasi ini. Sang istri menempati posisi Muslimat BASMI yang mengkoordinir kelompok perempuan. Untungnya, berbagai aktivitas dan gerakan Hasan Basri dalam berbagai organisasi itu tidak dihalang-halangi oleh Belanda.

Pada tahun 1948, dalam kondisi yang tidak aman, Hasan Basri bersama temannya yang berprofesi pedagang pergi ke Surabaya untuk melakukan konsultasi perjuangan di bidang politik. Tidak jelas siapa yang ingin ditemuinya di Surabaya dan untuk tugas apa. Kedatangannya ke Surabaya rupanya dicurigai oleh Belanda. Ketika ia menginap di rumah familinya di Surabaya, ia didatangi polisi dan dibawa ke kantor polisi. Rupanya polisi mencurigainya sebagai Let.Kol. Hasan Basry, pemimpin gerilyawan yang selalu melakukan penyerangan

---

<sup>16</sup> GPII berdiri pada tanggal 2 Oktober 1945. Organisasi ini didirikan oleh sejumlah senior (Wondoamiseno, Abikusno, Kyai Mansyur, Kartosudarmo dan lain-lain) dan mahasiswa STI (Sekolah Tinggi Islam). Pucuk pimpinan GPII ketika pada awal pendiriannya adalah Harsono Tjokroaminoto (ketua), A. karim Halim (ketua I), Moefraini Moekmin (ketua II), Anwar Harjono (sekretaris umum), Ahmad Buchari (pembantu) dan lainnya. Loekman Hakim, *Perjalanan Mencari Keadilan dan Persatuan: Biografi Dr. Anwar Harjono, S.H.*, (Jakarta: Media Dakwah, 1993), h. 75-76.

<sup>17</sup> Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 98; Hadariansyah, *KH. Hasan Basri*, h. 64.

terhadap konvoi Belanda dan merusak gudang-gudang milik Belanda hingga menimbulkan kerugian secara finansial. Untungnya, ia kemudian dilepaskan karena bukan orang yang dimaksud. Dua anak buah Let. Kol. Hasan Basry yang tertangkap di Surabaya, salah satunya bernama Mayor Asli, meyakinkan polisi Belanda bahwa Hasan Basri ini bukan Hasan Basry yang dimaksud. Komandan polisi pun akhirnya minta maaf kepadanya atas kekeliruan dalam melakukan penangkapan itu.<sup>18</sup> Untung saja polisi Belanda ini tidak tahu kalau kedua Hasan Basri ini kerap bertemu dan memiliki hubungan perjuangan.

Pada tahun 1948, terjadi agresi Belanda yang kedua dan berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap Soekarno-Hatta. Anggota Dewan Banjar mengutuk tindakan Belanda itu. Dewan Banjar tetap berpihak pada Republik Indonesia yang pada saat itu tengah dikuasai Belanda. Kondisi ini semakin menggelorakan perjuangan rakyat Kalimantan Selatan baik secara politik maupun militer.

Meski tidak ikut gerakan perlawanan bersenjata sebagaimana para gerilyawan, Hasan Basri memiliki andil besar dalam menggerakkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur organisasi dan politik. Keterlibatannya dalam SERMI, BASMI, Dewan Banjar, Masyumi, GPII, KNI (KNIP) hingga diakuinya kedaulatan RI pada tahun 1949 oleh Belanda menunjukkan perannya sebagai kelompok pemuda terdidik pada saat itu. Aktivitasnya sebagai seorang khatib dan dai, dimanfaatkannya untuk mengobarkan perlawanan.

Pada bulan Mei 1949, atas tekanan dunia internasional dan perlawanan rakyat, Belanda menyerahkan Yogyakarta kembali ke pangkuan Republik Indonesia dan membebaskan para pemimpin Indonesia yang ditangkap. Belanda juga menghentikan agresi militer. Atas situasi ini, Hasan Basri segera mengadakan apel besar atau rapat raksasa di Banjarmasin yang dihadiri puluhan ribu massa. Gedung Permufakatan Indonesia yang merupakan gedung terbesar di

---

<sup>18</sup> Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 43-44.

Banjarmasin pada saat itu tidak mampu menampung jumlah massa hingga meluber ke luar gedung. Rapat raksasa ini dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur atas kembalinya kekuasaan Republik Indonesia. Ia tampil berpidato mengajak massa untuk bersyukur atas segala kemenangan yang telah diraih.<sup>19</sup>

Pada tahun 1949, Hasan Basri juga ikut mendesak dibebaskannya para pejuang yang ditangkap termasuk dari kalangan anggota SERMI. Dia termasuk orang yang menandatangani mosi yang isinya menentang rencana pemindahan Idham Chalid (saat itu anggota SERMI) yang tengah dipenjara di Banjarmasin ke penjara Cipinang Jakarta untuk diadili. Idham Chalid batal dipindahkan dan kemudian dibebaskan pada bulan Oktober 1949 bersama tawanan lainnya.<sup>20</sup>

Pada bulan Desember 1949, ia bersama dengan anggota SERMI lainnya (Hanafi Gobet, Idham Chalid, Djuhuri dan Abdurrahman Ismail) menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta selama 5 hari. Kongres ini dihadiri oleh berbagai utusan dari organisasi Islam seperti Masyumi, Muhammadiyah, PUI, al-Ittihadiyah, Jam'iyatul Washliyah, Perti dan lain-lain. Setelah menghadiri kongres, ia beserta rombongan ikut menghadiri Kongres Masyumi dan KNIP di Yogyakarta sebagai peninjau.<sup>21</sup>

Pada tahun 1950 ia terpilih sebagai anggota parlemen RIS. Sebelumnya, ketika masih di Yogyakarta saat mengikut kongres, namanya tidak termasuk yang dipilih sebagai anggota Parlemen RIS. Ada tiga orang yang dipilih oleh Dewan Daerah Banjar yang pro negara federal untuk menjadi anggota parlemen. Tetapi, pilihan ini diprotes oleh kalangan Republikan hingga hampir terjadi kekacauan. Untuk menghindari kekacauan ini diadakanlah sidang istimewa yang dihadiri oleh rakyat dan tentara. Hasilnya, keputusan Dewan Daerah Banjar

---

<sup>19</sup> Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 38-39.

<sup>20</sup> Mandan (ed), *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2008), h. 200 dan 212

<sup>21</sup> Mandan, *Napak Tilas*, h. 214, 215 dan 218.

dibatalkan. Kelompok Republikan yang terdiri dari SERMI dan SKI kemudian memilih Dr. Diapari (ketua umum SERMI), Hasan Basri (ketua I SERMI) dan Idham Chalid (anggota pengurus besar SERMI) sebagai anggota Parlemen RIS. Ketiga orang inilah yang menggantikan ketiga pilihan dari Dewan Daerah Banjar yang batal menjadi anggota parlemen.<sup>22</sup> Dengan terpilihnya dirinya sebagai anggota parlemen sebagai utusan daerah Kalimantan Selatan, ia bersama rekannya yang lain akhirnya berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan anggota parlemen RIS lainnya.

#### **D. Ke Jakarta Sebagai Politisi di Parlemen dan Aktivis GPII (1950-1960)**

Pada tahun 1950 Hasan Basri berangkat ke Jakarta menunaikan tugasnya sebagai anggota parlemen sebagai utusan daerah mewakili Kalimantan Selatan bersama dengan Diapari dan Idham Chalid. Sebagai anggota Masyumi di daerah, ia dan Idham Chalid bergabung dengan Masyumi di parlemen. Di Jakarta, ia menginap di Hotel Dez Indez yang kepemilikannya masih dikuasai oleh Belanda. Anggota parlemen yang lain juga tinggal di sini. Pada waktu itu, ia tidak membawa anak dan istrinya. Dia tinggal sendiri di Jakarta. Gajinya sebagai anggota parlemen saat itu sebesar Rp. 750 ditambah dengan uang sidang. Pendapatannya pada saat itu terhitung tinggi. Untuk biaya sehari-hari di Jakarta, ia hanya menghabiskan uang sebesar Rp. 250. Sisanya dikirim ke Banjarmasin untuk keluarganya.<sup>23</sup>

Di Parlemen, Hasan Basri duduk di komisi E yang membidangi masalah agama, pendidikan dan masalah sosial. Ia dimasukkan di sini karena membidangi masalah agama. Komisi ini merupakan salah satu komisi penting dan strategis terutama berkaitan dengan isu-isu agama bagi umat Islam. Di komisi ini ia berkumpul dengan wakil dari beberapa golongan besar, yaitu kalangan Nasionalis, Komunis, dan Agama (Islam). Pada saat ia berada di komisi ini ada beberapa persoalan penting yang pada saat itu menjadi perhatian, yaitu masalah penyelenggaraan

---

<sup>22</sup> Mandan, *Napak Tilas*, h. 218-219.

<sup>23</sup> Mardjoend (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 21-22

ibadah haji Indonesia dan posisi pendidikan agama dalam pendidikan nasional serta masalah penegeloannya apakah dikelola oleh Departemen Agama atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Inilah beberapa persoalan penting yang dibahas oleh komisi E di mana ia terlibat dalam pembahasannya.

Pada masa awal tugasnya sebagai anggota parlemen, Hasan Basri bersama anggota komisi E lainnya aktif melakukan kunjungan ke sejumlah daerah untuk menggali aspirasi rakyat dan mendorong mereka untuk mendukung pemerintah. Di antara daerah yang mereka kunjungi adalah Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Aceh, dan seluruh wilayah pulau Jawa. Kunjungan rombongan Hasan Basri selalu disambut meriah oleh rakyat di daerah yang mereka kunjungi. Salah satu kunjungannya yang cukup berkesan dalam kenangannya adalah kunjungannya ke Sulawesi Selatan yang pada saat itu tengah bergolak akibat meletusnya pemberontakan Kahar Muzakar.<sup>24</sup>

Selain melaksanakan tugasnya sebagai anggota parlemen, Hasan Basri bersama Anwar Harjono tetap aktif mengikuti kegiatan GPII. Perannya di GPII cukup penting karena ia merupakan tokoh pendiri dan pengembang GPII di Kalimantan Selatan. Artinya, ia memiliki andil dalam memperluas jaringan GPII di daerah. Pada tahun 1951 ia mengikuti muktamar GPII di Medan. Menurut Hadariansyah, pada muktamar ini, ia terpilih sebagai wakil ketua GPII mendampingi Anwar Harjono yang ditetapkan sebagai ketua umum GPII.<sup>25</sup> Namun menurut Lukman Hakiem, penulis biografi Anwar Harjono, menyebutkan bahwa yang menjadi pendamping Anwar Harjono adalah Gusti Abdul Muis sebagai ketua I.<sup>26</sup> Tampaknya, informasi dari Lukman Hakiem lebih akurat. Pernyataan Hasan Basri dalam tulisannya untuk menyambut peluncuran biografi Anwar Harjono membuktikannya. Di sini ia menulis:

---

<sup>24</sup> Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 54, 64-65.

<sup>25</sup> Hadariansyah, *KH. Hasan Basri*, h. 73

<sup>26</sup> Hakiem, *Perjalanan Mencari*, h. 133.

... Pada kongres V GPII , 20-25 April 1951 di Medan, Pak Anwar Harjono dikukuhkan menjadi ketua umum PP GPII.

Sejak Kongres Medan itu, Saya masuk sebagai salah seorang anggota GPII. Dan mulai kepengurusan hasil Kongres VI GPII, 20-22 Desember 1952, di Jakarta, saya dipercaya menjadi wakil ketua I PP GPII. Ketua umumnya tetap Pak Anwar Harjono.<sup>27</sup>

Pernyataannya di atas jelas menunjukkan bahwa baru pada kongres keenam pada tahun 1952 di Jakarta, ia terpilih menjadi wakil ketua mendampingi Anwar Harjono. Posisi ini diembannya hingga beberapa tahun ke depan, yakni hingga tahun 1956.

Selain di GPII, Hasan Basri juga terlibat dalam aktivitas pemakmuran masjid. Aktivasnya dalam pengembangan masjid bukanlah hal baru baginya. Sejak muda ketika di Kalimantan Selatan ia sudah terbiasa beraktivitas di masjid, tidak hanya terkait masalah ibadah dan khutbah tetapi pada saat itu dia bersama ulama lainnya menjadikan masjid sebagai basis perjuangan dalam menggelorakan semangat perjuangan untuk melawan penjajah. Pada tahun 1951, pada tahun-tahun awal menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen, ia bersama dengan K.H. Taufiqurrahman, Nawawi Dusky dan Ali al-Hamidy mendirikan Ikatan Masjid Djakarta (IMD) pada tanggal 5 Maret 1951.<sup>28</sup> Kesibukannya semakin meningkat ketika pada tahun 1952 dia terpilih sebagai wakil ketua GPII mendampingi Anwar Harjono sebagaimana telah disebutkan di atas.

Pada tahun 1953, Hasan Basri mulai jenuh tinggal di hotel. Ia kemudian pindah ke sebuah tempat kost di Jalan Timor No. 19. Tempat kosnya itu merupakan rumah dinas milik seorang pegawai pelayaran Belanda. Setelah mengontrak rumah kos itu ia kemudian membawa istri dan anaknya pindah ke Jakarta. Ini mengakhiri kesendiriannya di Jakarta yang

---

<sup>27</sup> Hasan Basri, "Anwar Harjono Bukan Sekadar Sahabat", dalam Hakiem, *Perjalanan Mencari*, h. 504.

<sup>28</sup> Mardjoned, *KH. Hasan Basri*, h. 196; Hadariansyah, *KH. Hasan Basri*, h. 98.

berlangsung selama tiga tahun (1950-1953). Ia tidak menduga bahwa rumah yang dikontraknya itu kemudian menjadi miliknya. Tidak lama setelah tinggal bersama istri dan anaknya di rumah kos itu, muncul kebijakan pemerintah untuk mengambil alih milik Belanda di Indonesia. Orang Belanda pemilik rumah yang dikontraknya mau tidak mau harus melepaskan hak miliknya terhadap rumah itu sebagai konsekuensi dari kebijakan itu. Orang Belanda itu kemudian menyerahkan rumah itu secara sukarela kepadanya. Orang Belanda itu hanya meminta sekadar ongkos pindah untuk membawa sebagian barang-barangnya. Sebagian barang diserahkannya kepadanya secara cuma-cuma. Momen ini tentu membuat ia dan keluarga sangat gembira, karena mereka telah memiliki rumah sendiri di Jakarta yang cukup besar dan mencukupi menampung mereka sekeluarga. Rasa syukur mereka juga bertambah karena mereka juga masih memiliki kelebihan pendapatan untuk ditabung. Setelah tinggal bersama, honor Rp. 750 itu masih dapat disisakan Rp. 250 sebulan. Sisa ini dapat diwujudkan karena ia berangkat ke gedung parlemen berjalan kaki atau naik becak sehingga dapat menghemat pengeluaran.<sup>29</sup>

Pada tahun 1953, untuk pertama kalinya ia berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Keberangkatannya pada tahun ini terjadi karena kedudukannya sebagai anggota parlemen (DPR RI) dari komisi E dan mewakili MPH (Majelis Pimpinan Haji). Sambil melaksanakan ibadah haji, ia ditugaskan untuk mempelajari cara terbaik mengatur perjalanan haji. Pada saat itu, perjalanan haji dilakukan dengan menggunakan kapal laut. Perjalanan yang ditempuh olehnya berlangsung selama 16 hari mulai dari pelabuhan Tanjung Priok hingga pelabuhan Jeddah. Di sinilah ia merasakan dan menyaksikan susah-senangnya menempuh perjalanan haji melalui laut. Ketika gelombang keras menghadang, mabuk lautpun tidak terhindarkan. Namun ketika laut tenang panorama alam terutama ketika malam hari menjadi pemandangan yang menyenangkan. Untuk mengusir kejenuhan selama berlayar dalam waktu lama, rombongan jamaah mengadakan lomba

---

<sup>29</sup> Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 21-22

MTQ dan manasik haji. Pemenang diberi hadiah yang menarik. Inilah hiburan para jamaah selama dalam perjalanan. Pemandangan yang menyedihkan menurutnya adalah ketika ada anggota jamaah yang meninggal dunia dalam perjalanan. Jamaah yang wafat itu dikuburkan di laut dengan cara ditenggelamkan di laut. Jenazah yang telah disalatkan kakinya diikat dengan pemberat berupa dua keping baja dan timah hitam kemudian diluncurkan ke laut agar jenazah tenggelam.<sup>30</sup>

Setelah naik haji, Hasan Basri tetap melaksanakan tugasnya di parlemen hingga DPRS di mana dia berada dibubarkan karena masa tugasnya telah berakhir. Pada tahun 1955 Pemilihan Umum yang pertama dilakukan. Ia sebagai anggota Masyumi terpilih sebagai anggota DPR dari partai Masyumi mewakili daerah Kalimantan Selatan. Sementara Idham Chalid yang sama-sama bergabung di partai Masyumi pada tahun 1950 kini bergabung dengan Partai NU. Ia kembali menduduki posisinya di komisi E (periode 1955-1960). Kali ini tugas yang diemban komisi E mengalami perluasan dibanding sebelumnya (periode 1950-1955), yaitu meliputi bidang agama, sosial, kesehatan, penerangan dan keamanan dalam negeri.

Sebagaimana sebelumnya, di samping menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR, Ia tetap aktif mengikuti kegiatan GPII dan Partai Masyumi. Pada tahun 1955, menjelang Pemilu 1955, ia mengikuti Kongres VII GPII di Surabaya. Pada kongres ini, ia terpilih sebagai wakil ketua I mendampingi Anwar Harjono yang terpilih kembali menjadi ketua umum. Pada tahun ini juga ia terpilih menjadi ketua Yayasan Gedung GPII yang bertempat di Jl. Menteng Raya 58 Jakarta.<sup>31</sup> Pada tahun 1956, ia mengikuti Kongres VIII GPII di Bandung. Pada kongres ini dilaporkan bahwa dari 57 kursi Partai Masyumi hasil pemilu diisi oleh 11 anggota GPII, dua diantaranya disumbangkan dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan, yaitu ia dan Gusti Abdul Muis.<sup>32</sup> Pada kongres ini, ia dan Anwar Harjono tidak bersedia lagi diangkat sebagai pimpinan GPII. Ini

---

<sup>30</sup> Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 132-134

<sup>31</sup> Hakiem, *Perjalanan Mencari*, h. 137, 141-142.

<sup>32</sup> Lihat kesebelas nama anggota GPII pada Hakiem, *Perjalanan Mencari*, h. 139-140.

agak berbeda dengan pernyataan Hadariansyah yang menyebutkan bahwa ia menduduki jabatan wakil ketua GPII ini selama 12 tahun (1951-1963). Tetapi tampaknya yang benar posisi ini hanya didudukinya selama 5 tahun saja (1951-1956), sebagaimana uraian Hasan Basri berikut ini:

Sejak bertahun-tahun memimpin GPII, kami merasa tiba waktunya untuk menyerahkan kepemimpinan GPII kepada teman-teman yang lebih muda. Pada kongres GPII, 22-28 Juli 1956, di Bandung, saya bersama Pak Anwar Harjono menyatakan tidak bersedia lagi dipilih. Dan, dengan demikian, tampilah teman-teman yang lebih muda seperti EZ. Muttaqien, S. Soemarsono, dan Achmad Buchari.

Akan tetapi, meskipun tidak bersedia lagi dipilih menjadi pimpinan GPII, tidak berarti kami meninggalkan GPII sama sekali. Pada kepemimpinan EZ. Muttaqien itu, kami masih bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran. Pak Harjono menjadi Pembantu Umum Urusan Luar Negeri, sedang saya menjadi Pembantu Umum urusan Parleментарia.<sup>33</sup>

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Hasan Basri tidak lagi menjadi wakil ketua PP GPII sejak kongres di Bandung itu. Demikian juga dengan Anwar Harjono, dia tidak lagi menjadi ketua umum. Kedudukan mereka digantikan oleh E.Z. Muttaqien (ketua umum) dan Buchari Tamam (wakil ketua I). Meski tidak menduduki jabatan puncak GPII, ia tetap membantu kegiatan GPII hingga organisasi kepemudaan ini dibubarkan pada tahun 1963 oleh Presiden Soekarno.

Tahun 1956 hingga 1960 merupakan masa ketegangan antara Presiden Soekarno dengan anggota DPR dari tiga partai pemenang pemilu mengenai komposisi kabinet dan pembentukan UUD dalam sidang konstituante. Tiga besar pemenang pemilu, PNI, Masyumi dan NU menolak menempatkan PKI sebagai partai pemenang keempat pemilu untuk menempatkan kadernya di dalam kabinet. Soekarno

---

<sup>33</sup> Hasan Basri, "Anwar Harjono Bukan Sekadar Sahabat", dalam Hakiem, *Perjalanan Mencari*, h. 505.

menghendaki komposisi kabinet ‘berkaki empat’ (PNI, Masyumi, NU dan PKI), tetapi tiga pemenang pemilu yang memiliki suara mayoritas menghendaki kabinet ‘tiga kaki’ (PNI, Masyumi dan NU). Yang paling keras menentang masuknya PKI ke dalam kabinet adalah Masyumi dan NU. Dari dua partai ini, yang paling tidak disukai oleh Soekarno adalah Masyumi.

Ketegangan antara Soekarno dan Masyumi tentu dirasakan sekali oleh Hasan Basri yang ketika itu merupakan anggota DPR dari partai Masyumi. Hanya saja tampaknya ia tidak menjadi orang yang berada di garda depan dalam ketegangan antara Soekarno dengan partainya.

Pada tahun 1957, muncul kontroversi mengenai gagasan Soekarno yang disampaikannya melalui pidato yang berjudul “Konsepsi Presiden” pada tanggal 21 Pebruari 1957. Konsepsi Presiden itu berisi gagasan mengenai perlunya dibentuk Kabinet Gotong Royong yang mengikutkan PKI di dalamnya dan perlunya dibentuk Dewan Nasional yang berfungsi sebagai penasihat presiden. Gagasan presiden ini segera menjadi polemik. Masyumi terang-terangan menolak gagasan ini. Akibatnya, Masyumi dianggap sebagai ‘penantang utama’ keinginan Soekarno.

Ketegangan berlanjut pada tahun 1958. Masyumi menarik semua menteri yang duduk di kabinet akibat ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Tindakan Masyumi ini mengakibatkan jatuhnya Kabinet Ali-Roem-Idham pada tanggal 14 Maret 1957. Hari itu juga Presiden Soekarno menyatakan negara dalam keadaan bahaya (SOB) untuk seluruh Indonesia. Sekali lagi Masyumi memiliki andil dalam krisis politik ini.

Soekarno kemudian berusaha membentuk kabinet dengan menunjuk Suwirjo dari PNI sebagai formatur. Namun Suwirjo dua kali gagal berturut-turut untuk membentuk kabinet yang disebabkan penolakan keras Masyumi dan NU untuk bekerjasama dengan PKI dalam kabinet yang akan dibentuk. Melihat kondisi ini, tampaknya Soekarno tidak sabar. Secara mengejutkan Soekarno mengangkat dirinya sendiri sebagai formatur kabinet dan membentuk kabinet yang sesuai dengan

keinginannya yang disebut Kabinet Darurat Ekstra Parlementer. Komposisi kabinet lebih banyak diisi oleh PNI dan NU termasuk menteri dari PKI, sementara dari Masyumi tidak satupun yang dilibatkan dalam komposisi menteri kreasi presiden ini. Tindakan Soekarno ini merupakan bukti dari ketidaksukaannya terhadap Masyumi.

Setelah tidak mendapat jatah di kabinet, Masyumi mengalami krisis baru ketika terjadi pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) dan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) pada tahun 1958. Krisis ini disebabkan nama beberapa pemimpin Masyumi termasuk dalam daftar nama menteri yang diumumkan oleh PRRI. Dalam daftar Dewan Perjuangan PRRI, nama pemimpin Masyumi yang disebut adalah M. Natsir, Syafruddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap, sementara dalam daftar dewan menteri, terdapat nama Syafruddin Prawiranegara sebagai perdana menteri, M. Natsir sebagai wakil perdana menteri, dan Burhanuddin Harahap sebagai menteri pertahanan. Tak pelak lagi, Soekarno menuduh Masyumi terlibat dalam pemberontakan PRRI meski Masyumi sendiri membantah dan mengecam pemberontakan itu sebagai tindakan inkonstitusional.

Dalam situasi krisis dan konflik Masyumi dengan Soekarno, Masyumi mengadakan muktamar IX di Yogyakarta tahun 1959. Pada muktamar ini, Hasan Basri terpilih sebagai salah satu anggota pimpinan Masyumi dan termasuk pengurus harian partai Masyumi pusat. Posisi ini semakin meningkatkan posisinya dalam jajaran pimpinan Masyumi. Pada saat yang sama, posisinya ini semakin mendekatkannya dengan kemelut Masyumi yang semakin keras.

Tidak lama setelah itu, terbit Dekrit Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 dan sekaligus membubarkan Konstituante yang dianggap gagal melaksanakan tugasnya. Sebelum itu, Kabinet Djuanda bentukan presiden telah menetapkan untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Masyumi tidak sepenuhnya setuju dengan Dekrit Presiden dan tidak sepakat dengan Demokrasi Terpimpin. Kondisi ini semakin

menempatkan Masyumi sebagai oposisi pemerintahan Soekarno. Pukulan berikutnya bagi Masyumi dan partai lainnya yang anggotanya duduk di DPR adalah ketika Soekarno membubarkan DPR melalui penetapan Presiden no 3/1960 tanggal 5 Maret 1960 buntut dari penolakan DPR terhadap RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Pembubaran ini berdampak pada berakhirnya karir Hasan Basri di Parlemen.

Soekarno kemudian membentuk DPR Gotong Royong (dilantik 24 Juni 1960) sebagai ganti DPR sebelumnya tanpa melibatkan Masyumi di dalamnya. Dengan tidak disertakannya Masyumi dalam DPR GR ini, Hasan Basri sebagai anggota Masyumi secara otomatis juga tidak mendapat jatah sebagai anggota DPR.

#### **E. Memperjuangkan Masyumi dan Kembali Berdakwah (1961-1970)**

Pukulan politik paling keras yang diterima oleh Masyumi di mana Hasan Basri berada, setelah tidak mendapat jatah di kabinet dan di DPR GR, adalah keputusan Soekarno untuk membubarkan Masyumi atas tuduhan bahwa para pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI. Pembubaran Masyumi diputuskan presiden melalui Keppres No. 200 tahun 1960. Pembubaran ini kemudian diikuti dengan penangkapan sejumlah pimpinan Masyumi seperti Prawoto Mangkusaswito, M. Yunan Nasution, Muhammad Roem, Kasman Singodimedjo, Hamka, Isa Anshari dan Sholeh Iskandar, termasuk pula Anwar Harjono. Untungnya, Hasan Basri tidak termasuk anggota Masyumi yang ditangkap oleh Rezim Soekarno.

Situasi krisis politik yang dihadapi Masyumi pada saat itu membuat Hasan Basri terputus karir politiknya di DPR. Semenjak DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan dan Masyumi tidak lagi dilibatkan di Kabinet kemudian disusul dengan pembubaran Masyumi, pada tahun 1960, ia tidak lagi memiliki kesibukan yang berarti. Tidak lagi bekerja di DPR dan tidak lagi mengurus partai. GPII yang menjadi salah satu wadah aktivitas organisasinya juga tidak dapat lagi bertahan karena organisasi kepemudaan Islam ini juga dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena dituduh terlibat dalam peristiwa Cikini dan

peristiwa Idul Adha. GPII dibubarkan pada tahun 1963 berdasarkan Kepres No. 139 tahun 1963. Semua cabang dan ranting GPII di berbagai daerah ditutup dan dianggap organisasi terlarang bahkan sejumlah pimpinan organisasinya, seperti E.Z. Muttaqien, dipenjarakan. Untung saja, ia tidak lagi menduduki posisi wakil pimpinan GPII sehingga ia lepas dari risiko penangkapan.

Situasi ini membawa hikmah tersendiri baginya. Dia kini memiliki banyak waktu untuk mencurahkan perhatiannya pada aktivitas dakwah. Selama menjadi anggota DPR selama sepuluh tahun (1950-1960), banyak waktunya yang tersita untuk urusan organisasi, partai dan DPR. Banyak rapat, sidang, pertemuan dan kongres yang harus dia hadiri. Belum lagi kunjungan ke luar negeri dan ke berbagai daerah di Indonesia yang harus ia lakukan sebagai anggota DPR. Waktunya untuk melaksanakan aktivitas dakwah, berupa ceramah dan khutbah menjadi terbatas. Dia hanya mampu melaksanakannya jika ada kesempatan. Kini kesempatan itu terbuka lebar. Dia tidak pulang kampung ke Kalimantan Selatan untuk melaksanakan aktivitas dakwah itu, dia memilih tetap tinggal di Jakarta meski tidak lagi menjadi anggota parlemen. Rekannya sesama orang Banjar, yaitu Gusti Abdul Muis (aktivis GPII dan anggota Masyumi) seangkatan dengannya, lebih memilih pulang ke Banjarmasin untuk aktif melaksanakan dakwah dan kegiatan masjid.

Sejak tahun 1960, Hasan Basri mulai aktif melakukan aktivitas dakwah. Undangan dan permintaan untuk ceramah dan khutbah mulai mengalir, tidak hanya di wilayah Jakarta tetapi juga sampai ke daerah lainnya, seperti wilayah Kalimantan. Seiring dengan banyaknya undangan itu, namanya pun semakin populer dan mulai saat itu pula, gelar kyai haji (KH) mulai melekat di depan namanya. Ia sendiri dikenal sebagai khatib yang hampir tidak pernah menggunakan teks dalam khutbahnya. Gaya seperti ini memang sudah menjadi kebiasaannya sejak masih muda.

Meski perhatiannya mulai terkonsentrasi pada aktivitas dakwah, ia tidak melupakan Masyumi. Komunikasi dan silaturahmi dengan pimpinan dan anggota Masyumi tetap

dilakukannya. Bahkan, sebenarnya, keinginan untuk tetap menggeluti dunia politik tetap ada. Karena itu, ketika Rezim Soekarno tumbang dan pemberontakan PKI berhasil dihancurkan pada tahun 1966, ia bermaksud kembali menggeluti dunia politik. Bersama dengan KH. Faqih Usman dan Anwar Harjono, ia ikut membentuk Komite Rehabilitasi Masyumi. Komite ini bertugas melakukan penggalangan kekuatan organisasi Islam dalam rangka mewujudkan rehabilitasi Masyumi. Mereka bertiga kemudian mengirim nota (memorandum) kepada Panglima Militer Daerah Jakarta selaku Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah. Usaha ini kemudian dilanjutkan oleh pimpinan Masyumi, Prawoto Mangkusasmito dengan cara mengirim surat kepada Pejabat Presiden Soeharto pada tanggal 22 Desember 1966 yang isinya berkaitan dengan rehabilitasi Masyumi. Namun, usaha ini gagal karena jawaban pemerintah pada tahun 1967 memutuskan untuk tidak mengabulkan permintaan mereka untuk merehabilitasi Masyumi. Kegagalan rehabilitasi Masyumi ini juga berarti merupakan kegagalan Hasan Basri untuk kembali ke dunia politik.

Kegagalan Hasan Basri dan tokoh-tokoh Masyumi lainnya dalam merehabilitasi Masyumi tidak lantas membuat mereka berpangku tangan. Tidak lama setelah kegagalan itu, tokoh-tokoh Masyumi, termasuk di dalamnya Hasan Basri, membentuk wadah perjuangan baru yang tidak bersifat politis. Pada bulan Pebruari 1967 tokoh-tokoh Masyumi mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang memiliki misi untuk menggiatkan dan meningkatkan mutu dakwah Islamiyah di Indonesia.<sup>34</sup> Hasan Basri menduduki posisi bendahara ketika pengurus yayasan ini dibentuk pertama kali. Kehadiran yayasan ini menjadi tempat Hasan Basri berkiprah setelah Masyumi dan GPII dibubarkan. Bersama dengan tokoh-tokoh Masyumi lainnya, ia menjadikan

---

<sup>34</sup> DDII didirikan oleh 10 orang tokoh Masyumi, yaitu (1) M. Natsir, (2) H.M. Rasjidi, (3) M. Daud Dt. Palimo Kayo, (4) KH. Taufiqurrahman, (5) Hasan Basri, (6) Prawoto Mangkusasmito, (7) Nawawi Duski, (8) Abdul Hamid, (9) Abdul Malik Ahmad, dan (10) Buchari Tamam. Hakiem, *Perjalanan Mencari*, 235-236.

DDII sebagai wadah perjuangannya dalam memperjuangkan Islam dan nasib umat.

Kegagalan rehabilitasi Masyumi dan bergabungnya Hasan Basri dalam DDII bukan merupakan akhir dari upaya dan hasratnya untuk kembali ke dunia politik. Munculnya gerakan untuk menghidupkan kembali Masyumi membuatnya kembali mencoba memasuki dunia politik yang terpaksa ditinggalkannya sejak tahun 1960. Harapan ini muncul ketika sebuah badan koordinasi yang menghimpun organisasi-organisasi Islam yang mendukung rehabilitasi Masyumi, yaitu Badan Koordinasi Amal Muslimin memprakarsai pembentukan panitia tujuh pada tanggal 7 April 1967.<sup>35</sup> Panitia tujuh ini terdiri dari KH. Faqih Usman, Hasan Basri, Anwar Harjono, Agus Sudono, Ny. Sjamsuridjal, E.Z. Muttaqien, dan Marzuki Jatim. Di sini ia bersama dengan anggota panitia lainnya berusaha keras untuk membentuk partai baru dan berkonsultasi dengan pemerintah mengenai pembentukan partai baru itu. Rupanya pemerintah merestui pembentukan partai baru yang mewadahi aspirasi umat Islam itu. Lahirlah Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada tanggal 16 Pebruari 1968 dan kemudian disahkan dengan Keputusan Presiden no,70 tanggal 20 Februari 1968. Pada saat itu, yang menjadi pimpinan Parmusi adalah Djarnawi Hadikusumo.<sup>36</sup>

Sayangnya, komposisi pengurus pusat pimpinan Parmusi berdasarkan SK No. 70/1968 itu tidak melibatkan mantan pimpinan Masyumi era Orde Lama bahkan anggota panitia tujuh hanya satu yang masuk kepengurusan yaitu Agus

---

<sup>35</sup> Koordinasi Amal Muslimin ini dibentuk pada bulan Desember 1965 yang melibatkan banyak organisasi sosial dan pendidikan Islam, yaitu Muhammadiyah, Jamiatul Washliyah, Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (Gesbiindo), Persis, Nahdhatul Wathan, Mathla'ul Anwar, Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNII), Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM), Persatuan Umat Islam (PUI), Al-Ittihadiyah, Persatuan Organisasi Buruh Islam Se-Indonesia (Porbisi), Persatuan Guru Agama Islam Republik Indonesia (PGAIRI), Himpunan Seni Budaya Islam Indonesia (HSBI), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Al-Irsyad Al-Islamiyah, dan Wanita Islam. Hakiem, *Perjalanan Mencari*, 221.

<sup>36</sup> Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 92-93; Hadariansyah, *KH. Hasan Basri*, h.90.

Sudono (salah satu ketua). Hasan Basri sendiri tidak mendapat jatah dalam kepengurusan itu. Padahal, hasil versi rancangan bulan september 1967 dan versi rancangan pada bulan Oktober 1967, ia masuk sebagai salah satu ketua pimpinan pusat Parmusi bersama beberapa temannya yang lain seperti Anwar Harjono dan E.Z. Muttaqien.<sup>37</sup> Kondisi ini disebabkan, Rezim Orde Baru ketika itu tidak mengizinkan mantan tokoh-tokoh Masyumi menjadi pengurus partai baru itu.

Walaupun tidak ada unsur Masyumi dalam kepengurusan itu, mantan anggota Masyumi tampaknya masih bisa berkompromi untuk sementara. Namun bagaimanapun mereka berharap, mantan pimpinan Masyumi dapat menjadi pimpinan partai baru itu. Pada tanggal 7 Nopember 1968, usai menunaikan ibadah haji, Hasan Basri mengikuti Kongres pertama Parmusi di Malang, Jawa Timur. Pada awalnya berkembang keinginan agar trio Natsir-Prawoto-Reom (generasi pertama Masyumi) sebagai alternatif pertama untuk dipilih sebagai puncak pimpinan atau trio Anwar Harjono-Hasan Basri-Sjarif Usman (generasi kedua) sebagai alternatif kedua untuk dipilih sebagai pimpinan Parmusi. Namun perkembangan berikutnya, kongres menganggap belum waktunya tokoh Masyumi untuk tampil kembali. Akhirnya, kongres pada saat itu sepakat memilih Muhammad Roem, tokoh moderat Masyumi, sebagai ketua umum Parmusi. Sayangnya, terpilihnya Muhammad Roem ternyata tidak mendapat persetujuan dari pemerintah. Pemerintah tidak menginginkan mantan pimpinan Masyumi menjadi pimpinan partai baru itu. Bahkan ketika tokoh-tokoh utama Masyumi menunjukkan kesediaannya untuk bersikap akomodatif dan menghindari konfrontasi dengan pemerintah Orde Baru, sinyal untuk mengizinkan tokoh Masyumi memimpin Parmusi tidak pernah didapatkan. Tentu saja, tokoh-tokoh Masyumi termasuk Hasan Basri kecewa dengan sikap pemerintah.

Tidak itu saja, pada perkembangan berikutnya muncul pembajakan politik yang dilakukan oleh J. Naro dan kawan-kawannya terhadap kepemimpinan Parmusi pada tahun 1970.

---

<sup>37</sup> Lihat tiga versi kepengurusan pimpinan pusat Parmusi pada Hakiem, *Perjalanan Mencari*, h. 226-229.

Kelanjutan dari peristiwa ini adalah munculnya ketetapan Presiden Soeharto untuk menetapkan Syafaat Mintaredja (Menteri Sosial dalam kabinet Soeharto) sebagai pimpinan Parmusi.

Kenyataan ini merupakan pukulan politik bagi tokoh-tokoh Masyumi. Mereka yang sudah bersusah payah mengusahakan berdirinya Parmusi mulai dari membentuk panitia tujuh untuk mendirikan Parmusi hingga kesediaan untuk berkompromi dalam kepengurusan dan kepemimpinan Parmusi ternyata berujung pada pengambilalihan Parmusi dari pengaruh tokoh Masyumi.

Perlakuan Orde Baru terhadap tokoh-tokoh Masyumi sejak tahun 1967 hingga 1970 ini membuat Hasan Basri kehilangan minat untuk kembali memasuki dunia politik. Dunia politik tidak lagi ramah bagi tokoh-tokoh Masyumi seperti dirinya. Bahkan, aktivitas politik mantan anggota Masyumi benar-benar dihabisi dengan dikeluarkannya daftar 2.500 orang eks Masyumi dan PSI yang tidak boleh dipilih dalam pemilihan umum tahun 1971. Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud, meminta aparat untuk membuat daftar pimpinan Parmusi di daerah untuk diseleksi mana yang kooperatif dan mana yang konfrontatif. Hasilnya, adalah daftar yang telah disebutkan tadi. Dengan demikian, tertutuplah sudah kesempatan mantan tokoh-tokoh Masyumi untuk berkiperah dalam kehidupan politik di Indonesia pada era Orde Baru.

#### **F. YPI, DDII, DMI dan MUI: Wadah Berkiperah untuk Umat (1971-1980)**

Dengan tertutupnya peluang untuk berkiperah di dunia politik, Hasan Basri dan tokoh-tokoh Masyumi lainnya kemudian memusatkan perhatiannya kepada DDII yang telah mereka dirikan pada tahun 1967. Ia juga aktif dalam kegiatan dakwah, kemasjidan, keulamaan dan pendidikan Islam. Pada tahun 1970, ia mengikuti Musyawarah Alim Ulama Se-Indonesia. Di sini ia menjabat sebagai ketua komisi Kemerostan Akhlak dan Penanggulangannya. Musawarah ini merupakan cikal bakal berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun-tahun berikutnya.

Pada dekade 1970-an, Hasan Basri meningkatkan perhatian dan aktivitasnya dalam masalah kemasjidan. Pada tahun 1973, Ikatan Masjid Djakarta yang menjadi wadahnya berkiprah dalam bidang kemasjidan ditingkatkan cakupannya menjadi IKMI (Ikatan Masjid Indonesia). Periode pertama IKMI dipimpin oleh KH. Taufiqurrahman sementara ia menjadi ketua I. IKMI bermarkas di Masjid Al-Furqan yang dibangun oleh tokoh-tokoh Masyumi. Pembangunan masjid ini diketuai oleh Hasan Basri. Selain di IKMI, ia juga aktif di Dewan Masjid Indonesia (DMI). Dewan ini berdiri pada tahun 1972 ketika terjadi pertemuan Forum Konsultasi dan Pembinaan Organisasi Kemasjidan tanggal 22 Juli 1972 di Masjid Sunda Kelapa. Forum ini menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia yang disingkat Dewan Masjid. Ia menghadiri pertemuan ini sebagai utusan dari IKMI. Kepengurusan Dewan Masjid periode pertama (1972-1981) banyak melibatkan tokoh-tokoh Masyumi seperti M. Natsir, KH. Taufiqurrahman, Hamka, dan M. Rasjidi (keempatnya sebagai bagian dari dewan penasihat), Anwar Harjono (salah satu penasihat ahli), dan Hasan Basri sendiri (sebagai salah satu wakil ketua). Melalui IKMI, Masjid Al-Furqan dan DMI, ia bersama dengan tokoh umat lainnya berusaha menjadikan masjid sebagai basis membangun umat dan menjadikannya sebagai wadah yang memiliki fungsi yang lebih luas dari sekadar tempat ibadah.

Kesibukan dan aktivitas Hasan Basri semakin padat ketika posisinya di Yayasan PHI (Perjalanan Haji Indonesia) dan IKMI meningkat. Pada tahun 1973 ia yang aktif di Yayasan PHI terpilih menjadi wakil ketua mendampingi KH. Muhammad Dachlan (ketua) melalui hasil keputusan rapat kerja pada tanggal 29 Juli 1973 di Surabaya. Pada tahun 1974, ia bersama dengan keluarga Bulan Bintang (Masyumi) lainnya mengadakan pertemuan untuk merumuskan *khittah* dan tujuan penerbitan majalah IKMI. Kemudian pada tahun 1975, posisinya di IKMI meningkat dari posisi awalnya sebagai wakil ketua menjadi ketua umum. Ia menggantikan posisi KH. Taufiqurrahman yang meninggal pada tahun itu.

Hasan Basri juga aktif di Yayasan Pesantren Islam yang juga bermarkas di Masjid, yaitu Masjid al-Azhar Jakarta. YPI sendiri telah berdiri sejak tahun 1952 dan kemudian mendirikan Masjid Agung Kebayoran Baru (selesai 1957) dan dipergunakan pada tahun 1958, kemudian diubah namanya menjadi Masjid al-Azhar pada tahun 1961. Di sinilah kemudian ia bertemu dengan Hamka dan setia mendampinginya dalam mengurus YPI dan Masjid al-Azhar. Ia pula yang kelak menjadi salah satu pengganti Hamka di YPI dan menjadi imam besar Masjid al-Azhar pada periode berikutnya pada dekade 1980-an. Tidak jelas kapan ia pertama kali terlibat secara intens di YPI. Kemungkinan besar ia sudah terlibat aktif di YPI pada dekade 1960-an ketika Hamka memimpin YPI Al-Azhar. Dengan keterlibatannya di YPI yang bermarkas di Masjid al-Azhar, maka ia memiliki dua masjid sebagai markas utamanya, yaitu Masjid al-Furqan dan Masjid al-Azhar, dua masjid yang didirikan oleh tokoh-tokoh Masyumi.

Tahun 1974 hingga 1975 merupakan momen bersejarah proses berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasan Basri memiliki peran penting dalam proses terbentuknya MUI. Realisasi dari pendirian MUI mulai dilaksanakan setelah Penyelenggaraan Lokakarya Muballigh Se-Indonesia tanggal 26-29 Nopember 1974 yang diprakarsai oleh Pusat Dakwah Islam Indonesia. Amanat Presiden Soeharto yang disampaikan untuk menutup acara itu mengisyaratkan dengan jelas kehendak pemerintah agar terwujud suatu wadah atau forum dimana ulama dan pemuka agama lainnya dapat berhimpun dan bekerjasama memupuk kerukunan. Pada tahun 1975, Presiden Soeharto menerima kunjungan Dewan Masjid Indonesia dan menyampaikan harapannya agar MUI segera dibentuk. Menindaklanjuti keinginan presiden itu, upaya pembentukan MUI pun mulai diintensifkan. Menteri Dalam Negeri kemudian mengintruksikan sejumlah daerah yang belum memiliki MUI untuk melakukan persiapan. Pada bulan Mei 1975 telah berdiri sejumlah majelis ulama di sejumlah daerah tingkat satu (provinsi).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 243.

Untuk pembentukan MUI tingkat pusat, pemerintah membentuk Panitia Munas Para Ulama melalui keputusan Menteri Agama No, 28 tanggal 1 Juli 1975. Panitia ini diketuai oleh Letjen. H. Soedirman dan tim penasihat yang terdiri dari tiga ulama, yaitu Hamka, Abdullah Syafi'i dan Syukri Ghozali. Musyawarah itu berlangsung tanggal 21-27 Juli 1975 yang dihadiri oleh sejumlah ulama baik pusat maupun daerah, utusan sejumlah organisasi Islam, dan dinas-dinas jawatan Islam. Pada tanggal 26 Juli 1975 MUI resmi didirikan.<sup>39</sup> Berikutnya tanggal 27 Juli 1975 dilakukan peresmian MUI beserta pengurusnya (periode 1975-1980) oleh Menteri Agama, A. Mukti Ali.

Pada periode kepengurusan MUI 1975-1980, Hasan Basri menjadi salah satu ketua MUI. Ketua-ketua yang lainnya adalah KH. Abdullah Syafi'i, KH. M. Syukri Ghazali, KH. Muhammad Habib al-Habsyi, dan H. Soedirman. Pemimpin umum MUI pada periode ini adalah Prof. Dr. Hamka. Berkumpulnya Hasan Basri dengan Hamka di MUI menambah kedekatan keduanya setelah keduanya sama-sama aktif di YPI al-Azhar. Pada tahun 1976 juga Buya Hamka mempercayakan jabatan Ketua Harian Masjid Al-Azhar kepadanya.

Sejak menjadi bagian dari pimpinan pusat MUI, ia mulai memproduksi sejumlah tulisan. Tulisannya mulai muncul pada dekade 70-an terutama setelah terbentuknya MUI. Salah satu tulisannya pada dekade 70-an adalah makalah yang berjudul *Pemikiran dalam Rangka Kerukunan Ummat Beragama di Indonesia* yang disampaikan pada Sidang Pleno MUI tanggal 15 Pebruari 1976.<sup>40</sup> Isi makalah ini membahas tentang isu Kristenisasi di Indonesia. Tulisan ini menekankan pentingnya penerbitan peraturan pemerintah yang berkekuatan hukum untuk mengatur hubungan antarumat beragama termasuk perlunya pengaturan mengenai penyebaran agama (Kristen) terhadap orang yang sudah beragama (muslim). Ia menghendaki agar lembaga-lembaga misi Zending di bidang pendidikan,

---

<sup>39</sup> Hasan Basri, "Kepemimpinan Majelis Ulama Indonesia", dalam Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 243-244.

<sup>40</sup> Lihat tulisan ini pada Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 262-268.

kesehatan dan ekonomi jangan dijadikan sebagai alat Kristenisasi.<sup>41</sup>

Isu Kristenisasi merupakan salah satu perhatian MUI ketika itu. Hamka bahkan secara terang-terangan menyampaikan isu ini kepada Presiden Soeharto ketika MUI bertemu dengan presiden di Istana Negara pada tanggal 17 September 1975.<sup>42</sup>

Tulisan Hasan Basri berikutnya yang disebarakan melalui Majalah *Suara Masjid* ditulis pada tahun 1977 dengan judul *Keputusan dan Saran-saran Majma' Buhuts al-Islamiyyah*. Tulisan ini merupakan laporan yang disiarkannya setelah mengikuti pertemuan internasional Mukhtar Majma' Buhuts al-Islamiyyah di Mesir pada tahun 1977. Ia mengikuti muktamar ini bersama Hamka (utusan MUI), Ahmad Azhar Basyir (dari UGM), dan Rusydi Hamka (dari Redaksi Majalah *Panji Masyarakat*). Dalam tulisan ini ia melaporkan beberapa keputusan muktamar yang meliputi berbagai isu aktual dunia Islam pada saat itu, seperti isu Palestina, perang Lebanon, penindasan kaum muslimin di beberapa negara, pelaksanaan syariat Islam, Marxisme dan Misi Zending, posisi bahasa Arab, lembaga informasi dunia Islam, pembinaan akhlak, pendidikan agama di sekolah, pembinaan anak-anak dan remaja, penerjemahan Alquran, dan lainnya.<sup>43</sup>

Selain tulisan di atas, adapula tulisan Hasan Basri lainnya yang dihasilkannya antara tahun 1975-1980. Diantaranya tulisannya itu adalah *Sekitar Peningkatan Ibadah Haji* (*Suara Masjid* No. 7, 1975), *Catatan Ringkas dalam Lokakarya Muballigh* (*Suara Masjid* No. 4, 1975), *Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (1976), *Catatan Kenangan Untuk Buya Hamka* (1978), dan *Badan Musyawarah Antar umat Beragama* (*Suara Masjid* No. 68, 1980)

---

<sup>41</sup> Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 267-268.

<sup>42</sup> Lihat Hasan Basri, "Catatan Kenangan Untuk Buya Hamka", Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 291-294.

<sup>43</sup> Lihat Hasan Basri "Keputusan dan Saran-saran Majma' Buhuts al-Islamiyyah" dalam Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 276-284.

Kesibukan Hasan Basri di IKMI, YPI, DMI dan MUI tidak mengurangi aktivitas dakwahnya, bahkan semakin meningkat. Ia tidak saja berdakwah melalui khutbah dan ceramah di masjid-masjid dan majelis taklim, tetapi juga berdakwah melalui tulisan dan juga mulai tampil di TV pada dekade 1970-an. Sepanjang dekade 70-an, ia benar-benar disibukkan oleh kegiatan organisasi, aktivitas dakwah dan pertemuan-pertemuan baik nasional maupun internasional. Kondisi ini berlangsung hingga tahun 1980.

### **G. Menjadi Pimpinan MUI (1981-1990)**

Selama dekade 1980-an, markas atau pusat aktivitas Hasan Basri adalah masjid. Di MUI yang bermarkas di Masjid Istiqlal, posisinya tetap sebagai salah seorang ketua MUI pusat untuk periode II masa jabatan 1980-1985 (hasil Musyawarah Nasional II MUI tanggal 26-31 Mei 1980 di Jakarta). Pada Munas ini Hamka terpilih kembali sebagai ketua umum MUI. Setahun setelah menduduki posisinya sebagai ketua umum MUI, Hamka mengundurkan diri. Kedudukan Hamka digantikan oleh KH. Syukri Ghazali sementara ia tetap menjadi salah satu ketua MUI pusat.

Selain di MUI yang bermarkas di masjid, Hasan Basri pada awal dekade 80-an juga aktif di beberapa organisasi yang berhubungan dengan masjid. Jabatan dan aktivitas di bidang kemasjidan ini merupakan kesinambungan dari aktivitasnya pada dekade 70-an. Misalnya, pada tahun 1981, ia kembali menduduki wakil ketua Dewan Masjid Indonesia untuk periode kedua (1981-1984). Di YPI yang bermarkas di Masjid Al-Azhar, ia tetap menjadi pengurus YPI dari tahun 1980-1986.

Pada awal dekade 80-an, ia kembali mengikuti beberapa pertemuan internasional. Pada tahun 1981 ia menghadiri Mukhtar Menteri Wakaf di Makkah dan pada tahun 1983 ia bersama Wakil Presiden RI menghadiri KTT OKI di Casablanca (Maroko). Pertemuan-pertemuan ini semakin meningkatkan wawasannya mengenai dunia Islam di kancah internasional.



Pada dekade ini, ia juga aktif memproduksi tulisan. Kalau pada tahun 1975-1980, tulisannya masih sedikit, pada awal dekade ini tulisannya mulai banyak bermunculan meski dalam bentuk tulisan pendek. Tulisannya yang disiarkan oleh Majalah *Mimbar Ulama* dan *Suara Masjid* pada tahun 1981-1984 diantaranya adalah *Bersyukur dan Tafakkur* (*Mimbar Ulama* No. 74, 1983), *Menyambut Tahun Baru Apa yang Perlu Kita Persiapkan* (*Suara Masjid* No. 97, 1983), *Haji dan Qurban* (*Mimbar Ulama* No. 75, 1983), dan *Kepemimpinan Majelis Ulama Indonesia* (*Mimbar Ulama* No. 77, 1984)

Meski sibuk di Majelis Ulama pusat dan di organisasi lainnya, Hasan Basri tidak melupakan DDII. Bagaimanapun DDII merupakan wadah perjuangan di mana keluarga Masyumi berkumpul. Pada tahun 1983, beberapa anggota DDII telah wafat yang mengakibatkan adanya sedikit perubahan kepengurusan. Meski demikian, ia tetap pada posisi sebagai bendahara DDII yang telah didudukinya selama 16 tahun. Demikian juga pucuk pimpinan masih diduduki oleh M. Natsir, tokoh Masyumi yang dihormati dan disegani.

Tahun 1985-1990 merupakan masa ‘emas’ pertama Hasan Basri. Pada tahun 1985, posisinya di MUI meningkat dari salah seorang ketua MUI pusat menjadi ketua umum MUI pusat menggantikan KH. Syukri Ghazali. Ia terpilih menjadi ketua umum pada Munas ke-3 MUI di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1985. Inilah momen bersejarah baginya. Dalam usianya yang ke-65, ia dipercaya menduduki posisi puncak MUI. Tidak hanya itu, setahun berikutnya, yakni pada tahun 1986, posisinya juga melejit di YPI. Sejak tahun ini ia dipercaya sebagai ketua umum YPI untuk periode tahun 1986-1989. Kedua posisi ini (ketua umum MUI dan YPI) merupakan posisi yang sangat strategis baginya karena di sinilah ia dapat berperan lebih besar.

Dalam bidang kemasjidan, ia juga tetap berpartisipasi dalam keorganisasian IKMI dan DMI. Di IKMI ia menduduki

posisi penting sebagai ketua untuk periode 1984-1988. Namun setelah tahun 1988, ia tidak lagi menjadi pengurus IKMI karena aktif di DMI. Di DMI ia menjadi Dewan Mustasyar DMI untuk periode 1984-1989.

Pada periode awal kepemimpinannya di MUI, ada beberapa program penting yang dijalankan oleh Hasan Basri bersama dengan unsur pimpinan MUI lainnya. Pertama, penyempurnaan dan pembuatan muqaddimah pedoman dasar MUI pada tahun 1986. Penyempurnaan pedoman dasar disebabkan adanya peraturan pemerintah yang tidak mengizinkan asas agama dalam organisasi. Aturan ini juga berlaku untuk MUI. Karena itu, pada masa kepemimpinannya asas MUI adalah Pancasila ditambah dengan akidah Islamiyyah karena bagaimanapun MUI merupakan organisasi Islam. Kedua, pada tahun 1986 MUI di bawah kepemimpinannya menetapkan muqaddimah Pedoman Dasar yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 1986. Ketiga, tahun 1986 juga MUI menetapkan Pedoman Tatacara Penetapan Fatwa yang ditetapkan melalui Rapat Pengurus Paripurna MUI. Keempat, pada tahun 1987 dilakukan penyempurnaan Pedoman Rumah Tangga MUI melalui Rapat Kerja Nasional MUI. Kelima, pada tahun 1987 MUI memutuskan untuk menyelenggarakan Pendidikan Kader Ulama. Realisasi program ini berhasil diwujudkan pada tahun 1989 bertempat di Wisma Sejahtera IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ada tiga fokus kerja MUI yang ingin diwujudkan oleh Hasan Basri selama memimpin MUI yaitu ukhuwwah, dakwah Islamiyah dan tarbiyah Islamiyah. Ketiga fokus kerja MUI ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan berikut, yaitu pembinaan dan pembimbingan umat; fatwa, nasihat dan hukum; ukhuwwah Islamiyyah; konsultasi antarumat beragama; kerjasama ulama-umara; pengkajian dan pemecahan masalah keagamaan dan kemasyarakatan; serta pendidikan calon ulama.<sup>44</sup>

Fokus pertama adalah ukhuwwah. Gagasan tentang pentingnya mewujudkan ukhuwwah Islamiyyah sudah lama

---

<sup>44</sup>H.S. Prodjokusumo, *et. al.* (Tim Penyunting), *15 Tahun Majelis Ulama Indonesia Wadah Musyawarah Para Ulama, Zu'ama dan Cendikiawan Muslim*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 1990), h. 155.

menjadi ide Hasan Basri jauh sebelum ia memimpin MUI. Gagasan ini telah dikemukakannya ketika MUI masih dipimpin oleh Hamka. Ia melihat bahwa kalangan umat Islam masih menonjolkan perbedaan akibat lebih mementingkan kelompok dan golongannya sendiri. Sikap ini mengakibatkan kepentingan umat yang lebih menyeluruh dan harus dilaksanakan bersama-sama menjadi terabaikan. Ia ingin mewujudkan suasana atau iklim yang baik agar dapat membentuk jamaah muslim yang besar di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan itu pertentangan, perselisihan, dan perbedaan pendapat antarkelompok harus ditekan, ukhuwah harus diprioritaskan.<sup>45</sup>

Untuk mencapai tujuan di atas, Hasan Basri menggunakan pendekatan atau filosofi ‘gula dan semut’. Jika ada gula maka semut akan datang dari segala arah karena adanya kepentingan bersama. Karena itu, menurutnya, persatuan umat Islam tidak bisa terwujud jika disertai dengan adu argumentasi mengenai perpecahan dan perbedaan. Cara yang tepat adalah bersama-sama melakukan amal nyata untuk kepentingan bersama.<sup>46</sup> Untuk itu ia banyak melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai organisasi keagamaan lainnya seperti NU. Hubungan dengan NU menjadi penting karena selama ini ada kesan bahwa hubungan NU dengan MUI pada awal pendiriannya kurang harmonis. Hal ini disebabkan sejak awal berdirinya MUI dipimpin oleh tokoh yang memiliki latar belakang Muhammadiyah termasuk Hasan Basri sendiri. Hubungan NU dengan MUI mengalami pasang-surut. Tergantung siapa figur yang memimpinnya. Ketika lembaga ini dipimpin oleh Buya Hamka, hubungan MUI dengan NU kurang mesra. Situasi mengalami perubahan ketika MUI dipimpin oleh Syukri Ghazali. Pada masa Hasan Basri hubungan itu makin akrab karena ia mampu mendekatkan diri dengan NU dan mengajak Abdurrahman Wahid (ketua umum tanfiziyah NU) dan Ali Yafie dalam dewan pimpinan MUI pusat masing-masing sebagai ketua untuk periode 1985-1990.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 162.

<sup>46</sup> Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 163-164.

<sup>47</sup> Jamal D. Rahman, *et.al.* (eds), *Wacana Baru Fiqih Sosial 70 Tahun K.H. Ali yafie*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 40-41.

Wujud ukhuwwah Islamiyyah yang dikembangkan oleh MUI adalah (1) memperbanyak silaturrahi, menumbuhkan saling pengertian, dan menjalin kerjasama dengan sejumlah ormas Islam, lembaga Islam; (2) bekerjasama dengan instansi pemerintah (berbagai departemen); (3) memperkuat kerjasama ulama dan umara dengan memperbanyak kunjungan kepada presiden, wakil presiden, menteri dan pejabat negara lainnya; (4) mengikuti kegiatan kerukunan antarumat beragama yang diadakan oleh pemerintah; (5) memperkokoh dan mengembangkan ukhuwwah Islamiyah dengan umat Islam di luar negeri yang sekaligus mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dengan negara lain; (6) mengikuti pertemuan di forum-forum internasional.<sup>48</sup>

Salah satu pertemuan internasional terpenting yang pernah dihadiri oleh Hasan Basri ketika ia memimpin MUI pada periode pertama kepemimpinannya adalah pertemuan internasional di Roma Italia pada bulan Maret 1987. Pertemuan yang disebut Inter Action Council ini dihadiri oleh sejumlah tokoh agama dunia dan tokoh politik dunia. Ia diundang dalam posisi sebagai wakil dari umat Islam seluruh dunia. Di forum ini dibicarakan beberapa isu penting mengenai situasi dunia pada saat itu, yaitu masalah perdamaian, masalah keadilan ekonomi, masalah pembangunan, masalah kependudukan dan lingkungan.<sup>49</sup>

Kedua, dakwah *bi al-hal*. Dakwah *bi al-hal* adalah suatu upaya kegiatan dakwah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup rakyat secara keseluruhan. Dakwah *bi al-hal* mengacu kepada perbuatan nyata, sikap kerja yang menghasilkan karya nyata, melakukan pemecahan masalah yang di hadapi umat Islam, yang berorientasi kepada keperluan umat Islam yang bersifat material. Wujud konkretnya dapat berupa pembangunan masjid, madrasah, rumah yatim piatu, rumah sakit dan penyantunan kepada kaum dhuafa. Untuk memantapkan dan meningkatkan dakwah *bi al-hal* MUI

---

<sup>48</sup> Lihat Prodjokusumo, *et. al. 15 Tahun*, h. 159-161.

<sup>49</sup> Lihat Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 218-220; H.M. I. Anshary (ed), *KH. Hasan Basri Ulama Indonesia di Mata Dunia*, (Jakarta: Media Dakwah, 1989), h. 42-44.

membentuk Pusat Pelayanan Dakwah *bi al-hal* yang diresmikan pada tahun 1987 di Masjid Istiqlal Jakarta. Pusat pelayanan dakwah ini merumuskan program kerja yang meliputi peningkatan dan perluasan intensifikasi dan jangkauan dakwah Islamiyah baik dakwah *bi al-lisan* maupun dakwah *bi al-hal* (dakwah amaliah).<sup>50</sup>

Ketiga, bidang tarbiyah Islamiyah, oleh MUI diwujudkan dalam bentuk program pendidikan kader ulama. Setelah melalui proses yang panjang MUI mulai mengadakan pendidikan calon ulama pada tanggal 21 Januari 1989. Untuk tahap pertama diikuti oleh 19 orang peserta yang berasal dari berbagai daerah yang telah lulus testing. Masa pendidikan berlangsung selama dua tahun bertempat di Wisma Sejahtera yang terletak dalam kampus IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Versi lain mengenai sejumlah program yang dilaksanakan MUI pada masa kepemimpinan Hasan Basri dikemukakan oleh Hadariansyah berikut ini. Pertama, melengkapi pedoman dasar dan pedoman rumah tangga MUI. Proses realisasinya berjalan dari tahun 1985 hingga 1987. Pedoman dasar ditetapkan pada tahun 1986 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1987. Kedua, menetapkan pedoman tatacara penetapan fatwa. Pedoman ini ditetapkan pada tanggal 18 Januari 1986. Sejak awal berdirinya MUI belum memiliki pedoman tatacara penetapan fatwa meski telah menetapkan sejumlah fatwa antara tahun 1975-1985. Ketiga, meningkatkan kerjasama ulama dan umara. Kerjasama ulama-umara sebenarnya telah berlangsung sejak MUI didirikan, namun manfaatnya yang dirasakan oleh umat belum begitu tampak ke permukaan. Pada masa kepemimpinannya, manfaat kerjasama itu mulai dapat dirasakan oleh umat. Peningkatan kerjasama itu pun terus ditingkatkan. Di bidang agama MUI kerjasama dengan Departemen Agama, di bidang kesehatan MUI bekerjasama dengan Departemen Kesehatan, dibidang keluarga berencana bekerjasama dengan BKKBN, di bidang hukum bekerjasama dengan Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung, di bidang koperasi bekerjasama dengan Departemen Koperasi, dan di bidang transmigrasi bekerjasama dengan

---

<sup>50</sup> Lihat Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 166-170.

Departemen Transmigrasi. Keempat, mengembangkan forum silaturahmi ukhuwah Islamiyah. Kelima, mengembangkan dakwah bi al-hal. Keenam, menyelenggarakan pendidikan kader ulama. Ketujuh, membentuk LP POM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI). Lembaga ini dibentuk dengan Surat Keputusan MUI No. Kep-018/MUI/I/1989 tanggal 6 Januari 1989. Lembaga ini dibentuk oleh MUI dilatarbelakangi adanya isu lemak babi yang terjadi pada tahun 1988. Isu ini sangat menggemparkan dan meresahkan umat Islam di seluruh Indonesia. Apalagi dengan beredarnya selebaran yang berisi daftar produk makanan yang diduga mengandung lemak babi yang mengakibatkan keraguan kaum muslimin untuk memakan produk tertentu sementara di pihak produsen mengalami penurunan omzet yang drastis akibat isu ini.<sup>51</sup>

Walaupun sibuk dengan posisinya di MUI, ia tetap setia berpartisipasi di DDII. Pada tanggal 9 Februari 1989 kepengurusan DDII kembali mengalami penyegaran. Namun posisinya tetap tidak berubah, ia tetap menjadi bendahara DDII. Pada masa ini ia masih berkumpul dengan rekan-rekan Masyuminya seperti M. Natsir (ketua DDII), Prof. Dr. H.M. Rasyidi (wakil ketua I DDII), H.M. Yunan Nasution (wakil ketua II), Dr. Anwar Harjono, S.H. (wakil ketua III), dan Buchari Tamam (sekretaris).<sup>52</sup>

Kesibukannya di MUI dan berbagai organisasi lainnya tidak membuat Hasan Basri lupa untuk menulis pikiran-pikirannya. Sepanjang periode kepemimpinannya (1985-1990), ia berhasil menghasilkan beberapa tulisan baik berupa artikel maupun buku. Sedikitnya, ia menerbitkan tulisannya dalam bentuk artikel sebanyak 22 buah artikel yang diterbitkannya melalui *Mimbar Ulama* (paling banyak), *Harian Merdeka*, *Mihrab*, *Serial Khutbah Jumat*, *Harian Terbit*, dan *Harian Pikiran Rakyat*. Selanjutnya, karya tulis dalam bentuk buku diterbitkan pada tahun 1989 yang berjudul *Risalah Islamiyah Rahmat bagi Alam Semesta* diterbitkan oleh Media Dakwah. Buku ini berisi kumpulan khutbah pilihan yang diedit oleh

---

<sup>51</sup> Hadariansyah, *KH. Hasan Basri*, h. 242-278.

<sup>52</sup> Hakiem, *Perjalanan Mencari*, h. 240-241.

Ramlan Mardjoned. Berikut adalah artikel yang ditulis dari tahun 1985-1990:

1. *Muslim dan Kewajiban Memberantas Kejahatan (Mihrab, 1985)*
2. *Perlunya Kompilasi Hukum Islam (Mimbar Ulama No. 104, 1986)*
3. *Arti Pendidikan Agama Bagi Kawula Muda (Mimbar Ulama No. 106, 1986)*
4. *Peran Ulama Menyongsong Tahun 2000 (Mimbar Ulama No. 115, 1987)*
5. *Keadilan Kunci Tegaknya Kewibawaan Hukum (Mimbar Ulama No. 119, 1987)*
6. *Membangun Manusia Pembangunan Yang Berakhlakulkarimah (Mimbar Ulama No. 122, 1987)*
7. *Islam Melarang Nikah Antar Agama (Serial Khutbah Jumat, 1987)*
8. *Ukhuwah Islamiyah Yang Kita Dambakan (Mimbar Ulama No. 128, 1988)*
9. *Majelis Ulama Indonesia: Berakar Ke Bawah dan Berpucuk Ke Atas (Mimbar Ulama No. 130, 1988)*
10. *Cabaran Masa Kini Terhadap Islam (Mimbar Ulama No. 134, 1988)*
11. *Menyantuni Anak Yatim (Mimbar Ulama No. 135, 1988)*
12. *Peranan Lembaga Pendidikan Islam dalam Memasuki Era Masyarakat Industri dan Informasi (Mimbar Ulama No. 139, 1989)*
13. *Tanggung Jawab Cendekiawan Muslim dalam Pembinaan Umat (Mimbar Ulama No. 144, 1989)*
14. *Konsep al-Jama'ah (Persatuan) dalam Masyarakat Islam) (Mimbar Ulama No.145, 1989)*
15. *Mohammad Natsir Khadimul Ummah (1989)*
16. *Membina Takwa dan Disiplin Diri (Harian Suara Karya, 1989)*
17. *Lima Sifat Pemimpin (Harian Terbit, 1989)*

18. *Mantapkan Iman di Tengah Pergolakan Dunia* (1990)
19. *Pembangunan Bidang Mental Spiritual (Mimbar Ulama No. 146, 1990)*
20. *Keluarga Sakinah (Mimbar Ulama No. 147, 1990)*
21. *Peranan dan Peranserta Lembaga Dakwah dalam Meningkatkan dan Memasyarakatkan Pengajian Al-Qur`an (Mimbar Ulama No. 151, 1990)*
22. *Istiqamah dan Keteguhan Iman (Harian Pikiran Rakyat, 1990).*

Salah satu peristiwa yang menjadi salah satu kenangan hidupnya pada masa kepemimpinannya sebagai ketua umum MUI periode pertama adalah ia diisukan meninggal. Peristiwa ini terjadi pada 11 Maret 1989. Isu ini berasal dari seorang penelpon gelap yang mengaku bernama Suyoto. Penelpon gelap ini menybar isu ini ke Sekretariat MUI, ke kantor beberapa pejabat negara, dan ke kantor penerbit surat kabar dan majalah. Beredarnya isu ini mengejutkan banyak pihak. Banyak pejabat negara seperti ajudan presiden, wakil presiden, menteri agama (Munawir Sjadzali), sekjen departemen agama (Tarmizi Taher) dan menteri koperasi (Bustanul Arifin) dan sejumlah media massa (Antara, RRI, radio swasta, pemimpin redaksi surat kabar dan majalah) meminta konfirmasi mengenai kebenaran beritu itu ke rumah Hasan Basri dan Sekretariat MUI di Istiqlal. Berita atau isu kematiannya pun terbantahkan ketika TVRI menayangkan kondisinya yang dalam keadaan sehat walafiyat. Demikian juga dengan media massa lainnya membantah isu ini pada tanggal 13 Maret 1989.<sup>53</sup>

#### **H. Periode Emas Kedua di MUI (1991-1998)**

Setelah sukses memimpin MUI pada periode 1985-1990, Hasan Basri kembali ditetapkan menjadi ketua umum MUI pada periode berikutnya. Dia terpilih menjadi ketua umum MUI untuk kedua kalinya melalui Munas IV MUI yang berlangsung pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Sebagaimana

---

<sup>53</sup> Mardjoned (ed.), *KH. Hasan Basri*, h. 229-230.

sebelumnya, selain kembali memimpin MUI, ia juga tetap aktif di sejumlah organisasi di mana ia selama ini berkibrah sebelum menjadi orang nomor satu di MUI, seperti DDII dan YPI. Di DDII, posisinya tidak pernah 'naik', setelah menjadi bendahara, ia tidak pernah melampaui posisinya itu, bahkan belakangan posisinya menurun. Sementara di YPI, posisinya justru meningkat.

Pada tanggal 23-24 April 1993, setelah wafatnya M. Natsir (6 Februari 1993), komposisi pemimpin DDII pun berubah walaupun tetap mempertahankan tokoh senior DDII. Pemimpin DDII kali ini bersifat kolegal. Tim ketua terdiri dari empat orang, yaitu Prof. Dr. H.M. Rasyidi, H.M. Yunan Nasution, Dr. Anwar Harjono, S.H. (ketua harian) dan KH. Rusjad Nurdin. Hasan Basri sendiri hanya menduduki posisi sebagai anggota bersama dengan sejumlah tokoh lainnya.<sup>54</sup> Posisi ini tetap didudukinya hingga ia meninggal dunia pada tahun 1998.

DI YPI, Hasan Basri telah menduduki puncak pimpinan sejak periode ke-9 kepengurusan yayasan ini. Pada periode 1986-1989, ia telah dipercaya sebagai ketua umum YPI Al-Azhar bertepatan dengan periode pertama dirinya menjadi ketua umum MUI. Pada periode 1989-1992 (periode ke-10) yang juga bertepatan dengan masa jabatan keduanya sebagai ketua umum MUI, ia kembali menjadi ketua umum YPI Al-Azhar. Demikian pula pada masa-masa berikutnya, ia tetap menduduki posisi ini sampai wafat pada tahun 1998.

Pada periode kedua kepemimpinannya, ia semakin meningkatkan program MUI yang telah dilaksanakannya pada periode sebelumnya. Kerjasama MUI dengan pemerintah terus diperkuat. Kerjasama dengan pemerintah telah dilakukan sejak periode kepemimpinannya yang pertama, pada periode kedua kerjasama itu semakin ditingkatkan. Misalnya, kerjasama MUI dengan beberapa departemen dan yayasan (Departemen Agama, Departemen Transmigrasi, Yayasan Amal Bakti Pancasila, dan Yayasan Dharmais) untuk melaksanakan program pengiriman da'i ke berbagai lokasi transmigrasi di Indonesia. Pada tahun

---

<sup>54</sup> Lihat Hakiem, *Perjalanan Mencari*, h. 241-242.

1995 jumlah da'i yang berhasil dikirim mencapai jumlah 1667 orang da'i. Berikutnya, kerjasama MUI dengan beberapa departemen dan lembaga dunia (Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan UNICEF) dalam menyelenggarakan lokakarya nasional tentang perkawinan usia muda, lokakarya nasional tentang air bersih dan kesehatan lingkungan, dan lokakarya Gerakan Jumat bersih dan Jambanisasi. Gerakan Jumat Bersih ini pada tanggal 12 Nopember 1994 dicanangkan oleh Presiden Soeharto sebagai gerakan nasional.<sup>55</sup>

Forum silaturahmi ukhuwah Islamiyah pada periode kepemimpinan kedua Hasan Basri tetap dilakukan secara berkala. Pertemuan dengan kalangan pemimpin umat yang berasal dari unsur berbagai ormas, lembaga Islam, dan lainnya secara periodik tetap dilakukan. Dalam forum ini disampaikan berbagai informasi dan pencarian masukan-masukan dari forum yang berguna bagi kajian MUI dalam memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan lembaga lainnya. Forum ini diadakan untuk kepentingan MUI dalam memberikan sumbangan pemikiran mengenai RUU kesehatan, RUU perfilman, RUU perkoperasian, RUU Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan rancangan GBHN.<sup>56</sup>

Pendidikan kader ulama yang dilaksanakan sejak tahun 1989 terus dilanjutkan pada periode kedua kepemimpinannya. Bedanya, kalau pada tahap pertama pendidikan kader ulama dilakukan dalam jangka dua tahun, pada tahap berikutnya jangka waktu pendidikan hanya berlangsung selama satu tahun (dua semester) setiap angkatan. Demikian juga dengan LP POM MUI yang telah terbentuk pada tahun 1989 semakin ditingkatkan peran dan tugasnya. Penyempurnaan tugas LP POM MUI dilakukan pada tahun 1991. MUI pada masa kepemimpinannya juga MUI turut berperan dan mendorong berdirinya BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang berdiri pada 3 November 1991 dan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang berdiri pada . DI BMI, Hasan Basri terpilih sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah dengan dibantu

---

<sup>55</sup> Hadariansyah, *KH. Hasan Basri*, h. 256-257.

<sup>56</sup> Hadariansyah, *KH. Hasan Basri*, h. 261-262.

beberapa orang anggota yaitu Ali Yafie, M. Quraish Shihab, Ahmad Azhar Basyir dan Ibrahim Hosen.

Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada periode kedua kepemimpinannya adalah terjadinya demonstrasi besar-besaran umat Islam di berbagai kota menentang diedarkannya kupon SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) yang telah beredar sejak tahun 1989. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1993. Demonstran menuntut agar SDSB dihapuskan dan mendesak pemerintah dalam hal ini menteri sosial agar mencabut izin peredarannya. Para demonstran menilai SDSB mengandung unsur judi dan berdampak negatif terhadap masyarakat. Keberatan terhadap SDSB ini sudah muncul dari kalangan ulama dan cendekiawan muslim pada tahun 1989 ketika izin peredarannya dikeluarkan oleh menteri sosial. Bahkan, MUI pada tanggal 23 Nopember 1991 telah mengeluarkan fatwa bahwa SDSB itu lebih banyak unsur mudaratnya dan hukumnya haram. Namun reaksi protes dan fatwa MUI ini belum mampu menghentikan peredaran SDSB itu karena belum ada sinyal dari pemerintah untuk menghentikannya. Bahkan, sebaliknya menteri sosial justru memperpanjang izin peredaran kupon SDSB itu pada tanggal 9 September 1993. Keputusan pemerintah ini semakin memanas situasi. Unjuk rasa pun merebak.<sup>57</sup>

Melihat situasi ini, Hasan Basri selaku ketua umum MUI berusaha menjembatani keinginan umat dan ulama dengan kebijakan pemerintah. Secara diam-diam ia bersama dengan Menteri Agama Tarmizi Taher, menghadap presiden. Sebelum bertemu presiden, keduanya menemui Menko Polkam Soesilo Soedarman membicarakan situasi tersebut. Ia mengemukakan tiga dampak negatif SDSB yang menjadi alasan mengenai perlunya peredaran kupon SDSB itu dihentikan, sebagaimana yang dikemukakan Hadariansyah di bawah ini.

Pertama, dampak negatif dari peredaran kupon SDSB itu dapat berakibat merusak akidah umat. Karena, para pembeli kupon itu di antaranya ada yang datang ke dukun, ke tukang ramal, ada yang mendatangi kuburan, pohon kayu, dan lain

---

<sup>57</sup> Hadariansyah, *KH. Hasan Basri*, h. 228-229.

sebagainya dengan tujuan agar mendapatkan nomor yang bakal kena undian. Mereka mempercayai apa yang tidak dibenarkan dalam akidah Islam. Kedua, uang masyarakat di daerah banyak tersedot ke pusat. Karena, uang dari pembeli kupon SDSB di daerah mengalir ke pusat, yakni disetor ke bandarnya di pusat. Ketiga, membuat masyarakat menjadi malas bekerja. Orang lebih banyak berharap mendapat uang yang banyak, kaya mendadak, hanya dengan membeli kupon SDSB itu. Akibatnya pengangguran semakin bertambah, dan angka kriminalitas semakin meningkat.<sup>58</sup>

Berdasarkan tiga alasan ini Hasan Basri atas nama umat Islam dan Tarmizi Taher atas nama menteri agama meminta agar presiden berkenan untuk menghentikan peredaran kupon SDSB itu dengan cara memerintahkan menteri sosial mencabut izin peredaran SDSB tersebut. Menko Polkam berkenan untuk menyampaikan permintaan keduanya kepada presiden. Presiden menyetujui permintaan itu dan kemudian memerintahkan Menteri Sosial Inten Soeweno mencabut izin peredaran SDSB itu. Dengan adanya pencabutan ini, SDSB kemudian dihentikan dan ditutup.<sup>59</sup>

Sebelumnya, Hasan Basri sebagai ketua umum MUI sering dikritik karena dinilai tidak memiliki sikap tegas terhadap SDSB (juga Porkas) dan tidak berani dengan pemerintah. Ia bahkan dianggap ulama pendukung pemerintah dan harus mundur dari jabatannya karena dianggap tidak layak memimpin MUI. Ketika MUI memfatwakan SDSB itu lebih banyak mudharatnya dan perlu dihapus, Hasan Basri justru sedang melakukan ibadah umrah. Pengkritiknya menilai ia 'sengaja menghindar' pada saat MUI mulai bersuara keras. Namun teman-teman dekatnya yang tahu wataknya menepis kritik itu. Dalam pandangan mereka, Hasan Basri bukanlah tipe orang yang suka bicara blak-blakan dan keras. Dia juga tidak suka terang-terangan menolak pendapat orang lain. Apalagi selama ini, ia selalu menjaga hubungan baik antara ulama dan umara. Karena itulah cara yang ditempuh Hasan Basri dalam

---

<sup>58</sup> Hadaranisyah, *KH. Hasan Basri*, h. 230.

<sup>59</sup> Hadariansyah, *KH. Hasan Basri*, h. 230.

mengingatkan pemerintah tidak dengan cara turun ke jalan, berbicara keras, apalagi mencaci dan memaki.

Di sela-sela kesibukannya yang luar biasa, sebagaimana biasa yang tetap menulis pikiran-pikirannya dalam bentuk tulisan-tulisan pendek. Bahkan dapat dikatakan bahwa periode kedua kepemimpinannya merupakan masa di mana ia lebih produktif menulis dibanding sebelumnya. Beberapa tulisannya yang dimuat dalam majalah *Mimbar Ulama* adalah *Reuni Muallimin dan Zuama* (*Mimbar Ulama* No. 156, 1991), *Ajaran Islam dan Lingkungan Hidup* (*Mimbar Ulama* No. 161, 1991), *Ulama Pewaris Para Nabi* (*Mimbar Ulama* No. 162, 1991), *Belajar dari Sejarah* (*Harian Merdeka* 4 Desember 1992), *Narkotika dan Terorisme Dilihat dari Segi Agama* (*Mimbar Ulama* No. 169, 1992), *Nabi Muhammad saw Sebagai Rahmatan lil 'Alamin* (*Mimbar Ulama* No. 176, 1992), *Jadikanlah Ramadhan Sebagai Bulan Beramal* (*Harian Merdeka*, 5 Maret 1993), *Tulang Punggung Negara* (*Mimbar Ulama* No. 178, 1992), *Menguak Laut Menuju Cita* (*Mimbar Ulama* No. 190, 1994), *Ikhlas dalam Beramal* (*Mimbar Ulama* No. 191, 1994), *Kepemimpinan dalam Islam* (*Mimbar Ulama* No. 192, 1994), *Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan* (*Mimbar Ulama* No. 193, 1994), *Problematika Dakwah Islam di Indonesia* (*Mimbar Ulama* No. 194, 1994), *Wasiat Nabi* (*Mimbar Ulama* No. 195, 1994), *Hikmah Isra` dan Mi'raj Nabi Muhammad saw* (*Mimbar Ulama* No. 198, 1994), *Idul Fitri dan Pasca Ramadhan* (*Suara Karya*, 12 Maret 1994), *Ibadah Harta* (*Harian Merdeka*, 18 Maret 1994), *Kepribadian Muslim* (*Harian Merdeka*, 15 April 1994), *Pembinaan Pribadi dan Masyarkat Fitrah* (*Harian Merdeka*, 13 Mei 1994), *Semangat Tauhid, Perjuangan dan Pengorbanan* (*Harian Suara Karya*, 20 Mei 1994), *Hikmah Ibadah Kurban* (*Harian Suara Karya*, 20 Mei 1994), *Ajaran Islam tentang Akhlak Bekerja* (*Harian Merdeka*, 17 Juni 1994), *Amaliah Mu'amalah* (*Harian Merdeka*, 24 Juni 1994), *Anak Generasi Masa Depan* (*Harian Merdeka*, 23 Juli 1994), *Islam dan Industrialisasi* (*Harian Merdeka*, 4 Agustus 1994), *Islam dan Modernisasi* (*Harian Merdeka*, 26 Agustus 1994), *Amaliah Tergantung pada Niatnya* (*Harian Merdeka* 4 Desember 1994), *Keagungan Bulan Ramadhan* (*Mimbar Ulama* No. 199, 1995), *Ibadah Haji:*

*Peningkatan Ukhuwwah dan Dakwah bil hal (Mimbar Ulama No. 201, 1995), Mensyukuri Lima Puluh Tahun Indoensia Merdeka (Mimbar Ulama No. 205, 1995), dan Profil Ideal Perempuan Indonesia (Mimbar Ulama No. 207, 1995).*<sup>60</sup>

Sejumlah tulisan Hasan Basri yang telah beredar di Majalah *Mimbar*, Majalah *Suara Masjid*, Majalah *Serial Khutbah Jumat*, *Harian Merdeka*, *Harian Suara Karya*, *Harian Pikiran Rakyat*, dan sebagian dari makalah dan khutbah idul adha yang pernah disampaikannya kemudian dikumpulkan menjadi satu buah buku. Kumpulan tulisan ini diedit oleh Noor Chozin Agham dan diberi judul *Etika Bermasyarakat*. Buku ini kemudian diterbitkan oleh Majalah Bulanan *Mimbar Ulama* yang dikelola oleh MUI pada tahun 1995. Dengan hadirnya buku ini, ia telah memiliki dua buku yang berisi kumpulan tulisannya. Buku pertamanya adalah *Risalah Islamiah Rahmat Bagi Alam Semesta* telah diterbitkan pada tahun 1989 oleh Media Dakwah yang dikelola oleh DDII. Sebagian tulisannya juga dimuat dalam biografinya yang disusun oleh Ramlan Mardjoned yang berjudul *KH. Hasan Basri 70 Tahun: Fungsi Ulama dan Peranan Masjid* yang diterbitkan oleh Media Dakwah tahun 1990.

### **I. Pengabdian Terakhir (1995-1998)**



pada Munas MUI tanggal 21-25 Juli 1995 di Jakarta ia terpilih

Setelah sukses memimpin MUI untuk periode kedua, pengaruh Hasan Basri semakin kuat. Hubungan dan kerjasama dengan pemerintah juga semakin kuat. Pemerintah pun tampaknya ‘nyaman’ dengan gaya kepemimpinannya. Sejumlah ulama dan cendekiawan muslim pun menghormati kepemimpinannya. Karena itu tidaklah mengherankan jika

---

<sup>60</sup> Hadariansyah, *KH. Hasan Basri*, h.105-107.

kembali menjadi ketua umum MUI untuk ketiga kalinya. Padahal, ketika itu usianya sudah menginjak 75 tahun. Pada periode ini ia didampingi oleh 8 orang ketua yaitu KH. Moh. Ilyas Rukhiyat, Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, Prof. KH. Ali Yafie, Prodjokusumo, Prof. KH, Ibrahim Hosen, LML., Ismael Hasan, S.H., Prof. Dr. Hj. Zakiah Darajat, dan Drs. H. Amidhan.

Untuk pengembangan umat, pada periode ini MUI yang dipimpin oleh Hasan Basri diantaranya memfokuskan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah. Upaya ini merupakan salah satu wujud dari upaya peningkatan fungsi dan peranan MUI dalam membimbing dan menuntun umat. Untuk membenahan ke dalam, salah satunya MUI menyempurnakan pedoman tatacara penetapan fatwa yang telah dibuat pada tahun 1986 (pada masa kepemimpinan Hasan Basri periode pertama). Pedoman baru ini tidak jauh berbeda dengan pedoman terdahulu. Pedoman yang baru ini prosedur penetapan fatwa yang lebih rinci dan dilengkapi dengan mekanisme kerja komisi fatwa. Untuk peningkatan kerjasama dengan pemerintah, MUI tetap menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk menyukseskan program-program kerjanya dan sebaliknya ikut menyukseskan program pemerintah yang terkait dengan fungsi dan peran MUI. Salah satu kerjasama MUI dan pemerintah yang menonjol pada periode ketiga kepemimpinannya adalah kerjasama MUI dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Agama tentang pelaksanaan pencantuman label “halal” pada setiap kemasan produk makanan dan minuman. Piagam kerjasama MUI dengan kedua departemen ini dilakukan pada tanggal 21 Juni 1996. Dalam piagam ini disepakati bahwa kewenangan menentukan kehalalan produk makanan didasarkan pada fatwa MUI setelah melalui uji laboratorium dan audit di lokasi produsen.

Periode ketiga kepemimpinan Hasan Basri bersamaan dengan situasi sosial-politik yang memanas. Sejumlah kerusuhan sosial yang berbau syara terjadi di berbagai daerah termasuk di wilayah Kalimantan Selatan yang menjadi *banuannya* di masa muda. Tanggal 27 Juli 1996 terjadi peristiwa rusuh di kantor PDI yang berujung bentrok antara masing-masing

pendukung Megawati dan Suriadi yang didukung pemerintah. Peristiwa Situbondo (10 Oktober 1996) yang berawal dari kasus penghinaan agama berkembang menjadi rusuh massal disertai pembakaran dan penghancuran gereja, sekolah dan panti asuhan milik umat Kristen, dan pembakaran toko-toko milik Tionghoa. Pada tahun 1997 terjadi kerusuhan di Banjarmasin yang disebut peristiwa Jumat Kelabu. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Mei 1997 menjelang putaran akhir kampanye Golkar. Dalam peristiwa ini terjadi bentrokan dan pembakaran sejumlah tempat ibadah, toko, plaza, hotel dan rumah penduduk. Korban meninggal dan luka-luka cukup banyak terutama korban tewas yang ditemukan di gedung Mitra Plaza. Pada peristiwa ini, Hasan Basri berada di Banjarmasin, di pusat kerusuhan. Ia bersama dengan Sa'adilah Mursyid, sejumlah jurkam Golkar dan artis ibukota akan menghadiri Kampanye Golkar di lapangan Kamboja. Mereka menginap di Hotel Kalimantan yang menyatu dengan Junjung Buih Plaza. Gubernur Kalsel, Gusti Hasan Aman juga sedang berada di sini ketika kerusuhan terjadi. Pada sore hari ketika perusuh menuju kantor DPD Golkar, mereka 'singgah' ke Hotel Kalimantan dan melakukan perusakan serta pembakaran terhadap gedung hotel itu. Ia dan rombongan lainnya berhasil selamat dengan dikawal ketat oleh pihak keamanan. Mereka kemudian diterbangkan menuju Jakarta.

Tahun 1997 krisis ekonomi melanda Indonesia yang kemudian dilanjutkan dengan munculnya demonstrasi mahasiswa yang merebak di mana-mana menuntut reformasi untuk mengakhiri rezim Orde Baru yang dianggap sarat dengan KKN (Korupsi, kolusi dan nepotisme). Akibat krisis ini, pada tahun 1998, rezim Orde Baru yang begitu kuat dan tidak terbayangkan akan tumbang akhirnya tumbang juga ditandai dengan berhentinya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998 setelah mendapat desakan yang kuat dari berbagai pihak. Tumbangnya Soeharto didahului oleh peristiwa kerusuhan Jakarta pada tanggal 13-15 Mei 1998. Keberhasilan pejuang reformasi menumbangkan Soeharto dan Orde Baru menimbulkan euforia kebebasan yang luar biasa.

Dalam situasi krisis multidimensional (krisis ekonomi, sosial, politik dan lainnya) beberapa bulan setelah mundurnya Soeharto dan tumbangannya rezim Orde Baru Hasan Basri wafat. Ia wafat pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 1998 dalam usia 78 tahun. Ia wafat di rumahnya di jalan Mampang Prapatan IV No. 50 Jakarta Selatan pukul 13.05 WIB. Berita kematiannya segera menyebar dan diberitakan oleh berbagai media massa baik cetak maupun elektronik. Berita-berita sosial-politik pada masa awal reformasi yang begitu ‘panas’ pada saat itu hampir menenggelamkan berita kematiannya.<sup>61</sup> Jenazahnya disemayamkan di rumah Fahmi Idris (sang menantu) untuk memudahkan para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir dan ucapan belasungkawa karena rumah Fahmi Idris cukup luas untuk menampung pelayat yang tidak henti-hentinya mengalir. Banyak pejabat dan ulama yang datang, termasuk diantara pelayat itu adalah mantan Presiden Soeharto dan Presiden BJ. Habibie.

Hasan Basri dimakamkan pada esok harinya tanggal 9 Nopember 1998. Jenazahnya disalatkan di Masjid Agung al-Azhar setelah salat zhuhur dan kemudian dimakamkan pada pukul 13.00 WIB di TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan. Hasan Basri meninggalkan seorang istri (Nurhani) dan empat orang anak (Hasni, Husni, kartini, dan Husaini). Pada saat meninggal posisinya masih sebagai ketua umum MUI, dan ketua umum YPI al-Azhar. Kiprahnya di MUI telah berlangsung selama 23 tahun. 10 tahun pertama (1975-1985) ia menempati posisi sebagai salah satu ketua MUI pusat selama dua periode, 10 tahun kedua (1985-1995) ia menempati posisi puncak sebagai ketua umum MUI selama dua periode, dan tiga tahun terakhir ia tetap menduduki posisi sebagai ketua umum MUI. Pada periode ketiga kepemimpinannya (1995-2000) ia tidak sempat

---

<sup>61</sup> Ketika dia wafat ketegangan antara pendukung Sidang Istimewa MPR dan anti Sidang Istimewa MPR sedang memanas. Bahkan pada hari ia dimakamkan (9 Nopember 1998) terjadi rusuh di Jakarta antara demonstran dari kalangan mahasiswa dengan pamswakarsa yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Peristiwa ini terus berlanjut hingga terjadi peristiwa Semanggi I pada tanggal 11-13 Nopember 1998 yang melibatkan polisi dan tentara.

menyelesaikan masa kepemimpinannya karena ia terlebih dahulu wafat.

Selama hidupnya ia telah mendapat sejumlah penghargaan, diantaranya: (1) tanda jasa sebagai anggota Veteran Republik Indonesia; (2) penghargaan Bintang Tanda Jasa Kelas Satu yang diberikan oleh pemerintah Mesir (1992); (3) penghargaan dan tanda jasa Bintang Mahaputra Utama dari pemerintah RI (1994); dan (4) Penghargaan dan tanda jasa Satya Lencana Pembangunan Bidang Agama dari Pemerintah RI pada tahun (1994).

### BAB III

## PERJALANAN HIDUP IDHAM CHALID DARI 1922 HINGGA 1998

### A. Kelahiran dan Masa Kecil



Idham Chalid dilahirkan pada tanggal 5 Muharram 1341 di Satui. Tanggal hijriyah kelahirannya dikonversi menjadi tanggal 27 Agustus 1922. Tanggal inilah yang umum diterima termasuk oleh Idham sendiri. Tanggal ini pula yang digunakan untuk merayakan ulang tahunnya oleh keluarga dan murid-muridnya.<sup>1</sup> Satui yang merupakan tempat kelahirannya, pada saat itu merupakan desa kecil

---

<sup>1</sup> Versi lain yang berkembang mengenai kelahiran Idham adalah tanggal 5 Januari 1921. Tanggal inilah yang dipakai oleh *Tempo*, Martin van Bruinessen dan Greg Fealy dalam karya mereka masing-masing. Lihat catatan kaki nomor 1, Ahmad Muhajir, *Idham Chalid Guru Politik Orang NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), h.19. Idham sendiri mengaku bahwa dia tidak melakukan penyelidikan apakah tanggal tersebut merupakan tanggal yang tepat dari konversi tanggal kelahiran hijriyahnya. Ia mengaku dilahirkan pada hari Senin. Namun menurut Kalender Abadi Gayo tanggal 27 Agustus 1922 adalah hari Minggu. Justru tanggal 22 Januari 1922 adalah hari Senin. Lihat Arif Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2008), h.23 dan 90. Penulis sendiri ketika menggunakan Software Conversion of Islamic and Christian Dates dari situs <http://www.oriold.uzh.ch/static/hegira.html> justru menemukan bahwa tanggal 5 Muharram 1341 adalah tanggal 28 Agustus 1922 selisih satu hari dari tanggal yang sering digunakan selama ini. Tanggal 28 Agustus 1922 adalah hari Senin dan ini pas dengan pengakuan Idham mengenai hari kelahirannya.

berkedudukan sebagai ibukota *onderdistrik* dan masuk wilayah distrik Tanah Laut, Pleihari. Pada tahun 1925 wilayah itu masuk wilayah Tanah Bumbu, Pagatan.

Ayah Idham bernama Muhammad Chalid dan ibunya bernama Ummu Hani. Ibunya merupakan istri ayahnya yang termuda. Ayahnya berdarah Banjar asli sementara ibunya campuran darah Banjar-Melayu-Bugis. Idham memiliki tujuh saudara. Kakaknya ada tiga sedang adiknya ada empat. Mereka semua delapan bersaudara (empat laki-laki dan empat perempuan) dari dua orang ibu yang berbeda.

Ayah Idham memiliki pengetahuan agama yang baik karena termasuk orang yang rajin menuntut ilmu agama meskipun saat itu belum masuk kategori ulama (tuan guru).<sup>2</sup> Di Satui, ayahnya menjadi seorang penghulu (naib), guru (guru ngaji, guru agama Islam, guru tarikat), khatib, pedagang dan pawang buaya. Sebagai guru, ayahnya mengajar membaca huruf Arab dan Latin, mengajar Alquran dan tajwidnya, fiqih dan amalan-amalan lainnya. Sang ayah juga mendirikan sekolah untuk belajar baca tulis, hitung dan sedikit ilmu bumi. Cara mengajarnya cukup keras dan ketat.

Untuk menghidupi keluarga, ayahnya berdagang menjual hasil-hasil hutan seperti kayu ulin, rotan dan damar yang diperolehnya dari masyarakat Dayak di pedalaman Satui. Ia membawa hasil hutan itu ke Banjarmasin dengan menggunakan perahu layar sendiri. Sepulang dari Banjarmasin, ayahnya membawa bahan pokok kehidupan sehari-hari seperti garam, gula, bawang, minyak tanah, kain, barang pecah-belah dan sebagainya untuk dijual di Satui hingga daerah-daerah pelosok. Kadang untuk berdagang ia menghabiskan waktu yang cukup lama di dalam hutan dan berinteraksi cukup intens dengan masyarakat Dayak

---

<sup>2</sup> Ia pernah belajar kitab *Mukhtashar Syarh Jurmiyyah*, *Fath al-Qarib*, *Sabi al-Muhtadin*, *Siyar al-Salikin*, *Matla' al-Badrain li al-Fatani* dan kitab-kitab tasawuf lainnya. Iia pernah belajar ilmu agama di Amuntai dengan Tuan Guru Haji Abdul Qadir Panangkalaan dan Tuan Guru Haji Nanang Taluk Pakacangan. Dia juga pernah berangkat ke Mekkah dan belajar tarikat di sana. Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 34)

pedalaman. Keakrabannya dengan masyarakat Dayak pedalaman itu membuatnya mampu mengislamkan beberapa orang Dayak sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh beberapa orang dai dan misi zending (missionaris) pada saat itu.

Pekerjaan ayahnya yang menarik adalah sebagai pawang buaya meski hanya ‘amatiran’ dan hanya pada saat diperlukan. Pada saat itu Sungai Satui merupakan daerah yang banyak dihuni oleh buaya. Setiap tahunnya, 4-5 orang tewas diserang buaya. Setiap ada orang yang tewas diserang buaya, ayahnya selalu diminta untuk menangkap buaya penyerang itu. Kepandaian ayahnya menaklukkan buaya dipelajarinya ketika ia masih muda saat merantau di daerah Riau. Ilmu ini berhasil digunakannya untuk menaklukkan buaya ganas di Sungai Satui.<sup>3</sup>

Idham tidak lama tinggal di Satui. Pada tahun 1930 mereka sekeluarga pindah ke Pagatan. Ayahnya berhenti menjadi penghulu Satui karena perkara perkelahian dengan seseorang yang bernama Haji Bakri. Keduanya di sidang di sebuah *Landraad* di kota *Onder Afdeling* di Kotabaru. Keputusan pengadilan menyatakan keduanya tidak ada yang memenangkan perkara, keduanya bebas. Keduanya kemudian bersahabat kembali.

## **B. Masa Pendidikan di Amuntai dan Nagara**

Pendidikan awal Idham termasuk belajar baca tulis (Latin-Arab) ditempuh di sekolah sederhana yang didirikan ayahnya. Ia belajar kepada ayahnya dari usia 6 hingga 8 tahun. Ketika keluarganya pindah ke Pagatan, ia mengikuti pendidikan di sekolah dasar yang waktu itu bernama *gouvernement* kelas II atau biasa disebut juga Sekolah Rakyat atau Sekolah Melayu. Sekolah ini adalah satu-satunya sekolah yang ada di Pagatan pada waktu itu. Ia langsung dimasukkan ke kelas II karena sudah pernah belajar baca tulis sebelumnya.

---

<sup>3</sup> Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 24-34.

Di sekolahnya terdapat Taman Pustaka yang menyediakan tempat penyewaan buku-buku terbitan Balai Pustaka Jakarta. Ia memanfaatkan taman pustaka ini dan rajin menyewa buku di taman pustaka sekolahnya. Bacaannya juga berkembang karena ia juga membaca Harian *Suara Kalimantan* dan majalah *Panji Pusaka* yang menjadi langganan ayahnya. Di samping gemar membaca, ia juga belajar bahasa Belanda melalui kursus yang diadakan oleh salah seorang gurunya pada sore hari dan belajar mengaji Alquran pada pagi hari.<sup>4</sup>

Pada waktu kecil ketika masih di Pagatan, Idham sudah sering mendengar sejumlah nama tokoh nasional, organisasi, nama peristiwa dan sebagainya melalui percakapan sejumlah orang tua yang didengarkannya. Ia sudah mengenal nama Tjokroaminoto, Dr. Soetomo, Soekarno, Hoesni Thamrin, Ir. Pangeran Noor, Sarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Musyawaratutthalibin, Komunis, Boven Digul, Nusakambangan, Sawahlunto, dan sebagainya. Hanya saja, saat itu ia belum cukup mengerti apa dan siapa nama-nama itu.

Idham tidak lama tinggal di Pagatan. Pada tahun 1932 keluarganya pindah ke Amuntai, kampung asal ayahnya. Amuntai pada saat itu termasuk ibukota *Onder Afdeling* di bawah *Afdeling* Hulu Sungai yang beribukota di Kandangan. Kepindahan ini atas inisiatif ayahnya. Sang ayah ingin agar Idham mendapat pendidikan agama yang baik agar kelak dapat menjadi ulama. Di Amuntai banyak ulama besar yang pernah belajar ke Timur Tengah baik Makkah maupun Mesir, ayahnya ingin agar ia mendapat pendidikan dari mereka.

Di Amuntai Idham masuk ke *Vervolgschool*, Sekolah Melayu setingkat dengan sekolahnya di Pagatan. Di sekolah ini ia langsung duduk di kelas IV karena ia telah menyelesaikan kelas II dan III di Pagatan. Sejak bersekolah di sini, ia mulai pandai berpidato. Dalam usia sekitar 12

---

<sup>4</sup> Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 39-40.

tahun ia pernah berpidato di depan teman-temannya tanpa teks (dihafal).<sup>5</sup>

Pada tahun 1934, ia menamatkan pendidikannya di *Vervolgschool* dan melanjutkan pendidikannya di Madrasaturrasyidiyah (sekarang PP Rakha) yang didirikan oleh Mu'allim Abdurrasyid (alumnus Al-Azhar). Saat itu, madrasah ini dipimpin oleh KH. Juhri Sulaiman juga alumnus al-Azhar. Di madrasah ini, ia langsung masuk kelas II. Beberapa bulan kemudian ia dinaikkan ke kelas III. Di antara guru-gurunya di madrasah ini adalah Mu'allim Ahmad Mansur, Mu'allim Asy'ari, Mu'allim Rowi, Mu'allim Abdul Wahab Sya'rani dan Tuan Guru Dachlan Lok Bangkai. Kitab-kitab yang pernah dipelajarinya diantaranya adalah *Nahwu Kafrawi*, *al-Kawakib al-Durriyyah*, *fiqh al-Bajuri Ibnu Qasim*, *Saraf 'Unwan al-Zarraf*, *Tafsir Jalalain*, *hadis Mukhtashar Abi Jamrah*, *Riyadh al-Shalihin*, *Alfiyyah Ibnu Malik*, *Arud*, *I'anat al-Thalibin*, *Nahwu Ibnu Aqil*, *Tauhid Abdussalam*, *Ushul al-fiqh al-Waraqat*. Pada tahun 1938, ketika duduk di kelas V, ia telah menyelesaikan pendidikannya di Madrasatur Rasyidiyah.<sup>6</sup>

Idham tidak hanya belajar secara formal di madrasah. Setiap sore dia mengikuti pengajian agama di rumah sejumlah tuan guru yang biasa disebut mu'allim. Aktivitas ini telah dilakukannya sejak ia masih duduk di *Vervolgschool*. Terdapat sejumlah ulama (mu'allim) tempat ia belajar di Amuntai, di antaranya adalah Mu'allim Muslim, Mu'allim Imran, Mu'allim Ahmad Paliwara, Mu'allim Ahmad Mansur Karias, Tuan Guru Arsyad Chatib Tangga Ulin, Tuan Guru Abdul Hamid Paliwara (Haji Tarus), Tuan Guru Muhammad Chalid Tangga Ulin. Pengajian yang paling lama diikuti olehnya adalah pengajian Tuan Guru Ahmad Paliwara, Tuan Guru Ahmad Mansur dan Tuan Guru Chalid Tangga Ulin. Idham juga pernah belajar kepada Tuan Guru Abdurrahman

---

<sup>5</sup> Muhajir, *Idham Chalid*, h. 21.

<sup>6</sup> Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 64-65.

Siddiq (alumnus al-Azhar) dalam waktu singkat (hanya beberapa bulan).<sup>7</sup>

Pada malam hari, Idham kembali melaksanakan amaliyah yang menjadi jadwal wajib yang diterapkan ayahnya kepadanya. Setiap malam, antara Magrib dan Isya ia harus membaca Alquran. Setiap malam Jumat setelah membaca Alquran ditambah membaca Burdah. Malam Senin membaca Maulid Diba'i dan Maulud Azab. Amaliyah ini harus dilaksanakan sebagai syarat untuk dapat jatah makan malam.

Pada pertengahan tahun 1937, Idham dikirim ayahnya menuntut ilmu di Nagara. Nagara pada waktu juga merupakan gudang ulama. Ayahnya mengirimnya ke sana dengan alasan untuk mengambil berkah dari ulama besar Nagara dan menambah pengalaman. Namun ia menduga bahwa ia dikirim ke Nagara disebabkan ia terlalu aktif di klub Puadi (Persatuan Untuk Anak-anak Diba'i Islam). Pada bulan Maulud hampir setiap malam Puadi memenuhi undangan merayakan maulid Nabi dan ia tidak pernah absen. Bahkan, di luar bulan Maulid, Puadi dimana ia menjadi anggotanya juga sering mendapat undangan. Akibatnya, aktivitas belajarnya sedikit terganggu, ia sering mengantuk di kelas.

Di Nagara Idham tinggal bersama salah seorang sahabat ayahnya yang bernama Haji Sa'aluddin di Pakan Dalam. Berbagai keperluan hidupnya ditanggung oleh sahabat ayahnya ini. Selama di Nagara, ia mempelajari sejumlah kitab kuning dengan Tuan Guru Zubair dan Tuan Guru Mathahir di Pakan Dalam. Sebagian kitab yang dipelajarinya di Nagara adalah kitab yang pernah dipelajarinya di beberapa pengajian agama di Amuntai. Adapula pengajian yang hanya meneruskan kitab yang belum selesai dipelajarinya di Amuntai. Ia juga memperdalam kemampuannya membaca Alquran kepada Tuan Guru Yusuf yang terkenal sebagai salah satu qari papan atas di Kalimantan Selatan pada waktu itu. Tidak ketinggalan ia juga

---

<sup>7</sup> Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 64.

ikut grup kasidah dan syi'ir lagu padang pasir sebagaimana yang dulu dilakukannya di Amuntai. Hanya saja di Nagara undangan untuk tampil tidak banyak sehingga tidak mengganggu kegiatan belajarnya.

Di Nagara Idham mulai tertarik dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Di sini ia mengenal pimpinan Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan yang bernama Sayyid Abu Bakar al-Idrus dan KH. Thohir Bakri tokoh besar Anshor di Nagara. Ia kemudian menjadi anggota Anshor Nahdlatul Ulama. Hanya saja, ia tidak lama berada di Nagara. Setelah delapan bulan belajar, ia dipanggil pulang oleh sang ayah dan masuk kembali ke Madrasatur Rasyidiyah, duduk di kelas V.

Pada tahun 1938, Idham sempat duduk di kelas VI namun tidak lama, hanya tiga bulan. Pada tahun itu, informasi mengenai Pondok Modern Gontor sampai kepadanya dan ayahnya. Setelah mendengar penjelasan dari salah satu alumni KMI Gontor yang bernama H. Arsyad Kelua, sang ayah tertarik dengan pola pendidikan Gontor yang menanamkan kedisiplinan. Apalagi Gontor juga menyajikan pendidikan pengetahuan umum, bahasa (Arab dan Inggris) dan kursus pidato di samping pendidikan agama. Padahal, pada awalnya ayahnya ingin mengirim Idham ke Makkah untuk belajar agama di sana. Tetapi pecahnya perang Eropa yang dikhawatirkan akan melebar ke mana-mana dan berlangsung lama membuat ayahnya mengurungkan niatnya itu. Adanya Gontor menjadi alternatif dan pilihan pengganti.<sup>8</sup>

Pada akhir tahun itu juga Idham berangkat ke Gontor bersama enam orang temannya, Abdul Muthalib Mohyiddin (w. 1974), Djafri, Djafar Sabran, Nafiah Hasan Basri, M. Noeh, dan Masdan. Di Pondok Modern Gontor, ia, Abdul Muthalib dan Haji Djafri ditempatkan di kelas I *Kweek School* Islam (*Onderbouw*) atau lebih dikenal dengan nama KMI (Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyyah) yang setingkat SLTP. Mereka tidak ditempatkan di *Voor Klas A* dan *Voor Klas B* karena mereka dianggap telah memiliki pengetahuan

---

<sup>8</sup> Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 70-71.

awal yang baik karena pernah belajar di al-Madrasatur Rasyidiyah. Tidak ada kesulitan yang berarti baginya mengikuti pelajaran di Gontor karena ia sudah memiliki bekal pengetahuan yang cukup ketika ia belajar di Amuntai dan Nagara. Di sini ia mendapat pengetahuan baru seperti insya`, imla`, dan muthala'ah dalam bahasa Arab dan *handasah* ('*amaliyah wa nazariyah*), tarikh, al-tabi'i, al-jabar dan lainnya dalam ilmu umum. Tentu saja tidak kalah pentingnya adalah bahasa Inggris yang jarang sekali dipelajari di madrasah dan pesantren lainnya pada waktu itu.

Setelah setahun mengikuti pendidikan di kelas I KMI *Onderbouw*, tahun 1939, Idham bersama dengan delapan rekannya yang lain langsung dilompatkan dari kelas I ke kelas III *Onderbouw* karena memiliki nilai yang baik. Pada tahun 1940 ia telah menyelesaikan tingkat *Onderbouw* dan kemudian melanjutkan ke tingkat *Bovenbouw* (setingkat SLTA). Pada tingkat ini ia menerima mata pelajaran baru di samping peningkatan mata pelajaran yang sudah diterimanya di *Onderbouw* seperti Qawa'id al-Lughah, Nazariyah fi al-Insya`dan Balaghah. Mata pelajaran baru itu di antaranya Adab al-Lughah, Tabaqat al-Umam, Ilmu Mantiq, falsafah, Handasah Nazamiyah, Tariq al-Tarbiyah dan ilm al-Nafs. Pada tingkat ini bahasa yang dipelajari selain bahasa Arab meliputi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda. Idham sendiri tidak asing dengan bahasa Belanda karena bahasa ini telah dipelajarinya sejak ia belajar di Pagatan dan Amuntai melalui kursus.

Pada tahun terakhir (1942) ia dan murid-murid *Bovenbouw* lainnya mengikuti praktik mengajar di waktu sore hari. Mereka mengajar para pelajar di kelas yang lebih rendah. Ia bersama teman-temannya juga harus menjadi imam dan khatib secara bergiliran sebagai bentuk latihan agar mereka kelak dapat menjadi pemimpin agama di masyarakat.

Aktivitas ekstra yang diikuti oleh seluruh santri Gontor termasuk Idham pada waktu itu adalah latihan pidato tiga bahasa (Indonesia, Arab dan Inggris), latihan kepanduan Bintang Islam, latihan berorganisasi dalam wadah organisasi

Raudlatul Muta'allimin dan Corps Indonesische Muballighien, berolahraga, dan studi *tour (rihlah ilmiyyah)* ke beberapa tempat di Jawa.

Guru Idham di Gontor diantaranya adalah KH. Achmad Sahal, KH. Imam Zarkasyi, Ustadz Luqman, Ustadz Sutan Mansyur, Ustadz Arif Lubis, Ustadz Abussamad Arif, Ustadz Mr. Syarif Barmawi, Meneer Mu'in, dan Ustadz Ali Murtadlo. Beberapa guru yang paling banyak memberikan pelajaran kepadanya adalah KH. Imam Zarkasyi, Ustadz Sutan Makmur, Ustadz Mr. Syarif (guru bahasa Inggris), Ustadz Abdussamad Arif, dan Ustadz Meneer Mu'in (guru bahasa Belanda).

Pada tahun 1942 bersamaan dengan pecahnya perang Asia Timur Raya dan masa pendudukan Jepang, Idham dan beberapa orang temannya berhasil lulus di *Kweekschool* dengan hasil ujian yang memuaskan (rata-rata delapan). Meski sudah tamat, ia tidak langsung keluar dari Pondok Modern Gontor. Ia ingin menambah pengalaman mengajar di bawah pengawasan guru-guru mereka. Ia ditugaskan menjadi guru penuh (*full time job*) untuk mengajar beberapa mata pelajaran di *Onderbouw* dan *Bovenbouw*. Di sela-sela aktivitas mengajarnya, ia menyempatkan diri belajar bahasa Jepang dengan seorang guru dari luar Gontor dan belajar secara otodidak melalui buku pelajaran bahasa Nippon karanagn W.I.S. Purwadarminta.<sup>9</sup>

Minat Idham untuk belajar bahasa Jepang rupanya mendapat perhatian KH. Imam Zarkasyi. Atas bantuannya, idham mendapat rekomendasi melalui perantara pejabat Nippon yang bernama T. Hiruta di *Syumubu* yang memungkinkannya mengikuti pelajaran bahasa Jepang di Djakarta *Nippongo Gakko* bagian *Honka* di Jakarta.

Di bagian *Honka* (tingkat awal), ia belajar bahasa Jepang di bawah bimbingan Tsutsumu Hideshima Sensei, guru kelas sekaligus kepala sekolah. Pada sore hari ia juga mengikuti kursus bahasa Jepang pada Kursus Ilmu Dagang

---

<sup>9</sup> Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 94-96.

Brawidjaja di Kwitang. Pada kursus ini ia belajar kepada WJS. Poerwadarminta dan Abu Bakar. Empat bulan kemudian, ia lulus dan mendapat sertifikat *Honka* dengan hasil yang sangat baik.

Hideshima, gurunya, ingin agar ia langsung melompat ke bagian *Kotoka* (tingkat akhir) daripada meneruskan ke bagian *Chutoka* (tingkat kedua). Hideshima bersedia mengajarnya secara privat di rumah pada waktu sore semua diktat yang dipelajari di bagian *Chutoka*. Selama satu minggu sejak dari sore sampai malam, ia belajar bahasa Nippon dari guru Jepang itu dan dapat menyelesaikannya dengan baik karena apa yang dipelajarinya sebagiannya telah dipelajarinya pada Kursus WJS. Poerwadarminta. Sebenarnya Idham dapat langsung belajar di *Kotoka* saja, namun ia meminta untuk belajar di *Chutoko* dan *Kotoka* sekaligus. Caranya, ia belajar di *Chutoka* pagi hari dan *Kotoka* sore hari. Ia berhasil menyelesaikan kedua tingkatan itu selama enam bulan dengan hasil terbaik, ia ranking satu pada kedua tingkat itu. Atas prestasinya ini, ia diberi kehormatan untuk menyampaikan pidato dalam bahasa Nippon atas nama pelajar ketika upacara penyerahan ijazah. Ia juga dianggap layak untuk mengajar bahasa Nippon di sekolah menengah dan menjadi juru bahasa kelas dua.<sup>10</sup>

Selama di *Nippongo Gakko*, selain mendapat pelajaran bahasa dan menyanyi lagu-lagu Nippon (*kyoren*) atau kadang-kadang diganti dengan kerjabakti (*kinzohosi*), ia dan murid lainnya juga mendapat pengalaman menjadi barisan pelajar (*Gakuto Tai*). Setiap hari mereka berjalan berbaris untuk berlatih dan menyandang bedil kayu. Segala macam *Taiso* (gimnastik ala Nippon) yang berat diikuti olehnya sehingga tubuhnya makin berotot dan kulitnya agak gelap terbakar matahari. Ia juga ikut kursus mengetik pada Kurida dan belajar menulis dasar-dasar huruf kanji pada Hideshima. Bahkan ia sempat mengajar private bahasa Indonesia pada orang Jepang.

---

<sup>10</sup> Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 96-98 dan 102,

Di *Nippongo Gokka*, ia mendapat kesempatan berharga bertemu dengan sejumlah kiai NU yang mengikuti pelatihan bahasa Jepang yang bertempat di asrama yang ditempatinya. Hubungannya semakin akrab dengan kiai NU itu ketika mereka tahu bahwa ia adalah anggota Anshor NU dan murid dari KH. Imam Zarkasyi. Para kiai itu sering datang ke kamarnya untuk meminta bantuannya untuk membaca tulisan *Katakana*. Atas bantuannya para kyai itu lulus dengan baik.<sup>11</sup>

Selama di Jakarta Idham memiliki kesempatan untuk mengenal tokoh-tokoh bangsa. Di sini ia dapat melihat langsung Soekarno dan Hatta, KH. Hasyim Asy'ari, Abi Koesno Tjokrosjojoso, KH. Mas Mansyur. Ki Hajar Dewantara, Mr. Sartono, Mr. Syamsuddin, dan alim ulama dari berbagai daerah. Libur sekolah ia manfaatkan untuk mendengarkan ceramah pemimpin-pemimpin terkemuka itu. Selama di Jakarta ia bergaul dengan orang-orang Taman Siswa dan Jam'iyatul Khair. Pergaulan ini memperluas pergaulan dan pengalamannya.

Di Jakarta, ia dapat melihat dan merasakan langsung penderitaan rakyat akibat pendudukan Jepang. Banyak rakyat yang direkrut secara paksa untuk bekerja sebagai *Romusha*. Sebagian besar makanan utama rakyat diambil paksa atau dibeli dengan harga yang murah oleh Jepang. Banyak diantara mereka yang harus makan gaplek-tiwul, jagung, sagu dan lainnya ketika beras yang mereka simpan tidak cukup lagi. Rakyat yang badannya kurus dan kurang sehat dan kurang gizi itu dilatih *taiso* setiap pagi. Ia bersyukur dirinya tetap sehat karena tetap mendapat kiriman uang dari ayahnya dan mendapat honor dari mengajar bahasa Indonesia kepada orang-orang Nippon.

Setelah hampir satu tahun di Jakarta dan berhasil menyelesaikan pelajaran bahasa Jepang, Idham kembali ke Pondok Modern Gontor untuk mengajar kembali. Sebenarnya, ia ditawari oleh Jepang untuk bekerja di

---

<sup>11</sup> Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 100-101.

*Syumubu* namun ia menolaknya dengan hormat. Ia merasa berkewajiban untuk kembali ke Pondok Gontor membantu KH. Imam Zarkasyi yang telah mendidiknya dan menyebabkan ia dapat ke Jakarta.

Tahun 1944, ia resmi mengajar kembali di Gontor. Ia mengajar ilmu agama, bahasa, dan ilmu umum termasuk tentu saja bahasa Nippon. Ia kemudian ditugasi sebagai Ketua Majelis Pengajaran. Pada saat mengajar itu, kehidupan para santri cukup memprihatinkan karena tersendatnya kiriman uang orangtua mereka, bahkan ada yang tidak mendapat kiriman sama sekali. Kiriman orang tua Idham sendiri tersendat-sendat. Namun pimpinan pondok selalu membesarkan hati mereka dan menjamin hidup mereka selama hidup di pondok.<sup>12</sup>

Baru lima bulan mengajar di Gontor, Idham dikejutkan dengan datangnya telegram yang memberitahukan bahwa ayahnya, Muhammad Chalid, sakit keras dan ia diminta untuk pulang. Ia kemudian meminta pendapat Kiai Sahal mengenai telegram itu. Sang kiai memahami perasaannya dan mengizinkannya untuk pulang. Akhirnya, ia memutuskan untuk pulang. Namun ia tidak dapat sampai di Amuntai dalam waktu cepat. Suasana perang membuat pelayaran dari Surabaya ke Kalimantan dengan menggunakan kapal laut, apalagi menggunakan kapal milik Jepang, berisiko tinggi. Salah-salah, kapal yang ditumpanginya mendapat serangan torpedo dari kapal selam sekutu. Setelah sekitar dua bulan tertahan di Tanjung Perak Surabaya, barulah ia dapat berangkat. Meski diliputi ketegangan dan kecemasan, kapal yang ditumpanginya berhasil tiba di Banjarmasin dengan selamat.<sup>13</sup>

Idham tertahan selama seminggu di Banjarmasin. Dalam waktu singkat ia dapat menyaksikan dan mendengar bagaimana penderitaan rakyat dalam pendudukan Jepang. Banyak orang yang jatuh miskin karena barang dagangan

---

<sup>12</sup> Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 108-110.

<sup>13</sup> Lihat cerita perjalanan pulang Idham ke Banjarmasin, pada Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 113-117.

mereka seperti emas dan padi dibeli secara murah oleh Jepang. Sejumlah orang yang tidak menaati peraturan Jepang ditangkap dan disiksa. ia juga mendapat kabar bahwa Madrasatur Rasyidiyah dijadikan gudang padi oleh Nippon. Untuk keselamatannya, ia diminta oleh kerabatnya untuk berhati-hati dalam berbicara.

Setelah seminggu di Banjarmasin, Idham berangkat ke Amuntai menggunakan kapal gandengan. Sejumlah penumpang kapal sudah mengetahui kedatangannya dan berita kemampuannya berbahasa Jepang. Mereka tahu dari surat kabar *Borneo Simbun* Hulu Sungai. Ia sendiri terkejut kedatangannya dimuat dalam surat kabar.

Ketika tiba di Amuntai, kedatangannya disambut keluarga dengan suka cita terutama oleh ayah dan ibunya dan saudaranya. Kalangan kerabat berdatangan hingga memenuhi rumahnya. Upacara syukuran pun diadakan untuk menyambut kedatangannya. Salah satu tamu yang datang menasihatinya untuk tidak kembali ke Jawa. Sang tamu menginformasikan bahwa laut Jawa tidak aman karena banyak kapal selam Amerika berkeliaran. Kapal yang ditumpangnya dari Surabaya diberitakan telah karam dihantam torpedo sekutu dalam perjalanan pulang ke Surabaya.

Di Amuntai, Idham mulai berkenalan dengan banyak orang, mulai dari kalangan ulama hingga pejabat lokal dan pejabat Nippon. Ia menghadap *Guncho* Gusti M. Said, tokoh masyarakat yang disegani oleh masyarakat dan Nippon. Sang *Guncho* mengharap agar ia menetap di Amuntai dan membantu menghidupkan kembali Madrasatur Rasyidiyah yang hampir tutup. Gusti Said kemudian memperkenalkannya kepada sejumlah pejabat Nippon di Amuntai beberapa hari kemudian. Pejabat Nippon itu memintanya tinggal di Amuntai untuk mengajar bahasa Nippon. ia juga diminta untuk menerjemahkan tulisan pendek berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris dan Nippon. Ia menyelesaikan permintaan ini dua hari kemudian.

### **C. Mengabdikan dan Berjuang di *Banua* (1945-1949)**

Pada akhir tahun 1944 diadakan pertemuan di rumah Idham yang dihadiri oleh sejumlah ulama, tokoh masyarakat, dan para dermawan yang terlibat dalam pengelolaan Madrasatur Rasyidiyah. Pertemuan yang dipimpin oleh Juhri Sulaiman menghasilkan kesepakatan untuk mengangkat Idham menjadi pimpinan Madrasatur Rasyidiyah dengan mandat penuh dibantu oleh beberapa teman-temannya, Abdul Muthalib Mohyiddin, Ja'far Sabran, Jafri, dan Zamzam. Terpilih sebagai penasihat adalah Juhri Sulaiman, Tuan Qadi Burhan dan Tuan Guru Ahmad Mansur. Nama Madrasatur Rasyidiyah disepakati diubah menjadi Ma'had Rasyidiyah. Versi lain menyebutkan nama Madrasatur Rasyidiyah diubah menjadi Normal Islam.<sup>14</sup>

Idham dan kawan-kawannya mulai menyusun sistem pendidikan Ma'had Rasyidiyah. Mereka memadukan dua pola pendidikan yang pernah mereka terima yaitu pola Gontor dan pola Arabische School. Pola ini dianggap pas karena para pengajar dan pengurusnya terdiri dari lulusan pendidikan kedua pola ini. Masyarakat Amuntai dan sekitarnya segera menyambut aktifnya kembali madrasah ini dengan antusias. Belum sampai tiga bulan, santri yang datang untuk belajar di sini telah mencapai 250 orang lebih yang berasal dari Amuntai, Alabio, Nagara, Tanjung, dan Kelua.

---

<sup>14</sup> Menurut buku 50 tahun Perguruan Islam Rasyidiyah Khalidiyah, ketika Idham memangku kepala sekolah perguruan ini, nama "Ma'had Rasyidiyah" ia mengganti nama perguruan ini dengan nama baru, Normal Islam Amuntai. Nama itu diambil karena akan menyesuaikan perguruan ini dengan sistem pengajaran dan pendidikan yang telah ia ikuti di Pondok Modern Gontor Ponorogo sampai pada bagian *Bovenbouw*, dimana sebagian guru-guru yang mengajar di sana berasal dari Normal Islam Padang yang sudah terkenal waktu itu. Abdulmuthalib Mohyiddin, *et. al.*, *50 Tahun Perguruan Islam Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Amuntai Kalimantan Selatan 1922-1972*, (Yayasan Pemeliharaan Perguruan Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan, 1972), h. 34.

Ada juga beberapa pelajar yang berasal dari Banjarmasin, Kandangan, Barabai, Kuala Kapuas, Buntok dan Sampit.<sup>15</sup>

Dalam waktu singkat, Ma'had Rasyidiyah atau Normal Islam tidak hanya bangkit kembali tetapi mengalami kemajuan. Melihat kemajuan ma'had ini, sejumlah madrasah di Amuntai, Alabio, Tanjung dan Paringin ingin bergabung dengan Ma'had Rasyidiyah. Melalui musyawarah antarmadrasah dan dihadiri sejumlah ulama, dibentuklah satu organisasi untuk mengkoordinir madrasah-madrasah yang ada yang bernama IMI (Ittihadul Ma'ahid Islamiyyah). Pimpinan IMI terdiri dari Majelis Syura yang dipimpin oleh Tuan Guru Juhri Sulaiman dan Majelis Luhur yang dipimpin oleh Idham Chalid. IMI yang dipimpin oleh Idham ini kemudian maju pesat. IMI berhasil mendirikan sejumlah madrasah di beberapa tempat. Kemajuan IMI ini membuat beberapa madrasah di Banjarmasin dan Kuala Kapuas ikut bergabung dengan IMI.<sup>16</sup>

Sebagai pimpinan Ma'had Rasyidiyah dan IMI, guru agama, dan tokoh pemuda terpelajar yang diandalkan oleh ulama dan pejabat lokal, Idham tidak bisa menghindar dari berbagai undangan untuk berdakwah dan menyampaikan pengajian agama. Pada hari-hari libur sekolah, ia jarang berada di rumah. Ia harus berkeliling menyampaikan ceramah ke berbagai tempat. Tidak jarang tempat yang harus didatangi adalah tempat yang jauh berjarak 30-40 km dan harus ditempuh dengan bersepeda. Dalam beberapa kesempatan ia harus bermalam dua hingga tiga malam dan terkadang pula harus pulang malam dan tiba pada waktu subuh. Usianya yang masih muda dan tubuhnya yang masih kuat serta

---

<sup>15</sup> Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 131-132; untuk penjelasan lebih detail mengenai IMI dapat dilihat pada: Mohyiddin, *et.al.*, *50 Tahun*, h. 114-125.

<sup>16</sup> Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 136-137; untuk penjelasan lebih detail mengenai IMI dapat dilihat pada: Mohyiddin, *et.al.*, *50 Tahun*, h. 114-125; lihat pula tentang IMI pada Muhajir, *Idham Chalid*, h. 29-30.

semangat yang tinggi membuatnya tidak mengenal lelah melakukan tugas semacam itu.<sup>17</sup>

Ketika berpidato, Idham menguasai gaya orator. Ia pernah menyampaikan cerita pewayangan layaknya seorang dalang pewayangan. Saat berpidato, ia sering mengisahkan tentang tokoh-tokoh pahlawan dunia, seperti Umar ibn Khattab, Chalid ibn Walid, Napoleon Bonaparte, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi dan lain sehingga menimbulkan kekaguman massa.<sup>18</sup>

Sebagai seorang pimpinan Ma'had Rasyidiyah, ayah dan keluarga Idham menilai tidak seharusnya ia masih lajang. Karena itu mereka menikahkannya dengan Halimah anak pamannya yang ketika itu berusia 17 tahun sementara ia berusia 22 tahun. Ia dan istrinya kemudian tinggal berdua di sebuah rumah yang sangat sederhana dan minim fasilitas rumah tangga. Ia sendiri karena kesibukannya yang padat sering meninggalkan istrinya untuk melaksanakan tugasnya berdakwah dan memimpin pengajian agama.

Di tengah kesibukannya, Idham tetap aktif mengikuti perkembangan situasi pendudukan Jepang dan perang yang berkecamuk. Ia bersama dengan beberapa rekannya secara sembunyi-sembunyi berdiskusi mengenai masa depan bangsa dan nasib tanah air ke depan bila kekalahan Nippon dalam perang menjadi kenyataan. Idham sendiri sangat sulit untuk mendapat informasi mengenai perkembangan perang yang tengah berlangsung karena akses informasi yang sangat terbatas dan sensor yang ketat dari Nippon. Ia dan rakyat Amuntai secara umum sangat tergantung pada informasi dari Banjarmasin mengenai perkembangan dunia luar.

Akhirnya, berita tentang kekalahan Jepang mulai terdengar termasuk janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Idham juga mulai

---

<sup>17</sup> Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 137.

<sup>18</sup> Yusni Anggraini Antemas, "Kawanku Idham Chalid Kukenang dan Kulihat dari Sisi yang Lain" dalam Zainal Abidin A. Muthalib dan Amir Husaini Zamzam (eds.), *KH. DR. Idham Chalid dalam Pandangan Umat*, (Amuntai: Syndicate 23, 2010), h. 18-19.

mendapat informasi mengenai gerakan dan aktivitas pemimpin bangsa di Jawa terutama mengenai Soekarno-Hatta. Tidak mau ketinggalan, ia juga ikut melakukan gerakan di tingkat lokal. Ia terlibat dalam organisasi yang bernama *Kenkoku Doshikai* (Badan Kebaktian Rakyat) cabang Amuntai. Organisasi yang sama telah berdiri di Banjarmasin dan Kandangan. Organisasi ini berusaha menghimpun kekuatan dan menggalang persatuan sambil menunggu pengarahannya dari para pemimpin bangsa di Jawa, seperti Soekarno dan Hatta. Organisasi ini juga dapat menjadi tempat berkumpul untuk bertukar informasi dan sebagainya.

Pada awal tahun 1945, berita mengenai kekalahan Jepang dalam berbagai medan pertempuran tidak bisa lagi ditutupi oleh Jepang meski disampaikan secara beranting dari mulut ke mulut. Bahkan berita mengenai adanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta telah diketahui secara merata oleh rakyat Amuntai. Akhirnya, berita mengenai persiapan kemerdekaan yang dilakukan oleh pemimpin bangsa itu dimuat juga secara perlahan dalam surat kabar *Borneo Shinbun* meski dalam pemberitaan pendek.

Pada bulan Juni, Idham dan rakyat Amuntai mendengar kedatangan Bung Hatta ke Banjarmasin selaku wakil ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sulitnya akses informasi membuatnya tidak banyak tahu informasi apa yang disampaikan oleh Hatta. Yang jelas, ia mendapat informasi bahwa kemerdekaan Indonesia sudah berada di depan pintu dan Kalimantan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Gejala itu pun semakin jelas ketika pada bulan Agustus 1945 satu persatu orang Nippon meninggalkan Amuntai hingga penanggung jawab wilayah *Bunken* Amuntai diserahkan kepada Gt. M. Said. Ini berarti Amuntai dipimpin oleh bangsa sendiri, tidak lagi oleh Nippon. Sekali lagi, karena sulitnya akses informasi, ia dan rakyat Amuntai terlambat mengetahui diumumkannya proklamasi 17 Agustus 1945. Baru pada bulan September 1945 sejumlah tokoh pergerakan *Kenkoku Doshikai* datang ke Amuntai menjelaskan tentang proklamasi yang telah

ditandatangani dan dibacakan oleh Soekarno. Organisasi *Kenkoku Doshikai* dimana ia juga terlibat di dalamnya kemudian diubah namanya menjadi Persatuan Rakyat Indonesia (PRI) secara resmi pada 16 Agustus 1945.

Ia kemudian terlibat dalam Panitia Rakyat RI wilayah Amuntai yang diketuai oleh Tuan Guru Juhri Sulaiman selaku ketua dan Idham sendiri sebagai sekretaris. Panitia ini bekerja untuk membuat satu resolusi atas nama rakyat Amuntai yang memberikan pengakuan kepada Gt. M. Said sebagai Kepala Pemerintahan Republik Indonesia untuk Daerah Amuntai. Resolusi ini bersamaan dengan hadirnya kembali para tentara Belanda (NICA) ke Amuntai.<sup>19</sup>

Kehadiran kembali tentara Belanda menimbulkan keresahan di kalangan pemuda dan tokoh-tokoh Amuntai. Mereka sudah merdeka tetapi mengapa serdadu Belanda yang bersenjata berkeliaran sementara mereka tidak memiliki senjata sepucuk pun untuk membela diri. Walaupun ada senjata yang ada hanyalah senjata rusak peninggalan Jepang yang tidak bisa digunakan. PRI yang menjadi penghubung antara Amuntai dan Banjarmasin tidak bisa berbuat banyak. Bahkan, PRI kemudian tidak terdengar lagi beritanya, bubar tanpa diketahui. Idham mulai kehilangan kontak dari Banjarmasin, apalagi dengan bubarnya PRI ia tidak lagi diundang ke Banjarmasin.

Dalam situasi tidak menentu itu Idham mendapat musibah. Pada bulan Oktober 1945, istrinya, Halimah meninggal dunia ketika melahirkan. Ia *shock* berat dan jiwanya labil. Ditinggal istri yang rela hidup prihatin tanpa banyak menuntut dan sering ditinggal ketika ia menunaikan tugasnya membuatnya sangat bersedih. Hampir satu bulan ia bersedih. Ia sering merenung di makam istrinya dan meminta salah seorang temannya untuk membuat puisi yang kemudian ia baca di depan makam istrinya. Untungnya, jiwanya kemudian kembali kuat setelah 40 hari bersama murid-

---

<sup>19</sup> Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 138-142.

muridnya terus-menerus membaca Alquran di sekitar makam istrinya.

Idham tidak lama sendiri. Beberapa bulan kemudian di akhir tahun 1945, ia menikah kembali dengan Hj. Masturah binti Abdul Karim. Sebenarnya, ia enggan menikah kembali dalam waktu cepat. Namun orangtua dan sahabat-sahabatnya yang bersimpati kepadanya mendesaknya agar segera menikah.<sup>20</sup>

Idham belum bisa banyak berbuat untuk melakukan gerakan di tengah ketidakpastian. Ulama dan masyarakat mengharapkannya untuk tetap aktif di bidang pendidikan, berkonsentrasi mengajar putra putri mereka. Karena itu, untuk sementara ia berkonsentrasi mengajarsambil menggelorakan semangat perjuangan di kalangan murid-muridnya. Murid-muridnya diajarkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan lainnya. Dalam pelajaran Wathaniyah diajarkan UUD RI dan syarat-syarat suatu negara dan kewajiban warga negara. Pada sore hari ia mengajar kependuan di KRI (Kependuan Rakyat Indonesia) cabang Amuntai. Pada malam hari ia mengajar teknik ketentaraan dan teknik perang sekadar apa yang diketahuinya dari pengalamannya mengikuti kependuan dan *Kaguto Tai Kyoren* di Jakarta ditambah dengan buku-buku kependuan berbahasa Nippon yang dimilikinya. Latihan yang dilakukan dinamakan kependuan sebagai kamufase agar tidak ditindak oleh NICA. Meski demikian, tentu saja aktivitasnya ini dicurigai dan dimata-matai oleh NICA..<sup>21</sup>

Banyaknya mata-mata NICA membuat segala tindakan Idham dan teman-teman seperjuangannya tidak leluasa. Idham sendiri nyaris ditangkap akibat laporan mata-mata ini. Ketika ia berkumpul di rumah seorang pejuang berpengaruh yang bernama Bustami Jantra, salah seorang pelajar datang kepada mereka menyampaikan pesan agar mereka tidak pulang ke rumah karena NICA sedang mencari

---

<sup>20</sup> Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 144-145; lihat pula, Yusni, "Kawanku Idham" dalam Muthalib dan Zamzam (eds), *KH. DR. Idham*, h. 18.

<sup>21</sup> Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 146-148.

mereka. Laporan mata-mata menyebutkan bahwa mereka memiliki hubungan dengan Tuan Guru Muhammad Yasin yang ditembak mati oleh NICA.

Idham dan Tuan Guru Juhri Sulaiman tetap nekad pulang, namun di tengah jalan kawan-kawannya mencegatnya. Mereka kemudian memilih tidak pulang ke rumah tetapi meneruskan perjalanan menuju daerah Kelua menggunakan sepeda. Di sana mereka disembunyikan dan mendapat perlindungan dari pejuang-pejuang Kelua. Setelah beberapa malam mereka berpindah-pindah, utusan dari Amuntai datang membawa berita bahwa mereka dapat kembali ke Amuntai atas jaminan pihak kepolisian dan beberapa pejabat sipil di Amuntai. Rupanya mereka berhasil meyakinkan NICA bahwa gerakan Idham dan kawan-kawannya tidak membahayakan kekuasaan NICA. Sebaliknya, jika mereka ditangkap justru akan menimbulkan kegoncangan di masyarakat.<sup>22</sup>

Rupanya NICA mencurigai aktivitas kepanduan dan latihan yang dipimpin oleh Idham. Ia dan beberapa orang yang dicurigai dipanggil dan diberi peringatan oleh HBP (*Hoofd van Peratslyk Bestung*). Mereka diingatkan untuk berhati-hati karena banyak mata-mata Belanda berkeliaran. Akhirnya, sejumlah latihan yang telah dilakukan dihentikan karena mata-mata Belanda selalu mengawasi mereka. Meski latihan ditiadakan semangat perlawanan sudah menjalar ke pelosok desa. Perlawanan fisik hanya menunggu momen yang tepat. Kondisi ini berlangsung sampai tahun 1946.

Pada tahun 1946, Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) dan Sermi (Serikat Muslimin Indonesia) berdiri di Banjarmasin. Dalam waktu singkat cabang kedua organisasi ini berdiri di berbagai daerah. Idham bergabung dengan Sermi pada tahun itu juga. Ia menduduki posisi sebagai Komisaris Daerah Hulu Sungai dibantu oleh Abdurrahman Ismail. Ketika SKI dan Sermi menjalin kerjasama dengan membentuk Badan Koordinasi, ia menjadi pemimpin badan

---

<sup>22</sup> Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 150-152.

koordinasi wilayah Amuntai mewakili Sermi bersama dengan Gusti Anwar dari SKI. Untuk perluasan jaringan Sermi, ia bersama anggota Sermi lainnya aktif mendirikan cabang-cabang Sermi di wilayah Hulu Sungai Utara. Sekitar bulan Pebruari 1947 Sermi sudah menyebar di seluruh wilayah hulu sungai.<sup>23</sup>

Pada awal tahun 1947, Idham mendapat informasi dari sahabatnya Zafri Zamzam (tokoh SKI) mengenai Hasan Basry (alumnus Pesantren Gontor) yang telah diangkat pemerintah RI menjadi Komandan ALRI Divisi IV untuk wilayah Kalimantan dan pada saat itu sedang aktif membentuk ALRI Divisi IV di sejumlah daerah. Idham dan Zamzam sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ALRI untuk menyatukan perjuangan politik dan militer. Perjuangan politik dilakukan Idham dan tokoh-tokoh Sermi lainnya dan perjuangan bersenjata dilakukan oleh ALRI Divisi IV. Inilah awal mula Idham menjalin hubungan dengan ALRI Divisi IV yang membuatnya ditangkap Belanda dikemudian hari.<sup>24</sup>

Pada tahun itu juga ia bergabung dengan Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan (SOPIK), sebuah organisasi bawah tanah yang melakukan perang gerilya melawan Belanda pimpinan Hasan Basry. Organisasi ini kemudian dilebur menjadi ALRI Divisi IV dan Idham mendapat posisi sebagai staf penasihat umum. Pada tahun 1948, ia bersama Hassan Basry dan anggota ALRI Divisi IV lainnya mendirikan Fonds Nasional Indonesia Kalimantan di Banjarmasin.<sup>25</sup>

Keterlibatan Idham dalam aktivitas politik melalui Sermi dan keterlibatannya di ALRI memaksanya untuk harus mengurangi jam mengajarnya. Ia kemudian memilih untuk berkonsentrasi memimpin IMI dan aktif di Sermi. Ia hanya mengajar kelas tinggi Normal Islam saja. Kawan-kawannya yang lain diminta untuk tetap berkonsentrasi di Ma'had Rasyidiyah dan IMI agar perguruan tidak terbenkakai. Ia giat

---

<sup>23</sup> Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 152-154.

<sup>24</sup> Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 154-155

<sup>25</sup> Muhajir, *Idham Chalid*, h. 35-37

melakukan dakwah dan tabligh ‘politik’ melalui Sermi. Karena aktivitasnya di Sermi, ia sering mendapat teguran dari kaki tangan NICA. Namun teguran ini tidak menghentikan aktivitas politiknya. Bahkan, Ia tidak peduli dengan banyaknya mata-mata yang menyusup di dalam berbagai acara dan kegiatannya.

Tahun 1947-1948, Idham bersama dengan anggota SKI dan Sermi yang didukung kuat oleh kelompok gerilyawan giat melakukan gerakan untuk memenangkan kelompok Republikan (kelompok yang pro pada RI) agar menjadi kelompok mayoritas dalam Dewan Daerah Banjar yang dibentuk oleh Belanda. Tujuan Belanda membentuk dewan daerah ini adalah untuk mewujudkan keinginannya agar terbentuk negara federal, yaitu Negara Borneo yang meliputi semua wilayah Kalimantan.

Tahun 1949, dalam pemilihan tingkat lokal, Idham terpilih sebagai salah satu anggota Dewan Daerah Banjar dan duduk di fraksi Republikan. Jumlah fraksi Republikan yang terpilih ternyata berhasil mengungguli jumlah fraksi federal (16:14). Karena itu, ketika sidang membahas tentang pembentukan negara federal, pihak Republikan dan sebagian fraksi federal langsung menolaknya dengan perbandingan suara 21:9 untuk kemenangan fraksi Republikan. Belanda sangat terkejut dan tidak menduga dengan hasil keputusan politik Dewan Daerah Banjar yang menolak terbentuknya negara federal sebagaimana yang mereka harapkan.

Pada awal tahun 1949, aktivitas Idham dan hubungannya dengan ALRI Divisi IV mulai tercium oleh Belanda. Belanda semakin curiga dengan Idham ketika mendapati namanya tercantum dalam dokumen yang berisi susunan lengkap anggota gerilyawan mencantumkan nama mereka yang bergerak di bidang politik. Dalam dokumen itu nama Idham tercantum sebagai penasihat staf umum. Dokumen ini didapat Belanda dari sebuah tas kecil yang tertinggal ketika pasukan Hasan Basry mundur setelah menyerang markas Batalyon Belanda. Idham sendiri sebenarnya sudah mendapat peringatan dari kelompok

gerilyawan sehari sebelumnya. Gerilyawan malah memintanya untuk melarikan diri dan tidak tinggal di tempat. Sayangnya, ia mengabaikan peringatan ini karena tidak menduga bahwa dokumen milik gerilyawan ALRI Divisi IV dimana namanya tercantum sudah ada di tangan Belanda. Sebenarnya, pimpinan ALRI, Hassan Basry, telah menyuruh bawahannya untuk memberitahu Idham bahwa posisinya di ALRI sudah diketahui Belanda. Namun utusan itu terlambat datang. Sulitnya medan dan alat transportasi membuat mereka tiba di tempat setelah beberapa jam Idham ditangkap.<sup>26</sup>

Sebelum ditangkap, pada sore hari Idham berangkat mengajar dan singgah memperbaiki jamnya di pasar. Sambil menunggu jamnya diperbaiki, ia bermain catur di pasar. Pada saat bermain catur itulah ia dikepung dan ditangkap oleh Belanda dan kemudian rumahnya diledah. Sebelum dibawa oleh Belanda, ia sempat menyerahkan karangan pertamanya di bidang ilmu Falak yang berjudul *Bertamasja ke Tjakrawala* kepada istrinya untuk diterbitkan melalui sahabatnya. Selama proses penangkapan ia diperlakukan dengan baik. Perlakuan ini berkaitan dengan pengaruhnya yang luas. Padahal banyak orang yang ditangkap oleh Belanda ditembak di tempat.<sup>27</sup>

Idham ditahan di tangsi polisi di Amuntai dan kemudian dibawa ke Kandang di penjara CPM Belanda. Di sini ia dimasukkan seorang diri ke sel yang semula dijadikan sebagai kurungan orang utan. Jerujinya besar-besar dan atapnya terbuat dari besi tebal. Di sel itu ia hanya memakai celana pendek tanpa baju. Dapat dibayangkan, kondisinya pada saat siang hari, tubuhnya terpanggang dalam sel besi itu. Hampir 40 hari ia berada di sel itu.

Dalam beberapa kesempatan ia diinterogasi Belanda dan disiksa. Ia pernah ditendang oleh beberapa tentara Belanda seperti bola ditendang ke sana kemari. Siksaan ini dikemudian hari membuatnya cacat permanen, tulang

---

<sup>26</sup> Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 159-160 dan 163.

<sup>27</sup> Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 160-162.

punggungnya bengkok dan tidak bisa diluruskan lagi. Ia juga pernah disetrum meski hanya sebentar. Ia juga pernah diteror secara psikis dengan cara diperlihatkan bagaimana para pejuang disiksa dan disetrum di hadapannya. Bahkan ia kemudian diberi minuman zat tertentu yang membuatnya buta sementara dan tidak bisa membedakan siang dan malam. Dalam kondisi buta sementara itu, ia diinterogasi mengenai hubungannya dengan Hassan Basry. Namun ia cukup lihai menghadapi pertanyaan-pertanyaan Belanda. Ia malah berhasil membuat Belanda tidak mampu memaksanya mengakui hubungannya dengan Hassan Basry. Bahkan selama tiga jam dia diperiksa, hanya satu jam dia diinterogasi dan dua jam berikutnya hanya dihabiskan oleh sang interogator untuk menceritakan dirinya sendiri karena Idham berhasil menggiringnya ke arah itu.<sup>28</sup>

Dari interogasi itu, Idham menduga, Belanda menyesal menangkapnya. Tindakan ini menjadi bumerang bagi Belanda karena malah semakin meningkatkan perlawanan rakyat. Murid-muridnya yang marah dengan penangkapannya ikut bergabung dengan pasukan gerilya untuk menyerang Belanda. Bahkan markas Belanda dimana ia ditahan pernah diserang oleh pasukan gerilya. Kalangan politisi yang terlibat dalam Dewan Banjar juga melakukan protes atas penangkapannya.

Pada suatu malam, Idham diancam bahwa ia akan dihabisi besok harinya. Ia berpikir bahwa besok ia akan ditembak mati sebagaimana tahanan lain di sebelah selnya yang telah ditembak lebih dahulu. Merasa hidupnya terancam dan tidak lama lagi, ia kemudian memasrahkan diri. Dalam keadaan tidak melihat ia melakukan salat 41 kali (82 rakaat) dan salat witr tiga rakaat yang ia lakukan selama 3-4 jam. Setelah salat yang panjang itu ia tertidur. Dalam tidurnya itulah ia mendapat 'hiburan' yang menguatkan jiwanya, ia bermimpi bertemu Rasulullah. Dalam mimpinya, ia dibawa oleh sepupunya, Haji Abdul Manan, bertemu Nabi. Ketika

---

<sup>28</sup> Lihat kisah Idham dalam penjara secara lebih detil pada Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 163-166 dan 171-178.

dibawa ke suatu tempat, ia sempat melihat sebuah perguruan yang hanya memiliki satu kelas kosong. Di dalamnya terdapat papan tulis yang terdapat tulisan khat: *Nasrun Minallah wa fathun qarib*. Baginya, ini isyarat bahwa kemenangan akan datang. Kemudian ia dibawa ke tanah lapang yang bersih di sinilah ia bertemu Nabi Muhammad yang memakai selimut batik. Sang Nabi menepuk bahunya dan menyatakan bahwa ia akan selamat. Setelah terbangun dari mimpinya, ia sudah kehilangan rasa takut dan siap mati syahid. Firasatnya ternyata benar, ia tidak ditembak, tetapi hanya dipindah dari tahanan Belanda ke penjara polisi di Kandangan.<sup>29</sup>

Di penjara Kandangan yang dijaga oleh polisi dan sipir pribumi, Idham mendapat perlakuan yang jauh lebih baik daripada di sel tahanan militer Belanda. Ia mendapat makan dan minum yang lebih baik dan mendapat tikar tebal dan bantal. Di sini ia boleh dikunjungi dan mendapat kiriman makanan dari kerabat dan mendapat nasi bungkus dari penjara. Ia diperlakukan lebih istimewa dari tahanan lainnya. Para polisi dan sipir yang menjaganya begitu menghormati dan memperlakukannya dengan baik. Mereka juga memberi masukan bagaimana seharusnya ia menghadapi interogasi Belanda.

Selama di penjara, Idham bergaul dengan sesama tahanan pejuang. Sebagian mereka belajar agama kepadanya. Di sini ia mengajar sesama tahanan ilmu tauhid, fiqih, hadis dan tafsir serta memberikan amalan, wirid dan sebagainya. Selama di penjara, ia menulis beberapa pasal tentang akhlak menggunakan dua buku hijau yang diberikan oleh seorang opsir. Setelah kedua buku itu ditulis penuh, ia menyerahkannya pada opsir ketika akan dipindahkan ke penjara Banjarmasin. Inilah karya tulisnya yang kedua setelah *Bertamasja Ke Tjakrawala*. Sayangnya, karyanya yang ditulis di penjara ini tidak dapat lagi ditemukan, hilang tanpa jejak.

---

<sup>29</sup> Lihat kisah ini secara lebih detil pada Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 178-181.

Setelah satu bulan di penjara Kandangan, Idham dipindahkan ke penjara Banjarmasin. Di sini perlakuan yang buruk kembali dialaminya. Selama dalam perjalanan ia dirantai di badan truk dan dibiarkan kehujanan selama satu jam. Di Banjarmasin, pada hari-hari pertama ia dititipkan di sebuah sel berukuran 36 m persegi yang diisi tahanan sekitar seratus orang. Di kamar yang sesak dan berhimpitan itu ia bersama tahanan lainnya ditempatkan selama beberapa hari. Mereka tidak bisa berwudhu karena tidak ada air, Bahkan untuk kencing mereka harus membuang kencing mereka di tong yang ditempatkan dalam penjara yang sesak itu. Tentu saja baunya sangat mengganggu. Untungnya, lima hari kemudian ia dipindahkan dari penjara yang tidak nyaman itu ke penjara lain di Banjarmasin.

Di penjara yang baru itu Idham bertemu dengan beberapa ulama dan sejumlah teman-teman seperjuangannya yang terlebih dahulu ditangkap termasuk dari pengurus Sermi dan SKI. Di penjara ini ia kembali diinterogasi Belanda. Kali ini ia tetap dapat berkelit mengenai hubungannya dengan ALRI Divisi IV. Apalagi dalam proses pemeriksaan itu, ia dibantu oleh seorang jaksa yang selalu memberikan bantuan kepada pejuang dalam menghadapi interogasi. Jaksa itu bahkan sering membawa makanan untuk diberikan kepada tahanan tanpa sepengetahuan Belanda, termasuk kepada Idham.

Rupanya ada keinginan Belanda untuk memindahkan Idham ke penjara Cipinang di Jakarta. Namun keputusan ini ditentang oleh tokoh-tokoh Dewan Banjar dan Sermi seperti Muhammad Hanafiah dan Hasan Basri. Keinginan ini ternyata tidak dilakukan, Idham tetap ditawan di Banjarmasin bersama sekitar 100 tahanan lainnya.

Selama dalam penjara, ia dan tahanan lainnya dapat mengetahui perkembangan di luar. Mereka mengetahui berita pembebasan Soekarno-Hatta atas tekanan dunia internasional, intervensi Amerika dalam kasus Indonesia, serangan Letkol Soeharto ke Jogjakarta, perundingan KMB dan berita lainnya.

Adanya tekanan dunia internasional dan perlawanan militer dan politik dari bangsa Indonesia membuat Belanda tersudut. Tekanan Belanda terhadap Indonesia makin melemah. Kondisi ini membuat perlakuan terhadap para tahanan mulai membaik. Penjagaan terhadap tahanan Belanda di Banjarmasin tidak lagi seketat sebelumnya. Mereka sudah mulai dijenguk keluarga dan kawan-kawan. Mereka juga mulai mendapatkan makanan yang lebih enak. Hanya saja mereka belum dibebaskan. Dua bulan setelah KMB, Idham dan yang lainnya masih ditahan oleh Belanda. Kebebasannya baru menjadi kenyataan ketika Letkol Soehardjo utusan *Central Joint Board* (CJB) berunding dengan Letkol Hassan Basry (komandan ALRI divisi IV) mengenai pembebasan tahanan. Akhirnya, pada awal November 1949, semua tahanan dibebaskan termasuk Idham. Tahanan yang dibebaskan langsung dijemput oleh Letkol Hassan Basry dan Letkol Soehardjo disertai sambutan rakyat yang meriah.

Setelah keluar penjara, Idham ditugasi oleh Letkol Hassan Basry menjadi Kepala Penerangan Angkatan Daerah di daerah Hulu Sungai. Ketika bertemu ayahnya dengan memakai baju tentara, sang ayah rupanya protes. Ia tidak ingin Idham menjadi tentara, tetapi jadi orang sipil saja. Idham juga kembali membenahi perguruan Normal Islam yang ditinggalkannya selama beberapa bulan di penjara. Cabang-cabang IMI pun kembali diaktifkan. Ia meminta agar jangan semua guru menjadi tentara. Sekitar 10 persen guru dan murid Normal Islam/Ma'had Rasyidiyah menjadi tentara. Posisi Idham sendiri di militer masih belum jelas, setengah militer setengah sipil. Selain itu, ia juga kembali aktif di Dewan Banjar dan Sermi. Ia dan kawan-kawan di fraksi Republikan Dewan Banjar berjuang untuk memasukkan wilayah Kalimantan sebagai bagian dari Republik Indonesia bukan menjadi negara federal sebagaimana keinginan Belanda.

Pada bulan Desember 1949, Idham bersama beberapa rekannya di Sermi (Hasan Basri, Hanafi Gobet, Abdurrahman Ismail, dan Djuhri) diundang mengikuti Kongres Umat Islam

Indonesia di Yogyakarta. Inilah pengalaman pertamanya naik pesawat. Biaya keberangkatannya dibantu oleh Letkol Hassan Basry dan masyarakat. Di kongres ini, ia bertemu dengan tokoh-tokoh Masyumi seperti Muhammad Natsir (w. 1993), Anwar Harjono, dan KH. Wahid Hasjim (w. 1953).

Idham berkeinginan untuk menjadi peninjau dalam kongres Masjumi yang dilaksanakan juga di Yogyakarta tetapi ia bukan anggota Masjumi. Untungnya, ia bertemu dengan A.A. Achsin anggota Masyumi mewakili NU. Dari A.A. Achsin inilah ia mendapat jalan untuk menjadi peninjau di Kongres Masyumi. Ia menjadi peninjau mewakili NU. Di sinilah ia bertemu dengan anggota Masyumi dari tokoh-tokoh NU seperti KH. Abdul Wahid Hasjim (w. 1953), KH. Masjkur (w. 1992), KH. Zainul Arifin (w. 1963), dan KH. Musta'in.

Selain Kongres Umat Islam dan Kongres Masyumi, Idham juga mengikuti sidang KNIP yang dilaksanakan di Yogyakarta juga. Posisinya pada sidang KNIP adalah sebagai peninjau. Di sini ia menyaksikan dengan kagum perdebatan-perdebatan tokoh-tokoh nasional terutama dari kalangan PNI dan Masyumi.

Ketiga pertemuan ini (Kongres Umat Islam Indonesia, Kongres Masyumi dan Sidang KNIP) semakin membuka wawasannya mengenai persoalan-persoalan nasional baik pada aspek politik maupun agama. Pertemuan-pertemuan itu juga mempertemukannya dengan berbagai tokoh bangsa yang bergerak dan berjuang dalam berbagai organisasi sosial keagamaan dan politik. Ia sendiri pada saat itu belum berhasrat untuk masuk ke dunia politik. Sebaliknya, ia malah ingin mengundurkan diri dari dunia politik dan berkonsentrasi mengembangkan perguruan yang telah dipimpinya. Di samping itu, ia juga memiliki keinginan untuk meneruskan studinya ke Mesir. Kalaupun ada keinginan, setidaknya sebagai tokoh daerah, ia merasa bahwa posisi paling pantas diraihinya adalah menjadi kepala urusan agama propinsi atau yang paling tinggi menjadi wakil rakyat di DPRD. Ia juga membayangkan, bisakah Sermi sebagai

gerakan Islam lokal menjadi Masyumi yang bersifat nasional?

Ketika Idham masih berada di Yogyakarta, Dewan Daerah Banjar telah memilih tiga anggota parlemen RIS untuk mewakili daerah itu di Parlemen. Ketiga orang yang dipilih berasal dari kubu federal, yaitu mereka yang pro pembentukan negara federal. Keputusan ini rupanya mendapat penentangan dari rakyat, kubu Republikan dan tentara. Ketika Idham pulang ke Amuntai, gerakan protes sudah merebak luas dan datang bertubi-tubi. Demonstrasi dan gerakan rakyat hampir saja terjadi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan para pimpinan Daerah Otonom Banjar mengadakan rapat yang dipelopori oleh Letkol Hassan Basry dan Mr. Moh. Hanafiah (w. 1981), Hasil rapat memutuskan membatalkan keputusan Dewan Daerah Banjar dan mengadakan Sidang Istimewa. Sidang Istimewa dilakukan di Banjarmasin dihadiri oleh rakyat dan tentara. Idham sendiri sebagai anggota Sermi hadir dalam sidang istimewa itu. Ternyata sidang itu memutuskan untuk memilihnya (anggota pengurus Besar Sermi), Hasan Basri (Ketua I Sermi), dan Dr. Diapari (Ketua Umum Sermi) untuk menggantikan tiga tokoh federal yang diprotes rakyat.

Dengan demikian, Idham yang ketika itu berumur 27 tahun terpilih sebagai anggota parlemen RIS yang mengharuskannya untuk berangkat ke Jakarta. Sebelum berangkat, ia menghadap kepada Letkol Hassan Basry untuk berpamitan sekaligus memperjelas posisinya di lingkungan TNI. Mengingat posisinya di parlemen, ia menyatakan tidak lagi bekerja di lingkungan tentara. Sang komandan memahami keputusannya apalagi kalangan tentara memang menghendaki dirinya menjadi anggota parlemen di Jakarta. Bahkan ketika ia akan berangkat, mereka membekalinya uang Rp. 1000 dan baju sipil serta berpesan agar ia jangan lagi memakai 'baju hijau' (tentara).

#### **D. Idham di Jakarta: Menjadi Anggota Parlemen dan Politisi NU (1950-1960)**

Pada tahun 1950, Idham kembali naik pesawat untuk kedua kalinya. Ia berangkat bersama Hasan Basri dan Dr. Diapari. Di Jakarta ia tinggal sementara di Hotel De Zon dan kemudian pindah ke Hotel Gallery. Istri dan anaknya tidak ikut serta. Selama berbulan-bulan ia bersama anggota parlemen lainnya tinggal di hotel tersebut. Sementara Gedung DPR (Parlemen RIS) saat itu berada di jalan Dr. Wahidin I (Lapangan Banteng). Di sinilah ia berkantor dari tahun 1950-1955.

Sebagai anggota parlemen yang belum memiliki pengalaman, Idham banyak belajar dengan anggota parlemen lainnya yang sudah berpengalaman seperti Sukiman Wirjosandjojo, Muhammad Natsir (w. 1993) dan Zainul Arifin. Ia juga belajar tentang parlemen melalui buku-buku ilmu parlementaria. Dari sinilah pengetahuannya tentang parlemen semakin berkembang.

Meski sudah berada di Jakarta dan menjadi anggota parlemen, Idham tetap melakukan aktivitasnya di daerah. Masa-masa reses yang berlangsung selama satu bulan dimanfaatkannya untuk pulang ke Amuntai membenahi perguruan yang dipimpinnya dan tetap memenuhi sejumlah undangan untuk berdakwah. Ia juga tetap aktif di Sermi. Ketika Kongres Sermi memutuskan untuk bergabung dengan Masyumi, ia segera mengajak kawan-kawannya sesama anggota Sermi untuk bergabung dengan Masyumi dan mengganti plang nama Sermi menjadi Partai Islam Masyumi. Proses perubahan Sermi menjadi Masyumi berjalan lancar karena memang diinginkan dari awal. Idham sendiri kemudian menjadi salah satu anggota pimpinan wilayah sementara yang menjadi ketua wilayah adalah Hasan Basri. Aktivitas lainnya yang dilakukannya pada masa reses adalah membantu TNI memberikan penerangan kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil seperti kalangan masyarakat Dayak tentang makna kedaulatan dan Republik Indonesia.

Posisinya di sini adalah orang sipil bukan anggota TNI karena ia sudah resmi keluar dari keanggotaan penuh TNI.

Pulang-pergi selama masa reses itu ternyata dimanfaatkan Idham untuk berdagang kecil-kecilan. Dari Jakarta, ia membawa perak dan batik Yogya untuk di jual di Kalimantan. Ketika balik ke Jakarta, ia membawa batu-batu perhiasan dan lainnya untuk dijual ke sesama anggota parlemen. Meski pendapatannya sebagai anggota parlemen sebenarnya sudah mencukupi kehidupannya, bisnis kecil-kecilan itu ternyata dijalannya untuk menambah penghasilan keluarga. Karena itu, tidak mengherankan bila beberapa tahun kemudian kehidupan ekonomi keluarganya di Jakarta semakin membaik.<sup>30</sup>

Misi terpenting Idham dan kawan-kawannya selama menjadi anggota parlemen RIS pada masa awal adalah menjadikan daerahnya menjadi bagian dari Republik Indonesia, tidak menjadi negara bagian. Keinginan ini ternyata disetujui oleh parlemen dan diterima oleh pemerintah yang diwakili oleh Muhammad Hatta (w. 1980) selaku Perdana Menteri pada waktu itu. Dengan adanya persetujuan dan penerimaan ini, maka Dewan Daerah Banjar dianggap tidak relevan lagi dan tidak lama kemudian dibubarkan. Posisi ini berlangsung sampai RIS dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950.

---

<sup>30</sup> Menjelang Pemilu 1955 Idham sudah mampu membeli mobil meski mobil bekas merk Hilman berwarna hijau tua. Ia termasuk tiga dari delapan anggota parlemen fraksi NU yang telah memiliki mobil pada saat itu. Walaupun belum lihai menyetir sendiri, ia nekad menyetir sendiri mobilnya ke Parlemen. Dua orang sahabatnya di Parlemen, Saifuddin Zuhri dan Muchammad Ilyas mencoba menumpang ketika pulang dari parlemen meski dengan perasaan khawatir karena mereka tidak tahu sejak kapan Idham pandai menyetir. Kekhawatiran mereka terbukti. Idham menyetir dengan liar dan hampir menabrak pengendara sepeda motor. Saifuddin Zuhri hanya berkemat-komit membaca salawat berharap selamat sampai di tujuan sementara Muchammad Ilyas akhirnya memilih turun berjalan kaki. Saifullah Ma'shum (ed), *Karisma Ulama Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 277-278.

Di parlemen, Idham tidak hanya mengurus masalah daerahnya tetapi juga melaksanakan tugas untuk kepentingan negara secara umum. Salah satu tugas terpentingnya pada masa awal bertugas sebagai anggota parlemen adalah mempelajari persoalan haji. Sebagai negara yang baru lepas dari cengkeraman penjajah, Indonesia pada saat itu belum memiliki pengalaman menyelenggarakan perjalanan haji sendiri. Untuk itu, ia dan KH. Soedja (Ketua Panitia Hadji Indonesia) diutus oleh Menteri Agama Abdul Wahid Hasjim ke berbagai negara untuk memperoleh bahan-bahan masukan mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan perjalanan haji masing-masing negara. Selama empat bulan, ia mengunjungi beberapa negara, diawali dari Singapura kemudian ke Thailand, India (Mombay), Pakistan, Mesir dan terakhir ke Arab Saudi.

Idham dan Kyai Soedja banyak memperoleh bahan dari berbagai negara yang dikunjunginya. Salah satu misi pentingnya di Arab Saudi adalah melakukan negoisasi dengan pemerintah Saudi untuk mendapat keringanan biaya masuk sebanyak 175 riyal untuk setiap jamaah haji. Di Makkah, ia bertemu terlebih dahulu dengan para syekh yang mengurus jamaah haji Jawi (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina) yang kemudian mempertemukan mereka dengan *Mudir al-'Amm bi Syu'un al-Hajj wa Ziyarah*. Setelah itu mereka bertemu dengan Amir Makkah yang mewakili Raja Arab Saudi, Abdul Aziz. Negosiasi yang dilakukan ternyata berhasil sangat baik. Raja Arab Saudi berkenan membebaskan 100 persen biaya masuk untuk jamaah haji Indonesia. Ia sendiri harus menunggu keputusan raja ini selama dua bulan setengah. Selama masa menunggu itu, ia memanfaatkan waktunya untuk mengikuti *halaqah-halaqah* di Masjidil Haram. Setiap usai salat subuh, ia mengikuti *halaqah* Syekh Abdul Qadir al-Mandili dan berkeliling mengikuti *halaqah-halaqah* lainnya. Ia juga sempat berkenalan dengan Syekh Yasin al-Padani (w. 1989).

Hasil negoisasi dan bahan-bahan yang didapatkan Idham selama dalam perjalanan ke beberapa negara kemudian disampaikan kepada Menteri Agama dan Wakil

Presiden, Mohammad Hatta. Hasil laporan yang disampaikan bersama Kyai Soedja tentu sangat menggembirakan pemerintah. Laporan itu akan menjadi panduan bagi pemerintah untuk menyelenggarakan perjalanan haji Indonesia. Sebagai imbalan keberhasilannya dalam melakukan negosiasi dan mengumpulkan bahan perjalanan haji dari berbagai negara, Idham diangkat oleh Menteri Agama sebagai Koordinator Madjelis Pimpinan Hadji. Dengan demikian, ia mendapat kesempatan untuk naik haji. Pada tahun 1951, ia melaksanakan ibadah haji pertamanya menggunakan kapal laut. Pada tahun 1952 ia ditunjuk lagi untuk tugas yang sama.

Aktivitas penting lainnya yang dilakukan oleh Idham disamping sebagai anggota parlemen adalah aktif dalam kepengurusan PBNU. Pada masa awal keberadaannya di Jakarta, ia sudah menjadi anggota PBNU dan aktif dalam Gerakan Pemuda Ansor. Keterlibatannya di NU mengantarkan dirinya cepat populer dan karirnya menanjak dengan cepat. KH. Abdul Wahid Hasyim dan KH. Abdul Wahab Chasbullah merupakan dua tokoh penting NU yang telah membentuknya menjadi pemimpin dan politisi NU yang handal. Ia sendiri termasuk orang yang mengagumi Abdul Wahim Hasyim dan sempat pula belajar dengannya. Bahkan ia memiliki hubungan yang akrab dengannya ketika ia menjadi wakil ketua GP Ansor untuk wilayah Jakarta.<sup>31</sup>

Pada Mukhtar ke-19 NU di Palembang (28 April-1 Mei 1952), Idham hadir sebagai salah satu anggota pengurus besar PBNU sekaligus merangkap sebagai utusan NU dari Kalimantan Selatan. Posisinya di PBNU adalah Sekretaris Majelis Pertimbangan Politik (MPP) sementara posisinya di kepengurusan NU di Kalimantan Selatan adalah sebagai Wakil Rais Syuriah sekaligus merangkap Ketua GP Anshor wilayah Kalimantan Selatan. Di Mukhtar inilah ia kemudian terpilih sebagai Sekjen PBNU sementara yang menjadi ketua umum adalah KH. Masjkur.

---

<sup>31</sup> Maksoem Mahfoedz, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*, (Surabaya: Kesatuan Umat, 1982), h. 161.

Hasil keputusan penting Mukhtamar NU ke-19 adalah Keputusan organisasi Islam ini untuk keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik sendiri. Keputusan NU untuk keluar dari Masyumi menurut Idham disebabkan adanya dua tuntutan NU yang ditolak oleh Masyumi. Pertama, mengembalikan posisi Madjelis Sjura Masyumi yang terdiri dari alim ulama sebagai pihak yang ikut menentukan jalannya politik, bukan sekadar badan penasihat yang suaranya boleh didengar dan boleh tidak. Ketua Madjelis Sjura Masjumi pada waktu itu adalah KH. Abdul Wahab Chasbullah. Kedua, perwakilan dalam Dewan Partai harus ditentukan berdasarkan besar-kecilnya organisasi. Waktu itu semua organisasi, baik yang besar maupun yang kecil, diwakili oleh dua orang, jadi suaranya sama. Masyumi keberatan dengan dua tuntutan NU ini.

Pemicu lainnya yang membuat NU seperti dilecehkan dalam tubuh Masyumi adalah persoalan jatah menteri. Jatah menteri agama yang biasanya diberikan kepada NU ternyata pada kabinet Wilopo diserahkan kepada KH Faqih Usman dari Muhammadiyah. Kenyataan ini tidak hanya membuat NU kehilangan posisi menteri agama tetapi juga harus menerima bahwa tidak satupun NU mendapat jatah menteri dari lima jatah menteri yang diperuntukkan bagi Masyumi. Tidak adanya jatah menteri dalam kabinet dari unsur NU ini tentu menimbulkan kekecewaan pimpinan NU mengingat anggota dan simpatisan NU yang menyuplai suara bagi Masyumi cukup besar. Idham menanggapi ketidakadilan ini sebagai berikut:

Ini terus terang saja. Waktu lima menteri Masyumi, 4 sudah diambilnya. Departemen Agama masih diambilnya juga. Kalau orang mengatakan, NU pecah, karena kursi-meninggalkan Masyumi kata Masyumi.

Baik, baik-karena kursi. Apa tidak pantas, tuan-tuan mengambil empat kursi, satu yang dituntut oleh NU. Karena sekarang tuan-tuan tidak mau memberikan, tuan-tuan mau pecah karena kursi, sedang tuan-tuan telah punya, salah siapa. Kalau kita bersaudara

mempunyai milki lima lantas tuan-tuan sudah ambil empat, kita cuma tuntutan satu tidak diberi, kita pecah. Hujjahnya salah siapa-kalau memang benar karena kursi-saya mau tanya.<sup>32</sup>

Tidak hanya berkaitan dengan masalah kekecewaan politik, tokoh NU juga merasa direndahkan oleh sejumlah intelektual Masyumi yang memandang dirinya lebih unggul dibanding tokoh NU yang berlatar belakang pendidikan tradisional. Dalam hal ini Idham menyatakan:

Sebenarnya, keluarnya NU dari Masyumi tidak hanya karena persoalan posisi politik ... tetapi lebih karena persoalan yang lebih prinsipil .... Seseorang yang berlatar belakang pendidikan MULO menganggap seorang lulusan HIS lebih unggul ketimbang lulusan tsanawiyah (sekolah agama menengah pertama) ... Pada masa itu, tak bisa dibayangkan bahwa seorang lulusan universitas sekuler akan bersedia untuk membungkukkan diri kepada ulama sebagai tanda hormat. Bahkan, seorang lulusan AMS pada masa itu berbicara dengan K.H. Wahab Chasbullah dengan tangan bertolak pinggang yang mencerminkan sikap superior.<sup>33</sup>

Idham sendiri bersama KH. Mohammad Ilyas dalam muktamar di Palembang berusaha keras agar NU tidak langsung memisahkan diri tanpa melakukan negosiasi dulu dengan Masyumi mengenai tuntutan yang dikemukakan oleh NU. Akhirnya, muktamar memutuskan untuk menunda NU memisahkan diri dari NU selama enam bulan untuk bernegosiasi dengan Masyumi. Idham bersama dengan KH. Zainul Arifin (ketua tim), KH. Ilyas, KH. Dahlan, dan A.S. Bachmid menjadi satu tim untuk berunding dengan Masyumi. Tim ini bekerja selama enam bulan untuk melakukan

---

<sup>32</sup> Dikutip dari Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali Ke Khittah 1926*, (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 69.

<sup>33</sup> Dikutip dari Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 413.

perundingan dengan Masyumi. Namun setelah enam bulan kedua belah pihak ternyata tetap pada pendirian masing-masing. Masyumi tetap menolak tuntutan NU. Akhirnya, waktu yang telah ditentukan telah berakhir dan NU kemudian resmi keluar dari Masyumi. NU kemudian mendeklarasikan dirinya menjadi partai politik sendiri. Anggota parlemen dari Masyumi yang berasal dari unsur NU memisahkan diri dari Masyumi membentuk fraksi tersendiri. Idham sebagai kader NU memilih pindah ke fraksi NU.

Ketika NU dideklarasikan menjadi partai politik Idham sedang berada di Makkah, melaksanakan tugas sebagai Koordinator Madjelis Pimpinan Haji (MPH). Di Makkah, ia melakukan sosialisasi kepada sejumlah tokoh NU (pengurus syuriah dan tanfidziyah) yang kebetulan sedang naik haji. Ia juga memberikan penjelasan kepada para ulama dan mukimin simpatisan NU yang ada di Makkah yang meminta penjelasan posisi dan alasan NU keluar dari Masyumi. Sejumlah anggota Masyumi yang berasal dari Kalimantan yang protes terhadap langkahnya juga mendapat penjelasan darinya. Demikian juga ketika ia berada di kapal saat akan kembali ke Indonesia, Jamaah haji yang mayoritas simpatisan NU meminta penjelasan mengenai keputusan NU keluar dari Masyumi. Ia menjelaskan semuanya termasuk saat-saat perundingan dengan Masyumi yang tidak mencapai titik temu.

Fraksi NU dimana Idham berada menjadi salah satu fraksi kecil di parlemen. Dibanding dengan Masyumi yang berjumlah hampir 50 orang, fraksi NU tertinggal jauh karena hanya terdiri dari delapan orang. Karena jumlahnya kecil, fraksi ini dianggap sebagai fraksi nekat. KH Wahab Chasbullah memperingatkan sesama anggota fraksi NU bahwa ada kemungkinan mereka tidak terpilih lagi pada pemilu yang akan datang. Sebab, sebagai partai baru sulit bagi NU untuk sukses pada pemilu yang akan datang. Agar hal itu tidak terjadi ia mengharapkan agar mereka ikhlas dan bersungguh-sungguh untuk menjadikan NU sebagai partai yang bonafide.

Untuk menjaga eksistensi dan memperbesar NU sebagai partai politik, pengurus PBNU segera melakukan pembenahan organisasi dan membuka cabang-cabang baru di seluruh Indonesia. Di sinilah Idham (Sekjen PBNU) bersama KH. Wahab Chasbullah (Rais Aam Syuriah) berkeliling ke berbagai daerah untuk membuka cabang-cabang partai NU baru. Kedua orang inilah yang banyak bergerak karena pengurus lainnya memiliki tugasnya sendiri-sendiri yang tidak bisa ditinggalkan. Setiap hari Minggu, Idham bersama KH Wahab berkeliling ke sejumlah daerah. Pada daerah tertentu terkadang mereka disambut dengan tulisan, “selamat datang pemecah belah umat Islam” sebagai protes terhadap langkah NU keluar dari Masyumi. Ada pula poster yang bertulis “selamatkanlah umat Islam dari kaum pemecah belah” telah menghadang langkah mereka. Bahkan, dalam kasus tertentu di suatu daerah mereka tidak mendapat sambutan dari anggota NU yang bekerja di departemen agama karena memilih menghindar, takut posisi mereka terancam karena menteri agama pada saat itu berasal dari Masyumi.

Pada tahun 1953, partai NU sudah memiliki cabang hampir di seluruh Indonesia. Pendirian cabang-cabang ini tidak lepas dari jerih payah Idham yang berkeliling Jawa dan Kalimantan bahkan sampai ke Nusa Tenggara (saat itu terdiri dari Bali, NTB, dan NTT). Perannya dalam membuka cabang baru dan menyegarkan cabang-cabang NU yang vakum serta keterlibatannya dalam melakukan konsolidasi di berbagai wilayah NU yang memiliki basis yang kuat membuatnya dikenal dimana-mana. Popularitasnya ini dikemudian hari menjadikan dirinya menjadi pimpinan NU yang sulit dikalahkan dalam sejumlah muktamar. Populeritasnya itu didukung juga dengan sikapnya yang luwes dan suka menyenangkan orang lain. Menurut Mahfoedz, nama Idham cepat populer dan kariernya cepat menanjak karena dia memiliki cara bergaul yang menarik. Setiap teman yang datang kepadanya selalu merasa puas. Bahkan jika ada orang yang datang ingin melabraknya, orang yang dalam keadaan

marah itu akan pulang dengan senyum-senyum setelah bertemu dengannya.<sup>34</sup>

Bersamaan dengan aktivitas Idham berkeliling ke berbagai daerah untuk membesarkan partai NU. Kabinet Wilopo yang terdiri dari dua unsur partai kuat PNI dan Masyumi bubar pada 30 Juli 1953. Ketika PNI ingin mengajak kembali Masyumi untuk membentuk kabinet baru, Masyumi ternyata menolak. Rupanya Masyumi tidak menerima kalau mereka hanya diberi jatah lima menteri, mereka ingin mendapat enam jatah menteri sebagaimana ketika NU masih bergabung dengan Masyumi. PNI sendiri ingin memberi NU satu jatah menteri, yaitu menteri agama. Ketika Masyumi keras menolak untuk ikut terlibat di kabinet dan lebih memilih menjadi oposisi, PNI berpaling kepada NU, PSII, dan Perti. PNI rupanya menyadari bahwa meski fraksi NU hanya berjumlah delapan orang tetapi partai ini memiliki basis massa yang besar. Karena itu, NU yang pada awalnya dijanjikan jatah satu menteri malah diberi tiga jatah menteri (wakil perdana menteri, menteri agama dan menteri agraria) pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Pada awalnya pimpinan NU merasa keberatan jika Masyumi tidak ikut dalam kabinet karena akan membuat kabinet tidak solid. Namun sebagai partai baru mereka tidak punya pilihan lain jika ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. Inilah pertama kali NU duduk di kabinet atas nama partai sendiri.

Idham sendiri pada saat itu belum masuk dalam jajaran kabinet, dia tetap aktif sebagai anggota parlemen, sekjen PBNU, dan berkonsentrasi mengurus partai. Di parlemen, ia duduk sebagai anggota komisi pertahanan dan kemudian menjadi seksi pertahanan. Tugasnya sebagai seksi pertahanan ini sering dikerjakannya pada malam hari. Jika tidak ada kegiatan di parlemen atau pada hari-hari libur, sebagaimana biasa, ia aktif menghadiri konferensi cabang, menghadiri undangan wilayah dan cabang, menghadiri kongres badan-badan otonom dan lainnya. Sebagai Sekjen

---

<sup>34</sup> Mahfoedz, *Kebangkitan Ulama*, h. 161-162.

PBNU ia juga berkantor di Menteng Prapatan untuk mengurus administrasi partai.

Di tengah kesibukannya yang tinggi, Idham tetap memperhatikan dunia pendidikan. Ia tetap mengurus Ma'had Rasyidiyah di Amuntai meski tinggal di Jakarta dan kemudian ia mulai merintis pendirian Perguruan Darul Ma'arif di Cipete, Jakarta Selatan. Perguruan ini dirintis oleh Idham atas dorongan para ulama yang menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad saw agar dia mendirikan lembaga pendidikan di wilayah itu. Di samping itu, ayahnya Muhamamd Khalid juga menghendaki dirinya agar suatu saat ia mendirikan lembaga pendidikan Islam. Sekitar tahun 1953 atau 1954 ia mulai merintis berdirinya perguruan ini. Pada tahun 1955 bangunan fisiknya mulai berdiri meski masih sederhana. Proses pendidikan dan pendirian yayasan perguruan ini terwujud pada tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 1954, NU mengadakan muktamar di Surabaya pada tanggal 8-13 September. Muktamar ini berlangsung sangat meriah karena mendapat sambutan ratusan ribu massa NU. Ini menandakan kehadiran NU sebagai partai politik disambut dengan hangat. Muktamar ini sangat menentukan perjalanan NU sebagai partai politik, karena dalam muktamar inilah NU mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 1955. NU melakukan konsolidasi dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan kader, pertemuan-pertemuan pengajian, konferensi cabang, konferensi majelis wakil cabang dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

Idham tidak sempat mengikuti semua kegiatan muktamar, karena saat muktamar masih berlangsung ia mendapat telegram dari Amuntai yang isinya memintanya segera pulang karena ayahnya sakit keras. Pada subuh hari ia pulang menggunakan pesawat Dakota dari Surabaya ke Banjarmasin. Di Banjarmasin, transportasi untuk ke Amuntai telah disediakan oleh pemerintah daerah. Ketika ia tiba di Amuntai ayahnya telah meninggal dunia pada malam Jumat 8 September 1954. Kalangan kerabat, kawan-kawan dan

anggota NU telah memenuhi kediaman rumah ayahnya. Setelah ayahnya dimakamkan, ia tetap di Amuntai kurang lebih tujuh hari untuk melaksanakan tradisi upacara pascakematian dan membagi harta warisan. Pada malam peringatan hari ke-7 wafatnya sang ayah, malam itu tepat tengah malam ia diajak oleh KH. Juhri Sulaiman menyaksikan 'keajaiban' di makam ayahnya, yakni munculnya cahaya berbentuk bunga dari makam sang ayah. Cahaya berbentuk bunga itu keluar dan naik ke atas sekitar lima meter kemudian turun dan masuk kembali. Setelah malam itu, peristiwa ini berlangsung kembali selama enam bulan setiap malam Jumat.

Dalam suasana duka ditinggal wafat sang ayah, Idham tidak banyak memikirkan apa yang terjadi pada muktamar di Surabaya. Tidak lama kemudian ketika ia masih di Amuntai, datang telegram dari panitia muktamar yang isinya selain berisi ucapan belasungkawa juga berisi pemberitahuan bahwa dirinya terpilih sebagai Ketua I PBNU bersama dengan KH. Mohammad Ilyas sebagai ketua II sementara ketua umum adalah Muhammad Dachlan. Dengan demikian posisinya meningkat dari Sekjen menjadi Ketua I.

Setelah aktif kembali, Idham bersama pengurus besar NU lainnya sibuk melakukan persiapan menghadapi pemilu. Untuk keperluan itu, NU membentuk satu Lajnah Pemilihan Umum NU (Lapunu) yang dipimpin oleh Idham. Ia bertugas untuk menyusun pedoman berkampanye dalam pemilihan umum. Pedoman ini diperlukan untuk memberikan bimbingan kepada anggota dan simpatisan NU dalam melakukan kampanye dan melakukan pemungutan suara.

Menjelang pemilu, NU mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi manuver politik PKI yang sering berseberangan dengan partai Islam. Ini terbukti ketika kampanye berlangsung, antara partai Islam dan PKI saling melontarkan kritik, saling serang, dan melancarkan debat dan polemik di koran. Untungnya pada saat itu, NU dianggap golongan tengah sehingga tidak mendapat serangan yang berarti dari PNI, Masyumi dan PKI, tiga partai besar yang

ketika itu sedang bersaing. Pada musim kampanye itu, Idham lebih banyak berkampanye di daerah Jawa Timur, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan. Hanya satu kali ia berkampanye di Jakarta. Ia sering ikut bersama KH Wahab Chasbullah berkampanye ke berbagai daerah, mereka berbicara bergantian.

Dalam kampanye itu, NU sempat memprotes PKI yang menggunakan tanda gambar palu arit dengan tambahan kalimat “PKI dan tanda orang-orang tidak berpartai”. Bagi NU ini merupakan muslihat bagi pemilih yang tidak berafiliasi pada partai tertentu. Idham yang menjadi bicara NU pada saat itu memprotes tindakan PKI itu dan berhasil menggagalkannya. D.N. Aidit, ketua CC PKI, pernah membujuk agar Idham menerima rencana tersebut, tetapi ia tetap menolaknya.<sup>35</sup>

Ketika hasil pemilu diumumkan, di luar perkiraan, NU yang dianggap sebagai partai kecil, tiba-tiba masuk menjadi tiga besar dalam perolehan suara pemilu 1955 mengikuti PNI pemenang pertama dan Masyumi pemenang kedua, sementara PKI berada pada urutan keempat kalah dengan NU sebagai pendaatang baru. Posisi NU dalam tiga besar tidak hanya mengejutkan pihak luar tetapi juga mengejutkan kalangan internal NU sendiri. Kalangan NU sendiri tidak menduga karena mereka menghadapi pemilu dengan persiapan yang terbatas dan dengan pola kampanye yang sederhana yang kalah ‘megah’ dibanding partai besar lainnya.

Pada pemilu ini, Idham terpilih kembali menjadi anggota parlemen hasil pemilihan dari Kalimantan Selatan. Namun posisinya di parlemen tidak sempat dilaksanakannya karena nasib lain telah menentukan jalan hidupnya. Ia masuk di jajaran kabinet. Karena posisi itu, ia mengundurkan diri dari parlemen setelah dilantik.

---

<sup>35</sup> Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, (tt.: PT Duta Aksara Mulia, 2010), h. 271.

Proses pembentukan kabinet dimana ia terlibat di dalamnya berjalan sangat alot. Kerumitan itu terjadi karena Presiden Soekarno ingin membentuk kabinet ‘berkaki empat’ yaitu susunan kabinet yang melibatkan empat partai besar, PNI, Masyumi, NU dan PKI. Keinginan presiden untuk melibatkan orang-orang PKI dalam kabinet mendapat penolakan keras dari partai-partai berbasis agama terutama NU dan Masyumi. PNI sebenarnya juga memiliki sikap yang sama dengan partai Islam meski tidak tegas. Ali Sastroamidjojo sebagai formatur berusaha keras bernegosiasi dengan partai NU dan Masyumi namun tetap gagal. Presiden kemudian memanggil pimpinan partai NU dan Masyumi. Idham mewakili partai NU bersama KH. Wahab Chasbullah dan KH. Zainul Arifin datang memenuhi panggilan presiden untuk menjelaskan alasan dan posisi mereka. Dalam pertemuan itu sempat terjadi perdebatan kecil antara Idham dengan Soekarno mengenai PKI. Walaupun presiden berusaha meyakinkan pimpinan NU tentang perlunya unsur PKI terlibat di kabinet, namun Idham bersama kiyai lainnya tetap pada pendirian semula.

Pada tanggal 16 Maret 1956, susunan kabinet telah dirampungkan dan disepakati oleh formatur dan partai besar. Dalam susunan kabinet itu, Idham ditempatkan sebagai wakil perdana menteri II merangkap sebagai biro keamanan. Susunan kabinet itu kemudian diserahkan kepada presiden. Presiden Soekarno sangat kecewa dengan susunan kabinet itu karena tetap tidak melibatkan unsur PKI. Presiden Soekarno tidak langsung menerima susunan kabinet, dia minta diberi waktu untuk mempertimbangkannya. Kepada wartawan presiden mengatakan dia perlu mempelajari susunan kabinet itu karena banyak yang belum dia kenal.

Seminggu lebih belum ada jawaban dari presiden. Idham sendiri gelisah, khawatir kalau salah satu yang kurang dikenal itu adalah dirinya. Apalagi usianya waktu itu masih muda, 34 tahun. Ia merasa belum pantas untuk menjabat wakil perdana menteri II. Ia kemudian menghubungi formatur agar mempertimbangkan posisinya. Namun Ali Sastroamidjojo yang menjadi formatur meyakinkan Idham

bahwa bukan itu sebabnya presiden belum memberikan jawaban. Akhirnya, setelah setengah bulan, Presiden Soekarno memanggil Ali Sastroamidjojo, Moh. Roem dan Idham untuk menghadap. Kepada mereka bertiga, Presiden menyatakan dapat menerima susunan kabinet itu meski dengan berat hati. Kabinet yang dikenal dengan kabient Ali Sastroamidjojo II atau dikenal juga dengan A-R-I (Ali-Roem-Idham) dilantik pada tanggal 24 Maret 1956. Presiden sendiri pada saat itu tidak mau melantik secara langsung kabinet itu. Perdana menteri dan wakilnya serta menteri-menteri lainnya membaca sendiri sumpah jabatannya tanpa dipandu oleh presiden. Presiden hanya berdiri mendengarkan.

Setelah dilantik dengan suasana yang kurang menyenangkan dengan presiden, Idham bersama dengan menteri-menteri lainnya mulai bekerja dalam berbagai sektor, baik politik, ekonomi, agama, keamanan dan sebagainya. Sebagai wakil perdana menteri II tugas beratnya adalah pemulihan keamanan. Sebagai kepala badan keamanan, ia sering turun ke daerah-daerah yang mengalami gangguan keamanan. Di wilayah yang bergolak itu, keamanan dirinya tentu selalu terancam. Kemana-mana ia harus dikawal meski ia tidak menyukainya.

Tugas Idham yang terberat waktu itu adalah menghadapi gerombolan yang membawa dalil-dalil agama, yaitu Darul Islam Kartosuwiryo di Jawa Barat, Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dan Tengku Daud Beureuh di Aceh. Untuk menghadapi mereka ia meminta bantuan kepada sejumlah ulama. Ia membentuk badan Kiyai-kiai Pembantu Keamanan (KPK) untuk membantunya menghadapi DI/TII. Untuk mengatasi gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerombolan bersenjata, ia dibantu oleh tentara terutama angkatan darat dan polisi.

Saat menjalankan tugasnya, Idham pernah mengalami beberapa peristiwa yang dapat membahayakan dirinya. Salah satunya, pada saat dia menginap di Puncak dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta, tempat ia menginap diserang

dengan tembakan beruntun oleh gerombolan DI/TII. Ia langsung tiarap di bawah kolong ranjang. Untung, tentara segera datang dan membalas tembakan sehingga terjadi kontak senjata selama berjam-jam. Pengalaman lainnya adalah ketika ia berangkat menggunakan kereta api ke Jawa Timur, antara Gambir dan Pegangsaan, ia ditembak namun hanya mengenai ujung kopiah ajudannya. Ia tidak hanya menjadi target pembunuhan DI/TII karena posisinya sebagai kepala badan pengamanan tetapi juga posisinya sebagai pimpinan NU. Banyak orang-orang NU yang diserang dan dibunuh karena DI/TII menganggap NU telah membela Republik Indonesia Kafir dan menjadi musuh utama umat Islam karena keluar dari Masyumi.

Kesibukan Idham sebagai wakil perdana menteri II tidak mengurangi keterlibatannya dalam pengembangan NU. Ia tetap aktif membantu ketua umum PBNU dalam kegiatan-kegiatan partai seperti menghadiri konferensi, memberikan ceramah dan mengusahakan bantuan dana kepada organisasi. Dalam bidang organisasi ia juga ikut mengembangkan NU melalui latihan kader NU di Jakarta yang diikuti oleh anggota NU yang berasal dari utusan wilayah. Anggota NU yang telah menjadi ketua DPRD juga diundang untuk *upgrade* pengetahuan mereka tentang tatanegara, parlemen dan lainnya.

Pada tahun 1956, Kongres NU ke-21 diadakan di Medan. Idham berangkat ke sana. Ia tidak mengira bahwa perjalanannya menuju Medan akan menjadi perjalanan yang begitu mendebarkan. Pada awalnya, ia menggunakan kapal terbang menuju Medan. Ketika transit di Padang, Djamaluddin Malik (w. 1970) yang ikut bersamanya melihat kondisi yang tidak biasa di Padang sehingga ia mengusulkan agar Idham menggunakan jalan darat saja untuk mengetahui keadaan mengingat posisinya sebagai menteri yang mengurus bidang keamanan. Idham setuju. Di sinilah perjalanan mendebarkan itu dimulai.

Idham dan rekan-rekannya tidak menyadari bahwa di sepanjang daerah yang akan mereka lalui merupakan daerah

yang sedang bergolak, tidak aman, dan banyak orang yang anti pemerintah pusat. Pada malam pertama, Idham menginap di sebuah penginapan yang justru berdekatan dengan upacara pengambilalihan wilayah itu oleh pemberontak. Dari sana terdengar pidato-pidato yang memaki-maki pemerintah pusat. Idham khawatir ditangkap oleh para pemberontak itu. Malam itu juga mereka meninggalkan Padang, Di daerah Lubuk Sikaping, mereka dibantu oleh Bupati yang menyediakan bensin dan mobil. Tetapi perjalanan tetap menegangkan karena mobil sempat mogok di tengah hutan dan harus diganti mobil lain. Di Padang Sidempuan, ia menyaksikan banyak tulisan atau famlet yang memaki-maki pemerintah pusat. Di sini mereka menginap di hotel menggunakan identitas sebagai pedagang. Sebagai kamufase mereka menyuruh sopir membeli bermacam barang agar terlihat seperti pedagang.

Peserta muktamar gempar ketika tahu bahwa Idham menempuh jalan darat. Pimpinan NU segera meminta bantuan gubernur dan walikota untuk mencari Idham dan rekan-rekannya yang lain. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya ia ditemukan di sebuah hotel di Padang Sidempuan oleh bupati. Untuk keamanan, bupati mengantarkan sendiri Idham sampai ke Medan. Peserta kongres pun akhirnya merasa lega. Ia diinapkan di rumah walikota berdampingan dengan panglima TT-I Kol, Simbolon, pemberontak yang saat itu mengambil alih kekuasaan di Medan! Ia sempat mendatanginya dan memintanya untuk tidak mengganggu kongres NU. Simbolon memberi jaminan keamanan karena ia tidak memberontak pada NU tetapi memberontak pada pemerintah pusat.

Ketegangan belum berakhir. Pada saat kongres NU masih berjalan, terjadi pengambilalihan kekuasaan antara Djamin Ginting (kepala staff TT-I) dengan Simbolon yang berlangsung di depan tempat Idham menginap. Untung tidak ada pertumpahan darah karena Simbolon telah menyingkir ke luar kota. Idham sendiri tetap bersembunyi di kamar sampai akhirnya Gintings menemuinya dan menyatakan telah mengambil kekuasaan dari Simbolon. Ia mengharapkan agar

jangan terjadi pertumpahan darah. Ginting meminta Idham menjadi saksi bahwa mulai saat itu Sumatera Utara kembali mengakui pemerintah pusat.

Dengan kondisi keamanan yang tidak menentu, Idham tidak dapat berkonsentrasi mengikuti kongres NU di Medan. Ia tidak bisa menghadiri sidang-sidang kongres NU karena ia harus mengurus persoalan keamanan. Ia harus melayani sejumlah aparat pemerintah daerah yang datang silih berganti dengan membawa berbagai macam persoalan. Di luar dugaannya, kongres ternyata memilihnya menjadi ketua umum tanfidziyah PBNU menggantikan Moh. Dachlan (w. 1977). Ia tidak menduga karena pada pemilihan itu ia tidak melakukan kampanye di kongres dan tidak hadir pada saat pemilihan. Ia sempat merasa tidak nyaman dengan Moh. Dachlan, karena terjadi pertukaran tempat dengannya, Idham yang asalnya ketua I menjadi ketua umum sementara Dachlan yang asalnya ketua umum menjadi ketua I. Ia sempat menawarkan agar bertukar tempat tetapi Dachlan tidak bersedia karena sudah menjadi keputusan kongres.

Mengapa Idham sampai terpilih menjadi ketua umum? Mahfoedz mengemukakan faktor mengapa Idham dapat terpilih pada muktamar di Medan itu. Menurutnya, pada saat Idham mengikuti muktamar, ia dalam posisi sebagai wakil perdana menteri. Tentu saja ini merupakan modal besar baginya. Selain itu, sikapnya yang luwes dan keramahannya yang menarik membuat ia dalam waktu singkat dikenal di berbagai cabang meski ia merupakan orang baru di NU. Apalagi dibalik wajahnya yang tenang ia memiliki otak brilian dan mampu mengatur taktik dan strategi. Kemampuan yang dimilikinya ini membuat ia dianggap memenuhi persyaratan untuk menduduki posisi ketua umum. Ini kemudian terbukti, meski melalui jalan berliku, akhirnya ia terpilih menjadi ketua umum PBNU.<sup>36</sup>

Greg Fealy melihat beberapa faktor keberuntungan Idham dibanding Dachlan pada muktamar itu. Gaya

---

<sup>36</sup> Mahfoedz, *Kebangkitan Ulama*, h. 165.

kepemimpinan Dachlan tidak disukai oleh berbagai kelompok dalam tubuh NU dan hubungannya dengan Wahhab Chasbullah tidak harmonis. Sementara Idham pada saat itu sedang melesat karir dan popularitasnya. Gaya kepemimpinan Idham berbeda dengan Dachlan. Idham adalah seorang yang ahli dalam berkomunikasi, punya banyak lelucon, dan sangat pandai membaca suasana hati pendengarnya. Kemampuannya menyenangkan hati dan menggerakkan massa membuatnya menjadi salah satu pembicara NU yang paling populer. Ciri Idham paling menonjol menurut Fealy adalah kemampuannya dalam menjalin hubungan pribadi dan membangun jaringan patronase. Kharismanya membuat orang yang berhubungan dengannya merasa nyaman. Ia juga sangat murah hati dalam memenuhi segala permintaan para pendukungnya dan orang-orang yang meminta bantuannya.<sup>37</sup>

Faktor penting lainnya menurut Fealy adalah hubungan Idham dengan Wahhab Chasbullah yang sangat dekat. Wahhab Chasbullah adalah pelindung sekaligus guru spiritual Idham. Keduanya memiliki watak pragmatis yang memiliki insting politik yang kuat dan bakat untuk mengatur orang di sekitarnya. Dalam berbagai perdebatan di tubuh NU, keduanya saling membantu untuk mempertahankan sikap luwes dan akomodatif. Idham sering menemani Wahhab Chasbullah mengunjungi cabang-cabang NU. Kunjungan ini memberinya kesempatan untuk mengamati jaringan pengaruh di masing-masing komunitas itu dan membuatnya dikenal oleh tokoh-tokoh partai setempat. Pengetahuan dan hubungan yang dimilikinya sangat membantunya dalam membangun basis kekuatan di tubuh NU.<sup>38</sup>

Setelah kongres NU di Medan usai, Idham yang telah terpilih sebagai ketua umum PBNU kembali ke Jakarta menggunakan kapal terbang *convair Garuda*. Kapal terbang itu sebenarnya ditahan oleh Dewan Gajah, namun untuk

---

<sup>37</sup>Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta: LkiS, 2011), h. 221-223.

<sup>38</sup>Fealy, *Ijtihad Politik Ulama*, h. 223-224.

Idham pesawat itu diizinkan terbang. Letkol DJamin Gintings memberikan jaminan keamanan kepadanya untuk transit di sejumlah tempat. Meski sempat mengalami kerusakan mesin, Idham selamat tiba di Jakarta dengan menggunakan pesawat itu. Saat itu juga ia langsung menghadap Presiden Soekarno yang sudah menunggunya untuk melaporkan situasi pergolakan di Sumatera mengenai adanya Dewan Banteng, Dewan Garuda dan Dewan Gajah yang tidak puas dengan pemerintah pusat. Ia juga menceritakan apa yang dialaminya selama di Sumatera. Dalam pertemuan kabinet, ia pada prinsipnya menghendaki adanya tindakan yang bijaksana dalam mengatasi pergolakan daerah dan menginginkan presiden Soekarno turun tangan. Tetapi unsur kabinet lain dan tentara lebih suka bertindak tegas terhadap pemberontak.

Seminggu setelah Idham pulang dari Medan, roda pemerintahan kembali goyah setelah pada awal tahun 1957 Masyumi menarik menteri-menterinya dari kabinet, disusul kemudian Perti dan PSII juga melakukan hal yang sama. Di tengah penarikan sejumlah menteri dari kabinet oleh sejumlah partai Islam, pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno menyampaikan “Konsepsi Presiden” yang isinya menunjukkan bahwa (1) presiden menganggap bahwa sistem demokrasi parlementer ternyata tidak cocok untuk bangsa Indonesia karena itu harus diganti dengan demokrasi terpimpin, (2) untuk melaksanakan demokrasi terpimpin harus dibentuk kabinet gotong royong, (3) membentuk dewan nasional yang anggotanya berasal dari golongan fungsional dalam masyarakat, dan (4) pembentukan kabinet ‘berkaki empat’ yang terdiri dari PNI, Masyumi, NU dan PKI.

Tidak lama setelah penyampaian konsepsi presiden itu, pada tanggal 14 Maret 1957 Idham dan Ali Sastroamidjojo mendatangi presiden untuk menyerahkan mandat kabinet karena tidak mungkin lagi dipertahankan karena ditinggal oleh Masyumi, Perti dan PSII. Kabinet tidak akan dapat berjalan jika tanpa dukungan parlemen. Penyerahan mandat ini disusul dengan pengumuman negara dalam keadaan darurat perang yang kemudian ditingkatkan lagi menjadi negara dalam bahaya perang pada 17 Desember

1957. Idham sendiri sebenarnya tidak menginginkan keadaan darurat ini karena itu berarti yang berlaku adalah peraturan dan kekuasaan berada di tangan militer.

Di sela-sela kesibukannya sebagai wakil perdana menteri yang mengurus masalah keamanan, Idham mendapat penghormatan melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir sekaligus mendapat gelar doktor honoris causa dari Universitas al-Azhar. Pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 1957 bertempat di aula Universitas al-Azhar dilangsungkan penganugerahan doctor honoris causa kepada Idham. Pada kesempatan itu ia menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul *al-Tadhamun fi al-Islam* (Solidaritas dalam Islam) dalam bahasa Arab. Penganugerahan gelar dan pidato ilmiahnya ini dihadiri oleh para ulama besar, sarjana dan staf pengajar Universitas al-Azhar juga mahasiswa yang berasal dari berbagai negara. Setelah penganugerahan gelar ini, ia melakukan kunjungan ke parlemen Mesir dan bersilaturahmi dengan Duta Besar Filipina, Mufti Palestina serta mengadakan resepsi dengan duta besar dan mahasiswa Indonesia. Dalam resepsi itu ia menyampaikan pidato dalam bahasa Inggris.<sup>39</sup>

Setelah kabinet bubar, presiden menunjuk formatur untuk membentuk kabinet sesuai dengan konsepsi presiden yang disampaikannya. Setelah dua kali formatur yang ditunjuk presiden tidak berhasil membentuk kabinet akibat berbagai perbedaan pandangan antarpantai, akhirnya Presiden Soekarno menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur untuk menyusun kabinet baru. Langkah presiden ini segera menjadi kontroversi, namun presiden tetap menjalankan keputusannya membentuk kabinet tanpa berkonsultasi kepada partai-partai. Presiden kemudian berhasil membentuk kabinet yang disebut Kabinet Karya atau Kabinet Djuanda. Dalam kabinet ini beberapa tokoh NU kembali menduduki kabinet termasuk Idham yang kembali menduduki jabatan Waperdam II

---

<sup>39</sup> Mohd. Hamdan Khalid, 'KH. Idham Chalid Tawadhu dan Penyantun terhadap Ulama' dalam Muthalib dan Zamzam (eds.), *KH. Dr. Idham*, h. 35-36.

sementara tokoh-tokoh Masyumi tidak satupun yang masuk kabinet.

Kabinet ini harus segera bekerja untuk mengatasi berbagai pemberontakan di berbagai daerah, yaitu DI/TII di Jawa, PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. Kabinet mendahulukan langkah perundingan terlebih dahulu melalui Musyawarah Nasional di Jakarta bulan september 1957 untuk mengatasi berbagai masalah di daerah. Ternyata hasil Munas ini tidak menghentikan pemberontakan, akhirnya opsi militer terpaksa dilakukan. Pada tahun 1958 Angkatan Perang RI mengerahkan kekuatannya untuk menumpas pemberontakan di seluruh Indonesia. Idham sebagai waperdam II sekaligus ketua biro keamanan menerima tugas yang berat. Namun negara yang dalam kondisi SOB membuat Idham sebagai bagian dari sipil (nontentara) tidak dapat mempengaruhi kebijakan terlalu banyak karena keputusan dan undang-undang yang digunakan sepenuhnya diputuskan oleh militer. Biro keamanan hanya menangani hal-hal yang sifatnya nonoperasi militer. Operasi militer sepenuhnya berada di tangan angkatan bersenjata. Meski tidak dapat berbuat banyak, ia tetap berusaha menyampaikan pendapat agar solusi yang diambil tidak selalu harus melalui pertempuran hingga ada pihak yang habis dan kalah karena itu akan membuat rakyat menderita. Keluhan-keluhan rakyat yang merasa dirugikan akibat aksi kedua belah pihak (angkatan bersenjata dan pemberontak) yang sampai kepadanya akan segera ia sampaikan kepada pihak tentara terutama pimpinan operasi militer yang ketika itu dipimpin oleh Jenderal Nasution.

Pada tahun 1959, diadakan kongres NU ke-23 di Jakarta. Di sini untuk pertama kali Idham melaporkan dan mempertanggungjawabkan aktivitas NU selama masa kepemimpinannya. Ia menjelaskan kepada peserta kongres mengenai perkembangan negara dan keterlibatan NU di dalamnya, termasuk keikutsertaan NU di kabinet. Ia menjelaskan mengapa NU ikut dalam kabinet dan mengapa kemudian kabinet Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandat ke presiden, mengapa presiden kemudian mengumumkan

kondisi negara dalam keadaan darurat perang, dan mengapa NU diam ketika presiden menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur kabinet padahal dalam sistem kabinet parlementer hal itu dinilai inkonstitusional. Ia menggambarkan situasi politik dan negara pada saat itu seperti cuaca yang tidak normal. Ia menggambarkannya sebagai berikut:

Dengan diumumkannya SOB oleh Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno sesudah kabinet Ali-Roem-Idham bubar, mulailah kita hidup dalam suasana politik baru yang bertemperamen baru. Situasi dan ukuran kekuatan-kekuatan baru yang lain dari masa sebelumnya. Kita memerlukan cara berpikir dan cara bertindak yang baru pula dalam menghadapinya, kalau kita tidak ingin terlanda oleh banjir yang sedang memuncak itu. Memang sangatlah sulit bagi beberapa kalangan untuk melupakan masa pergolakan politik yang biasa wajar sebelum SOB atau sebelum negara dalam keadaan perang dan darurat. Tidak sedikit orang yang masih berpikir seolah-olah dia sedang berjalan di taman bunga yang disinari oleh cahaya matahari yang cemerlang padahal sebenarnya dia sedang merangkak-rangkak di jalan yang penuh lumpur dan berliku-liku di bawah hujan lebat, di tengah malam gelap gulita. Demikianlah misal perbandingan antara keadaan biasa dan SOB. Situasi politik yang normal sudah tidak bisa dijadikan patokan dan pedoman lagi dalam mengatur langkah dan kebijaksanaan pimpinan partai.<sup>40</sup>

Idham ingin memberi pengertian kepada peserta kongres mengenai sejumlah kebijakan politik NU yang diambil selama ini. Ia berusaha memberi pemahaman kepada warga NU bahwa krisis politik dan keamanan yang terjadi membuat NU harus memahami keputusan presiden untuk mengumumkan negara dalam keadaan darurat dan mengangkat dirinya sendiri sebagai formatur kabinet. Idham menceritakan bagaimana ia bersama pimpinan NU lainnya

---

<sup>40</sup> Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 340-341.

dan sejumlah pimpinan partai dan intelektual dipanggil ke istana untuk menyatakan sikap setuju atau tidak terhadap keputusan presiden menunjukkan dirinya menjadi formatur. Mereka diberi formulir yang isinya tertulis “Bersediakah saudara bekerjasama dengan Presiden Soekarno” disertai pilihan jawaban “bersedia” atau “tidak”. Idham bersama pimpinan NU lainnya sepakat memilih opsi “bersedia” karena mereka khawatir kalau tidak bersedia akan disamakan dengan pemberontak. Jika itu terjadi, nasib NU sebagai jam’iyyah dan partai akan terancam. Atas pertimbangan itu pula NU memberi izin kepada anggotanya untuk menjadi menteri jika ditunjuk oleh presiden.

Diamnya NU atas keputusan Presiden Soekarno menunjuk dirinya sebagai formatur dan kesepakatan tokoh NU untuk terlibat dalam kabinet yang dibentuk presiden menunjukkan bahwa Idham bersama tokoh NU lainnya berusaha memahami posisi presiden di tengah negara yang dalam keadaan darurat sehingga muncul kebijakan presiden yang tidak biasa. Tokoh-tokoh NU seperti Idham tidak ingin melakukan manuver politik yang kaku. Idham menyatakan, untuk urusan dalam negeri, pada batas-batas kemungkinan NU selalu mencoba menyesuaikan diri dengan waktu dan peristiwa, serta tidak pernah tampil dengan sesuatu yang absolut dan mutlak-mutlakan. NU cukup mengerti dalam keadaan apa dan bagaimana dia berada. Dalam menentukan sikap, NU senantiasa memperhitungkan manfaat dan mudarat, selalu mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya. Di samping semua itu, dalam setiap mengambil tindakan, NU juga senantiasa memperhitungkan dimensi keselamatan negara dari jurang kehancuran.<sup>41</sup>

Ketika Presiden Soekarno yang didukung oleh militer akan mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945, Idham dan Saifuddin Zuhri (w. 1986) ditemui oleh A.H. Nasution pada waktu dini hari untuk menyampaikan

---

<sup>41</sup> Khoirul Fathoni dan Muhammad Zein, *NU Pasca Khittah Prospek Ukhuwwah dengan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992), h. 36,

rencana presiden mengeluarkan dekrit. Keduanya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden karena menganggap hal itu adalah hak presiden namun mereka memberikan syarat agar Piagam Jakarta diakui kedudukannya sebagai menjiwai UUD 1945 dan berharap agar NU tidak dikecewakan.

Tanggal 5 Juli 1959 Dekrit Presiden disampaikan dan Konstituante dibubarkan. Pada saat itu pula Demokrasi Terpimpin yang diinginkan Soekarno dalam pidato Konsepsi Presidennya pada tahun 1957 diterapkan. Soekarno yang saat itu merangkap sebagai perdana menteri kemudian membentuk Kabinet Karya di mana beberapa tokoh NU lainnya tetap masuk dalam daftar kabinet. Sebaliknya, tokoh Masyumi dan PSI tidak satupun yang dilibatkan. Masyumi sendiri tengah menghadapi masalah dengan pemerintah karena beberapa tokoh utamanya dituduh terlibat dalam pemberontakan PRRI di Sumatera tahun 1958.

Setelah dekrit dikeluarkan NU tidak mengeluarkan pernyataan sikap. Sikap defensif ini dimaksudkan untuk memudahkan NU masuk dalam kabinet. Pada tanggal 5-9 Juli 1959, terjadi kasak-kusuk di istana mengenai pembentukan kabinet. Idham sendiri sebagai ketua umum PBNU tiga kali diajak berunding oleh Presiden Soekarno mengenai susunan kabinet tersebut. Presiden memberi sinyal akan memberi tempat pada NU di kabinet. Namun Idham tidak menduga kalau kemudian pengumuman kabinet yang disampaikan oleh presiden tidak mencerminkan hasil rembug bersama presiden karena dalam kabinet terdapat menteri-menteri yang tidak berasal dari partai. Namun NU tidak protes dan menerima dengan lapang dada. Sikap NU ini mendapat ganjaran dari Presiden Soekarno dengan memberi beberapa jatah menteri untuk NU terutama menteri agama yang selalu diincar oleh NU. Jatah ini segera diterima. Jika tidak diterima NU khawatir departemen agama akan diambil oleh pihak lain.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, h. 298-299.

Sebulan sesudah Dekrit Presiden, pada bulan Agustus 1959 Idham diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Pengangkatan ini tidak lepas dari kedekatannya dengan Soekarno. Ia bersama dengan beberapa tokoh NU lainnya seperti KH. Wahab Chasbullah, Saifuddin Zuhri, Masjkur, Zainul Arifin dan Ahmad Sjaichu adalah orang yang dekat dan sekaligus pegagum Soekarno. Mereka secara berkala bertemu dan berdiskusi mengenai berbagai masalah.

Di DPAS, Idham bersama Kiai Wahab Chasbullah dan Saifuddin Zuhri selama berbulan-bulan mengikuti sidang yang membahas tentang sosialisme Indonesia, *Landreform* dan Pancasila. Dalam sidang ini mereka berhadapan langsung dengan PKI yang mengusulkan agar sosialisme Indonesia mengikuti sosialisme komunis ala Moskow atau Peking-Beijing. PKI juga menghendaki agar *Landreform* diterapkan dalam bentuk pembagian tanah yang sama rata, sama rasa dan meniadakan hak milik. Sebaliknya, Idham dan kawan-kawan menghendaki agar sosialisme Indonesia adalah sosialisme yang didasarkan pada Pancasila dan penerapan *Landreform* harus tetap mengakui hak milik pribadi.<sup>43</sup>

Meski sibuk dalam dunia politik, Idham tidak lupa untuk terus mengembangkan Perguruan Darul Ma'arif yang telah didirikannya sejak pertengahan tahun 1950-an. Pada tahun 1958 Perguruan Darul Ma'arif membuka jenjang pendidikan tingkat madrasah Tsanawiyah (MTs). Pada tahun 1959 Perguruan ini resmi berbadan hukum pada tanggal 15 Desember 1959. Sejak itu perguruan ini dikelola oleh Yayasan Darul Ma'arif yang diketahui oleh Taufik Rachman Chalid. Tidak sampai hanya pada perguruan ini saja, Idham kembali merintis lembaga pendidikan baru. Pada tahun 1960, ia mendirikan Lembaga Pendidikan Darul Quran disertai dengan pendirian Rumah Yatim di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Dengan berdirinya perguruan ini, ia bertanggung jawab mengelola tiga perguruan sekaligus, satunya adalah

---

<sup>43</sup> Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, h. 301-302.

Ma'had Rasyidiyah di Amuntai yang tetap dipimpinnya dari Jakarta.

Selama berkiprah dalam satu dekade, ada beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Idham pada paruh kedua dekade 50-an (1956-1960). Penghargaan itu adalah Penghargaan Bintang Gerilja dari Presiden Soekarno pada tahun 1956. Penghargaan ini diberikan atas perjuangannya bersama kaum gerilyawan di Kalimantan. Dia juga mendapat Penghargaan Bintang Vendera Yugoslavia dari Presiden Tito tahun 1958. Penghargaan lainnya yang berasal dari luar negeri adalah Bintang R.P.A. el-Gumhuriyah Tingkat I tahun 1959. Kemudian pada tahun 1960, ia kembali mendapat penghargaan Bintang Mahaputra dari Presiden Soekarno.<sup>44</sup>

#### **E. Idham pada Era Demokrasi Terpimpin dan Awal Orde Baru (1961-1970)**

Pada tahun 1960 Idham terpilih sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Tugasnya antara lain membuat GBHN yang didasarkan pada pidato-pidato presiden Soekarno. Saat-saat itu merupakan masa yang menegangkan bagi partai dan anggota parlemen. Pada tahun itu Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 akibat dari ancaman DPR untuk tidak menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah. Pembubaran itu juga didasari atas pandangan Soekarno bahwa DPR yang dibentuk berdasarkan UUDS 1950 itu tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Manifesto Politik.

Tidak lama setelah pembubaran itu, Juni 1960, Presiden Soekarno membentuk sebuah dewan baru, yaitu DPRGR yang komposisinya terdiri dari unsur partai politik dan unsur golongan karya. NU sendiri tidak kuasa menolak pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 meski partainya tetap dilibatkan dalam DPRGR bentukan Soekarno.

Dalam pertemuan di Tampak Siring Bali, PBNU mengutus Idham untuk menghadiri undangan Presiden Soekarno untuk membicarakan pembentukan DPRGR. Idham

---

<sup>44</sup> Muhajir, *Idham Chalid*, h. 50.

yang mewakili NU tidak punya pilihan lain kecuali menerima hasil pertemuan itu. Memilih pilihan politik yang lain baginya akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi NU karena tidak mungkin melawan keputusan yang mendapat dukungan partai lain dan militer. Idham sadar bahwa meski pembentukan anggota DPR GR tidak melalui pemilu dan bertentangan dengan demokrasi, namun melawan kebijaksanaan politik tersebut dalam kondisi seperti itu akan menjadi bumerang bagi diri sendiri. Idham yang mewakili NU tidak mau mengambil risiko. Kaidah fiqh seperti *dar al-mafasid muqaddam 'ala Jalb al-mashalih* harus digunakan dalam kasus ini. Meski demikian, NU tetap meminta agar pemilu segera dilaksanakan.<sup>45</sup>

Di kalangan NU sendiri hasil keputusan Tampak Siring menjadi kontroversi. Ketidakpuasan terhadap keterwakilan partai Islam di dalam DPRGR (hanya 67 padahal sebelumnya 116) yang menyusut akibat tidak masuknya Masyumi menjadi keprihatinan bersama. Selain itu, persoalan legitimasi DPRGR juga menjadi masalah kontroversial di kalangan NU sendiri, ada yang pro ada yang kontra. Sebagian tokoh NU seperti KH. Bisri Sjansuri (w. 1980), Muhammad Dachlan (w. 1977) dan Imron Rosyadi (w. 1993) menilai pembentukan DPRGR itu tidak sah dan ikut terlibat di dalamnya juga tidak sah karena merampas hak rakyat dan bertentangan dengan demokrasi. Di pihak lain, sebagian tokoh NU seperti Idham dan Wahab Chasbullah menerima keputusan Tampak Siring karena situasi yang tidak memungkinkan untuk menentang keputusan itu. Bagi mereka NU belum siap berkonfrontasi dengan Orde Lama. Sikap menantang bisa membuat NU dikeluarkan dari pemerintahan dan kemungkinan NU akan dibubarkan sebagaimana yang dialami oleh Masyumi dan PSI bisa saja terjadi.

Meski sudah bermusyawarah, kedua kubu NU yang berbeda sikap ini belum dapat menemukan keputusan yang

---

<sup>45</sup> M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 161-163.

disepakati bersama. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyerahkan keputusan kepada masing-masing individu untuk bersedia atau tidak bersedia menerima penunjukan sebagai anggota DPRGR.<sup>46</sup> Sebagian kecil menolak ikut sementara sebagian besar memilih ikut dalam DPRGR. Dengan keikutsertaan sebagian besar tokoh NU dalam DPRGR menghindarkan mereka dicap sebagai kelompok oposan kekuasaan Presiden Soekarno.

Kelompok Islam modernis terutama Masyumi menilai Idham yang mewakili NU hanya mementingkan diri sendiri, oportunis, dan melalaikan perjuangan Islam yang lebih utuh dalam kebersamaan. Masyumi menganggap Idham hanya memperjuangkan NU saja dan tidak memperjuangkan kepentingan partai Islam lain seperti Masyumi dalam pertemuan Tampak Siring. Idham menolak tuduhan ini. Menurutnya, tuduhan itu tidak benar karena kehadirannya ke Tampak Siring adalah selaku ketua umum PBNU, bukan wakil umat Islam. Ia menyatakan bahwa memperjuangkan nasib NU saja sudah sulit bukan main, apalagi memperjuangkan kepentingan Masyumi atau umat Islam lain.<sup>47</sup> Dia sangat menyayangkan adanya kecaman bahwa seolah dirinya tidak memperjuangkan dan tidak membela sesama Islam. Menurutnya, tuntutan semacam itu di luar kemampuannya dan kemampuan partainya. Sebaliknya, ia balas mengkritik Masyumi yang dinilainya tidak memperlihatkan perilaku dan sikap yang konstruktif terhadap NU dan ulama NU, terutama tuduhan Masyumi bahwa NU sama dengan PKI. Ia menganggap sikap Masyumi itu seolah seperti ingin agar NU mengalami nasib yang sama dengan Masyumi. Ia mengatakan, "Namun sayang, sesudah matipun menyebar racun yang mengundang mati bersama."<sup>48</sup>

Mengenai pilihan-pilihan politik sulit NU dalam menghadapi keputusan politik Soekarno, pada tahun 1962

---

<sup>46</sup> Andree Feillard, *NU Vis-à-vis Negara; Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta: LkiS, 1999),h. 60-61.

<sup>47</sup> Haidar, *Nahdatul Ulama*, h. 166-167.

<sup>48</sup> Haidar, *Nahdatul Ulama*, h. 168.

dalam laporan pertanggungjawabannya di depan muktamar NU di Solo, Idham menyatakan:

Tugas yang berat ialah menyelamatkan hidup dan perjuangan partai NU sebagai alat dan tempat perjuangan dimana sebagian terbesar umat Islam menggantungkan nasib dan cita-citanya yaitu izzul islam wa muslimin (hal. 2). Berjuang pada saat normal saja bukan main sulitnya, apalagi dalam situasi seperti ini (hal. 3) ... sedikit saja lengah atau lalai, sedikit saja tidak mengerti arah angin, sedikit saja kemudi tidak disesuaikan dengan riak gelombang, niscaya akan karamlah kapal itu dengan segala isinya (hal. 4) ... maka dengan tangkas dan cekatan Partai kita menampung situasi itu, dan menempatkannya dalam posisi yang teraman dan termungkin yang dapat dikerjakan dan dapat dicapai ... dan dalam batas mana dia dapat bergerak.<sup>49</sup>

Dalam pidatonya, Idham juga menyampaikan adanya usulan agar NU kembali ke Khittahnya, yakni kembali menjadi jam'iyah sebagai organisasi sosial keagamaan seperti sebelumnya daripada menderita batin dan perasaan tersinggung secara terus menerus. Usul untuk kembali ke khittah itu ternyata tidak mendapat perhatian sehingga usul itu kemudian tenggelam. Idham sendiri menyatakan: "Masyumi yang dibubarkan berjuang sampai akhir untuk mendapatkan hak hidup kembali, mengapa justru NU hendak mengubur hak kepartaiannya sendiri."<sup>50</sup>

Selama ini memang ada semacam kekhawatiran di kalangan NU terhadap adanya tindakan pembubaran terhadap NU oleh kekuatan-kekuatan yang ada seperti yang dialami oleh Masyumi dan PSI. Idham sendiri menjawab kekhawatiran itu dengan mengatakan bahwa NU sebenarnya merupakan isme, suatu paham yang telah menyatu dalam budaya dan tradisi. NU sebagai organisasi mungkin saja bubar atau dibubarkan. Tetapi NU sebagai isme yang telah

---

<sup>49</sup> Dikutip dari Haidar, *Nahdatul Ulama*, h. 167-168.

<sup>50</sup> Mandan (ed.), *Napak Tilas*, h. 376.

melembaga dalam budaya dan tradisi tidak mungkin dibubarkan karena isme yang telah menyatu dalam masyarakat tidak memerlukan struktur dan organisasi formal.<sup>51</sup>

Idham menyatakan, sejak Dekrit Presiden sampai dengan pengesahan kembali partai NU pada 14 April 1961, tokoh-tokoh NU sedang mengalami keprihatinan yang mendalam. Pikiran mereka dipenuhi pertanyaan: Apakah NU masih boleh hidup atau tidak? Mereka khawatir tergilas Penpres no. 7 tahun 1959 dan Penpres No. 13 1960 tentang penyederhanaan partai dan syarat-syarat partai yang berhak hidup.<sup>52</sup> Namun kekhawatiran itu akhirnya sirna setelah NU diakui sebagai salah satu dari delapan partai politik yang diizinkan oleh pemerintahan Soekarno. Malah karena sikap akomodatif dan adaptifnya, NU dapat ikut bergabung dalam pemerintahan Soekarno sebagai salah satu pilar dari Nasakom yang digagas oleh Soekarno.

Dengan bergabungnya NU bersama pemerintahan Orde Lama, maka praktis NU yang dipimpin oleh Idham menjadi bagian dari Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis). Konsekuensinya NU berhadapan secara langsung dengan PKI yang mendapat tempat dalam pemerintahan Soekarno. Nasakom sendiri digunakan oleh Soekarno untuk mengimbangi kekuatan angkatan bersenjata yang semakin memantapkan posisinya berhadapan dengan PKI. NU yang antikomunis dan menjadi satu-satunya unsur agama dalam Nasakom memilih ikut bersama Soekarno meski harus berkumpul dengan PKI dalam pemerintahan. Keikutsertaan NU sendiri dimaksudkan untuk membendung dan menandingi pengaruh PKI. Artinya, NU memilih untuk berada di dalam 'ring' menghadapi PKI daripada berada di luar 'ring' yang membuat NU kurang mampu berbuat lebih banyak.

Idham sendiri yang dekat dengan Soekarno tampil sebagai 'pembela' gagasan Demokrasi Terpimpin dan

---

<sup>51</sup> Haidar, *Nahdatul Ulama*, h. 91-92.

<sup>52</sup> Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, h. 305.

Manipol Usdek. Dalam tulisannya yang berjudul *Islam dan Demokrasi Terpimpin* ia mencoba mencari kesesuaian antara Demokrasi Terpimpin dengan konsep *syura* dalam Islam.<sup>53</sup> Dalam pembelaannya terhadap persetujuan NU mengenai Demokrasi Terpimpin ia menyatakan, “dalam menyetujui Demokrasi Terpimpin pada umumnya haruslah ditekankan pada perkataan demokrasinya saja, oleh karena menjadi anutan di kalangan NU berdasarkan keyakinan Islam yang menjadi dasar pokok dari kita, bahwa sesuatu demokrasi yang tidak terpimpin akan menimbulkan anarchisme. Sebaliknya sesuatu yang terpimpin tanpa demokrasi mengantarkan kepada diktatorisme”.<sup>54</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Idham tidak memiliki keberatan terhadap gagasan Soekarno mengenai Demokrasi Terpimpin sebagaimana beberapa tokoh NU lainnya. Walaupun pro Soekarno, ia tetap antikomunis. Karena itu pada sisi lain ia juga mendukung angkatan darat yang menggalang kekuatan membendung pengaruh PKI. Pada tahun 1963, ia merupakan satu-satunya pimpinan partai politik yang membela organisasi SOKSI (Serikat Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia), yaitu organisasi yang berisi karyawan non-komunis, yang dibentuk oleh angkatan bersenjata dan Idham menyerukan agar NU menjalin kerjasama dengan SOKSI.

Bentuk perlawanan NU terhadap PKI juga dilakukan ketika Subandrio melakukan gerakan politik untuk mendiskreditkan TNI-AD dengan menyebarkan fitnah ke berbagai negara Asia-Afrika yang prokomunis. Melihat perkembangan solidaritas komunis yang semakin kuat, NU segera memprakarsai terbentuknya solidaritas Islam. Tanggal 6-14 Maret 1965 dilangsungkan KIAA (Konferensi Islam Asia Afrika) di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 155

---

<sup>53</sup> Analisis tentang tulisan Idham mengenai perbandingan antara Demokrasi Terpimpin dengan ajaran *syura* dalam Islam sebagaimana tertuang dalam *Islam dan Demokrasi Terpimpin* pada Muhajir, *Idham Chalid*, h. 69 dan seterusnya

<sup>54</sup> Husin Naparin, “KH. DR. Idham Chalid yang Kukenang”, dalam Muthalib dan Zamzam, (ed.), *KH. DR. Idham*, h. 55.

orang delegasi mewakili 33 negara dan 4 negara peninjau. KIAA kemudian memilih Lajnah Tandzimiyah di mana Idham dipilih sebagai presidennya. KIAA berhasil unjuk gigi di hadapan PKI. Akibatnya, suhu politik semakin memanas. Aksi-aksi PKI semakin brutal dan nekad. Kondisi ini membuat NU bersama organisasi-organisasi Islam lainnya menggalang persatuan menghadapi PKI.<sup>55</sup>

Perlawanan NU terhadap PKI yang dipimpin oleh Idham dan tokoh-tokoh utama NU lainnya berlangsung di semua lini, di dalam dan di luar pemerintahan. Konflik NU dan PKI yang terus berlangsung sepanjang periode Nasakom rupanya sampai ke telinga Presiden Soekarno. Idham kemudian dipanggil presiden. Sang presiden bertanya, "mengapa NU gontok-gotokkan dengan PKI?" Idham menjawab, "Kami tidak gontok-gontokan. Kami digontok PKI lalu kami menggontok kembali, kami diserang tentu saja kami balas dia".<sup>56</sup>

Reaksi sengit Idham terhadap PKI juga terjadi ketika pada tahun 1964 dalam sebuah sidang kabinet di Jakarta, Ketua CC PKI, D.N. Aidit meminta supaya Presiden Soekarno membubarkan GP Ansor Jawa Timur atau paling tidak membekukannya. Menurut Aidit, berdirinya Ansor/Banser Jawa Timur dianggap kontra revolusi, menghalangi pelaksanaan *landreform*, memusuhi rakyat, petani dan buruh tani (BTI). Mendengar permintaan itu, Idham yang saat itu menjadi Menko Kesra dan ikut dalam sidang kabinet itu, langsung membela Banser Jawa Timur dengan sengit. Akibatnya terjadi adu argumen yang sengit dari kedua belah pihak. Akhirnya, masalah ini diserahkan ke BPI (Badan Pusat Intelijen). Usaha PKI ternyata gagal, BPI tidak membekukan Ansor/Banser apalagi membubarkannya. Idham sendiri datang menghadiri Apel Besar Ansor/Banser

---

<sup>55</sup> Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, h. 311-312.

<sup>56</sup> Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, h. 306.

Jawa Timur di alun-alun kota Blitar dan menjadi inspektur upacara dalam rangka Deklarasi Banser Jawa Timur.<sup>57</sup>

Keterlibatan NU sebagai satu-satunya partai Islam dalam pemerintahan Orde Lama dengan ideologi Nasakomnya, membuat Idham sebagai tokoh penting NU pada saat itu mendapat posisi-posisi penting baik di pemerintahan maupun di parlemen. Posisi penting Idham antara tahun 1962 hingga 1964 masa kekuasaan Presiden Soekarno adalah Wakil Ketua MPRS dengan kedudukan sebagai Menteri Kabinet Kerja III (6 Maret 1962 – 13 November 1963) dan kemudian menjadi Wakil Ketua MPRS dengan kedudukan sebagai Menko Kabinet Kerja IV (13 November 1963 – 27 Agustus 1964). Posisinya sebagai pejabat negara tetap berjalan hingga tahun 1965. Pada saat itu ia menduduki jabatan Wakil Ketua MPRS dengan kedudukan sebagai Menko Kabinet Dwikora yang dijabatnya hingga 1966 (27 Agustus 1964 – 22 Februari 1966).

Dengan adanya jabatan-jabatan ini Idham dan tokoh-tokoh NU lainnya yang mendapat posisi penting dalam pemerintahan dapat melindungi posisi NU dari berbagai kekuatan yang sedang bertarung pada saat itu. Ia sendiri merasa bahwa NU yang dipimpinnya telah menjadi partai besar dan kuat berhadapan dengan kekuatan lainnya. Padahal, dulu NU sebagai partai sering dilecehkan dan diragukan kemampuannya berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam hal ini ia menyatakan: “Dulu NU diejek dan dicemoohkan oleh golongan tertentu sebagai partai bakiak dan tahlil, tetapi sekarang ternyata NU menjadi besar dan akan bertambah besar untuk memimpin umat Islam bukan saja di negara Indonesia, tetapi imamnya umat Islam di seluruh dunia”.<sup>58</sup>

Peristiwa G 30 S PKI pada tahun 1965 merupakan momen di mana perlawanan NU terhadap PKI mencapai

---

<sup>57</sup> Soeleiman Fadeli dan Muhammad Subhan, *Antologi NU Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah*, (Surabaya: Khalista, 2007), h. 38-42.

<sup>58</sup> Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam dan Politik Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 106.

puncaknya. Dalam peristiwa pemberontakan itu, tokoh-tokoh NU sendiri termasuk Idham berada dalam bahaya. Ia termasuk dalam daftar tokoh NU yang akan diculik dan dihabisi oleh PKI. Langkah NU yang pertama adalah mengamankan tokoh-tokoh NU dan mencari informasi siapa dalang gerakan ini. Mereka sebenarnya telah curiga bahwa dalang dibalik Gerakan 30 September adalah PKI.

Idham dan beberapa tokoh NU lainnya dalam rapat darurat memutuskan untuk meminta tokoh-tokoh senior NU untuk mencari perlindungan. Mereka dihimbau untuk tidak pulang ke rumah dan tidak keluar kota. Kepemimpinan NU untuk sementara diserahkan kepada tokoh muda NU, Subchan ZE (w. 1973), ketua IV PBNU. Subchan ditugaskan untuk menyelidiki siapa dalang dibalik peristiwa 1 Oktober dan diberi wewenang untuk bekerja kepada siapa saja. Subchan cepat bertindak dengan membentuk KAP Gestapu (Kesatuan Aksi Pengganyang Gerakan Kontra Revolusi 30 September) pada tanggal 4 Oktober. Munculnya surat pernyataan yang menuntut agar PKI dibubarkan dan menyerukan kaum muslimin untuk mendukung ABRI dalam memulihkan keamanan juga dipelopori oleh Subchan dan para pemuda. Pernyataan ini sendiri kemudian ditandatangani oleh para pemimpin NU termasuk Idham meski agak terlambat.

Tidak lama setelah pemberontakan PKI dan penumpasannya yang melibatkan massa NU segera terjadi polarisasi antara kubu pro Soekarno dan anti Soekarno di kalangan NU. Idham termasuk di antara tokoh NU yang meski anti PKI tetap pro Soekarno dan juga pro angkatan bersenjata sementara di kalangan pemuda NU yang dipimpin oleh Subchan ZE merupakan kubu yang anti PKI sekaligus anti Soekarno.

Pada pertengahan tahun terakhir 1965 setelah pemberontakan PKI, Idham bersama dengan tokoh senior NU seperti Wahab Chasbullah dan Saifuddin Zuhri masih diliputi kebingungan dan tetap bersikap hati-hati menyikapi posisi Presiden Soekarno. Mereka masih menunjukkan kesetiaan

bahkan pembelaan terhadap Soekarno. Pada awal tahun 1966 pada perayaan peringatan NU ke-40 yang dirayakan secara besar-besaran di Jakarta, Idham menyatakan NU akan hidup dan mati bersama Bung Karno untuk Allah. Sementara terkait dengan PKI Idham menyatakan bahwa pelarangan terhadap PKI sebagai urusan antara NU dengan Allah dan mengganggu ateisme sebagai kejahatan terbesar di dunia.<sup>59</sup>

Kesetiaan Idham dan beberapa tokoh NU lainnya terutama Wahab Chasbullah terhadap Soekarno tetap terlihat meski sudah terjadi pelimpahan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto dari Soekarno melalui Supersemar pada tahun 1966. Bahkan pada tahun 1967, Idham masih terus mengunjungi Soekarno di rumahnya di Bogor, ketika sang presiden berada di bawah pengawasan tentara Divisi Siliwangi. Kondisi presiden yang dapat dikatakan tengah mengalami tahanan rumah dan terkucilkan membuatnya merasa iba kepadanya.<sup>60</sup> Bagaimanapun ia tetap menghormatinya sebagai tokoh bangsa yang memiliki jasa besar terhadap kemerdekaan Indonesia dan tentu saja kepada NU yang selama ini dipimpinnya. Namun bagaimanapun akhirnya ia harus berpaling dari Soekarno karena penguasa baru telah mulai muncul, Jenderal Soeharto.

Melihat sikap Idham yang belum jelas, sejumlah aktivis muda dari Gerakan Pemuda Anshor membuat surat pernyataan yang memprotes kepemimpinannya yang mereka nilai menerapkan *safe playing policy* (memainkan kebijakan politik cari selamat). Ormas lain turut menandatangani surat itu. Surat pernyataan itu diterima dan dipelajarinya. Isi pernyataan itu mengesankan ia tidak bertanggung jawab sebagai ketua PBNU. Buktinya, dia tidak pernah ke kantor dan tidak pernah membuat pernyataan politik keluar melalui pers. Anak-anak muda NU kecewa dengan kepemimpinannya.

---

<sup>59</sup> Mengenai perbedaan antara kelompok konservatif-moderat dan kelompok muda NU mengenai Soekarno dan PKI dapat dilihat pada Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara*, h. 78-93.

<sup>60</sup> Feillard, *NU Vis-à-vis Negara*, h. 87-88.

Idham kemudian menanggapi pernyataan itu dengan menggelar pertemuan di rumah kediamannya di Jl. Mangunsarkoro. Mereka yang menandatangani surat pernyataan itu juga hadir. Ia menjelaskan secara panjang lebar posisinya pada saat-saat yang sulit pasca G30S PKI. Sebagai ketua umum, ia harus mengambil garis yang jelas dan tegas. Namun bagaimanapun hubungan dekat dengan Soekarno sebagai Presiden/Panglima Tertinggi ABRI dan Pemimpin Besar Revolusi harus disikapi dengan arif. NU harus keluar dari kesulitan ini dengan risiko sekecil mungkin. Keselamatan NU menjadi tujuan utama. NU memang mencari selamat. Idham berkata: “tunjukkan kepada saya siapa yang berpolitik tidak mencari selamat”.<sup>61</sup>

Idham juga mendapat kritik ketika ia kemudian berpaling mendukung Soeharto sebagai presiden. Aktivis muda NU kembali datang memprotesnya. Ia dituduh tidak mendukung proses demokratisasi di Indonesia. Ia menyangkal tuduhan bahwa ia tidak mendukung demokratisasi. Ia beralasan bahwa NU baru saja menyelesaikan masalah komunis, sisanya masih panjang. Jangan meminta demokrasi pada saat yang sama. Demokrasi ada waktunya sendiri. Ia menyatakan bahwa Allah menyelamatkan satu persatu tidak sekaligus. Biarkan Soeharto berkuasa. Setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya.<sup>62</sup>

Pasca pemberontakan PKI, Idham tetap memegang jabatan penting pada masa akhir pemerintahan. Tahun 1966 ia menjabat Wakil Perdana Menteri IV kabinet Dwikora yang disempurnakan, Wakil Ketua MPRS, Menteri Utama Bidang Politik *ad interim* merangkap Menteri Tenaga Kerja *ad interim*. Jabatan ini hanya berlangsung singkat, yakni antara 24 februari 1966 sampai 28 Maret 1966 (satu bulan lebih).

---

<sup>61</sup> Baidhawi Adnan, “Catatan Takziah Untuk KH. DR. Idham Chalid (2): Pandai Menangkis Serangan Anak Muda NU”, dalam Muthalib dan Zamzam (ed.), *KH. DR. Idham*, h. 81-82.

<sup>62</sup> Hasyim Muzadi, “Menyelamatkan Indonesia dari Disintegrasi Nasional”, Muthalib dan Zamzam (ed.), *KH. DR. Idham*, h. 41-42.

Berikutnya, pada tahun itu juga ia menjabat Wakil Perdana Menteri II Bidang Hubungan Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara Kabinet yang Disempurnakan lagi. Jabatan ini hanya dijabat dalam beberapa bulan, yaitu dari 28 Maret 1966 hingga 25 Juli 1966 (sekitar empat bulan). Inilah beberapa jabatannya pada masa akhir kekuasaan Soekarno.

Di sisi lain, pada saat Idham masih menikmati jabatan di pemerintahan Soekarno, kalangan aktivis muda NU yang memiliki hubungan dekat dengan petinggi militer seperti Jenderal AH. Nasution, mulai melancarkan gerakan untuk mereduksi pengaruh Soekarno dalam tubuh NU. Saat itu, muktamar NU kian dekat waktunya. Adanya beberapa tokoh NU yang masih setia pada Soekarno membuat para aktivis dan pelopor lahirnya Orde Baru memiliki kepentingan besar agar muktamar NU ke-24 ditunda beberapa tahun. Muktamar yang seharusnya diselenggarakan pada 1965 atau 1966 itu ditunda karena dikhawatirkan jika dilaksanakan pada tahun itu sebagian besar delegasi dari berbagai propinsi kemungkinan akan berpihak kepada Kiai Wahab CHasbullah yang masih pro Soekarno.

Saat muktamar ini diadakan pada tahun 1967 dalam pemilihan Wahab Chasbullah yang pro Soekarno kalah bersaing dengan Kiai Bisri Sjansuri. Bisri Sjansuri terpilih sebagai Rais Aam Syuriah baru dan Kiai Wahab sebagai wakil I (Rais I). Ini berarti posisinya turun dari posisi Rais Aam. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kiai Bisri, walaupun dalam banyak hal tidak sependapat dengan Kiai Wahab, merasa tidak pantas menggantikan posisinya dan kemudian mengundurkan diri, sehingga Kiai Wahab secara formal tetap berada di posisi puncak Syuriah sampai wafatnya, tidak lama setelah muktamar 1971.

Bagaimana dengan Idham Chalid, sang ketua Umum Tanfidziyah NU? Nasibnya hampir saja seperti Kiai Wahab Chasbullah. Pada tahun 1967 ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Idham telah meluas. Kepemimpinannya yang sudah berlangsung selama sebelas tahun itu sudah dianggap terlalu lama sehingga menimbulkan kejenuhan dan tidak

adanya kreativitas baru yang muncul dari kepemimpinannya. Ia juga dianggap tidak menggunakan kesempatan yang ada, tetapi selalu hanyut dalam arus politik. Sejak Orde Lama terutama pada saat Deskrit Presiden dan Nasakom, ia dalam pandangan penentangannya selalu menjadikan NU sebagai makmum bukan sebagai imam. Ketidakpuasan terhadapnya juga dipicu adanya sejumlah orang yang belum mendapat 'bagian' baik jabatan maupun fasilitas. Ketidakpuasan ini menimbulkan gerakan kelompok tertentu untuk menurunkannya dari posisi sebagai ketua umum PBNU. Muktamar NU yang ke-24 di Bandung ini menjadi kesempatan kelompok ini untuk mewujudkannya. Namun setelah melalui pertarungan seru dalam menentukan ketua umum, upaya penentangannya tidak berhasil. Ia belum dapat digeser dan tetap terpilih kembali menjadi ketua umum PBNU.<sup>63</sup>

Pada muktamar NU ke-24 di Bandung Juli 1967, Subchan menjadi salah satu calon ketua umum PBNU yang bertanding dengan Idham. Walaupun Subchan memiliki populeritas dan pengaruh di kalangan aktivis muda NU namun ia belum mampu menandingi Idham. Idham memperoleh suara 306 terpaut jauh dengan Subchan yang hanya memperoleh 9 suara, sementara tokoh lain yang juga ikut bertanding adalah Sjaichu (9 suara) dan Dachlan 19 suara. Menurut Feillard tidak ada satupun tokoh yang cukup berbobot untuk menandingi Idham yang luwes dan moderat.<sup>64</sup>

Menurut Fealy, kemenangan Idham yang mengejutkan pada muktamar itu disebabkan oleh sikapnya yang mampu mengesankan peserta muktamar dengan kerendahan hati, kebijaksanaan dan ketenangannya yang luar biasa. Dalam pidatonya ia sama sekali tidak merendahkan Orde Lama yang telah tumbang dan tidak pula mengelak bahwa ia pernah terlibat di dalamnya. Pernyataan-pernyataannya juga menunjukkan akan dukungannya pada Orde Baru. Selain itu, menurut Fealy, Idham juga telah

---

<sup>63</sup> Mahfoedz, *Kebangkitan Ulama*, h. 219-220.

<sup>64</sup> Feillard, *NU Vis-à-vis Negara*, h. 162-163.

mendapat dukungan dari kalangan militer, apalagi ia pada saat itu adalah mantan menteri utama pada kabinet Soeharto. Tidak kalah pentingnya adalah jaringan kerjasama antara Idham dengan sejumlah kyai NU dan kampanye para ‘klien’ dan santrinya yang mampu menghasilkan dukungan yang luas.<sup>65</sup>

Ketidakmampuan kelompok radikal yang dipimpin oleh Subchan menguasai NU pada saat itu sedikit banyak dipengaruhi oleh figur Subchan sendiri yang kontroversial terutama dari sisi gaya hidupnya yang dinilai kurang santri. Tahun 1966 ia pernah diskors dari keanggotaan NU selama tiga bulan karena kegemarannya bermain-main atau berdansa dengan wanita atau gadis yang bukan muhrimnya. Setahun kemudian (25 Mei 1967) ia kembali diskors dari pengurus PBNU karena gaya hidupnya meskipun ia kemudian direhabilitasi. Meski telah direhabilitasi ia tetap mengundang kemarahan kiai karena sikapnya yang radikal dan bicaranya yang blak-blakan.<sup>66</sup> Oleh penentangannya, Subchan dilabeli *play boy*, pemimpin NU yang tidak NU, santri sekuler, dan tokoh yang ekstrensik.<sup>67</sup> Sementara di kalangan militer dan Orde Baru, Subchan dianggap calon yang berisiko dan keras kepala.<sup>68</sup>

Dengan kemenangannya ini, Idham tetap memegang posisi ketua umum tanfidziyah NU untuk keempat kalinya sejak kongres NU di Medan. Ia juga mendapat jabatan menteri dari kabinet Ampera yang dibentuk oleh Soeharto pada 25 Juli 1966. Jabatan itu merupakan satu dari dua jabatan menteri yang diberikan Orde Baru kepada NU. Jabatan Menteri Kesejahteraan dijabat oleh Idham sedang jabatan menteri untuk NU yang satunya adalah jabatan Menteri Agama dijabat oleh Mohammad Dachlan.

Keterlibatan Idham dalam kabinet ini merupakan isyarat yang sangat jelas kalau ia telah berpaling dari

---

<sup>65</sup> Fealy, *Ijtihad Politik Ulama*, h. 341.

<sup>66</sup> Feillard, *NU Vis-à-vis Negara*, h. 163.

<sup>67</sup> Marijan, *Quo Vadis NU*, h. 128.

<sup>68</sup> Fealy, *Ijtihad Politik Ulama*, 341.

Soekarno yang saat itu berusaha agar kabinet ini gagal terbentuk. Pada saat itu terjadi dualisme kepemimpinan negara antara Soekarno (presiden secara formal) dan Soeharto (presiden *ad interim*). Idham menjabat sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat pada masa transisi itu dari 25 Juli 1966 hingga 17 Oktober 1967.

Jabatan lain yang dijabat Idham sebagai implikasi dari jabatannya sebagai Menteri Kesra adalah Ketua Bidang Pertimbangan Penanggulangan Bencana Nasional dan Koordinator Masalah Keluarga Berencana Nasional. Ketika kabinet Ampera disempurnakan, Idham tetap menduduki kembali jabatan menteri di bidang yang sama yaitu Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Ampera yang disempurnakan. Posisi ini dijabatnya dari 17 Oktober 1967 hingga 6 Juni 1968.

Maret 1968 MPRS mengukuhkan Jendral Soeharto sebagai presiden penuh. Orde Baru mencari partner baru untuk duduk di pemerintahan. Salah satu partai yang diperhitungkan adalah NU. Hanya saja NU memiliki beberapa kelemahan tertentu untuk bisa diajak duduk dalam pemerintahan, seperti ketidakmampuannya menonjolkan orang-orang yang dibutuhkan militer. Di tubuh NU misalnya, sulit ditemui orang-orang yang mampu memecahkan persoalan ekonomi. Memang beberapa tokoh senior masih dilibatkan di dalam pemerintahan seperti Idham, tetapi tidak dalam bentuk koalisi. Boleh dikatakan sebagai pelengkap saja. Pada kenyataannya Orde Baru lebih condong bekerjasama dengan cendekiawan dan para teknokrat.<sup>69</sup>

Idham sebagai pimpinan NU tetap diberi jatah oleh Orde Baru ketika Soeharto mendapat posisi sebagai presiden penuh (bukan lagi pejabat presiden). Ia kembali didudukkan pada 'pos' sebelumnya yaitu Menteri Negara Bidang Kesra Kabinet Pembangunan I dan kemudian menjabat Menteri Sosial *ad interim* Kabinet Pembangunan I. Jabatan ini

---

<sup>69</sup> Marijan, *Quo Vadis NU*, h. 92-93)

didudukinya sejak 6 Juni 1968 hingga awal tahun 1970-an. Inilah jabatan terakhirnya sebagai menteri.

Pada awal era Orde Baru muncul dua kubu dalam tubuh NU, yaitu kubu konservatif yang merupakan wadah para kiai termasuk di dalamnya Idham dan kubu radikal yang merupakan wadah kelompok kritis terhadap pemerintah Orde Baru dan kepemimpinan Idham. Kelompok radikal banyak didukung oleh para aktivis muda NU yang dimotori oleh Subchan ZE. Idham yang awalnya merupakan kelompok pro Soekarno kini sudah mampu bekerjasama dengan Orde Baru. Sebaliknya, Subchan yang anti Soekarno dan memiliki kerjasama yang erat dengan militer ketika melawan PKI kini malah sangat kritis dengan Orde Baru yang dinilainya tidak demokratis. Subchan sendiri cenderung agar yang menjadi presiden adalah Jenderal A.H. Nasution bukan Jenderal Soeharto. Karena itulah ia banyak mengkritik Orde Baru secara tajam. Idham yang berada pada kubu konservatif menilai langkah Subchan telah membahayakan NU.

**F. Idham pada Dekade 70-an: Ketua Umum PBNU, Ketua DPR/MPR dan Presiden PPP (1971-1980)**



Sebagai ketua PBNU, Idham telah berhasil membawa NU melewati masa krisis sebagai partai politik pada era Orde Lama dan awal era Orde Baru. Namun

Kepemimpinannya kembali diuji dengan akan diadakannya Pemilu kedua pada tahun 1971. Pemilu ini menjadi batu ujian baginya, apakah dia dapat memberikan

kemenangan dan keuntungan politis yang lebih besar bagi NU atau tidak. Adanya keretakan yang telah terlihat pada Muktamar Bandung mengenai pro kontra kepemimpinannya

masih belum terselesaikan. Keretakan ini merembes pada penyusun daftar calon anggota DPR. Pemilihan anggota mulai tidak memperhatikan kualitas calon tetapi lebih mengarah pada siapa teman yang dapat diajak bermain untuk memperkuat kelompok.<sup>70</sup>

Pada pemilu pertama masa Orde Baru NU harus melawan saingan berat, yaitu Golkar yang didukung oleh Angkatan Bersenjata. Rezim Orde Baru yang memiliki kepentingan memenangkan pemilu melancarkan pengawasan politik dan intimidasi kepada kaum tradisional dalam kampanye. Selain melakukan intimidasi dan praktik curang lainnya, Orde Baru juga menerapkan monoloyalitas kepada pegawai negeri. Mereka diwajibkan untuk memilih Golkar. Hanya Departemen Agama yang menterinya orang NU satu-satunya yang tidak mau melaksanakan keharusan ini sehingga kaum tradisional belum terpengaruh dengan adanya keharusan monoloyalitas ini. Namun, dampak dari ‘pembangkitan’ ini adalah munculnya isu bahwa NU akan kehilangan jabatan Menteri Agama setelah Pemilu. Isu ini kelak terbukti karena setelah pemilu Presiden Soeharto memilih A. Mukti Ali seorang intelektual muslim modernis sebagai menteri agama.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Mahfoedz, *Kebangkitan Ulama*, h. 223-225.

<sup>71</sup> Pengambilalihan Departemen Agama dari tangan NU sebenarnya sudah direncanakan sebelumnya oleh pihak Orde Baru. Departemen Agama merupakan satu-satunya departemen yang belum dapat dikooptasi oleh Orde Baru. Kehadiran Mohammad Dachlan dan unsur NU lainnya jelas menjadi ganjalan Orde Baru untuk mengambilalih Departemen Agama. Pada saat yang sama muncul sejumlah pegawai yang kecewa dalam tubuh Departemen Agama yang merasa tersingkir akibat penguasaan orang-orang NU terhadap Departemen Agama. Pegawai yang kecewa ini kemudian membentuk Korps Karyawan (Kokar) Departemen Agama. Kokar kemudian menjalin hubungan dengan CSIS dan keduanya ternyata memiliki kepentingan yang sama. CSIS ingin meng-Golkarkan Departemen Agama. Kokar yang dimotori oleh Muljanto Sumardi dan CSIS bekerjasama untuk melakukan restrukturisasi Departemen Agama untuk mengikis pengaruh NU di dalamnya. Kelompok inilah yang menentukan siapa pengganti Mohammad Dachlan. Setelah mendapat persetujuan Soeharto, Mukti Ali terpilih sebagai pengganti Mohammad Dachlan. Penggantian ini mengakhiri dominasi NU di Departemen

Kubu radikal dalam tubuh NU yang dimotori oleh Subchan melakukan melawan berbagai intimidasi dan kecurangan yang dilakukan oleh Orde Baru dalam masa kampanye. Subchan meneriakkan bahwa pemungutan suara akan dimanipulasi dan NU akan membuka kantor pembelaan hukum gratis bagi anggota NU yang diintimidasi. Bahkan, Subchan mengibarkan semangat jihad yang dipahami sebagai ancaman oleh pihak penguasa. Pemerintah kemudian menuduh NU telah membentuk komando jihad, yang dicap sebagai kelompok ekstremis.

Idham tidak ingin sikap radikal dan konfrontatif yang dilakukan oleh sebagian tokoh NU berlangsung terus menerus karena sikap ini akan menempatkan NU sebagai oposisi pemerintah Orde Baru. Ia melalui petunjuk harian PBNU yang ditandatangani meminta agar warga NU berpartisipasi dan bekerjasama dengan aparat pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketenteraman. Ia juga menyalahkan Subchan mengenai seruan jihadnya dan lebih mendukung Soeharto.<sup>72</sup>

Subchan sendiri tidak takut dengan intimidasi penguasa bahkan dia berani membantah isi pidato Presiden Soeharto dengan menyatakan bahwa pernyataannya tentang jihad telah disalahpahami oleh pemerintah. Menurut Subchan, Jihad yang dilontarkannya telah diartikan oleh pemerintah sebagai berontak kepada pemerintah.

Pernyataan Subchan dimuat di *Duta Masyarakat*, koran milik NU. Tidak lama setelah *Duta Masyarakat* memberitakan pernyataan Subchan, Idham selaku ketua PBNU segera merespon pernyataan Subchan karena dinilai telah membahayakan eksistensi NU baik sebagai partai maupun sebagai organisasi Islam. Karena itu, dia segera bantahan melalui RRI dan TVRI. Dalam pernyataannya

---

Agama pada masa Orde Baru. Lihat Ali Munhanif, "Prof. Dr. A. Mukti Ali; Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru" dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.), *Menteri-menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*, (Jakarta: PPIM, 1998), h. 289-292.

<sup>72</sup> Feillard, *NU Vis-à-vis Negara*, h. 156-158.

Idham menyatakan, “tidak tahu menahu dan sangat menyesalkan sikap Subchan ZE, bahwa bisa saja Soeharto sebagai pimpinan nasional memberikan peringatan kepada setiap warga negaranya untuk tidak berbuat hal-hal yang dapat membahayakan negara.”<sup>73</sup>

Berbedaan sikap antara Subchan dan Idham merupakan representasi dari polarisasi di tubuh NU antara kubu konservatif dan kubu radikal yang memuncak pada rivalitas antara Subchan dan Idham. Subchan ingin agar NU menjadi partai dan organisasi yang memiliki sikap tegas, bermartabat dan dihormati serta tidak terjebak pada sikap oportunisme. Sebaliknya, Idham menghendaki agar NU tetap bersikap luwes, toleran dan tidak melawan arus. Idham menghindari dampak politis yang akan muncul jika NU menentang pemerintah yang sedang berkuasa.<sup>74</sup>

Pada Pemilu 1971, Nahdatul Ulama menjadi pemenang kedua pemilu tetapi dengan perolehan jumlah kursi NU (58 kursi) yang cukup jauh dengan Golongan Karya (236 kursi). Meski NU berhasil mempertahankan jumlah kursinya bahkan sedikit menaikannya, tetapi hasil itu tidak menggembirakan bahkan hasil pemilu itu oleh sejumlah kalangan mengejutkan. Sejumlah kalangan baik intern maupun eksternal NU memperkirakan NU akan memenangkan pemilihan itu. NU sendiri kecewa dan mengeluhkan adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu. Kondisi ini semakin memperbesar jumlah kelompok radikal dalam tubuh NU. Kemenangan Golkar dengan ‘tatacaranya’ yang dianggap tidak *fair* membuat kalangan radikal NU yang sudah berseberangan dengan ABRI sejak tahun 1968 telah mulai memainkan peran sebagai oposisi secara terang-terangan. Padahal peran oposisi dan sikap konfrontatif adalah peran dan sikap yang selalu dihindari oleh NU pada masa sebelumnya. Akibat dari posisi ini intimidasi dan tekanan terhadap kegiatan-kegiatan NU pada di sejumlah daerah semakin meningkat.

---

<sup>73</sup> Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, h. 333.

<sup>74</sup> Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, h. 331-334.

Idham yang berada pada kelompok konservatif di NU yang memilih bersikap akomodatif, adaptif, dan terkesan membela pemerintah mendapat imbalan. Setelah Pemilu, ia dilantik menjadi ketua DPR/MPR untuk periode 1971-1977, suatu kehormatan yang tidak diberikan lagi kepada orang sipil dalam waktu lama dalam era Orde Baru. Posisi ini didapatkan atas simpati pemerintah kepadanya dan atas rekomendasi Ali Murtopo, asisten pribadi presiden Soeharto dan restu kiai Wahab Chasbullah.

Terlepas dari *'reward'* yang diberikan kepada Idham, NU juga mulai mendapat *'hukuman'*, jabatan menteri agama yang sejak Orde Lama hingga awal Orde Baru diberikan kepada NU, kini diberikan kepada Mukti Ali, dosen Perbandingan Agama IAIN Sunan Kalijaga. Menurut Feillard, keputusan yang diambil oleh pemerintah ini bukan disebabkan pengelolaan departemen tersebut yang kurang baik, melainkan lebih disebabkan oleh keinginan untuk menghapus kekuasaan NU yang menyerupai kekuasaan negara dalam negara.<sup>75</sup> Kondisi seperti ini sebenarnya yang mungkin dikhawatirkan oleh Idham terhadap munculnya sikap *'menantang'* sebagian tokoh dan warga NU terhadap pemerintah.

Pertentangan antara kelompok konservatif dan kubu radikal di tubuh NU semakin meruncing setelah diumumkannya kabinet baru Orde Baru yang tidak menempatkan satupun tokoh NU sebagai menteri Departemen Agama. Subchan yang merupakan tokoh utama kelompok radikal menjadi sasaran serangan ulama konservatif di tubuh NU. Konfrontasinya dengan Orde Baru sedikit banyaknya berpengaruh pada semakin kuatnya tekanan pemerintah dan tersingkirnya NU dari Depag. Serangan terhadapnya semakin gencar ketika berlangsung muktamar NU ke-25 di Surabaya. Muktamar ini dilaksanakan pada tanggal 20-25 Desember 1971. Pada muktamar ini sekali lagi Idham yang konservatif kembali berhadapan dengan Subchan yang radikal.

---

<sup>75</sup> Feillard, *NU Vis-à-vis Negara*, h. 160.

Sebagaimana muktamar di Bandung tahun 1967, dalam muktamar ini kepemimpinan Idham kembali menjadi sorotan dari kelompok radikal dan mereka yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Kelompok radikal yang menentangnya bahkan semakin meningkat jumlahnya. Kepemimpinannya yang fleksibel dan akomodatif pada era Orde Lama dan Orde Baru dinilai sebagai kepemimpinan yang lemah karena tidak membawa NU sebagai partai yang menentukan dan bertanggung jawab tetapi justru hanya mencari selamat. Tetapi, usaha menjegal Idham kembali gagal. Kontribusi Idham dalam membentuk cabang-cabang baru terutama di luar Jawa membuat NU yang awalnya memiliki cabang yang sedikit menjadi banyak. Ketika cabang-cabang itu berkembang Idhamlah yang menjadi pimpinan PBNU. Dia memilih tenaga yang dianggap tidak menyulitkan NU. Karena itu ketika posisinya digoyang, ia tetap tenang. Karena mereka yang tidak puas adalah orang-orang yang tidak menentukan dalam muktamar dan bukan berasal dari cabang-cabang yang dibentuknya.<sup>76</sup>

Pada muktamar ini memang terjadi perubahan situasi. Kelompok radikal yang dipimpin oleh Subchan telah membesar dan ia berusaha merebut kepemimpinan gerakan kaum ulama itu. Sekali lagi ia berhadapan dengan Idham, calon yang tetap populer, dihormati dan telah menarik simpati pemerintah. Memilih antara Idham atau Subchan sama artinya memilih antara akomodasi atau konfrontasi dengan pemerintah. Subchan nyaris menang. Sebenarnya muktamar telah memilihnya sebagai ketua umum PBNU tetapi karena tantangan kelompok eskternal (militer) dan sebagian ulama senior terutama KH. Bisri Syansuri (Wakil Rais 'Aam), Subchan batal dan gagal menjadi ketua Tanfidziyah. Kegagalan Subchan disebabkan Kiai Bisri tidak bersedia bekerjasama dengan Subchan sehingga menantang muktamirin antara memilih dia atau Subchan. Peserta muktamar tidak punya pilihan lain selain kembali memilih Idham sebagai ketua umum Tanfidziyah. Menurut Anam,

---

<sup>76</sup> Mahfoedz, *Kebangkitan Ulama*, h. 228-231).

kembalinya Idham menjadi Ketua Umum menimbulkan keberatan dari KH. As'ad Syamsul Arifin karena khawatir munculnya penilaian negatif jika NU selalu dipimpin oleh Idham. Namun Idham meminta kesempatan sekali lagi, apalagi saat itu dukungan terhadapnya juga diberikan oleh KH. Bisri Sjansuri dan KH. Wahab Chasbullah. Akhirnya, Kiai As'ad bersedia ia memimpin kembali NU dengan catatan muktamar berikutnya posisi ketua umum bukan 'jatah' Idham lagi.<sup>77</sup> Faktor lain yang juga sangat menentukan selain dukungan ulama berpengaruh NU dan muktamirin adalah keberpihakan pemerintah Orde Baru kepada Idham yang lebih memilih bekerjasama dengan pemerintah daripada Subchan yang bersikap oposisi pada pemerintah.

Subchan sendiri yang mendapat dukungan dari kalangan aktivis muda NU menjadi wakil ketua I PBNU meski KH, Bisri Sjansuri keberatan dengan posisinya itu. Namun posisi ini tidak lama diduduki Subchan. Ketika Wahab Chasbullah wafat tahun 1971 dan digantikan oleh Bisri Sjansuri, kiprah Subchan di NU berakhir. Pada tanggal 21 Januari 1972, Subchan 'dibebaskan' untuk selamanya dari NU melalui surat yang ditandatangani oleh Kiai Bisri, Idham dan Kiai Dachlan. Konon tindakan ini diambil didasarkan pada 'wasiat Kiai Wahab' sebelum wafat. Tindakan ini segera menimbulkan kontroversi, apalagi Subchan menolak dikeluarkan. Tetapi kontroversi ini berakhir setelah Subchan tewas dalam kecelakaan mobil di Makkah.<sup>78</sup> Orang-orang yang bersimpati pada Subchan mencurigai adanya Opsus (Operasi Khusus) yang melakukan manuver dan intervensi sehingga membuat Subchan terdepak dari NU. Kelompok militer dicurigai terlibat karena jelas tidak menginginkan Subchan menang dalam muktamar karena hubungan mereka yang semakin memburuk.

Pada tahun 1972, Orde Baru mulai menerapkan gagasannya untuk menyederhanakan partai. Sebenarnya penyederhanaan partai melalui fusi partai-partai telah

---

<sup>77</sup> Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, h. 189.

<sup>78</sup> Feillard, *NU Vis-à-vis Negara*, h. 163-165.

dicetuskan presiden Soeharto tahun 1967. Namun usulan ini mendapat tantangan karena membahayakan eksistensi partai. Idham sendiri pada saat itu menyatakan bahwa tidak ada satu kekuatan pun bisa menghilangkan NU kecuali Allah. Partainya dengan senang hati bersedia bekerjasama dengan partai-partai lain, tetapi tanpa bergabung dengannya.<sup>79</sup> Namun setelah Golkar memenangkan pemilu secara telak pada tahun 1971, tidak ada kekuatan partai lain yang bisa menghalangi keputusan pemerintah termasuk NU. Idham bersama NU mau tidak mau harus menerimanya meski dengan berat hati. Mulai tahun 1972 fusi NU dengan partai lain mulai dirintis. Pada tanggal 5 Januari 1973 Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan fusi dari partai NU, Parmusi (MI), PSII dan Perti dideklarasikan. Deklarasi ini ditandatangani oleh Idham dan KH, Masjkur (NU), MS. Mintaredja (MI), Anwar Tjokroaminoto (SI), dan Rusli Halil (Perti). Komposisi kepengurusan PPP pada fase awal ini didominasi oleh unsur NU. Beberapa jabatan penting diduduki oleh tokoh-tokoh NU. Idham sendiri terpilih sebagai Presiden Partai PPP.

Fusi ini pada awalnya masih menguntungkan NU karena komposisi pembagian kursi partai masih dikuasai NU sebagai pemenang kedua Pemilu 1971. Namun lama kelamaan dominasi NU di PPP secara sistematis mulai dikurangi dan digusur. Kondisi ini tidak hanya karena perebutan jatah di kalangan internal partai terutama antara MI (Muslimin Indonesia) dan NU tetapi juga karena adanya intervensi pemerintah yang tidak senang dengan radikalisme politisi NU di parlemen. Idham sendiri tidak dapat berbuat banyak untuk mencegah konflik di tubuh PPP dan juga tidak mampu mencegah radikalisme dan sikap oposan beberapa politisi NU kepada pemerintah. Tahun 1973 RUU perkawinan yang diajukan pemerintah ditentang keras oleh tokoh-tokoh NU terutama KH, Bisri (Rais Aam NU) sehingga terjadi perundingan antara ABRI dan NU di luar DPR. Polemik mengenai RUU perkawinan ini berakhir

---

<sup>79</sup> Feillard, *NU Vis-à-vis Negara*, h. 173.

setelah RUU itu direvisi dan mengakomodasi dua pertiga keinginan NU (PPP).

Pada Pemilu 1977 suara partai Islam (PPP) mengalami sedikit peningkatan dibanding Pemilu 1971. Peningkatan ini tidak lepas dari peran NU dalam menjaring suara meski sejak fusi mereka mendapat berbagai tekanan dan rintangan dari aparat pemerintah terutama dalam hal izin kegiatan. Setelah tekanan ini agak mengendur, masalah baru kembali terjadi. Pada tahun 1978 polemik baru kembali terjadi antara pemerintah dengan unsur NU di PPP. Polemik dipicu masalah aliran kepercayaan dan masalah pelaksanaan P4. Politisi NU di PPP menolak eksistensi aliran kepercayaan yang ingin diakui secara resmi oleh negara dan NU juga menginginkan agar aliran kepercayaan dicoret dari semua dokumen resmi MPR dan GBHN. NU juga menolak pelembagaan P4 karena khawatir P4 akan menggantikan agama dan menjadi dasar pedoman segala kegiatan. Peran penting dari aksi protes NU ini dimainkan oleh KH. Bisri Sjansuri, Ketua Majelis Syuro PPP dan Rais Aam PBNU. Dia bahkan mendatangi presiden Soeharto berkaitan dengan masalah tersebut. Namun pemerintah tidak bergeming. Akhirnya, unsur NU dalam PPP melakukan *walkout* meninggalkan sidang saat pemungutan suara mengenai pelembagaan P4. Hal yang sama juga dilakukan pada saat pemungutan suara mengenai pengakuan terhadap aliran kepercayaan.

Sikap oposan PPP yang dimotori oleh unsur NU ini dianggap menantang pemerintah. Akibatnya, upaya intervensi untuk melakukan depolitisasi NU terutama menyingkirkan unsur radikal NU dalam PPP mulai dilakukan secara kasar. Ketua umum PPP, Mintaredja diangkat menjadi duta besar untuk Belanda dan Naro ditunjuk sebagai penggantinya di PPP tanpa melalui mekanisme partai. Walaupun kelompok NU banyak yang tidak setuju, namun Idham sebagai Presiden PPP dan Ketua Tanfidziyah PBNU menyetujui penunjukkan Naro sebagai pemimpin partai dan akan dibicarakan lagi pada muktamar berikutnya.

Pada tahun 1978, jabatan Idham sebagai ketua MPR/DPR hasil pemilu tahun 1971 telah berakhir. Idham tidak lagi menduduki jabatan itu meski suara PPP meningkat pada pemilu 1977. Posisi Idham yang baru yang diberikan Orde Baru untuknya adalah Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang dijabatnya sejak tahun 1978. Walaupun posisi ini kurang menentukan tetapi ini merupakan tanda bahwa Idham masih dianggap mitra penting pemerintah.

Di tengah kesibukannya di partai dan pemerintahan, Idham tetap memperhatikan perkembangan perguruan yang telah didirikannya pada dekade 50-an. Melalui Yayasan Darul Ma'arif ia berhasil mengembangkan Perguruan Darul Ma'arif. Pada tahun 1979, perguruan ini telah memiliki beberapa jenjang pendidikan yaitu Madrasah Aliyah (telah berdiri sejak tahun 1962), SD Islam (telah berdiri sejak tahun 1964, TK Islam (berdiri tahun 1974), SLTP dan SMU (keduanya berdiri pada tahun 1979).

Pengembangan Perguruan Darul Ma'arif ini menunjukkan bahwa komitmen Idham pada dunia pendidikan tidak pernah surut meski dia disibukkan dengan berbagai persoalan sebagai konsekuensi dari berbagai jabatannya. Hanya saja, pada akhir 1970-an kondisi fisik bangunan Perguruan Darul Ma'arif terlihat kumuh dan menyedihkan. Kondisi ini disebabkan oleh keinginan Idham sendiri agar lembaga pendidikan yang didirikannya diperuntukkan untuk kalangan menengah ke bawah. Biaya untuk memasuki Darul Ma'arif diusahakan semurah mungkin dan dapat dijangkau oleh semua lapisan. Akibatnya, Darul Ma'arif sering mengalami kendala dana untuk membiayai perguruan ini, baik masalah pembangunan dan pemeliharaan bangunan fisik maupun menyangkut kesejahteraan para staf pengajarnya. Ia bahkan menolak jika perguruan yang didirikannya ini diubah menjadi lembaga pendidikan unggulan dan elite apalagi berorientasi bisnis. Meski ia cenderung menolak bantuan pemerintah, namun dalam kondisi tertentu Darul Ma'arif juga menerima bantuan pemerintah. Pada tahun 1970-an Darul Ma'arif menerima bantuan dari Pemerintah DKI Jakarta pada

masa Gubernur Ali Sadikin (1966-1977) dan Tjokropanolo (1977-1982).

Posisi Idham sebagai Ketua DPA dan mitra pemerintah tidak dapat membantunya untuk menghilangkan tekanan pemerintah pada satu sisi dan ketidakpuasan sebagian warga dan tokoh Nahdliyyin pada sisi yang lain. Ketidakpuasan terhadapnya terlihat kembali pada saat berlangsungnya muktamar NU ke-26 di Semarang tanggal 6-11 Juni 1979. Ia tidak lagi mendapat dukungan Rais Am Kiai Bisri Sjansuri yang menentang pengangkatannya kembali sebagai ketua tanfidziyah. Demikian juga dengan Kiai As'ad Syamsul Arifin dari Situbondo. Kepengurusannya sebagai pemimpin NU sejak tahun 1956 mendapat berbagai kritik. Ia dinilai pengkritiknya sebagai orang yang cenderung suka merahasiakan hal yang mestinya diketahui umum dan tidak memberikan dukungan pada cabang-cabang daerah yang mengalami tekanan dari pemerintah sehingga dalam beberapa kasus menyebabkan hancurnya cabang tersebut, terutama selama masa kampanye pemilu 1971-1977. Dengan demikian ia dianggap kurang memperjuangkan kepentingan organisasinya. Sebagai ketua tanfidziyah, ia tampaknya lebih bertanggung jawab kepada pemerintah daripada ke Syuriah. Idham juga dianggap telah meminggirkan peran kiai sebagai benteng spiritualitas jam'iyah maupun jama'ah. Banyak keputusan yang diambil tanpa berkonsultasi dengan kiai sehingga muncul kesan bahwa ia bersama politisi lainnya berjalan sendiri tanpa mepedulikan kepentingan organisasi.

Di samping itu, dominasi kelompok politisi dalam kepengurusan NU juga menimbulkan ketidakpuasan. Dominasi kaum politisi yang besar ini memunculkan kelompok dalam tubuh NU yang benar-benar anti politik dan kurang respek terhadap politik NU dalam muktamar ini. Ketidakpuasan juga dialami kelompok baru dari kalangan generasi muda yang menginginkan NU kembali ke fungsi sosial keagamaan, menjauh dari panggung politik tanpa meninggalkannya secara total. Kelompok ini didukung oleh

para ulama yang merasa disingkirkan ke baris kedua oleh orang-orang politik.<sup>80</sup>

Banyaknya dikritik dan hilangnya dukungan beberapa ulama senior ternyata belum mampu menurunkan Idham. Di luar dugaan, ia terpilih kembali menjadi ketua umum Tanfidziyah. Begitu pula dengan sebagian besar tokoh NU yang berkecimpung dalam kegiatan politik kembali masuk dalam jajaran pengurus PBNU. Kemenangan orang-orang politik ini sangat mengejutkan para ulama. Kiai Bisri tidak menyetujui susunan pengurus PBNU yang baru. Kiai As'ad Situbondo meninggalkan muktamar untuk menyatakan kekecewaannya. Beberapa aktivis NU, seperti Imran Rosyadi dan Saifuddin Zuhri menyatakan meletakkan jabatan mereka. Achmad Sjaichu, saingan Idham, calon ketua Tanfidziyah, mengumumkan bahwa ia meninggalkan NU.<sup>81</sup>

Terpilihnya kembali Idham sebenarnya memicu polemik dan ketidakpuasan. Pasalnya, sebelum muktamar berlangsung, Idham berjanji untuk tidak mencalonkan diri lagi sebagai ketua umum PBNU dan juga tidak akan bersedia dicalonkan lagi. Pernyataan ini disampaikannya untuk memberikan kesempatan kepada calon lain yang relatif lebih muda untuk mencalonkan diri seperti Syaichu, Tolhah Mansyur, Yusuf Hasyim dan Saifuddin Zuhri. Ia bahkan bersedia untuk mendukung mereka jika mencalonkan diri menjadi ketua umum PBNU. Tetapi sangat mengejutkan, menjelang pemilihan ketua umum PBNU ternyata ia bersedia dicalonkan kembali ketika sejumlah cabang mencalonkan dirinya. Dalam pemilihan, dia kembali terpilih sebagai ketua umum PBNU sementara calon-calon lainnya gagal. Tindakan ini tentu saja mengecewakan calon-calon lainnya yang telah dijanjikan olehnya. Mereka merasa terkecoh. Akibatnya, Syaichu menyatakan dirinya keluar dari NU dan mendirikan organisasi sendiri yang bernama Ittihadul Muballighin.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Feillard, *NU Vis-à-vis Negara*, h. 210-211.

<sup>81</sup> Feillard, *NU Vis-à-vis Negara*, h. 212-213.

<sup>82</sup> Fathoni dan Zein, *NU Pasca Khittah*, h. 57; Marijan, *Quo Vadis NU*, h. 137-138.

Cerita lain disampaikan oleh Anam. Menurutnya, menjelang muktamar di Semarang, KH. As'ad memperingatkan sesuai janji pada muktamar di Bandung (1971) bahwa pada muktamar ini bukan lagi jatah untuknya. Idham *sami'na wa atha'na*, setuju mundur. Bahkan beberapa waktu menjelang muktamar NU di Semarang kepada wartawan ia menyampaikan niatnya untuk tidak lagi mencalonkan diri sebagai ketua umum PBNU dan ia bertekad memperkuat barisan Syuriah. Namun kenyataan menunjukkan ketika muktamar, beredar surat pernyataan Idham mencalonkan diri dan bersedia dipilih kembali menjadi ketua umum PBNU.<sup>83</sup>

Sebenarnya, pada saat muktamar kritik pedas telah dialamatkan pada kepemimpinan Idham. Kritik-kritik itu hampir membuat ia tidak terpilih lagi. Para kiyai pun tidak sedikit yang menginginkannya mundur karena sudah terlalu lama memimpin NU. Namun, ia memiliki strategi sendiri dalam menghadapi kritik yang bertubi-tubi padanya ketika ia menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan NU periode sebelumnya. Ketika dikritik secara bertubi-tubi, ia tidak memberikan komentar pembelaan diri, tetapi meminta maaf dan mengakui kesalahan-kesalahannya. Ia tidak melemparkan kesalahan dan tanggung jawab pada orang lain atau membuat alasan untuk membela diri. Sikapnya dalam menanggapi kritik ini ternyata lebih diterima oleh peserta muktamirin. Berbeda dengan A. Syaichu yang menjadi rival kuatnya pada muktamar itu. Ketika ia dikritik, ia menanggapi dengan memberikan jawaban-jawaban argumentatif untuk menangkis kritik yang ditujukan kepadanya. Pembelaan diri A. Syaichu ini tampaknya kurang diterima sehingga dia gagal memperoleh simpati peserta muktamirin.<sup>84</sup>

Faktor lain yang ikut menentukan kemenangan Idham adalah pertama, keberpihakan pemerintah padanya masih kuat sementara Syaichu yang menjadi rivalnya dianggap

---

<sup>83</sup> Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, h. 189.

<sup>84</sup> Fathoni dan Zein, *NU Pasca Khittah*, h. 57-58.

sebagai mitra yang kurang bisa dipercaya dan sering melontarkan kritik kepada pemerintah. Kedua, faktor dukungan yang kuat dari luar Jawa terutama Kalimantan memberikan kontribusi besar terhadap kemenangannya.

Situasi semakin sulit ketika sikap ‘menantang’ politisi NU di PPP terhadap RUU Pemilu diperlihatkan secara terbuka dengan cara memilih tidak hadir ketika RUU itu disahkan secara aklamasi. DPP-PPP sendiri menerima rumusan RUU Pemilu melalui surat yang ditandatangani oleh Idham, Naro, Masjkur dan Jahja Ubaid. Sikap menantang ini mengakibatkan Presiden Soeharto ‘marah’ dalam dua pidatonya Presiden Soeharto menunjukkan bahwa penentangan terhadap P4 dan RUU Pemilu 1980 merupakan ancaman terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang harus diwaspadai dan dilawan.<sup>85</sup> Situasi kemudian tambah rumit ketika KH. Bisri Sjansuri wafat pada tanggal 25 April 1980. Posisi sang kiyai sangat penting baik di tubuh NU maupun PPP mengingat perannya sebagai penjaga keseimbangan di tubuh PPP antara unsur NU dan MI.

#### **G. Peristiwa Mei 1982 dan NU kembali ke Khittah (1981-1990)**



Posisi Rais Aam yang ditinggalkan oleh Kiai Bisri dibiarkan lowong selama satu setengah tahun. Posisi ini baru diisi ketika diadakan Musyawarah Nasional di Kaliurang 30 Agustus-2 September 1981. KH. Ali Maksum terpilih sebagai Rais Aam menggantikan Kiai Bisri Sjansuri. Idham sebenarnya menginginkan agar KH. Musaddad,

---

<sup>85</sup> Lihat beberapa cuplikan pidato Presiden pada Feillard, *NU Vis-à-vis Negara*, h. 215-216.

pendukungnya, menjadi Rais Aam. Namun Musaddad tidak terpilih. Peristiwa ini sering dianggap sebagai tanda awal kekalahan kubu Idham.

Pada tahun 1981 keretakan dalam tubuh PPP semakin lebar. Ini dipicu persoalan jatah kursi NU dan MI dan masalah penyusunan daftar calon legislatif yang disusun secara 'sepihak' oleh Naro. Daftar calon legislatif yang disusun oleh Naro selain mengurangi jatah kursi NU di PPP dari 56 menjadi 49 kursi juga menurunkan nomor urut tokoh-tokoh NU baik tingkat nasional maupun tingkat daerah dari nomor jadi ke nomor tidak jadi. Misalnya, KH. Saifuddin Zuhri (Rais 'Aam III PB Syuriah NU) dari nomor 1 ke nomor 20; H.M. Zamroni (Wakil Sekjen PBNU) dari nomor 5 ke nomor 28; KH. Yusuf Hasyim (ketua I PBNU) dari nomor 1 ke nomor 31; Drs. H.A. Chalik Alie (Bendahara PBNU) dari nomor 7 ke nomor 43.

Ketika daftar tadi diumumkan, kegemparan dan kehebohan segera terjadi di kalangan NU. Reaksi keras terjadi di mana-mana. Kenyataan ini dianggap sebagai peristiwa paling naas bagi NU. Idham sendiri sebagai Ketua Umum PBNU tidak memberikan komentar. Padahal kalangan NU dan massa pendukung PPP berharap agar ia mampu menjernihkan persoalan ini. Sikapnya yang tidak jelas itu kemudian memicu munculnya kritik yang tidak hanya dialamatkan pada J. Naro (Ketua Umum PPP) tetapi juga ditujukan kepadanya selaku Presiden PPP. Apalagi sebelum daftar itu diserahkan kepada LPU (Lembaga Pemilihan Umum), ia menelpon Naro untuk 'menitipkan' sejumlah nama kyai yang meminta menjadi calon jadi.

Keretakan dan perpecahan di tubuh PPP dan di kalangan NU tidak dapat lagi disembunyikan. Di PPP perpecahan itu terjadi antara unsur NU dan unsur MI, sementara di pihak NU muncul dua kelompok yang berbeda sikap yang tidak bisa disatukan. Kelompok pertama terdiri dari tokoh-tokoh yang ingin agar NU tetap berfusi dalam PPP, mereka adalah KH. Ali Maksum, Mahbub Djunaidi, Amin Iskandar, dan Chalid Mawardi. Kelompok kedua

terdapat tokoh-tokoh NU yang menginginkan agar NU keluar dari PPP, mereka antara lain adalah KH. Saifuddin Zuhri, Imron Rosyadi, Yusuf Hasyim, Abdurrahman Wahid, dan Chalik Ali.<sup>86</sup>

Idham selaku Ketua Umum PBNU bersama dengan pimpinan NU lainnya, KH. Ali Ma'shum (Rais Aam) dan H.M. Munasir (Sekjen NU) menandatangani surat pernyataan yang kemudian dikirimkan kepada LPU dan DPP-PPP untuk memprotes daftar calon yang disusun oleh J. Naro. Memang ada kecurigaan bahwa daftar itu sengaja dibuat sedemikian rupa untuk menggusur unsur NU yang kritis terhadap pemerintah dan adanya keinginan kuat dari MI untuk mengubah komposisi agar terjadi perimbangan wakil unsur dalam DPR hasil pemilu 1982.

Orde Baru juga sangat berkepentingan untuk menyingkirkan unsur-unsur NU yang bersikap oposan terhadap pemerintah. Mereka adalah unsur-unsur Politisi NU yang melakukan beberapa kali *walk out* seperti yang terjadi pada penolakan RUU perkawinan tahun 1973-1974 dan masalah aliran kepercayaan pada SU MPR 1976, masalah P4 dan masalah aliran kebatinan pada SU-1978, dan masalah RUU Pemilu tahun 1980. Indikasi ini terlihat dari muncul 'ancaman dari unsur MI dalam PPP yang diwakili oleh Sudardji dkk yang menyatakan bahwa perombakan itu akan disertai dengan pembersihan unsur-unsur Orde Lama dan mereka yang *walk out* pada saat pengesahan RUU Pemilu tahun 1980. Karena itulah ketika Idham dan pimpinan NU lainnya melayangkan surat protes, surat itu sudah tidak dapat mengubah keadaan karena jelas pemerintah melalui LPU/Mendagri berpihak pada daftar yang dibuat oleh Naro. Akibatnya, banyak tokoh NU yang kecewa.

Tokoh-tokoh NU sebenarnya menaruh harapan kepada Idham dalam kapasitasnya sebagai presiden PPP dapat menemukan solusi perdamaian dan kalau perlu memberikan pembelaan terhadap tokoh-tokoh NU yang

---

<sup>86</sup> Baca konflik NU dengan MI pada Machfoedz, *Kebangkitan Ulama*, h. 275-286.

tersingkir. Namun Idham tidak menyampaikan sikapnya. Tampaknya, posisinya serba sulit karena posisinya terjepit dengan berbagai kepentingan kelompok, yaitu NU yang terpecah menjadi kubu oposisi pemerintah dan kubu Idham sendiri yang akomodatif pada kepentingan pemerintah, PPP yang di dalamnya terdapat kubu MI yang menuntut perimbangan dan mendapat dukungan pemerintah, dan terakhir pihak pemerintah yang ‘gusar’ dengan sejumlah politisi NU yang bersikap oposan.

Konflik ini semakin memanas ketika KH. Saifuddin Zuhri, salah seorang Ketua DPP-PPP dan tokoh NU berpengaruh yang masuk dalam daftar yang ‘disingkirkan’ menyatakan mengundurkan diri. Hanya saja Pemilu yang sudah dekat membuat NU harus segera meredam konflik ini untuk berkonsentrasi menghadapi pemilu sekaligus memberi arah kepada warga NU untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu.

Keretakan dalam tubuh PPP yang terjadi menjelang pemilu 1982 kemudian merembet ke dalam tubuh NU setelah pemilu. Ketika konflik dengan PPP mulai mereda, konflik terbuka di tubuh NU justru memanas. Bermula dari pertemuan Kawatan di Kampung Kawatan Surabaya yang dihadiri oleh beberapa ulama berpengaruh NU, yaitu KH. As’ad Syamsul Arifin, KH. Ali Ma’shum, KH. Machrus Ali, KH. Achmad Shiddiq, dan KH. Mudjib Ridwan (tuan rumah). Pertemuan ini berlangsung pada tanggal 1 Mei 1982 dari pukul 10.00 hingga 11.00 siang (sekitar satu jam). Pertemuan ini memperbincangkan tentang berbagai masalah yang melanda NU dan yang terpenting adalah masalah kepemimpinan Idham Chalid dan kondisinya yang sering sakit. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk mendorong Idham untuk lebih aktif di kepengurusan PBNU dan jika ia tidak mampu aktif karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan mereka sepakat memintanya untuk mengundurkan diri secara ikhlas dan terhormat.

Keesokan harinya, 2 Mei 1982 mereka berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan hasil pembicaraan dan usul

mereka secara langsung kepada Idham. Selama dalam pesawat dari Surabaya menuju Jakarta, mereka memperbincangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi saat bertemu dengan Idham, terutama jika Idham bersedia mengundurkan diri. Di pesawat mereka kemudian membuat konsep surat pengunduran diri untuk Idham jika ternyata ia bersedia mundur jabatannya dari Ketua Umum PBNU. Setibanya di Jakarta, di rumah KH. Masjkur, konsep surat itu disempurnakan lagi kemudian diketik dan hasilnya kemudian ditelaah kembali oleh para ulama senior itu.

Setelah menilai isi surat yang dipersiapkan sudah memadai, rombongan ulama senior yang terdiri dari KH. As'ad Sjamsul Arifin, KH. Machrus Ali, KH. Ali Ma'shum, KH. Masjkur, KH. Mudjib Ridwan dan dr. Muhammad berangkat menuju rumah Idham di Jl. Mangunsarkoro. Pertemuan antara ulama senior dan Idham berlangsung akrab. Di sela pembicaraan, ulama senior mengajukan alternatif agar Idham bersedia mengundurkan diri jika kesehatannya tidak mendukungnya untuk memimpin NU dan kemudian menyerahkan jabatannya kepada Rais Aam untuk memusyawarahkan penggantinya.

Idham yang memang memiliki rencana untuk mengundurkan diri tampak gembira dengan jalan keluar yang diusulkan oleh ulama senior. Ia setuju dengan usul para ulama senior itu untuk mengundurkan diri. Para ulama senior kemudian menunjukkan kepadanya konsep surat pengunduran diri yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk dipelajari. Setelah membaca surat itu Idham meminta agar konsep surat itu disempurnakan. Untuk alinea pertama ia meminta tambahan kalimat: “sesuai dengan nasehat Y.M. para alim ulama sesepuh Nahdlatul Ulama yaitu: Bapak K.H. As'ad Sy. Arifin, KH. Machrus Ali, KH. Masjkur.” Kalimat ini ditambahkan agar tidak muncul kesan bahwa ia sengaja lari dari tanggung jawab memimpin NU. Ia juga meminta agar tanggal surat 2 Mei 1982 diganti menjadi 6 Mei 1982. Permintaan ini dimaksudkan agar tidak muncul kesan bahwa surat itu sengaja dibuat untuk mengganggu pelaksanaan pemilu. Permintaan Idham yang terakhir adalah surat itu

diumumkan pada tanggal 6 Mei 1982. Semua permintaan Idham ini dipenuhi. Surat itu kemudian diketik ulang untuk disempurnakan.<sup>87</sup>

Setelah dilakukan revisi dan diketik ulang, isi surat pengunduran diri Idham yang telah disempurnakan itu berbunyi sebagai berikut:<sup>88</sup>

Bismillahirrahmanirrahim

Surat pertanyaan

Sesuai dengan nasihat *al-mukarram* para alim ulama sesepuh Nahdhatul Ulama yaitu: K.H. As'ad Syamsul Arifin, K.H. Machrus Ali, K.H. Masykur maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DR. K.H. Idham Chalid

Jabatan: Ketua Umum P.B. Nahdlatul Ulama

Bersama ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: mengingat kondisi fisik dan kesehatan saya selama ini, maka sejak hari ini tanggal 6 Mei 1982 saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama. Selanjutnya saya menyerahkan sepenuhnya Rois Aam PB Syuriyah Nahdhatul Ulama bersama *Almukarram* Bapak-bapak Kiai tersebut di atas, untuk menunjuk Pejabat Ketua Umum PB Nahdhatul Ulama sebagai pengganti saya sampai Muktamar Nahdhatul Ulama yang akan datang. Ada pun saya tetap berkhidmat di dalam Nahdhatul Ulama sesuai dengan kesanggupan fisik saya.

---

<sup>87</sup> Lihat kronologi peristiwa ini secara lebih lengkap dari mulai pertemuan Kawatan hingga pertemuan di rumah Idham pada Slamet Effendy Yusuf, *et.al.*, *Dinamika Kaum Santri Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), h. 77-89.

<sup>88</sup> Lihat isi surat ini pada Machfoedz, *Kebangkitan Ulama*, h. 305; Yusuf, *et.al.*, *Dinamika Kaum Santri*, h. 89-90; lihat pula Marijan, *Quo Vadis NU*, h. 121-122.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan tulus ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab demi keselamatan Nahdhatul Ulama.

Semoga Allah meridhoi dan memberikan rahmat atas tindakan saya ini dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Jami'ah Nahdhatul Ulama.

12 Rajab 1402 H  
Jakarta -----  
6 Mei 1982.

Menerima penyerahan,

K.H. Ali Ma'sum (DR. K.H. Idham Chalid)

Saksi-saksi

1. K.H. As'ad Syamsul Arifin
2. K.H. Machrusy Ali
3. K.H. Masjkur

Surat ini kemudian ditandatangani oleh Idham dan ulama senior lainnya dan diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh KH. As'ad untuk kemajuan NU dan kesembuhan Idham. Pertemuan itu berakhir sekitar pukul 13.00 siang dan para tamu istimewa Idham ini kembali ke rumah KH. Masjkur. Ketika akan meninggalkan rumah Idham mereka semua saling berangkuhan dengan suasana yang penuh keakraban dan mengharukan. Para ulama senior itu kemudian kembali ke Surabaya.

Selain orang-orang yang terlibat dalam pertemuan ini, belum banyak orang yang tahu mengenai kesediaan Idham mengundurkan diri. Hari-hari pertama setelah pertemuan itu peristiwa itu hanya diketahui oleh kalangan terbatas. Di kalangan terbatas tokoh-tokoh NU di Jakarta, Surabaya, Jombang dan Yogyakarta sudah mulai mengetahui peristiwa ini. Pada tanggal 3 Mei 1982, kalangan pendukung Idham sudah mendapat informasi tentang ini dan mulai berdatangan

ke kediamannya. Tanggal 5 Mei sejumlah tokoh NU di Surabaya dan Yogyakarta sudah menerima informasi itu dan mengadakan pertemuan khusus untuk membicarakan pengunduran diri Idham itu. Bahkan pada tanggal 6 Mei 1982 sebelum surat resmi pengunduran diri dibacakan oleh PBNU, surat Kabar *Kedaulatan Rakyat* dan *Masa Kini* yang terbit di Yogyakarta telah menurunkan berita pengunduran diri Idham Chalid. Tanggal 7 Mei 1982 barulah PBNU mengadakan rapat dan mengumumkan surat pengunduran diri Idham yang dibacakan oleh Imron Rosyadi (Rais IV PB Syuriah NU). Idham sendiri tidak hadir dalam rapat itu. Meskipun sudah diumumkan secara resmi, publik belum banyak mengetahui berita itu. Pada tanggal 12 Mei 1982 dan seterusnya barulah berita tentang pengunduran diri Idham diketahui publik secara luas karena sejumlah media massa yang dimulai dari surat kabar *Merdeka* menurunkannya sebagai berita utama disusul surat kabar lainnya.

Pengunduran diri Idham ini sebelum dan setelah diumumkan secara resmi segera menimbulkan kegemparan di kalangan NU. Reaksi pro dan kontra bermunculan. Reaksi keras muncul dari kelompok pendukung Idham. Dipelopori oleh Amin Iskandar dan Chalid Mawardi, pendukung Idham menyampaikan pernyataan bahwa prosedur pengunduran diri Idham tidak wajar. Ia menjadi ketua PBNU atas pilihan mutlak dalam Muktamar Semarang, karena itu pengunduran dirinya harus melalui muktamar pula. Ia harus bertanggung Jawab di depan muktamar. Pengunduran diri dengan cara yang telah dilakukan itu tidak sah, sebab tidak sesuai dengan AD/ART partai. Mereka menilai, telah terjadi kup (kudeta) yang dilakukan oleh empat kyai terhadap ketua umum PBNU. Artinya, pengunduran diri Idham itu dipaksa.<sup>89</sup> Amin Iskandar bahkan mengatakan tidak akan mengakui siapapun orang yang akan menggantikan Idham sebagai ketua umum PBNU karena dinilainya telah melanggar AD/ART NU.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Machfoedz, *Kebangkitan Ulama*, h. 307.

<sup>90</sup> Fathoni dan Zein, NU Pasca Khittah, h. 74; Yusuf, *et.al.*, *Dinamika Kaum Santri*, h. 98.

Polemik terbuka pun tidak terhindarkan. Kubu ulama dan pendukungnya yang menginginkan Idham mundur juga membela diri. Mahbub Junaidi (ketua II PBNU) menyatakan bahwa Rais ‘Aam K.H. Ali Maksum sama sekali tidak melanggar AD/ART NU. Syuriah berwenang untuk menegur, menyarankan dan membimbing perangkat organisasi termasuk PBNU. Kelompok pro yang lain seperti Chalik Ali, Zamroni dan Anwar Nurris menilai apa yang dilakukan oleh para ulama senior itu adalah sah dan pengunduran diri Idham juga sah.<sup>91</sup>

Pendukung Idham yang dimotori oleh Amin Iskandar kemudian menghubungi ketua-ketua wilayah NU seluruh Indonesia. Dalam waktu singkat sudah berkumpul beberapa ketua wilayah yang berasal dari 17 wilayah. Mereka melakukan pertemuan di Warung Sate Bangil Senayan Jakarta. Setelah melakukan pembahasan yang serius dan emosional mereka memutuskan untuk meminta kepada Idham kembali memimpin NU dan tetap menduduki jabatan Ketua Umum PBNU sebagaimana biasa.<sup>92</sup>

KH. Masykur Ali yang terlibat dalam pertemuan Idham di Cipete, secara tegas menolak tuduhan bahwa para ulama telah melakukan kudeta atau penggulingan terhadap posisi Idham. Menurutnya, para ulama menghendaki agar Idham dapat aktif di NU setelah pemilu agar kegiatannya berjalan. Namun Idham menyatakan dirinya tidak bisa karena kesehatannya tidak memungkinkan. Idham sendiri menyatakan bahwa dirinya telah dua kali meminta sekretarisnya untuk mengumpulkan orang dalam rangka penyerahan jabatannya, namun sekretarisnya itu keberatan karena itu berarti Idham lari dari tanggung jawab. Bersamaan dengan kedatangan para ulama itu Idham menyerahkan jabatannya kepada Rais ‘Aam K.H. Ali Makshum.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Fathoni dan Zein, *NU Pasca Khittah*, h. 74; Yusuf, *et.al.*, *Dinamika Kaum Santri*, h. 98-100.

<sup>92</sup> Machfoedz, *Kebangkitan Ulama*, h. 307.

<sup>93</sup> Baca selengkapnya pernyataan KH. Masykur pada Machfoedz, *Kebangkitan Ulama*, h. 308-310

Bila melihat rangkaian peristiwa sebelumnya, munculnya kecurigaan kalangan pendukung Idham mengenai adanya skenario tingkat tinggi yang dilakukan kelompok tertentu yang anti Idham untuk menurunkannya dari jabatan ketua umum PBNU cukup beralasan. Tanda-tanda itu misalnya pada muktamar di Semarang tahun 1979 permintaan agar Idham mengundurkan diri sudah disuarakan dari tokoh-tokoh NU. KH. Bisri Sjansuri Rais Aam Syuriah PBNU sudah tidak mendukungnya lagi. Ketidakpuasan kepadanya juga meningkat ketika ia sebagai Presiden Partai PPP dianggap tidak banyak berbuat dalam memperjuangkan NU di PPP terutama ketika terjadi kisruh masalah daftar calon legislatif unsur NU yang didaftarkan oleh Naro ke LPU. Bahkan ada dugaan Idham membiarkannya karena tidak satupun dari kalangan pendukungnya yang terkena nasib sial tersingkir dari nomor urut jadi. Karena itulah ketika pendukung Idham mendengar pengunduran dirinya mereka langsung tidak menerima dan langsung mengaitkannya dengan kisruh dalam internal NU dan kisruh antara NU dengan PPP.

Idham sendiri akhirnya pun menjadi curiga. Kabar pengunduran dirinya tersebar begitu cepat di kalangan tokoh NU padahal ia meminta agar surat pengunduran dirinya itu diumumkan tanggal 6 Mei 1982 seakan-akan ini sudah diskenariokan sejak awal. Ia pun kecewa karena berita itu bocor sebelum waktunya. Ia juga curiga kalau kalangan ulama senior yang mendatangnya telah digerakkan oleh orang lain, yaitu mereka yang anti dengan kepemimpinannya selama ini. Kecurigaan ini membuat hilangnya keikhlasannya untuk mundur.

Idham juga terkejut dengan kerasnya reaksi dari kalangan pendukungnya dan juga kerasnya pro-kontra yang terjadi setelah pengunduran dirinya diketahui oleh kalangan NU dan publik. Kondisi ini membuatnya khawatir akan terjadinya perpecahan di tubuh NU. Akhirnya, ia berketetapan hati untuk membatalkan dan menarik kembali pengunduran dirinya melalui surat yang diumumkan pada

tangga 14 Mei 1982. Isi surat pembatalan pengunduran dirinya pada tanggal 14 Mei 1982 adalah sebagai berikut:

Assalamu'alaikum W.W. dengan hormat.

Saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan kepada PBNU yang terhormat, satu keputusan yang saya ambil, mengenai diri saya dalam hubungan dengan perasaan tanggung jawab dalam memikul amanat umat, khususnya warga Nahdhatul Ulama.

Sebelum itu, saya perlu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 2 Mei 1982/8 Rajab 1402 itu. Pada hari itu, hari Ahad, saya dalam keadaan terganggu kesehatan, dirawat oleh seorang perawat, yang meminta saya agar hari itu banyak berbaring, menghindari setiap ketegangan, tiba-tiba datang pembantu menyampaikan kepada saya bahwa ada tamu beberapa kiai;

Saya pun keluar dari kamar dan agak kaget juga, karena yang datang itu adalah Bapak-bapak kiai yang saya hormati, yaitu: Almurrom K.H. As'ad Syamsul Arifin, K.H. Machrus, K.H. Ali Maksum dan K.H. Masykur, dan dr. Muhammad yang merawat K.H. As'ad yang dalam keadaan sakit. Setelah saling tanya menanya dan saling mendoakan sebagaimana lazimnya, maka Almurrom K.H. As'ad diminta oleh Bapak-bapak kyai untuk menjadi juru bicara. Beliau langsung saja berkata kepada saya: "Oleh karena kesehatan Pak Idham maka kami anjurkan agar Pak Idham mengundurkan diri dari ketua umum NU dan menyerahkan kepada Rois 'Aam Bapak K.H. Ali Maksum."

Sesuai dengan keharusan ta'dzim dan ihtiram saya kepada bapak-bapak yang saya kenal keikhlasan beliau, yang diterbangkan dengan Garuda dari Surabaya, dalam keadaan sakit pula, maka saya dalam keadaan sakit anval di leher saya, mengiyakan, dan saudara K.H. Mujib Ridwan mengeluarkan surat yang

telah ditik dari map, diminta saya menandatangani, ia menangis tersedu-sedu. Saya cukup mengerti, bahwa forum seperti ini tidaklah wajar untuk berhentinya seorang ketua umum PB organisasi Islam yang besar, seperti Nahdlatul Ulama, yang dipilih oleh suatu muktamar yang resmi, yang mendapat suara terbanyak mutlak, juga tidak wajar untuk ketua wilayah atau ketua cabang sekalipun.

Namun saya berniat waktu itu untuk menyalurkannya ke jalan yang wajar. Sesuai dengan keputusan muktamar dan AD/ART Jam'iyah NU. Dan saya meminta untuk menambahkan kata-kata: sesuai dengan nasehat dan sebagainya, dan mengubah tanggal yang semula dalam teks itu tanggal 2 Mei menjadi tanggal 6 Mei 1982. Karena saya khawatir akan timbul kegoncangan reaksi polemik di muka umum yang tidak membawa maslahat bagi NU khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dan saya pun meminta pada Al Mukarram Rois 'Aam untuk segera memanggil Sdr H. Imam Sofwan dan wakil ketua Tanfidziyah lainnya untuk menyalurkan ini ke arah yang semestinya, dan sekali lagi saya harapkan jangan sampai bocor. Namun saya sungguh kecewa, karena pada tanggal 4 Mei saya ditelpon dari seorang dari Surabaya yang menyatakan protesnya atas pengunduran diri saya. Besoknya sudah banyak tokoh NU di Jakarta yang datang menelpon saya dengan kata-kata emosional yang mengkhawatirkan saya.

Kemudian terjadilah rapat PB NU yang kabarnya meriah itu. Saya dengar ada kesimpulan untuk mendep sementara soal itu, tidak menyiarkannya sampai rapat PB NU selanjutnya. Tetapi sungguh disayangkan, surat-surat kabar di Surabaya, di Yogya dan kemudian di Jakarta menyiarkan hal itu sebagai berita besar, head line. Lalu terjadilah polemik antara sesama orang NU yang sungguh membuat saya sedih dan malu.

Perlu saya tambahkan, bahwa dari laporan anggota PB NU yang menghadiri rapat pleno, diceritakan oleh Bapak Rois ‘Aam tentang pertemuan di rumah Sdr Mujib Ridwan, tentang siapa yang hadir pada pertemuan itu, mengundang kesan umum bahwa ada begroun (background) lain selain alasan kesehatan dan dengan sendirinya mengundang reaksi dari mana-mana, terutama dari wilayah-wilayah yang memprotes dan menganggap itu tidak sah dan menuntut tanggung jawab saya sebagai ketua umum merangkap salah seorang formatur menyempurnakan PB. N.U. sampai saat saya menulis surat ini, telah 17 wilayah yang memprotes saya.

Oleh karena itu semua, ditambah hal-hal lain yang menyangkut kemaslahatan Jam’iyah Nahdlatul Ulama maka dengan bertawakal kepada Allah Swt. Dengan ini saya menyatakan:

Bahwa saya menarik kembali pernyataan saya mengundurkan diri dari Ketua Umum Nahdlatul Ulama, dan saya insya Allah akan menjalankan tugas biasa selaku Ketua Umum Jam’iyah Nahdlatul Ulama sesuai dengan kepercayaan dan keputusan Mukhtamar ke 26 di Semarang.

Dan saya minta maaf kepada bapak-bapak kyai yang saya muliakan yang telah menjadi saksi dari pernyataan yang telah saya cabut itu.

Sekian!!<sup>94</sup>

Adanya pembatalan ini tidak menyelesaikan persoalan, malah semakin mempertebal polarisasi di tubuh NU. KH. Ali Ma’shum sebagai Rois ‘Aam Syuriah yang menerima pengunduran Idham bersikukuh pada sikapnya bahwa pencabutan kembali pernyataan pengunduran Idham itu tidak ada artinya. Jabatan ketua umum yang telah dilimpahkan kepada Rois ‘Aam juga tidak bisa diambil

---

<sup>94</sup> Dikutip dari Machfoedz, *Kebangkitan Ulama*, h. 313-315. Lihat pula Marijan, *Quo Vadis NU*, h. 122-125.

kembali. Menurutnya, kalau kasus semacam itu (pengunduran diri melalui delegasi ulama dan pencabutan pengunduran diri) tidak terdapat dalam AD/ART tidak semestinya dicari-cari interpretasi terhadap AD/ART. Jika kasus ini tidak terdapat dalam AD/ART harus dikembalikan pada hukum syara', bahwa pemberian yang sudah diberikan tidak boleh diminta kembali. Termasuk dalam hal ini Jabatan Ketua Umum PBNU yang telah diserahkan kepada Rais Aam tidak dapat diminta lagi.<sup>95</sup> Tindakan Idham mencabut pernyataan pengunduran dirinya sama halnya 'merampas' jabatan yang sudah diserahkan ke tangan Rais Aam. Tindakan Idham itu secara langsung dinilai telah merendahkan harga diri ulama yang dalam tradisi NU harus dijunjung tinggi.<sup>96</sup>

Untuk meredakan polemik antarpending dan untuk menurunkan tensi 'perang dingin' antara kubu Idham dan Ali Maksum, pada tanggal 16 Mei 1982 PB Syuriah NU melangsungkan rapat pleno dengan mengundang pengurus Syuriah (legislatif ala NU) dan Tanfidziah (eksekutif) untuk membahas kemelut kepemimpinan PBNU. Pada rapat ini, Idham hadir bersama dengan sejumlah pengurus lainnya yaitu KH. Ali Maksum (Rais Aam), K.H. Anwar Musaddad (Wakil Rais 'Aam), KH. Masykur (Rais Tsani), Saifuddin Zuhri (Rais Tsalits), Imran Rosyadi, Abdurrahman Wahid, dan KH. Rodhi Soleh.<sup>97</sup>

Dalam pertemuan ini Idham mengemukakan argumennya mengenai tindakannya mencabut kembali pernyataan pengunduran dirinya. Alasan pertama, ia terpaksa mencabut kembali pengunduran diri itu karena terlanjur bocor ke masyarakat sebelum ia sempat menjelaskan duduk persoalannya kepada pengurus NU daerah. tersiarnya berita ini secara prematur membuat banyak pengurus daerah yang protes dan tidak setuju dengan pengunduran dirinya. Alasan

---

<sup>95</sup> Machfoedz, *Kebangkitan Ulama*, h. 316 dan Fathoni dan Zein, *NU Pasca Khittah*, h. 76.

<sup>96</sup> Fathoni dan Zein, *NU Pasca Khittah*, h. 76.

<sup>97</sup> Fathoni dan Zein, *NU Pasca Khittah*, h. 78.

kedua, ia mencurigai tindakan ulama yang datang kepadanya untuk meminta dirinya mundur itu ‘digerakkan’ oleh kelompok lain yang selama ini tidak setuju dengan kepemimpinannya. Keraguan itu muncul ketika ia mengetahui bahwa sehari sebelum kedatangan para ulama sepuh ke kediamannya di Jakarta telah dilakukan pertemuan di Kawatan Surabaya yang dihadiri oleh Yusuf Hasyim (Ketua I PBNU) yang dikenal sebagai penentang kepemimpinannya. Ia khawatir para ulama sepuh itu diperalat oleh pihak-pihak yang tidak setuju dengan kepemimpinannya. Berdasar kedua alasan itu, ia meminta PB Syuriyah NU mengumumkan bahwa dirinya tidak jadi mengundurkan diri dan tetap menjabat sebagai Ketua Umum PBNU serta menetapkannya menjadi ketua umum non-aktif sampai muktamar yang akan datang dan tugasnya ditangani oleh Wakil Ketua Umum Imam Sofwan selaku Pejabat Ketua Umum sampai muktamar berikutnya. Ia juga menegaskan bahwa ia tidak akan mencabut kembali surat pembatalan pengunduran dirinya kecuali orangtuanya yang telah wafat bangun dari kubur.

Di pihak lain, para ulama yang ikut rapat pleno itu rata-rata berpendapat bahwa pencabutan kembali pengunduran diri yang dilakukannya tidak sesuai dengan tatakrama organisasi serta tidak sah berdasarkan hukum fiqih. Tindakan itu juga meruntuhkan martabat para ulama yang merupakan panutan segenap warga NU.<sup>98</sup> Mereka juga menolak jalan keluar yang diusulkan oleh Idham termasuk ajakan Idham untuk mengadakan muktamar luar biasa.

Pertemuan ini tidak menghasilkan kesepakatan antara Idham dengan pengurus PBNU yang tidak setuju dengan pencabutan pengunduran dirinya. Akhirnya, rapat ini memutuskan untuk membahas kembali permasalahan ini pada rapat pleno PB Syuriyah berikutnya dengan

---

<sup>98</sup> Fathoni dan Zein, *NU Pasca Khittah*, h. 77. Yusuf, *et.al. Dinamika Kaum Santri*, h. 106. Untuk melihat argumen ulama NU yang menolak pengunduran diri Idham berdasarkan perspektif fiqih dapat dilihat pada Yusuf, *et.al., Dinamika Kaum Santri*, h. 114-117.

menghadirkan mereka yang menjadi saksi pengunduran diri Idham. Idham sendiri menghendaki pertemuan itu dilakukan setelah lebaran. Tetapi pertemuan yang direncanakan itu tidak pernah terwujud karena kedua pihak tetap berpegang teguh pada pendiriannya masing-masing. Kubu ulama tetap berpendapat bahwa pengunduran diri Idham itu sah dan tidak dapat dicabut lagi. Di pihak lain, Idham tetap menganggap dirinya adalah Ketua Umum PBNU yang resmi. Akibatnya, muncullah dualisme kepemimpinan dan dua kubu dalam tubuh NU yang dikenal dengan kubu Situbondo (kubu KH. As'ad dan Ali Maksud yang didukung oleh kelompok nonpolitisi) dan kubu Cipete (kelompok Idham yang didukung oleh politisi).<sup>99</sup>

Pada tanggal 19 Mei 1982, Idham menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Sekretariat Kabinet dalam posisinya sebagai Ketua DPA. Kehadirannya menarik perhatian para pejabat dan wartawan. Idham menolak menjawab secara langsung semua pertanyaan wartawan dan hanya memberikan keterangan pers tertulis yang dibacakan oleh Abdurrahim Hasan. Dalam keterangan pers itu ia menyatakan bahwa isu mengenai adanya NU Pembaharuan yang juga disinggung dalam pertemuan 2 Mei ternyata tidak benar. Isu itu hanya fitnah. Idham juga menegaskan bahwa dirinya tidak senang dengan penggunaan istilah “kup” dalam kasusnya dan mengharap agar warga NU berhenti berpolemik di depan umum karena akan merugikan NU sendiri.<sup>100</sup>

Himbauan Idham untuk berhenti berpolemik ternyata belum meredakan situasi. Hari-hari berikutnya setelah himbuan itu, polemik sesama NU masih terjadi. Apalagi pada tanggal 20 Mei muncul kebulatan tekad dari 22 DPW-NU yang disampaikan langsung kepada Idham dikediamannya di Perguruan Darul Ma'arif Cipete. Adanya kebulatan tekad ini menunjukkan dengan jelas telah terjadi polarisasi di dalam tubuh NU.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Fathoni dan Zein, *NU Pasca Khittah*, h. 78.

<sup>100</sup> Yusuf, *et.al.*, *Dinamika Kaum Santri*, h. 108.

<sup>101</sup> Yusuf, *et.al.*, *Dinamika Kaum Santri*, h. 109.

Para ulama kubu Situbondo merasa perlu mendapat dukungan pemerintah karena ini menjadi salah satu kunci penting untuk memenangkan kubu mereka. Kubu Situbondo segera bergerak melakukan lobi kepada pemerintah. KH. As'ad beberapa kali datang ke Presiden Soeharto dan beberapa ulama kubu Situbondo juga melakukan pertemuan dengan beberapa menteri antara tahun 1983-1984. Hasilnya, pemerintah mulai berpihak pada kubu Situbondo. Ini ditandai dengan berhasilnya Munas Alim Ulama (18-21 Desember 1983) yang dilaksanakan oleh kubu Situbondo di Kabupaten Situbondo dengan keputusan penting yaitu mendukung Asas Tunggal Pancasila dan NU kembali ke Khittah 1926.

Dukungan Munas Ulama NU atas Asas Tunggal tidak segera meyakinkan pemerintah mengingat banyaknya resistensi organisasi Islam terhadap kebijakan pemerintah ini. Untuk meyakinkan pemerintah, para ulama ini kembali bertemu dengan Presiden Soeharto dan sejumlah menteri terutama menteri agama dan menteri dalam negeri pada tanggal 26 Pebruari 1984. Mereka berhasil meyakinkan pemerintah. Imbalannya adalah Mendagri memberikan isyarat dukungan dan keberpihakan pemerintah kepada kubu Situbondo dengan disertai harapan agar kasus Idham diselesaikan secara prosedural.

Kelompok Idham sendiri tidak tinggal diam. Dalam rapat pleno PBNU 7-8 Desember 1983 juga menghasilkan keputusan untuk menerima Asas Tunggal Pancasila. Idham sendiri juga bertemu dengan Presiden Soeharto dan bahkan Menteri Agama Munawir Sjadzali menemui Idham di rumahnya. Terdapat pula dua orang penghubung kubu Idham dengan pemerintah yaitu Imam Sofyan dan Nuddin Lubis yang bertugas menemui Menteri Dalam Negeri Suparjo Rustam.

Menyikapi lobi kedua kelompok itu, tampaknya pemerintah Orde Baru lebih berpihak pada kubu Situbondo karena lebih menguntungkan dan lebih aman secara politis bagi pemerintah daripada kubu Idham yang politis. Dukungan ulama NU dan kembalinya NU ke Khittah sebagai

organisasi keagamaan bukan lagi organisasi politik jelas lebih menguntungkan. Dukungan ulama NU terhadap asas tunggal Pancasila pasti akan menimbulkan dampak luas. Posisi mereka sebagai panutan akan membuat umat Islam secara luas juga mengikuti langkah mereka. Kembalinya NU menjadi organisasi sosial-keagamaan, tidak lagi menjadi partai politik, dengan sendirinya akan melenyapkan kelompok radikal dalam tubuh NU yang ingin disingkirkan oleh pemerintah dari parlemen.

Adanya sinyal yang jelas mengenai arah keberpihakan pemerintah pada satu sisi menjadi salah satu faktor meredanya konflik di tubuh NU. Kedua kubu yang bertikai sepakat untuk mengakhiri konflik. Momen rekonsiliasi antara dua kubu itu terjadi pada acara tahlilan di kediaman Hasyim Latif di Surabaya tanggal 10 September 1984 yang dihadiri 50 ulama Jawa dan Madura. Kedua kubu bertemu pada acara ini, di antaranya dihadiri oleh KH. Idham Chalid, KH. As'ad Syamsul Arifin, KH. Ali Maksum, KH. Masykur, KH. Saifuddin Zuhri, KH. Machrus Ali dan KH. Achmad Siddiq. Rekonsiliasi kedua kubu pada acara itu ditandai dengan ditandatanganinya “maklumat keakraban” dan sepakat untuk secepatnya menyelenggarakan muktamar NU.<sup>102</sup>

Menurut Haidar, langkah kompromi dengan kubu Idham agaknya tidak mungkin dihindari oleh kelompok khittah. Pengaruh Idham di hadapan pejabat pemerintah masih kuat. Terbukti, antara lain, Menteri Agama Munawir Sjadzali mengemukakan, NU tidak mendapat izin melakukan muktamar sebelum kedua kubu melakukan rekonsiliasi. Pemerintah berkepentingan dengan kembalinya keutuhan NU, sebab keretakan dalam tubuh NU dapat mengganggu stabilitas dan pembangunan.<sup>103</sup>

Untuk rekonsiliasi itu, kubu Idham mengajukan syarat agar keputusan muktamar Semarang harus dijunjung tinggi dan AD/ART harus ditegakkan dengan segala

---

<sup>102</sup> Fathoni dan Zein, *NU Pasca Khittah*, h. 80-81; Haidar, *Nahdatul Ulama*, h. 236. Lihat catatan kaki no. 37.

<sup>103</sup> Haidar, *Nahdatul Ulama*, h. 236.

konsekuensinya. Menurut mereka, untuk mempertemukan pendapat harus dikembalikan sebagaimana suasana seperti sebelum perbedaan pendapat terjadi. Dengan syarat ini kubu Idham ingin memperkukuh diri sesuai keputusan muktamar Semarang, artinya, Idham selama ini harus tetap diperlakukan sebagai Ketua Umum PBNU.<sup>104</sup>

Menjelang Muktamar NU di Situbondo, berbagai negosiasi segitiga antara kubu Idham, kubu Situbondo dan pemerintah dilakukan berkaitan dengan komposisi pengurus yang akan dipilih pada muktamar. Idham yang masih didukung dengan setia oleh banyak cabang NU, terutama di luar Jawa, setuju tidak lagi mencalonkan diri untuk menjadi ketua umum, dengan syarat sejumlah sekutunya (seperti Anwar Musaddad, Ali Yafie dan Chalid Mawardi) diberi posisi-posisi penting dalam kepengurusan baru. Di lain pihak, pemerintah sekali lagi memperlihatkan sikapnya yang lebih mendukung Situbondo sebagai tempat penyelenggaraan muktamar, sebuah tempat yang tidak netral. Pemerintah juga ‘menyingkirkan’ Chalid Mawardi, sekutu kuat Idham dan calon kuat ketua umum dari kubu Idham, dengan cara mengangkatnya sebagai duta besar untuk Syiria beberapa bulan sebelum muktamar diselenggarakan. Langkah-langkah pemerintah ini jelas membuka jalan bagi kemenangan kubu Situbondo dalam muktamar.

Untuk menutup jalan pemilihan langsung dalam muktamar yang memungkinkan kubu Idham menang kembali dan hal-hal yang diluar dugaan, maka dilakukan cara baru penyusunan pengurus yang disepakati sebelum muktamar dimulai. Para negosiator sepakat bahwa pengurus baru tidak akan dipilih melalui pemungutan suara secara langsung oleh para utusan muktamar, tetapi dipilih oleh sebuah tim ulama senior, yang diketuai oleh Kiai As'ad Sjamsul Arifin. Tim ini disebut *Ahl al-Hall wa al-Aqdhi*. KH As'ad dipilih karena merupakan ulama paling senior di antara mereka semua. Atas dasar ini ia dianggap paling pantas dipilih sebagai *Ahl al-Hall wa al-Aqdhi*. Muktamar mendelegasikan kepada Kiai As'ad,

---

<sup>104</sup> Haidar, *Nahdatul Ulama*, h. 236-237.

yang dibantu enam orang ulama senior lainnya, tugas untuk membentuk pengurus besar.

Terpilihnya KH. As'ad sebagai Ketua Tim *Ahl al-Hall wa al-Aqdhi* jelas membawa kerugian bagi kubu Idham karena bagaimana pun sang kiai masuk bagian dari konflik yang terjadi. Cara pemilihan seperti ini yang berbeda dengan cara sebelumnya dicurigai oleh Haidar sebagai sebuah rekayasa untuk mendapatkan legitimasi mengimbangi pengaruh Idham dan kelompok politik lain.<sup>105</sup> Ini terbukti cara ini tidak digunakan lagi pada muktamar berikutnya. Sebagaimana telah disepakati sebelumnya, KH. As'ad memilih Abdurrahman Wahid dan Achmad Siddiq sebagai Ketua Umum dan Rais Aam PBNU yang baru. Beberapa anggota kelompok pembaru muda lainnya juga diberi posisi kunci dalam kepengurusan. Sebaliknya, kubu Idham mendapat jatah jauh lebih sedikit daripada yang telah disepakati. Rupanya KH. As'ad telah mencoret calon-calon yang diunggulkan Idham dari daftar pada saat-saat terakhir dan menggantikannya dengan orang yang lebih disukainya. Dari kubu Idham, hanya Ali Yafie yang tetap menjabat di Syuriyah sebagai salah satu Rais, Idham sendiri diberi posisi sebagai Mustasyar (penasehat), satu posisi yang tak mempunyai pengaruh nyata. Kubu Idham benar-benar merasa tidak puas, dan kelompok ini menarik kelompok-kelompok lain yang karena satu atau lain alasan tidak menyetujui keputusan Situbondo.

Menurut Kang Turab (dalam *Thohiriyyah Com*), pada muktamar di Situbondo, Idham berangkat ke sana. Namun dalam usahanya untuk tiba di arena muktamar ternyata banyak 'gerakan' yang menghalangi kehadirannya. Idham memilih menginap di sebuah hotel di Kawasan Wisata Pasir Putih Situbondo. Utusan kiai sepuh menemuinya dan memintanya untuk tidak mencalonkan diri. Bahkan, kemungkinan salah satu pejabat tinggi pemerintah mendesaknya agar tidak mencalonkan diri dengan alasan demi menjaga keutuhan NU dan stabilitas politik umat Islam.

---

<sup>105</sup> Haidar, *Nahdatul Ulama*, h. 227.

Akhirnya, Idham mengalah dan mengundurkan diri dari pencalonan padahal pada saat itu Idham telah mengantongi dukungan dari 23 provinsi dari 26 provinsi yang mengikuti muktamar. Baginya kemaslahatan dan keutuhan warga nahdhiyyin lebih penting dari apapun. Ia tidak mau mempertaruhkan keutuhan organisasi yang sangat dicintainya demi jabatan ketua umum. Ia pun kembali ke Jakarta.<sup>106</sup>

Versi Nur Khalik Ridwan menjelaskan bahwa orang yang menemui Idham di Pasir Putih adalah Gusdur. Menjelang akhir muktamar Gusdur masih melakukan negoisasi dengan Idham. Gusdur datang sebelum fajar untuk menemui Idham di Pasir Putih untuk menanyakan ada tidaknya perubahan daftar pengurus NU yang telah disepakati sebelumnya. Idham kemudian menambahkan satu nama baru untuk jabatan bendahara. Gusdur kembali ke Situbondo pada pukul 10 pagi dan menemui KH. As'ad di kamarnya. Sang kiyai menandatangani daftar yang disodorkan Gusdur. Namun, sebagaimana telah disebut sebelumnya, daftar pengurus NU yang diumumkan tidak sesuai dengan daftar yang telah disepakati oleh kubu Cipete dan Kubu Situbondo. Gusdur tahu bahwa ini bisa menimbulkan kekecewaan kubu Cipete dan ia berdiri ingin memprotesnya. Namun tindakan Gusdur ditahan oleh Mahbub Junaidi. Mahbub menyarankan agar Gusdur menerima hasil pengumuman itu untuk menghindari adanya pertarungan sengit kembali. Gusdur meminta agar Idham diberi tahu. Idham yang sudah berada di Surabaya diberitahu melalui telepon. Idham menyatakan agar Gusdur jangan cemas. Ia dan kubunya tidak akan menentang secara terbuka dan tidak ada pertarungan lagi.<sup>107</sup>

Meskipun Idham 'kalah' dalam muktamar ini, ia tidak mudah diturunkan begitu saja mengingat pengaruhnya dan pendukungnya yang luas. Kubu penentangannya harus melakukan 'cara yang tidak biasa' untuk mengalahkannya

---

<sup>106</sup> Kang Turob, "KH, Idham Chalid: Mengalah Demi Keutuhan NU" dalam Muthalib dan Zamzam, *KH. DR. Idham*, h. 121-122.

<sup>107</sup> Nur Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 271-272.

dalam pertarungan. Bahkan mereka harus melakukan kompromi dan negosiasi dengan pemerintah untuk memperoleh dukungan. Idham sendiri tidak dendam dengan apa yang telah terjadi. Ia telah membuka jalan bagi NU untuk kembali ke Khittahnya dan ia pun kembali ke khittahnya, yaitu memimpin lembaga pendidikan Islam atau perguruan sebagaimana yang dulu ditekuninya sejak muda di Amuntai. Pemerintah sendiri masih menghargainya dengan memberinya posisi sebagai anggota tim P-7 (Tim Penasihat Presiden mengenai Pelaksanaan P-4) sejak tahun 1985.

NU sendiri pasca keputusan untuk kembali ke Khittah, di satu sisi NU mendapat keuntungan dari keputusannya untuk menarik diri dari dunia politik praktis tetapi di sisi lain NU juga tidak mendapat keuntungan yang berarti dalam pemerintahan. Dalam bidang pendidikan dan dakwah NU mendapat keuntungan dengan semakin berkembangnya dunia pendidikan dan dakwah di kalangan warga Nahdliyyin sebagai dampak dari membaiknya hubungan NU dengan pemerintah dan melonggarnya kontrol pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan warga NU. Namun di sisi lain sebagaimana dinyatakan oleh Feillard, setelah usaha-usaha rekonsiliasi yang telah ditempuh sejak Situbondo ada harapan yang tidak terungkap dari kalangan NU bahwa jabatan Menteri Agama diberikan kembali kepada kalangan tradisionalis.<sup>108</sup> Namun harapan ini tidak pernah tercapai karena Soeharto tidak pernah memberikannya bahkan sampai ketika Soeharto jatuh dari kekuasaannya.

Idham sendiri setelah tidak lagi menjadi Ketua Umum PBNU memilih menenggelamkan dirinya di lembaga pendidikan yang telah didirikannya sejak tahun 1950-an, Perguruan Darul Ma'arif Cipete Jakarta. Tidak lama kemudian, Darul Ma'arif yang diasuhnya membuka jenjang pendidikan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) pada tahun 1985. Dengan berdirinya STAI ini, Darul Ma'arif telah memiliki jejang pendidikan dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Namun sebagaimana telah disebut

---

<sup>108</sup> Feillard, *NU Vis-à-vis Negara*, h. 272.

sebelumnya, masalah dana juga tetap menjadi kendala dalam pengelolaan perguruan ini pada dekade 1980-an. Bahkan Idham harus rela menjual rumahnya di Jl Mangunsarkoro untuk membayar tunggakan utang yayasan Darul Ma'arif sebanyak tiga ratus juta rupiah. Presiden Soeharto yang mendengar berita ini merasa prihatin dan tidak dapat mengerti mengapa Idham tidak meminta bantuan kepadanya. Soeharto bahkan mengirim Basofi Sudirman yang saat itu menjabat Wakil Gubernur Jakarta (1987-1993) untuk membujuk Idham agar mau menerima bantuan pemerintah. Namun usaha ini tidak berhasil, Idham menolak tawaran itu dengan halus. Meski demikian, Darul Ma'arif pernah menerima bantuan pemerintah melalui Gubernur Jakarta, R. Soeprapto (1982-1987).

Idham sadar betul dampak dari keputusannya untuk mempertahankan Darul Ma'arif sebagai lembaga pendidikan bermutu namun berbiaya murah dan tidak berorientasi profit. Kesulitan dana akan selalu menjadi kendala. Namun ia tetap teguh pada pendiriannya. Mengenai sikapnya ini, ia pernah mengatakan: “Saya mendirikan perguruan bukan untuk mencari keuntungan seperti sekolah-sekolah elite Islam, tetapi saya ingin menampung anak-anak tukang bajaj, tukang sapu, anak-anak tukang sayur di daerah sini untuk bisa bersekolah, minimal mendapatkan ilmu dan ijazah. Saya ingin menampung anak-anak yang tidak kaya dan tidak pintar”.<sup>109</sup>

Setelah tidak lagi menjabat ketua umum PBNU sejumlah pendukungnya ternyata masih menyediakan tempat untuknya. Pengikutnya memberi tempat di Jam'iyah Ahl Al-Thariqah Al-Mu`tabarah Al-Nahdliyah. Anggota jam'iyah ini berusaha membangun kesatuan dan kekuatan jam'iyah untuk menjaganya agar tetap dekat dengan PPP. Pada 1987 dan 1988 mereka menyelenggarakan dua pertemuan besar jam'iyah untuk menggalang solidaritas, dimana hanya anggota yang berafiliasi dengan PPP yang hadir. Pada pertemuan-pertemuan inilah Idham tampil pertama kalinya

---

<sup>109</sup> Mandan, *Napak Tilas*, h. 394-395.

(dan dipublikasikan secara luas) di hadapan umum sejak tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Pendukung setianya, Moechammad Baidlowi, menginginkannya mendapatkan rumah baru di dalam jam'iyah ini setelah NU sendiri menurunkan jabatannya. Idham masih mendapatkan banyak simpati di kalangan kiai tarikat, yang menerimanya sebagai ketua, walaupun ia sendiri bukan seorang guru tarikat dan bahkan bukan pengikut tarikat tertentu. Para penentangannya curiga bahwa ia akan memanfaatkan organisasi ini sebagai batu loncatan untuk naik kembali ke posisi puncak NU. Sebuah koalisi sekutu-sekutu tradisional Idham, para kiai tarikat dan pendukung setia PPP, memang bisa menjadi tantangan berat bagi mereka yang sedang menjabat sebagai pimpinan NU.<sup>110</sup>

Sebelum Muktamar NU ke-28 (November 1989) jam'iyah ini mengadakan kongresnya yang ketujuh di Semarang. Kongres ini dihadiri hampir tujuh ratus orang dari seluruh tanah air. Kongres menyerahkan tugas penyusunan pengurus baru kepada panitia yang terdiri dari lima "sesepuh", yang dipilih secara aklamasi di antaranya KH. Adlan Aly, KH. Makky, dan Idham. Idham tetap terpilih sebagai ketuanya.

Setelah Kongres tahun 1989, jam'iyah yang dipimpin oleh Idham ini nampak lebih kuat dan bersatu dibandingkan sebelumnya. Sebagian kiai tarikat yang telah diundang tidak datang dan tampaknya ikut bergabung ke jam'iyah saingannya (Jam'iyah Kiai Musta'in Romli) yang berafiliasi dengan Golkar, tetapi pengurus merasa yakin bahwa jam'iyah saingannya ini tidak akan menjadi saingan berat. Adalah benar bahwa keputusan Situbondo tampaknya memberikan legitimasi yang terlambat atas penyeberangan Kiai Musta'in ke Golkar satu dasawarsa sebelumnya. Tetapi konsekwensi lain dari keputusan ini adalah: Golkar menjadi tidak lagi sangat memerlukan jam'iyah Kiai Musta'in. Karena tidak adanya patronase yang kuat, jam'iyah ini mungkin akan

---

<sup>110</sup> Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (005\_2 TXT Versi Notepad, Pdf)

semakin melemah, sementara jam'iyah yang berafiliasi dengan NU sudah berkembang begitu kuat sehingga tidak dapat lagi diabaikan oleh pemerintah dan juga pengurus NU sendiri.<sup>111</sup>

Idham merasa yakin bahwa para anggota yang tidak puas ini akan segera kembali ke pangkuan jami'yahnya atau menjadi tidak berpengaruh lagi, sebagaimana yang dialami Kiai Musta'in sendiri. Jam'iyah saingan ini tidak pernah berafiliasi secara formal dengan Golkar, dan harapan untuk mendapatkan pengakuan sebagai organisasi tarikat Golkar dengan segala keuntungan politis dan material yang diperolehnya, menurut pandangan Idham adalah harapan yang tidak realistis. Golkar sudah memiliki ikatan organik dengan persatuan tarikat lainnya, PPTI yang semula berhasil di Sumatera; hal ini membuat Golkar tidak mungkin mengakui organisasi tarekat yang lain. PPTI didominasi oleh kelompok orang yang sangat berbeda (tidak ada anggota NU, misalnya) dan para pemimpin Jam'iyah ini tidak mungkin mencapai posisi puncak di dalamnya.<sup>112</sup>

Pada muktamar NU ke-28 di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tanggal 25-28 Nopember 1989 Idham muncul kembali setelah lama 'tenggelam' semenjak tidak terpilih pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo (1984). Rumor yang berkembang Idham merupakan calon kuat pengganti Achmad Shiddiq sebagai Rais Aam. Namun Idham berkali-kali menyatakan bahwa dirinya tidak berminat pada posisi itu dan sudah merasa cukup pada posisinya sebagai ketua Jam'iyah Thariqah al-Mu'tabarrah al-Nahdhiyah yang dijabatnya sejak tahun 1985. Idham sendiri tidak hadir di muktamar karena alasan kesehatan. Namun ada rumor yang berkembang bahwa dia menginap di sebuah hotel di Yogyakarta, dan secara teratur mendapatkan keterangan singkat dari para pendukungnya dan memberikan pengarahan

---

<sup>111</sup> Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi Kuasa*, (005\_2 TXT versi Notepad, Pdf).

<sup>112</sup> Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi Kuasa*, (005\_2 TXT versi Notepad, Pdf) lihat footnote no. 35.

tentang apa yang akan dilakukan. Tampaknya rumor ini terakhir ini diragukan kebenarannya. Idham sendiri meski menyatakan tidak berminat dalam memperebutkan posisi Rais Aam dan tidak hadir dalam muktamar, namun ia membiarkan namanya masuk dalam bursa calon Rais Aam dan ikut bersaing dengan calon lainnya.<sup>113</sup>

Pada muktamar ini terdapat dua kubu yang pro dan kontra terhadap kepemimpinan Gusdur. Ada kelompok yang ingin mempertahankan Gusdur sebagai Ketua Umum PBNU dan kelompok lainnya ingin menggusur Gusdur dari posisi itu. Kacung Marijan mengutip Majalah *Aulia* menyebutkan bahwa posisi Gusdur berada di ujung tanduk karena ada dua kelompok yang bersatu untuk menggeser Gusdur dari posisinya. Kelompok pertama adalah kelompok Kiai As'ad Syamsul Arifin yang terdiri dari Zahrowi Musa, Koen Solahuddin, Anwar Nuris, dan sejumlah nama lainnya. Kelompok kedua adalah kelompok Idham Chalid yang didukung oleh Imron Rosyadi, KH. Masykur, Abduh Padare, Nuddin Lubis dan sejumlah nama lainnya. Kelompok ini juga didukung oleh politisi NU di PPP dan sejumlah kiai yang bergagang dalam Jam'iyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah al-Nahdliyah, jamaah tarikat NU yang otonom.<sup>114</sup> Namun, kedua kelompok ini gagal menggeser Gusdur karena pendukung Gusdur lebih kuat dan lebih banyak apalagi KH. Achmad Shiddiq secara terbuka mendukungnya. Gusdur terpilih kembali secara aklamasi.

Pada muktamar ini Idham ikut bersaing memperebutkan posisi Rais 'Aam Syuryah PBNU dengan KH. Achmad Shiddiq. Sementara sahabat dan pendukungnya, KH. Ali Yafie bersaing dengan KH. Sahal Mahfudz memperbutkan posisi Wakil Rais Aam Syuriyah PBNU. Dalam pemilihan, Idham mendapat 116 suara dan Ahmad Shiddiq memperoleh 188 suara. Dengan demikian Achmad Shiddiq memenangi pemilihan. Sementara di pihak lain, Ali

---

<sup>113</sup> Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi Kuasa*, (006\_1 TXT dan 006\_2 TXT versi Notepad, Pdf)

<sup>114</sup> Marijan, *Quo Vadis NU*, h. 183-184.

Yafie memperoleh 202 suara dan Sahal Mahfudz memperoleh 100 suara. Hasil pemilihan ini menunjukkan bahwa jabatan Rais Aam Syuriah PBNU dijabat kembali oleh KH. Achmad Shiddiq dan Wakil Rais Aam dijabat oleh KH. Ali Yafie.<sup>115</sup> Yang cukup mengejutkan dalam pemulihan ini adalah kemunculan kembali Idham yang bersedia mencalonkan diri sebagai Rais Aam PBNU dan mendapat suara yang cukup signifikan. Meski kalah, tetapi suara yang diperolehnya menunjukkan masih kuatnya dukungan dan pengaruhnya di kalangan peserta muktamirin NU. Padahal, setelah tidak lagi terpilih sebagai ketua umum PBNU di Situbondo, Idham dapat dikatakan ‘tenggelam’ dari arena NU dan dunia politik. Ia lebih banyak mencurahkan dirinya di pesantrennya dan di Jam’iyah Ahlith Thariqah al-Mu’tabarrah al-Nahdliyah.<sup>116</sup>

Pada periode pengurus besar Nahdlatul Ulama periode 1989-1994, Idham berada pada kelompok Mustasyar (Dewan Penasihat) bersama dengan sejumlah ulama senior lainnya, yaitu KH As’ad Syamsul Arifin, KH. Masykur, KH. Prof. Anwar Musaddad, KH. Achmad Syaichu, KH. M. Rodli Sholeh, KH. Prof. Ali Hasan Achmad Addary, KH. Achmad Abdul Hamid, dan Mahbub Djunaidi.<sup>117</sup>

Selain di NU dan Jam’iyah Ahlith Thariqah, sejak tidak lagi menjadi Ketua Umum PBNU, Idham juga terlibat dalam kepengurusan MUI. Di MUI ia tidak banyak berperan. Sejak berdiri pada tahun 1975 hingga tahun 1984 (periode kepemimpinan Buya Hamka dan KH. Syukri Ghazali), ia tidak terlibat dalam kepengurusan MUI. Baru pada periode kepemimpinan KH. Hasan Basri sebagai Ketua Umum MUI (periode 1985-1990) ia masuk dalam kepengurusan MUI pusat. Tetapi keterlibatannya dalam kepengurusan MUI tidak begitu menentukan karena ia hanya berada pada Dewan

---

<sup>115</sup> Fathoni dan Zein, *NU Pasca Khittah*, h. 159-160; Marijan, *Quo Vadis NU*, h. 184-185.

<sup>116</sup> Fathoni dan Zein, *NU Pasca Khittah*, 159-160; Marijan, *Quo Vadis NU*, h. 185.

<sup>117</sup> Lihat susunan lengkap pengurus besar NU periode 1989-1994 pada Marijan, *Quo Vadis NU*, h. 317-319.

Pertimbangan MUI sebagai anggota. Pada proses awal berdirinya, pada hari pertama (21 Juli 1975) Munas I pada saat Sidang Paripurna Munas I pembentukan MUI Idham Chalid menyampaikan ceramah pada acara tersebut. Pada saat itu, Idham menjabat sebagai ketua DPR/MPR dan ketua PBNU.<sup>118</sup>

## **H. Menjelang Sakit (1991-1998)**

Pada dekade 1990-an, Idham tidak lagi memiliki jabatan penting yang menentukan baik di NU maupun di Pemerintahan. Meskipun posisinya termasuk dalam kepengurusan PBNU namun posisinya di Mustasyar untuk periode 1989-1994 tidak lagi menentukan. Pada dekade ini, ia masih menduduki posisi ketua Jam'iyah Ahlit Tariqah Mu'tabarrah al-Nahdliyah yang afiliasi politiknya lebih diarahkan ke PPP. Aktivitas utamanya adalah mengabdikan dirinya di Perguruan Darul Ma'arif Cipete yang kembali ditekuninya setelah tidak lagi menjadi ketua PBNU dan tidak lagi menjadi pejabat negara. Aktivitas pendidikan dan dakwah kini menjadi perhatiannya. Dua minggu sekali ia mengajar kitab di Masjid Darul Ma'arif tidak jauh dari rumahnya. Di samping itu, rutinitas memperingati hari-hari besar Islam terutama maulid selalu dilakukan di Jl. Mangunsarkoro yang disertai dengan pengajian besar-besaran. Tradisi ini sudah dilakukan Idham sejak dekade 50-an. Biasanya, dalam peringatan maulid ini banyak tokoh NU dan pejabat negara yang diundang. Kolega dan murid Idham yang berasal dari Kalimantan Selatan terutama dari Amuntai tidak jarang datang dengan rombongan.

Sekitar tahun 1995-1996, Idham telah merasakan bahwa akan ada peristiwa besar yang akan menimpa Jakarta tahun 1997 yang melebihi tragedi 1965. Idham mengingatkan aktivis muda untuk berhati-hati dan aktivis daerah yang ada di Jakarta dimintanya untuk pulang. Prediksi Idham ternyata terbukti. Pada tahun 1997, marak terjadi penculikan aktivis

---

<sup>118</sup> Prodjokusumo, H.S., *et. al.*, (eds.), *15 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indoensia, 1990), h. 49 dan 117.

dan terjadi demonstrasi besar-besaran yang berujung pada kerusuhan.

Kesehatan Idham sendiri yang mulai sepuh mulai menurun. Ia sering bolak-balik ke Singapura dan Jepang untuk berobat. Gejala menurunnya kesehatannya telah terlihat pada dekade 1980-an. Tidak lama setelah Soeharto lengser bulan Mei 1998, pada bulan Juli 1998 kondisi kesehatannya menurun drastis. Pada bulan itu ia terserang stroke yang pertama. Ia dibawa ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat. Berita sakitnya segera menyebar, sejumlah tokoh nasional segera menjenguknya di rumah sakit. Mantan Presiden Soeharto dan Presiden BJ Habibie yang baru sebulan lebih menjabat sebagai presiden RI juga turut menjenguk.

Setelah dua minggu dirawat, kondisi Idham membaik. Atas rekomendasi dokter, keluarga dapat membawanya pulang ke rumah. Namun baru sehari dirawat di rumah, stroke kedua menyerangnya. Ia kemudian dibawa ke RS Pondok Indah Jakarta. Setelah koma sekitar delapan jam, kondisinya dapat distabilkan setelah dirawat di ICU selama dua hari. Setelah dirawat selama tiga minggu, pihak keluarga memutuskan untuk melakukan rawat jalan untuk Idham. Di rumah, Idham harus dibantu kursi roda dan masih mampu untuk bicara.<sup>119</sup> Namun pada masa-masa berikutnya kesehatannya semakin menurun. Kondisi ini membuatnya tidak lagi dapat berbuat banyak. Meski demikian, ketika Partai Nahdhatul Ummah (PNU) didirikan tanggal 16 Agustus 1998 di Jakarta dan berasaskan Pancasila, namanya tercantum sebagai Ketua Dewan Mustasyar partai ini.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Mandan, *Napak Tilas*, h. 390.

<sup>120</sup> Asep Saiful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, (Jakarta: LP3ES, 2004), h. 227.



## BAB IV

### PERJALANAN HIDUP DJOHAN EFFENDI DARI TAHUN 1939 HINGGA 1998

#### A. Masa Kecil dan Masa Belajar (1939-1960)



Djohan Effendi lahir pada 1 Oktober 1939 di Kota Kandangan Kalimantan Selatan. Dia adalah anak sulung dari lima bersaudara. Ayahnya bernama Haji Mulkani dan ibunya bernama Hj. Siti Hadijah. Kakek dan neneknya dari pihak ayah adalah H. Masri dan Hj. Moerdiah sedang kakek dan neneknya dari pihak ibu adalah H. Mansuri dan Hj. Siti Zahrah. Ayah Djohan berprofesi sebagai pedagang sementara ibunya seorang

pembaca Alquran yang mahir dan menjadi guru mengaji. Kedua kakeknya merupakan pedagang yang sukses. Kakeknya yang bernama H. Masri merupakan orang pertama yang memiliki mobil di Kandangan dan dapat membeli beberapa buah mobil ketika berada di Makkah untuk dijadikan angkutan umum. Dia juga memiliki kebun karet yang luas. Sementara kakeknya dari pihak ibu yang bernama H. Mansuri merupakan pedagang yang memiliki jalur perdagangan Singapura, Johor dan Pulau Penang di samping memiliki usaha perkebunan karet di Batu Pahat (Johor Malaysia).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*, Penerjemah: Nanang Tahqiq, (Jakarta: Paramadina dan Pustaka Antara, 1999), h. 175; Ahmad Gaus, *Sang Pelintas Batas: Biografi Djohan Effendi*, (Jakarta: ICRP dan Kompas, 2009), h. 1 dan 3.

Djohan tumbuh di lingkungan kerabat yang menunjang pertumbuhan intelektualnya. Neneknya yang bernama Hj. Zahrah yang mengasuhnya dari kecil hingga remaja merupakan orang tua yang disegani di lingkungan keluarga. Dia sering berkeliling ke sejumlah pengajian dan memperkenalkan Djohan dengan banyak ulama terpandang. Kakeknya H. Masri merupakan tokoh SI dan pembela kaum *tuha* yang fanatik berseberangan dengan kerabatnya yang lain yang mengikuti kaum muda (Muhammadiyah). Kerabat dari pihak kakeknya ini ada yang aktif dalam Parindra (Partai Indonesia Raya) dan yang lainnya aktif dalam gerakan kemerdekaan. Kerabat dari pihak neneknya, Hj. Zahrah kebanyakan merupakan petani dan menempuh pendidikan di sekolah umum tetapi sebagian mereka ada juga yang menjadi pegawai pemerintah dan guru sekolah dasar. Djohan juga masih memiliki hubungan kekerabatan meski tidak dekat dengan Tuan Guru Abdurrauf dan Tuan Guru Muhammad Khaberi. Djohan juga memiliki seorang paman yang memiliki bakat kepemimpinan dan sering tampil menjadi khatib Jumat dengan teks khutbah yang ditulis sendiri.<sup>2</sup> Di samping pengikut SI, kerabat Djohan sebagiannya menjadi anggota Nahdlatul Ulama dan sebagiannya menjadi anggota Muhammadiyah. Keragaman ini turut mempengaruhi sikapnya dikemudian hari dalam menghadapi perbedaan.

Ayah Djohan sendiri adalah anggota SI dan rajin mengikuti perkembangan keagamaan dengan berlangganan surat kabar dan majalah-majalah Islam seperti *Pedoman Masyarakat*, *Panji Islam*, *Pembela Islam*, *Al Lisan*, dan *Soal Jawab* (ketiganya terbitan PERSIS Bandung). Meski sang ayah pengikut kaum *tuha* ternyata dia juga rajin membaca majalah yang diterbitkan oleh PERSIS Bandung yang justru banyak menyerang keras kaum *tuha*. Sementara ibu Djohan di samping tetap menjadi guru mengaji Alquran dia juga sosok yang disiplin dan gemar membaca buku. Apalagi dia mampu membaca aksara Latin yang dipelajarinya sendiri. Buku yang banyak dibacanya adalah buku karangan Hamka, seorang ulama modernis!<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 3-5.

<sup>3</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 6, dan 10.

Djohan beruntung memiliki keluarga yang memiliki tarap ekonomi yang baik dan sekaligus banyak yang terdidik dan berperan di masyarakat. Karena itulah ia tidak memiliki kesulitan untuk memasuki jenjang pendidikan sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, sejak kecil ia telah mengenal dengan baik berbagai keragaman afiliasi organisasi keagamaan di lingkungan keluarganya dan telah mengenal paham kaum *tuha* dan kaum muda.

Pendidikan awal Djohan dimulai dari internal keluarga. Ia belajar membaca aksara Arab dari neneknya, Hj. Zahrah. Selama satu bulan ia belajar membaca Juz 'Amma di Langgar Tuan Guru Aseri dan kemudian ia belajar sendiri membaca Alquran di rumahnya di bawah bimbingan neneknya hingga tamat. Sang nenek juga membawanya ke berbagai pengajian langgar di Kandangan untuk belajar dengan sejumlah ulama. Di sini ia diperkenalkan dengan ajaran Islam tradisionalis yang menjadi anutan keluarganya, terutama ayah dan ibunya.

Tahun 1947 Djohan memasuki Sekolah Rakyat dan juga belajar di Sekolah Arab pada sore hari. Di sekolah ini ia diajari tentang akidah Asy'ariyah dan fiqih Syafi'iyah yang menjadi ajaran kaum tradisionalis. Di malam hari, ia kembali belajar kitab *Parukunan* dan *Sifat Dua Puluh*. Ia sebenarnya pernah mengikuti pendidikan di Sekolah Muhammadiyah, namun tidak lama karena ia merasa tidak nyaman di sana akibat adanya resistensi masyarakat yang luas. Padahal, guru yang mengajar di sana masih memiliki hubungan famili dengan ibunya. Pada saat masih di sekolah dasar itu, ia juga mengenal praktik tirakat puasa putih yang ia pelajari dari seorang penganut semacam kebatinan yang melaksanakan puasa tetapi tidak salat yang bernama Abdul Hamid, tetangga orangtuanya.

Pada saat Djohan duduk di kelas dua terjadi agresi militer Belanda ke II (1948). Banyak orang yang ditangkap Belanda termasuk guru kelasnya yang pada saat itu sedang mengajar di kelasnya. Untuk menghindari penangkapan, banyak penduduk Kandangan yang mengungsi ke pedalaman termasuk Djohan dan neneknya. Aktivitas belajar dilanjutkan di sekolah pedalaman hingga mereka dapat kembali pada tahun 1949 ketika kedaulatan RI diakui oleh Belanda.

Ketika Djohan sudah bisa membaca huruf Latin, ayahnya suka membelikannya buku-buku agama. Djohan sendiri gemar membaca buku terutama buku biografi dan kisah petualangan. Di antara buku yang pernah ia baca adalah biografi Sir Ahmad Khan, Jose Rizal, Tjipto Mangunkusumo, kisah Untung Surapati, Trunojoyo, Gajah Mada, *Ayahku* (karya Hamka) dan lain-lain. Selain buku biografi, ia juga suka membaca buku agama yang ditulis oleh Hamka, Hasbi ash-Shidieqy, Munawwar Chalil dan Hasan Bandung. Buku *Ayahku* yang ditulis oleh Hamka memberikan kesan mendalam pada dirinya. Keberanian ayah Hamka berbeda paham dengan orang tua, ulama tradisional dan lingkungan masyarakatnya serta sikapnya yang anti taklid dalam buku itu berkesan dalam dirinya. Buku lain yang mempengaruhinya adalah buku-buku yang ditulis oleh A. Hassan (PERSIS). Ia memiliki banyak koleksi buku A. Hasan seperti *Debat Taqlid, Debat Talqin, Risalah Madzhab, Risalah Shalat* dan *Kumpulan Soal Jawab Lengkap*. Ketertarikannya pada masalah-masalah polemis (khilafiah) yang terjadi saat itu membuatnya gemar mencari jawabannya pada karya-karya A. Hasan. Buku lain yang juga mengganggu pikirannya adalah *Sejarah Islam* yang ditulis oleh Latif Oesman. Pikirannya terganggu dengan kisah pertentangan dalam keluarga Nabi (Aisyah dan Ali) dan pergantian khalifah yang disertai dengan kekerasan dan pembunuhan. Di samping buku-buku itu, ia juga gemar membaca majalah-majalah Islam koleksi ayahnya yang diterbitkan oleh kalangan modernis seperti *Panji Islam, Pedoman Masyarakat, Pembela Islam* dan *Al-Muslimun*. Di Kandang terdapat Perpustakaan Masyarakat yang dikelola oleh Jawatan Pendidikan Masyarakat Kabupaten. Ia menjadi anggota perpustakaan tersebut dan meminjam sejumlah buku untuk dibaca di rumah.<sup>4</sup>

Selain faktor bacaan yang membentuk sikap Djohan, lingkungan keluarganya yang memiliki variasi pilihan politik, organisasi dan paham keagamaan juga turut mempengaruhinya untuk tidak terjebak dalam pandangan yang eksklusif dalam beragama. Pada aspek pilihan organisasi keagamaan, di lingkungan keluarganya ada yang memilih aktif di SI, NU,

---

<sup>4</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 13-14 dan 25-26.

Muhammadiyah, dan Musyawaratut Thalibin. Dari sisi pilihan politik, ada yang memilih bergabung dengan Masyumi, ada yang ke NU dan ada pula yang memilih SI. Dari segi pemahaman keagamaan lingkungan keluarganya terbelah menjadi pengikut kaum *tuha* (tradisionalis) dan kaum muda (modernis). Latar belakang pendidikan keluarganya juga cukup variatif, ada yang sekolah Arab atau pesantren tradisional, sekolah umum, ada pula yang belajar di Pesantren Modern Gontor Ponorogo.

Kondisi kehidupan keagamaan di kalangan masyarakat Kandangan pada waktu itu cukup kondusif. Pemahaman agama masyarakat Kandangan memang tidak tunggal termasuk pilihan organisasi keislaman. Mayoritas mereka memiliki pemahaman tradisional (kaum *tuha*) sementara sisanya mengikuti paham kaum muda (Muhammadiyah). Ada pula alumni Gontor yang berusaha bersikap netral. Meski demikian, perbedaan pemahaman ini tidak menimbulkan pertentangan yang mencemaskan. Para ulama yang memiliki afiliasi politik yang berbeda, terutama mereka yang menjadi tokoh Masyumi dan NU di Kandangan, tetap menjalin persahabatan dan melakukan pengajian dan khutbah secara bergiliran.

Pada tahun 1951, ketika baru duduk di SR kelas 5, Djohan harus merasakan suasana tegang di daerahnya karena wilayah Kandangan dijadikan wilayah operasi militer oleh pemerintah RI. Suasana yang tidak aman ini disebabkan pemberontakan Ibnu Hajar terhadap pemerintah pusat akibat ketidakpuasan mereka terhadap perlakuan yang tidak adil terhadap mantan pejuang lokal. Sebagian mereka yang berdinasi militer diberi tunjangan yang jauh berbeda dengan rekan-rekan mereka dari Jawa sementara mereka yang mengalami demobilisasi tidak diakui sebagai veteran dan tidak mendapat uang pensiun. Akibat pertempuran kedua belah pihak, Djohan kembali harus mengungsi. Ia sempat menyaksikan pertempuran antara pasukan Ibnu Hajar dan tentara RI di kampungnya. Karena itu, melihat gerombolan yang tertembak dan adanya mayat yang tergeletak di pagi hari menjadi hal yang biasa baginya.

Setelah lulus Sekolah Rendah (1952), Djohan melanjutkan pendidikannya di Banjarmasin. Ibunya ingin memasukkannya ke SMP di Kandangan, namun ia memilih melanjutkan studinya di PGAP (Pendidikan Guru Agama Pertama) di Banjarmasin. Motifnya sebenarnya bukan karena ingin belajar agama tetapi dia ingin pindah ke kota besar. Di sini ia kembali berburu buku-buku yang diminatinya dengan mengunjungi toko buku. Buku-buku yang pernah dibacanya dulu juga ditelaah lagi. Saat liburan ia pulang kampung. Di sana ia membongkar lemari yang berisi koleksi majalah kaum pembaru yang disimpan agak tersembunyi oleh ayahnya. Ia sangat mengidolakan A. Hassan. Ia mengoleksi dan mempelajari hampir semua buku-buku yang ditulis oleh A. Hassan. Buku Munawar Chalil terutama *Kembali Kepada al-Quran dan Sunnah* dan Hasbi ash-Shiddieqy anggota Majelis Ulama PERSIS juga dikoleksi olehnya. Manifesto Persatuan Islam yang ditulis oleh Ketua Umum PERSIS, KH. Isa Anshary juga dikaguminya sehingga buku-buku Isa Anshary juga menjadi koleksi perpustakaanya. Kekagumannya pada buku-buku dan tokoh-tokoh PERSIS membuat Djohan menjadi penganut salafisme dan lebih memilih menjadi pengikut PERSIS daripada Muhammadiyah yang dinilai kurang tegas dibanding PERSIS dalam memberantas Bidah dan khurafat. Meski demikian, ia tidak kehilangan sikap kritisnya. Meski ia sangat mengidolakan A. Hassan namun tidak semua pendapatnya disepakati olehnya. Dalam kasus laki-laki berjabat tangan dengan wanita, Djohan lebih cenderung pada pendapat Hasbi ash-Shiddieqy yang membolehkannya daripada pendapat A. Hassan yang mengharamkannya. Ketika membaca buku *Risalah Wanita* karya A. Hassan, ia mulai merasa bahwa pendekatan fiqih semata mengandung masalah.<sup>5</sup>

Di samping mengagumi tokoh-tokoh Islam reformis-puritan, Djohan juga mengagumi tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Foto kedua tokoh nasional ini dipajang di rumahnya. Saat itu ia belum memahami polemik antara kelompok islamis dan nasionalis mengenai dasar negara. Masyumi yang menginginkan berdirinya negara Islam ternyata

---

<sup>5</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 26-28

disambut hangat oleh Djohan. Ia rajin mengikuti rapat-rapat Masyumi di Banjarmasin dan memuliakan tokoh-tokohnya. Ketertarikannya pada Masyumi tidak mengalami kendala karena ayahnya juga seorang pengikut Masyumi dan ibunya aktif di GPII yang memiliki kaitan erat dengan Masyumi. Tampaknya Djohan tidak tertarik pada NU meski dia juga pernah menyaksikan pertemuan ulama-ulama NU di Kandangan dengan KH. Wahab Chasbullah (salah seorang pendiri NU).

Di PGAP, Djohan mulai banyak mengenal gerakan Islam dan kesadaran politik Islam dari salah seorang guru bahasa Arabnya, Ahmad Muzakkir, seorang aktivis Muhammadiyah pendukung Masyumi dan aktif di GPII yang berasal dari Pekalongan Jawa Tengah. Bimbingan sang guru membuatnya mulai memiliki wawasan politik. Karena itu ketika duduk di kelas 2 PGAP, seorang aktivis PKI yang rumahnya menjadi tempat indok Djohan sering mengajaknya berdialog dan berdebat soal-soal politik. Aktivis PKI itu memuji Djohan yang mengikuti perkembangan masyarakat dan berani berpendapat.

Dukungannya pada Masyumi semakin kuat dan tetap setia pada Masyumi meski sang ayah akhirnya keluar dari Masyumi ketika terjadi perpecahan antara Masyumi dan NU. Semangatnya sebagai pendukung Masyumi semakin bergelora ketika ia sempat bertemu dengan Muhammad Natsir dan Syafruddin Perwiranegara ketika kedua tokoh ini datang ke Kandangan dan menginap di rumah saudara sepupunya. Menjelang Pemilu 1955, ia aktif mengikuti pawai partai Masyumi dan menjadi pendukung fanatik ideologi Masyumi. Ia rajin mengikuti debat politik di Konstituante di mana Masyumi yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara berhadapan dengan kelompok nasionalis dan PKI yang menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Bahkan ketika dia mendengar proklamasi PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) tanggal 15 Pebruari 1958 di Padang Sumatera Barat yang melibatkan tokoh Masyumi yaitu Muhammad Natsir, Syafruddin Perwiranegara dan Burhanuddin Harahap, Djohan bersama temannya Masbuchin minta pertimbangan gurunya di PHIN, Bahrudin Edrees, mengenai keinginan mereka menjalin kontak dengan PRRI. Untungnya, sang guru menasihati mereka

untuk membatalkan niat mereka dan meminta mereka fokus pada pelajaran.<sup>6</sup>

Ketertarikan pada paham keagamaan PERSIS dan kegaguman terhadap tokoh-tokoh PERSIS yang sebagiannya juga menjadi tokoh penting Masyumi membuatnya ingin bergabung sebagai anggota PERSIS. Pilihan ini diperkuat lagi setelah ia menemukan bahwa PERSIS lebih tegas dalam masalah bid'ah dan khurafat dibanding Muhammadiyah. Tulisan Isa Anshary, *Manifesto Persatuan Islam*, turut mengokohkan keinginannya. Buku ini mengklasifikasikan umat Islam menjadi tiga kelompok, (1) konservatif, yaitu umat Islam yang banyak melakukan bid'ah dalam beribadah, mereka biasanya dinisbatkan pada NU; (2) moderat, yaitu umat Islam yang meninggalkan bid'ah tetapi tidak berusaha keras menentang bid'ah, mereka adalah pengikut Muhammadiyah, dan (3) progresif revolusioner, yaitu umat Islam yang tegas menentang bid'ah tanpa kompromi, mereka adalah PERSIS. Djohan dengan bangga menempatkan dirinya pada kelompok ketiga ini. Sikap tegas PERSIS menarik perhatiannya. Ia kemudian menghubungi PERSIS yang berpusat di Bandung untuk mengajukan permohonan untuk menjadi anggota. Ia diterima menjadi anggota PERSIS meski keanggotaannya bersifat individual karena pada saat itu tidak ada cabang PERSIS di Banjarmasin.<sup>7</sup>

Pada tahun 1957 Djohan menyelesaikan pendidikannya di PGAP. Bersama dengan lima orang temannya, ia terpilih sebagai lulusan terbaik PGAP dan mendapat beasiswa ikatan dinas untuk melanjutkan pendidikannya ke PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri) di Yogyakarta. Sebelum berangkat ke Yogyakarta, ia mengirim surat ke Pengurus Pusat PERSIS di Bandung untuk mendapat informasi mengenai anggota PERSIS yang ada di Yogyakarta yang dapat dihubungnya untuk membantunya mendapat tempat indekos di Yogyakarta. Namun ternyata cara ini tidak membantu, akhirnya ia berangkat ke Yogya seorang sendiri. Di Yogyakarta, bersama dengan lima temannya, Djohan tidak mengalami kesulitan mendapat tempat indekos karena kakak-kakak kelas mereka mencarikan tempat

---

<sup>6</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 32-36.

<sup>7</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 38-39.

indekos untuk mereka. Ia mendapat indekos tidak jauh dari PHIN.

Di Yogyakarta, dengan bekal uang diberi neneknya, Djohan langsung berburu buku-buku yang tidak ia dapatkan di Banjarmasin. Buku-buku yang dibelinya antara lain adalah *Subul al-Salam*, *Nayl Awthar*, *Mabadi Awwaliyah*, *al-Sullam*, *al-Bayan*, *al-Mu'in al-Mubin*, *Umm al-Qurra`*, dan beberapa karya Muhammad Ghazali. Ia juga menggunakan sisa uang beasiswanya yang ditabungnya setiap bulan untuk membeli sejumlah buku baik yang berbahasa Arab, Inggris maupun Indonesia sehingga lemarinya di tempat kos banyak dipenuhi buku-buku.

Di PHIN, mata pelajaran yang dipelajari Djohan adalah Ilmu Kalam, Ushul Fiqih, Fiqih, Tafsir, Perbandingan Agama, Filsafat, Hukum, Pidana, Perdata, Adat, Dagang, Kimia, Ilmu Jiwa, Etnologi, Geometri, Bahasa Arab, bahasa Inggris dan Bahasa Perancis. Kumpulan mata pelajaran ini terasa berat bagi Djohan karena terlalu banyak. Untungnya ada mata pelajaran Perbandingan Agama yang cukup menarik perhatiannya dan adanya beberapa guru yang memberikan wawasan politik membuatnya dapat mengatasi rasa beratnya. Beberapa orang gurunya yang mengajar fiqih dan ilmu Kalam adalah pendukung Masyumi. Mereka inilah yang menanamkan ideologi Islam kepada pelajar PHIN termasuk Djohan. Salah seorang gurunya di PHIN yang bernama Said bin Thalib, anggota Majelis Ulama PERSIS dan murid Ahmad Surkati mengubah cara pandangya terhadap cara keberagamaan PERSIS. Semula ia menduga Said bin Thalib akan memperkokoh keberpihakannya terhadap cara pandang PERSIS yang telah dikaguminya sejak dari Banjarmasin. Tetapi Said ternyata mengajarnya fiqih dengan cara berbeda, ia mengajarkan fiqih secara komparatif dengan cara menjelaskan berbagai perbedaan pendapat beberapa imam mazhab tanpa menunjukkan mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Akibatnya, ketertarikan Djohan pada PERSIS justru menurun karena ia mulai merasa adanya dunia pemikiran yang lebih luas.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 40-42.

Fase penting dalam dinamika intelektual Djohan ketika belajar di PHIN terjadi pula ketika ia berada di kelas II saat ia mendapat pelajaran filsafat dari gurunya Hasbullah Bakry. Untuk pertama kali ia mempelajari polemik antara al-Ghazali dan Ibnu Rusyd tentang keazalian alam dan kehidupan rohani di akhirat. Ia sebenarnya cenderung pada pendapat Ibnu Rusyd tentang keazalian alam dan kehidupan rohani di akhirat. Namun dirinya bimbang karena umat Islam pada umumnya menerima pendapat al-Ghazali. Kondisi ini membuat imannya terguncang dan hampir saja membuatnya menjadi agnostik. Namun kondisi ini berakhir ketika ia mendapat ‘pencerahan’ dari beberapa literatur agama dari kalangan Ahmadiyah. Argumen Ahmadiyah tentang kehidupan akhirat yang bersifat rohaniah membuatnya lebih mantap untuk memilih pendapat Ibnu Rusyd.<sup>9</sup>

Dari guru filsafatnya, Hasbullah Bakry, terbuka pintu bagi Djohan untuk berinteraksi dengan orang-orang Ahmadiyah dan menyelami literatur Ahmadiyah. Secara kebetulan sang guru menyuruhnya untuk mencari literatur tentang Ahmadiyah dan menyuruhnya menemui tokoh Ahmadiyah Lahore di Yogyakarta. Djohan meminjam beberapa buku dan majalah Ahmadiyah dari Muhammad Irshad termasuk buku yang diinginkan gurunya. Dari sinilah ia mulai mengenal secara langsung ajaran dan pendekatan Ahmadiyah dalam masalah agama. Ada beberapa pola pemikiran Ahmadiyah yang menarik Djohan, yaitu (1) Pemikiran Ahmadiyah mempertemukan pendekatan rasional dan penghayatan rasional, (2) literatur Ahmadiyah bersifat apologis untuk menunjukkan kelebihan Islam dibanding agama-agama dan ideologi-ideologi modern lain.<sup>10</sup>

Setelah mengenal dan membaca beberapa literatur Ahmadiyah, Djohan mulai berkenalan dengan sejumlah tokoh Ahmadiyah baik tokoh Ahmadiyah Lahore maupun Qadiyan. Dalam waktu tidak lama ia telah mengenal beberapa muballigh Ahmadiyah. Kongres Jamaah Ahmadiyah Indonesia yang dilaksanakan di Yogyakarta pada saat ia masih belajar di sana juga dihadapinya. Hanya saja interaksinya dengan tokoh

---

<sup>9</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 45.

<sup>10</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 47; Barton, *Gagasan Islam Liberal*, h. 176.

Ahmadiyah di Yogyakarta tidak berlangsung lama karena studi Djohan di PHIN telah selesai. Ia harus kembali ke Kalimantan setelah studinya selesai pada tahun 1960. Kali ini ia pulang dengan pemikiran yang berbeda dengan ketika ia datang. Pengaruh PERSIS yang selama ini begitu kuat memengaruhinya kini memudar dan pemikiran Ahmadiyah mulai memengaruhi dirinya.

## **B. Dua Tahun Mengabdikan di *Banua* (1960-1962)**

Setelah kembali ke kampung halamannya di Kandangan, Djohan diangkat sebagai pegawai negeri di Kerapatan Qadhi (Kantor Pengadilan Agama) di Amuntai. Awalnya keluarga, termasuk kedua orangtuanya menginginkan agar ia ditempatkan di Kandangan saja. Bahkan beberapa orang kerabatnya yang memiliki jabatan penting di Kandangan berjanji untuk mengusahakan agar ia dapat ditempatkan di Kandangan. Namun Djohan ingin mandiri dan tidak tergantung pada keluarga. Karena itu, penempatannya di Amuntai diterimanya meski ia harus kembali berpisah lagi dengan orang-orang dekatnya.

Tidak lama kemudian Djohan mulai bekerja di Kerapatan Qadhi Amuntai. Saat ia bekerja, yang menjabat sebagai Kepala Kerapatan Qadhi adalah Mu'allim Ahmad Hasan. Pimpinannya memahami bahwa Djohan memiliki pemahaman yang berbeda dengan mayoritas masyarakat sekitar. Masyarakat Amuntai mayoritas merupakan pendukung NU dan memiliki tradisi keagamaan kaum *tuha* yang kuat sementara Djohan pengikut kaum muda yang modernis yang didalam dirinya tengah bersemayam pengaruh PERSIS dan Ahmadiyah. Karena itu Mu'allim Ahmad Hasan menasihatinya agar ia menjaga sikap agar tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar. Djohan memaklumi nasihat itu. Untungnya, suasana kantor Kerapatan Qadhi saat itu terasa sangat longgar karena beberapa pegawai di dalamnya memiliki latar belakang yang cukup variatif sehingga ia betah bekerja di sana.

Selama di Amuntai, Djohan melakukan beberapa aktivitas lain di samping bekerja secara rutin sebagai pegawai negeri di Kerapatan Qadhi. Saat bekerja di sini ia sempat mengikuti latihan militer saat Soekarno melancarkan Komando Trikora dan sempat menjadi anggota GPII cabang Amuntai.

Keikutsertaannya di GPII berakhir ketika organisasi ini dibubarkan menyusul Masyumi yang bubar terlebih dahulu. Sejumlah anggota Masyumi kemudian berpindah ke al-Washliyah. Bubarnya GPII memaksa Djohan untuk masuk menjadi anggota pengurus al-Washliyah mengikuti langkah mantan anggota Masyumi di daerah itu. Pekerjaan lain yang cukup menyita waktunya adalah pekerjaannya sebagai guru di Madrasah Aliyah Ma'arif dan SMA Negeri. Djohan cukup akrab dengan murid-muridnya. Tidak heran ketika murid-murid SMA-nya ingin mendirikan PII (Pelajar Islam Indonesia), ia menjadi tempat berkonsultasi. Ketika organisasi pelajar ini berdiri ia menjadi penasihat di PII cabang Amuntai.

Melunturnya pengaruh PERSIS dalam diri Djohan dan semakin terbukanya pemikirannya dengan pemahaman yang berbeda membuatnya dapat menyesuaikan diri dengan tradisi keagamaan masyarakat Amuntai. Ia mulai dapat mengikuti acara maulidan dan tahlilan yang banyak dipraktikkan masyarakat sekitar. Perspektif PERSIS yang dipelajari Djohan menunjukkan bahwa tradisi ini termasuk perbuatan bid'ah. Namun ia tidak ingin terkungkung dengan perspektif fiqih yang sempit. Kebenaran tidak harus dihadapi dengan hitam putih tetapi harus disertai dengan kearifan. Niatnya mengikuti acara semacam itu untuk bersilaturahmi dengan masyarakat.

Setelah dua tahun bekerja di Kerapatan Qadhi Amuntai, Djohan harus kembali ke Yogyakarta. Pada tahun 1962, ia kembali mendapat tugas belajar, kali ini ia ditugaskan belajar ke IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia ditempatkan di Fakultas Syariah karena berasal dari pegawai Kerapatan Qadhi. Baginya, Yogyakarta bukan sesuatu yang baru karena ia telah berpengalaman menempuh pendidikan selama tiga tahun di sana. Baginya, ini kesempatan untuk meneruskan pencariannya yang belum tuntas saat ia menjadi pelajar di PHIN.

### **C. Dinamika Intelektual Djohan di Yogyakarta (1962-1970)**

Pada tahun pertama kuliah di IAIN, Djohan lebih fokus belajar karena ia ingin segera menyelesaikan kuliah dan pulang ke Kalimantan. Apalagi saat itu sang ayah baru saja meninggal dunia dan ia tidak sempat melihatnya. Agar dapat berkonsentrasi

pada kuliah, ia tidak melibatkan diri pada kegiatan ekstra kampus. Tetapi pada tahun kedua sikapnya berubah. Perubahan itu berawal dari demonstrasi mahasiswa yang juga melibatkan beberapa dosen pada tanggal 10 Oktober 1963 menentang NU-isasi IAIN bertepatan dengan kedatangan Menteri Agama Saifuddin Zuhri ke IAIN Yogyakarta dalam rangka pembukaan kuliah. Dampak dari demonstrasi ini memicu munculnya reaksi dari Departemen Agama yang ‘membalas’ aksi demonstrasi itu dengan memindahkan sejumlah dosen yang terlibat dalam demonstrasi itu sehingga IAIN Sunan Kalijaga banyak kehilangan dosen. Djohan kemudian kecewa karena dosen yang menggantikan mereka adalah dosen muda yang baru lulus yang tentu saja tidak sebanding dengan dosen sebelumnya. Akibatnya, ia kehilangan selera mengikuti kuliah dan sering membolos. Ia lebih suka mengunjungi berbagai perpustakaan yang ada di Yogyakarta, yaitu Perpustakaan Islam, Perpustakaan Negara, Perpustakaan Hatta dan Perpustakaan Katolik.<sup>11</sup>

Selain ke perpustakaan, Djohan juga semakin intensif mengikuti kegiatan kalangan Ahmadiyah dan mendalami literatur Ahmadiyah. Ahmadiyah Yogyakarta bukanlah kelompok asing baginya karena ia telah berinteraksi dengan kelompok ini sebelumnya. Setiap Minggu pagi ia juga mengikuti pengajian tafsir Alquran yang dipimpin oleh tokoh Ahmadiyah Lahore, Muhammad Irshad. Pengajian ini diberi nama *Sunday Morning Class*. Ia juga rajin membaca artikel-artikel tentang Islam pada majalah Ahmadiyah, baik *Islamic Review*, *The Light* (terbitan Ahmadiyah Lahore) dan *The Review of Religions* terbitan Ahmadiyah Qadiyan. Buku Ahmadiyah yang paling mempengaruhinya adalah *The Teaching of Islam* tulisan Mirza Ghulam Ahmad dan *The Secret of Existence* tulisan Khwaja Kamaluddin. Kedua buku ini dibaca berkali-kali oleh Djohan karena mengasyikkan dan inspiratif.

Ketika *Sunday Morning Class* membentuk sebuah organisasi yang diberi nama *Islamic Sunday Morning Class* (ISMC), Djohan tidak lagi sekadar pengikut pengajian, tidak lagi sebagai pendengar, tetapi ia ikut berpartisipasi dalam memberikan ceramah-ceramah yang diselenggarakan oleh

---

<sup>11</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 60-61.

ISMC. Dalam kegiatan ISMC, ia pernah menyampaikan paper panjang berkenaan dengan pengaruh paganisme dalam Kristen. Ia juga pernah menulis buku kecil yang berjudul *Fakta Kemurnian Alquran*. Di bawah pengaruh Ahmadiyah, tulisan Djohan itu bersifat apologetis, membela Islam dan menyerang agama-agama lain terutama Kristen di hadapan jamaah pengajian yang dikoordinasi ISMC. Ketika ISMC berubah menjadi AMAL (Angkatan Muda Ahmadiyah Lahore) ia tetap terlibat dan tercatat menjadi anggota Ahmadiyah.<sup>12</sup>

Meski tercatat sebagai anggota Ahmadiyah tidak berarti Djohan mengikuti doktrin atau teologi Ahmadiyah. Sebenarnya ia lebih banyak tertarik pada pendekatan Ahmadiyah dalam menyajikan masalah-masalah agama. Ia misalnya tidak tertarik dengan ajaran Mesianis Ahmadiyah meyakini bahwa Isa telah turun dan menjelma dalam diri Mirza Ghulam Ahmad atau Mirza menjelma sebagai al-Masih atau al-Mahdi. Demikian juga, ia tidak sepaham dengan Ahmadiyah mengenai konsep *khatamun nabiyyin*. Dalam hal ini, ia mengikuti Iqbal yang menegaskan bahwa setelah Nabi Muhammad, Tuhan tidak lagi mengirim utusan dari langit. Manusia tidak lagi memerlukan tokoh langit, apakah al-Masih, al-Mahdi apalagi nabi untuk membantu mereka menghadapi tantangan dunia. Manusia harus mampu memecahkan sendiri masalah-masalah kehidupan di dunia ini.<sup>13</sup> Tetapi ini juga bukan berarti bahwa ia menjadi pengikut Iqbal seperti dugaan bahwa ia adalah pengikut Ahmadiyah Lahore. Menurut Barton, meski ia merupakan mahasiswa yang menaruh minat besar terhadap kedua mazhab pemikiran tersebut, Djohan tidak lebih sebagai mahasiswa yang masih muda, yang *committed* dan benar-benar setia pada perubahan yang bebas dan jujur dalam dunia gagasan.<sup>14</sup>

Lunturnya pengaruh PERSIS dalam diri Djohan sebagai akibat perkenalannya dengan berbagai pemikiran seperti pemikiran fiqh yang terbuka, filsafat dan pendekatan Ahmadiyah, membuatnya kehilangan daya tarik terhadap cara berpikir PERSIS. Kondisi serupa juga mulai menimpa sikapnya

---

<sup>12</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 62-64

<sup>13</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 65

<sup>14</sup> Barton, *Gagasan Islam Liberal*, h. 178-179.

terhadap Ahmadiyah ketika pada awal tahun 1965 dia mendaftarkan diri menjadi anggota HMI Rayon Jetis.<sup>15</sup> Awalnya, ia tidak tertarik menjadi anggota HMI karena HMI saat itu tengah mengibarkan aspirasi Masyumi. Masuknya ia sebagai anggota HMI didorong oleh keinginannya untuk membela HMI dari serangan dari CGMI (*underbouw* PKI) dan GMNI (*underbouw* PNI). HMI saat itu tengah terancam dibubarkan terutama oleh PKI melalui CGMI karena dianggap sebagai bagian dari Masyumi yang telah dibubarkan pada tahun 1960.<sup>16</sup> Masuknya Djohan di HMI banyak mengubah cara pandangnya terutama sikap apologetisnya yang berasal dari pengaruh Ahmadiyah.

Dalam waktu singkat Djohan diangkat sebagai sebagai Ketua Umum Rayon dan kemudian menjadi aktivis HMI cabang Yogya dan anggota badan koordinasi (badko) HMI Jawa tengah. Bersamaan dengan itu dia juga ditunjuk sebagai seksi penerangan di Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI). Dawam Rahardjo kemudian mengajaknya untuk bergabung dalam *training* dan pengembangan kader HMI. Dari sini kemudian ia menjadi instruktur kunci yang terlibat dalam *training-training* HMI dan menjadi anggota Biro Kader HMI Jawa Tengah bersama dengan Dawam Rahardjo, Ahmad Wahib dan Mansur Hamid.<sup>17</sup>

Untuk menghadapi komunis (PKI/CGMI), Djohan dan kawan-kawannya mempelajari Marxisme, Komunisme dan Sosialisme baik yang berasal dari penulis China, Rusia dan Indonesia sendiri. Buku yang menjadi pegangan penting Djohan adalah *Sosialisme Islam* karya H.O.S. Tjokroaminoto karena dianggap sebagai jalan tengah antara komunisme dan kapitalisme. Djohan bersama dengan Ahmad Wahib dan Dawam Rahardjo rajin menjadi instruktur dalam *training-training* HMI karena itulah ia memerlukan bacaan semacam itu. Mereka ingin

---

<sup>15</sup> Djohan masuk HMI menggunakan cara diluar ketentuan penerimaan anggota baru. Dia tidak mendaftarkan diri melalui salah satu komisariat HMI yang tersedia di fakultas-fakultas IAIN, akan tetapi mendatangi sekretariat rayon HMI dan menyatakan keinginannya untuk masuk HMI. Barton, *Gagasan Islam Liberal*, h. 183.

<sup>16</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 66; Barton, *Gagasan Islam Liberal*, h. 182.

<sup>17</sup> Barton, *Gagasan Islam Liberal*, h. 183-184.

memperkuat ideologi HMI dengan ide-ide sosialisme sebagai tandingan terhadap komunisme.

Titik balik situasi terjadi ketika PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 dan kemudian berhasil ditumpas dengan cepat oleh TNI Angkatan Darat. HMI yang awalnya bersikap depensif, kini mulai berani menyerang PKI. Bersama dengan organisasi dan kelompok masyarakat yang selama ini anti PKI dan merasa disakiti termasuk HMI kini bangkit ikut melakukan aksi pengganyangan PKI. Akibatnya, pembantaian terhadap pengikut PKI terjadi di mana-mana. Djohan dan anggota HMI lainnya tidak berminat untuk melakukan kekerasan terhadap anggota PKI, malah Djohan berusaha melindungi beberapa orang anggota PKI yang terancam jiwanya.

Runtuhnya PKI disusul dengan bubarnya rezim Soekarno membuat aktivis Masyumi berusaha kembali merehabilitasi Masyumi yang telah dibubarkan pada era Soekarno dan mengungkit kembali isu Piagam Jakarta. Djohan bersama Dawam dan Wahib sangat menentang masuknya pengaruh Masyumi dalam tubuh HMI karena itu mereka tidak mendukung upaya-upaya rehabilitasi Masyumi karena beranggapan bahwa pola-pola perjuangan Masyumi sudah tidak bisa dilanjutkan. Bagi mereka mengangkat kembali isu Piagam Jakarta adalah sia-sia dan keinginan untuk menghidupkan kembali Masyumi tidak akan berhasil. Menurut Djohan perjuangan sekarang adalah perjuangan untuk mewujudkan modernitas bukan memperjuangkan negara Islam sebagaimana yang selalu diperjuangkan Masyumi. Hanya saja modernitas sebagaimana yang diinginkan Djohan saat itu dicurigai sebagai bentuk westernisasi yang menganut sekulerisme. Djohan tidak setuju dengan anggapan seperti itu. Baginya, modernisasi merupakan suatu keharusan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang melandasi kehidupan modern tidak mengenal Timur dan Barat. Karena itu, belajar ke negeri-negeri modern tidak dapat dihindari. Untuk menyampaikan gagasannya tentang modernitas, pada tahun 1966 atas desakan Dawam, Djohan menulis makalah provokatif tentang modernisasi untuk pertemuan HMI Jawa Tengah/Yogya dengan PP IMM. Makalah ini segera menyebar hingga HMI Jakarta.

Apa yang diprediksi Djohan ternyata benar. Upaya untuk merehabilitasi Masyumi ternyata gagal karena rezim Soeharto menolak menghidupkan kembali partai yang dianggap pernah terlibat dalam pemberontakan PRRI itu. Bahkan ketika Parmusi dibentuk pada tahun 1967 untuk menggantikan Masyumi, Soeharto menolak partai itu dipimpin oleh mantan tokoh-tokoh Masyumi. Karena itu dia semakin mantap untuk melepaskan pengaruh Masyumi dalam tubuh HMI yang masih menghinggap anggota HMI lainnya terutama HMI Jakarta dan Jawa Barat. Namun sikap dan gagasan Djohan mengenai Masyumi ternyata tidak disukai oleh sejumlah anggota HMI lainnya yang masih menaruh harapan pada Masyumi

Pada pertengahan 1967, sebuah kelompok diskusi yang bernama *Limited Group* dibentuk di Yogyakarta. *Limited Group* ini digagas oleh Dawam dan mendapat restu dari Mukti Ali. Djohan dan Ahmad Wahib segera ikut terlibat dalam forum diskusi *Limited Group* bersama Dawam. Nama *Limited Group* sendiri berasal dari Ahmad Wahib yang dipilih sebagai sekretaris forum diskusi. Forum diskusi ini segera terkenal di Yogya karena merupakan forum diskusi yang terbuka untuk umum baik muslim maupun nonmuslim. Djohan, Wahib dan Dawam merupakan anggota inti yang menentukan tema, narasumber dan peserta yang akan diundang. Sejumlah aktivis, akademisi dan intelektual pernah berpartisipasi dalam forum diskusi ini baik sebagai narasumber maupun peserta. Sebagian mereka adalah peserta internal dan sebagiannya lagi peserta yang berasal dari kalangan eksternal forum ini.

Forum diskusi *Limited Group* ini sendiri memicu kontroversi. Forum ini dikritik karena pembahasannya yang dianggap terlalu bebas karena tidak membatasi apa yang boleh dan yang tidak dibicarakan. Masalah-masalah keimanan dan ketuhanan yang sudah dianggap final dapat diperdebatkan habis-habisan di forum ini. Mukti Ali yang menjadi mentor dan memberi fasilitas forum ini sering mendapat kritik karena memfasilitasi sebuah forum untuk mendiskusikan hal-hal yang tidak umum dan mengungkit masalah yang sudah dianggap final dalam agama. Namun Mukti Ali mengabaikan kritik ini. Baginya, anak-anak muda yang terlibat dalam forum diskusi ini tengah melakukan pencarian dan tengah bergulat dengan

pemikiran yang keras. Djohan sendiri yang terlibat dalam forum ini sejak awal sangat menyukai forum ini karena sesuai dengan jiwa petualangannya dan memberikannya perspektif yang luas. Hal semacam ini tidak ia dapat ketika ia menggeluti PERSIS, Ahmadiyah, dan HMI.

Pada tahun 1968, Djohan bersama Ahmad Wahib menjadi aktivis HMI yang dengan tegas menolak Piagam Jakarta dan rehabilitasi Masyumi. Sikap Djohan yang menolak Islam politik dan kritiknya terhadap aktivis HMI yang ikut terlibat dalam politik praktis menimbulkan perpecahan dirinya dengan aktivis HMI lainnya. Perpecahan itu semakin kuat ketika Djohan justru mengembangkan wacana-wacana tentang sekularisasi, modernisasi dan westernisasi. Djohan dan Ahmad Wahib mengembangkan tema-tema ini dalam *training-training* HMI. Bahkan dalam Seminar Garis Perjuangan HMI di Bandung pada Pebruari 1968 Djohan berdebat keras dengan Nurcholish Madjid terkait bagaimana menghadapi peradaban Barat. Djohan berpandangan bahwa westernisasi diperlukan untuk pengembangan ilmu dan teknologi serta pengembangan mentalitas. Sebaliknya, Nurcholish memandang bahwa westernisasi itu berbahaya.<sup>18</sup>

Akibat gagasan-gagasan yang disampaikan dalam beberapa *training* dan seminar membuat Djohan dan Wahib dinilai sekuler dan terlalu western dalam berpikir. Bukan hanya persoalan kebebasan berpikir yang diserukan Djohan yang menjadi persoalan tetapi juga seruan mereka untuk melepaskan diri dari partai politik Islam terutama Masyumi. Sikap dan pandangan Djohan ini menimbulkan konsekuensi berupa ketidaksenangan sejumlah aktivis HMI lainnya yang menganggapnya berbahaya. Resistensi sejumlah aktivis HMI Jakarta yang berseberangan dengan HMI Yogya terhadap pemikiran Djohan juga Wahib membuat keduanya tidak merasa nyaman. Apalagi kemudian muncul tuduhan bahwa Djohan dan Wahib memiliki *link* dengan PSI. Tuduhan ini muncul salah satunya karena dalam sejumlah *training-training* HMI saat melawan PKI Djohan menyajikan Marxisme dan Sosialisme untuk menandingi ideologi komunisme PKI. Rasa frustrasi

---

<sup>18</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 71-72.

Djohan dan Wahib semakin besar ketika HMI tetap mempertahankan orientasi ideologis dan politisnya daripada orientasi program setelah pelaksanaan Musda se-Jawa Tengah-Yogya di Purwokerto pada Agustus 1969.<sup>19</sup>

Merasa tidak cocok lagi dengan HMI, Djohan menyatakan diri keluar dari HMI melalui “Statemen pamitan” yang ditulis pada tanggal 1 Oktober 1969. Sebelumnya Wahib mendahului Djohan keluar dari HMI melalui pernyataan yang berjudul “Memorandum Pembaharuan” yang ditulis pada tanggal 30 September 1969. Nurcholish Madjid yang terpilih kembali sebagai ketua umum HMI pada bulan Nopember 1969 menulis surat rahasia kepada Djohan bahwa dia menyetujui gagasan Djohan tetapi sebagai ketua umum ia harus berdiri netral.<sup>20</sup>

Setelah keluar dari HMI pada bulan Oktober 1969, Djohan memiliki waktu luang untuk menyelesaikan studinya yang tertunda sejak tahun 1965. Ia mendaftarkan dirinya kembali untuk penyelesaian akhir skripsinya di IAIN Sunan Kalijaga. Meski telah keluar dari HMI dan berkonsentrasi menyelesaikan skripsi, Djohan tetap memberikan *training-training* HMI bersama Wahib. Ketika Nurcholish Madjid menyampaikan tulisan dalam ceramahnya yang berjudul “Keharusan Pembaharuan” di Menteng tanggal 3 Januari 1970 yang menimbulkan kegemparan di kalangan umat Islam, Djohan dan Wahib segera mengkampanyekan dan mempertahankan gagasan Nurcholish dari serangan orang-orang yang menentangnya.

Pada tahun 1970 setidaknya ada dua peristiwa penting dalam hidup Djohan. Pertama pada tahun ini, Djohan berhasil menyelesaikan studinya dengan skripsi yang berhubungan dengan tafsir. Kedua, pada tahun itu juga Djohan menikah dengan Solichah. Gadis yang telah dikenalnya sejak tahun 1967 dan sempat memiliki hubungan khusus meski untuk menikahinya Djohan harus melalui proses yang berliku.

---

<sup>19</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 72-73.

<sup>20</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 73; Barton, *Gagasan Islam Liberal*, h. 192.

#### **D. Menjadi Staf Pribadi Menteri Agama dan Penulis Pidato (1971-1980)**

Setelah menyelesaikan studinya di IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1970, Djohan berniat berangkat ke Jakarta pada tahun 1972. Baginya, Jakarta saat itu merupakan pusat distribusi gagasan dan transmisi pengetahuan yang dominan. Itulah sebabnya ia membulatkan tekad untuk berangkat ke Jakarta. Seharusnya, sesuai ikatan dinasnya dan statusnya sebagai pegawai negeri di Kerapatan Qadhi Amuntai, ia harus kembali ke kantornya di Amuntai setelah menyelesaikan studi. Tetapi rupanya ia tidak berminat untuk kembali tetapi bertekad untuk melanjutkan petualangan intelektualnya di tempat yang lebih menantang. Tekadnya semakin kuat ketika mentornya, Mukti Ali dan koleganya, Dawam, di *Limited Group* terlebih dahulu telah berpindah ke Jakarta sementara sahabatnya, Ahmad Wahib juga memiliki niat yang sama.

Djohan berangkat ke Jakarta untuk mengurus penempatannya sebagai pegawai negeri di Kantor Direktorat Peradilan Agama. Ternyata ia ditempatkan sebagai Kepala Pengadilan Agama di daerah Nagara yang terletak sekitar 20 Km dari kampung halamannya, Kandangan. Ia keberatan dengan penempatan itu. Permintaannya agar ditempatkan di Kantor Lembaga Kerohanian Depag yang diminatinya ternyata juga ditolak. Bagaimanapun ia sudah bertekad untuk tinggal di Jakarta dan memilih untuk berhenti jadi pegawai negeri jika harus dikembalikan ke daerahnya lagi dan memilih mencari pekerjaan lain asal tetap di Jakarta. Ia sebenarnya bisa saja meminta bantuan Mukti Ali yang telah menjadi Menteri Agama terkait penempatannya, namun rupanya ia tidak ingin merepotkan Mukti Ali untuk menempatkannya di Depag Pusat. Akhirnya, ia memilih untuk menemui Bahrum Rangkuti, Sekjen Depag yang sebenarnya belum pernah dikenalnya secara langsung. Ia hanya mengenal Rangkuti dari buku-bukunya, *Kandungan al-Fatihah*, *Eksistensi Islam* dan *Asrar Khudi* (terjemah karya Muhamamd Iqbal). Kali ini ia beruntung, Rangkuti yang ditemuinya ternyata bersedia menempatkannya di Depag pusat dan bahkan mengangkatnya sebagai staf pribadinya.

Setelah Djohan pindah ke Jakarta bersama istrinya, Ahmad Wahib segera menyusul. Wahib tinggal di rumah Djohan selama beberapa bulan di Kebon Kacang Jakarta untuk mencari pekerjaan. Wahib akhirnya mendapat pekerjaan sebagai reporter Majalah *Tempo*. Di sini Wahib membantu Syu'bah Asa yang menangani masalah agama. Namun Wahib tidak lama bekerja di *Tempo* karena sebuah kecelakaan tragis akhirnya merenggut jiwanya. Pada tanggal 31 Maret 1973, Wahib yang sedang berangkat pulang saat malam hari dari kantor Majalah *Tempo* tiba-tiba ditabrak sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi di persimpangan jalan Senen Raya-Kalilio. Meski sempat dirawat di rumah sakit namun nyatanya tidak tertolong. Kematian Wahib segera menjadi berita duka bagi Djohan dan teman seperjuangannya yang lain.

Djohan bersama beberapa koleganya, mendatangi rumah kontrakan Wahib. Di sana Djohan menemukan 17 catatan harian Wahib dan membawanya pulang atas izin keluarga. Belakangan catatan harian Wahib ini diserahkan Djohan kepada Mufti Juneidi untuk diketik ulang. Catatan harian ini setelah melalui proses bertahun-tahun akhirnya dapat diterbitkan pada awal 80-an dan Djohan memiliki peran dan kepentingan terkait dengan penerbitan catatan harian sahabatnya itu.

Posisi Djohan sebagai staf pribadi Rangkuti memberi keuntungan tersendiri bagi Djohan. Kelebihannya tidak pada tugas rutinnnya yang hanya membaca dan membuat disposisi yang ditujukan kepada Sekjen Depag, baginya ini hanya pekerjaan biasa. Setidaknya ada tiga keuntungan yang didapat dari posisinya mendampingi Rangkuti selain keuntungan ia dapat ditempatkan di Depag pusat, yaitu (1) Djohan dapat bersilaturahmi dan berkenalan secara pribadi dengan pejabat eselon satu dan dua, (2) Djohan mendapat kebebasan untuk membaca buku-buku yang diminatinya dan menghadiri seminar-seminar di luar kantor. Ia juga dapat bertemu dengan beberapa teman lamanya di HMI. Ia sering bertemu dengan Nurcholish Madjid dan Dawam Rahardjo untuk berdiskusi. Bersama mereka ditambah dengan kehadiran Ahmad Wahib, ia aktif mengadakan serangkaian diskusi formal dan informal. Mereka kemudian membentuk Yayasan Samanhuji untuk menyelenggarakan diskusi yang luas dan serius tentang pembaruan Islam; (3)

Djohan mendapat kesempatan untuk menjadi dosen SESPA untuk mengajar pejabat tinggi (IV/a keatas) menggantikan sang Sekjen jika berhalangan padahal saat itu pangkatnya masih III/a; (4) Djohan berkenalan dan ikut berdiskusi dengan tokoh-tokoh lintas agama baik muslim maupun non-muslim yang menjadi tamu Rangkuti. Rangkuti memahami minat Djohan terhadap wacana-wacana intelektual dan hubungan antaragama.<sup>21</sup>

Djohan tidak lama menjadi staf pribadi Rangkuti. Pada tahun 1973 Djohan dipindahkan ke Sekretariat Tata Usaha Menteri sebagai Staf Pribadi Menteri. Pindahan Djohan berawal ketika Djohan ditunjuk oleh Rangkuti untuk menulis naskah pidato Sambutan Presiden untuk Hari Raya Idul Adha. Mukti Ali yang tidak mengetahui peristiwa ini karena berada di Mekkah sebagai Amirul Hajj diberitahu oleh Rangkuti mengenai naskah pidato yang ditulis Djohan itu. Beberapa hari kemudian Mukti Ali meminta agar Djohan dipindahkan ke kantornya. Tugas utama Djohan adalah menulis pidato/sambutan menteri agama untuk berbagai acara. Djohan tidak mendapat kesulitan untuk menulis pidato untuk Mukti Ali karena ia sudah mengerti jalan pikiran mentornya ini apalagi selama bekerja di kantor Mukti Ali, ia sering berdiskusi dengannya mengenai berbagai masalah yang dihadapi Depag. Meski Mukti Ali tidak menunjukkan bagaimana seharusnya isi pidatonya, namun ia dapat menuangkan ide-ide Mukti Ali yang sudah dikenalnya. Tidak jarang ia juga menyisipkan ide-idenya sendiri dalam naskah pidato itu.

Pada tahun 1974, Djohan mendampingi Mukti Ali ketika sang menteri harus menyusun jawaban pemerintah terhadap Pemandangan Umum yang disampaikan oleh PPP terkait dengan RUU Perkawinan. Isi pandangan umum PPP sangat keras terhadap RUU itu karena banyak pasal yang dianggap bertentangan dengan hukum perkawinan Islam. Situasi semakin panas karena di luar gedung DPR demonstrasi juga tidak kalah kerasnya. Djohan menyalahkan proses pembuatan RUU ini karena dibuat oleh Menteri Kehakiman tanpa mengajak pemikir Islam untuk memasukkan poin-poin yang dianggap perlu dalam

---

<sup>21</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 100-101; lihat juga Barton, *Gagasan Islam Liberal*, h. 193.

RUU itu. Djohan menyiapkan 35 halaman jawaban pemerintah namun teks ini tidak sampai habis dibacakan oleh Mukti Ali karena terjadi demonstrasi dalam ruang sidang yang tidak memungkinkan sidang dilanjutkan. Dalam proses berikutnya terkait RUU ini, ia selalu terlibat dalam lobi-lobi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Depag dan ia juga ikut memberikan kontribusi untuk membuat rumusan alternatif terhadap pasal-pasal yang dipertentangkan.

Sejak tahun 1975, Djohan tidak hanya menulis naskah pidato menteri, ia pun akhirnya menjadi ‘langganan’ Sekneg untuk menulis naskah pidato presiden. Setiap kali Sekneg meminta Depag untuk menulis naskah pidato untuk presiden dalam berbagai acara keagamaan, maka Djohanlah yang mendapat tugas untuk mengerjakannya padahal saat itu pihak Sekneg sendiri belum mengenal Djohan. Tugas ini dianggap sebagai tugas sampingan bagi Djohan. Mukti Ali sendiri tidak ingin Djohan hanya menjadi sekadar penulis pidato menteri dan pidato presiden. Ia juga ingin agar Djohan melakukan sesuatu tindakan nyata.

Mukti Ali menunjuk Djohan agar terlibat dalam Proyek Kerukunan Beragama yang telah dimulai sejak tahun 1972. Awalnya proyek ini dipimpin oleh Mas’udi Sekteraris Menteri Agama dan kemudian Amidhan yang menjabat Sekretaris Dirjen Bimas Islam sementara Djohan menjadi Sekretaris Proyek. Setelah dipimpin Amidhan, barulah proyek ini dipimpin oleh Djohan dalam rentang waktu hingga tahun 1978. Di bawah kendali Djohan proyek ini diarahkan pada beberapa kegiatan yang diharapkan melahirkan paradigma baru dalam kehidupan beragama. Langkah yang dilakukannya adalah menumbuhkan persahabatan personal antar pemuka agama melalui beberapa kegiatan, yaitu (1) menyelenggarakan dialog para pemuka agama dari berbagai agama di sejumlah daerah dengan tema yang tidak menyinggung masalah teologi. Peserta yang diundang dalam dialog itu hadir atas nama pribadi bukan sebagai perwakilan lembaga agama. Tempat kegiatan dilaksanakan di luar kota yang memungkinkan peserta menginap bersama; (2) program penelitian bersama mengenai masalah sosial keagamaan; dan (3) program kamping bersama yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi agama

(IAIN, STT, STF dan lainnya) dan organisasi kemahasiswaan (HMI, PII, GMKI). Hanya saja setelah proyek ini berlangsung 5 tahun (1972-1977) dan berhasil mengadakan sekitar 23 kegiatan dialog pemuka agama dan mendapat sambutan antusias dari tokoh-tokoh agama, program ini berhenti seiring pergantian kepemimpinan Depag tahun 1978. Djohan juga berhenti memimpin proyek ini.<sup>22</sup>

Pada tahun 1976 Djohan diangkat sebagai Kepala Sub-Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam. Meski sudah mendapat jabatan struktural dan menempati kantor baru, Djohan tetap menjadi Staf Pribadi Menteri Agama sebagai penulis pidato menteri dan juga pekerjaan sampingannya sebagai penulis pidato presiden tetap berjalan. Kebijakannya yang penting ketika ia menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat PTAI adalah menempatkan dosen IAIN yang baru diangkat tidak pada tempat ia lulus tetapi ditempatkan di IAIN lain agar sang dosen memiliki wawasan dan persahabatan yang luas.

Meski sibuk dengan posisinya sebagai Kepala Sub-Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam dan Proyek Kerukunan Beragama serta tugas sampingannya sebagai penulis pidato menteri agama dan presiden, Djohan tetap aktif dalam diskusi mengenai pemikiran Islam di Kelompok Diskusi Samanhuri. Hanya saja pada saat itu terjadi kemunduran dalam gerakan pembaruan Islam. Meninggalnya Wahib pada tahun 1973 dan kepergian Nurcholish Madjid selama beberapa bulan ke Amerika pada tahun 1976 kemudian disusul dengan menetapnya Nurcholish Madjid di Amerika untuk mengambil studi S3 di sana sejak tahun 1978 membuat gerakan ini kehilangan dua tokoh penting. Untungnya, kekosongan posisi Nurcholish Madjid kemudian diisi dengan kehadiran Abdurrahman Wahib tokoh NU yang baru saja pindah ke Jakarta.

Pada tahun 1978 Djohan sudah mendapat meja khusus di Sekneg sebagai salah satu penulis pidato presiden. Rupanya sekneg menyukai naskah pidato yang ditulis oleh Djohan sehingga perlu menempatkannya di sana. Ketika Djohan mengikuti kursus bahasa Inggris di Australia selama enam bulan

---

<sup>22</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 118-123.

pada tahun 1976, tugasnya menulis naskah pidato presiden di Depag diserahkan pada orang lain. Pihak Sekneg tampaknya merasa ada yang berbeda dengan isi naskah pidato yang telah ditulis sebelumnya. Mereka lebih suka naskah pidato yang ditulis oleh Djohan tetapi mereka belum tahun dengan Djohan. Akhirnya, melalui pemberitahuan dari Mukti Ali, bahwa yang menulis konsep pidato yang disukai oleh Sekneg itu adalah Djohan maka Djohan pun dipanggil ke Sekneg menemui Moerdiono. Sejak itu tugas ‘khusus’ ini ditekuni Djohan hingga dua dekade. Meski memiliki tempat di Sekneg Djohan tetap sebagai pegawai Depag dan belum mendapat SK yang menetapkan statusnya di Sekneg.

Dalam menulis naskah pidato untuk presiden, Djohan memasukkan pikiran-pikirannya ke dalam naskah pidato yang dibuatnya. Ia tidak mau menulis apa yang tidak disetujuinya. Meski konsep pidatonya akan mendapat ‘sensor’ dari Moerdiono dan Sudharmono baginya tidak menjadi masalah. Jika ada bagian yang dicoret dan diganti dengan kalimat atau kata yang lain baginya itu sudah diluar tanggung jawabnya lagi. Yang penting baginya, ide-idenya yang dituangkan dalam naskah pidatonya itu akan didengar oleh banyak orang melalui orang nomor satu di negeri ini, yaitu Presiden Soeharto.

Pada tahun 1979 Djohan diangkat sebagai Kepala Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan di Jakarta. Di sini Djohan melakukan beberapa penelitian dan merekrut calon peneliti. Masalah yang dihadapinya di sini adalah perekrutan tenaga peneliti dan masalah dana. Djohan mewawancarai sendiri calon peneliti agar benar-benar memiliki kemampuan meneliti. Namun ia juga terpaksa harus menerima tenaga peneliti ‘titipan’ pejabat yang tidak lulus tes meski sebenarnya ia nerasa tidak nyaman. Keinginannya untuk merekrut peneliti dari kalangan nonmuslim juga tidak bisa dilakukan karena adanya penolakan dari atasan. Masalah dana juga mengganggu Djohan. Bukan karena anggaran dananya yang tidak jelas tetapi keharusan semua dana proyek harus dipotong 10% untuk diserahkan ke Depag pusat. Kemudian ada juga potongan 5% yang disetorkan ke Balitbang Agama Depag. Potongan ini dibebankan kepada para pelaksana proyek termasuk peneliti. Ia tidak mau melakukannya dan tidak pernah menyertorkan potongan dana yang dimaksud.

Pembangkitan Djohan mendapat konsekuensi. Setelah setahun beberapa bulan ia menjabat sebagai kepala balai penelitian, ia dipecat dengan alasan melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya. Ia keberatan dengan alasan pemecatannya itu. Ia tahu bahwa pemecatan ini merupakan ulah orang-orang yang tidak menyenangkannya. Sebelum dipecat, ia dituduh terlibat dalam pertemuan Gontor yang mempersoalkan kebijakan Alamsyah (Menteri Agama yang baru menggantikan Mukti Ali) mengenai pengumpulan dana BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) padahal ia tidak mengikuti dan tidak tahu mengenai pertemuan itu. Ia sempat diinterogasi pihak Inspektor kepegawaian namun orang yang menginvestigasinya tidak dapat menemukan kesalahannya. Ia juga diminta untuk minta maaf jika ingin mempertahankan jabatannya, namun ia menolak dan lebih suka dipecat daripada mengakui kesalahan yang tidak ia lakukan.

Setelah dipecat sebagai Kepala Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Djohan hanya menjadi peneliti biasa. Meski tidak memiliki jabatan penting ia tidak dikucilkan karena ia tetap diperlukan untuk membantu Sekneg membuat konsep pidato presiden. Pihak Depag tidak bisa memecat Djohan terkait dengan hal yang satu ini. Aktivitas Djohan lainnya yang terus berjalan adalah menjadi dosen pengajar Islamologi di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara sejak tahun 1974. Pekerjaannya yang satu ini dilakukan Djohan dalam waktu lama dan baru berhenti ketika ia melanjutkan studi di Australia tahun 1995.

Sejak menjadi salah satu penulis konsep pidato menteri dan presiden, Djohan juga menulis untuk kepentingan lain. Beberapa tulisannya yang lahir pada dekade 1970-an diantaranya adalah *Sekitar Perkembangan Perpustakaan dalam Dunia Islam* (makalah, 1974), *Islam: Pengantar Untuk Memahami* (makalah seminar, 1974), *Kehidupan Agama dan Masalah Kepadatan Penduduk* (makalah pelatihan, 1977), *Dialog antar Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan?* (Prisma, 1978), *Pancasila Kerangka Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama* (makalah seminar, 1979), dan *Membangun Kehidupan Agama dalam Kerangka Masyarakat Pancasila* (makalah seminar, 1979).

## **E. Djohan Dekade 1980-an: Peneliti, Mentor, Iqbalian, dan Penulis Pidato**

Tahun 1981 dibuka dengan kehebohan buku *Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib* yang juga menyeret nama Djohan. Terseretnya nama Djohan dalam kontroversi buku ini merupakan konsekuensi dari keterlibatannya dalam proses penerbitannya dan namanya sendiri banyak disebut-sebut dalam catatan harian Ahmad Wahib yang dibukukan itu. Artinya, ia terlibat dalam pergolakan pemikiran Islam sebagaimana tertulis dalam buku itu. Itulah sebabnya namanya juga sering dikaitkan dengan buku ini. Apalagi dialah yang mengambil catatan itu ketika Wahib wafat tahun 1973 dan ia juga yang meminta agar buku catatan itu diketik ulang. Naskah ketikan itu kemudian diserahkan pada Aswab Mahasin, Direktur LP3ES, yang kemudian bersedia menerbitkannya. Djohan sendiri membuat Kata Pengantar, Pendahuluan ditulis oleh Mukti Ali, dan editing sepenuhnya dilakukan oleh Ismet Natsir. Pencantuman nama Djohan sebagai editor pada buku itu sepenuhnya merupakan kebijakan LP3ES.

Terbitnya buku ini menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Mengenai munculnya reaksi keras terhadap buku ini Barton, yang meneliti Wahib sebagai bagian dari Neomodernisme Islam bersama Nurcholish Madjid, Djohan dan Gusdur menjelaskan bahwa ide-ide Wahib itu luar biasa baru dan bahkan cenderung radikal saat buku itu diterbitkan tahun 1981. Selain itu, pembaca buku tersebut mengalami keterkejutan atau ketidaksiapan menerima perbedaan pemikiran. Wahib sendiri menurut Barton terlalu banyak mengangkat isu-isu yang menjadi perhatian dan pada saat yang bersamaan ia terlalu cepat menangani isu-isu tersebut.<sup>23</sup>

Pada tahun 1981 Djohan masih menduduki jabatan sebagai ketua Balai Penelitian Agama dan Masyarakat. Sejak tahun 1979 hingga 1981, ia telah melaksanakan tiga proyek penelitian, yaitu *Studi Kebijakan tentang Pertumbuhan Islam di Pemukiman Baru* (Proyek Anggaran 1979/1980), *Studi Penelitian tentang Pendidikan Agama pada Sekolah Dasar* (Proyek Anggaran 1980/1981) dan *Studi Penelitian Pendidikan*

---

<sup>23</sup> Barton, *Gagasan Islam Liberal*, h. 288.

*Agama pada Gerakan Pramuka* (Proyek Anggaran 1980/1981). Untuk melaksanakan proyek penelitian ini ia tidak hanya melibatkan peneliti dari kantor yang dipimpinnya tetapi juga merekrut beberapa peneliti dari luar untuk kelancaran penelitian tersebut. Pada tahun 1982 setelah ia tidak lagi menjadi kepala Balai Penelitian Agama, masih ada sejumlah penelitian dimana ia terlibat di dalamnya. Diantaranya penelitian tentang *Orientasi Keagamaan di Berbagai Tipe Komunitas* (Proyek Anggaran 1982/1983) dimana ia bersama M.M. Billah ditunjuk sebagai konsultan.<sup>24</sup>

Meski Djohan tidak lagi menjadi Kepala Balai Penelitian Agama tetapi minatnya terhadap dunia penelitian tidak berkurang. Ia tetap menekuni dunia penelitian meski tidak memiliki jabatan penting selain sebagai peneliti biasa. Minatnya terhadap penelitian telah tumbuh sejak awal bekerja di Depag. Orang yang berjasa mengembangkan kemampuan menelitinya adalah Harsya W. Bachtiar. Seminggu sekali ia bersama Nurcholish Madjid dan Zarkowi Soeyoeti bertemu di LIPI. Harsya W. Bachtiar memperkenalkan kepada mereka teori-teori sosial dan metode-metode penelitian. Di samping itu, kehadirannya di LIPI tidak sekadar memperkuat basis teori dan metode penelitian, tetapi ia juga terlibat dalam kegiatan penelitian LIPI di samping juga melakukan penelitian untuk Departemen Agama. Di LIPI, ia membantu Dr. Mochtar Buchori, salah seorang Deputi Ketua LIPI yang memimpin penelitian tentang strategi kebudayaan.<sup>25</sup>

Pada awal tahun 1980-an selain sebagai peneliti, Djohan menjadi mentor sejumlah intelektual muda dalam sebuah forum diskusi yang dinamakan Kelompok Studi Proklamasi. Nama proklamasi sendiri diambil dari nama jalan proklamasi dimana rumah Djohan berada. Sebelum kelompok studi ini terbentuk, rumahnya sering dijadikan tempat pertemuan para intelektual seperti Komaruddin Hidayat, Kautsar Azhari Noor dan Jimly Asshiddiqie dan yang lainnya. Kemudian pada tahap berikutnya, pada awal 1980-an sejumlah intelektual muda berkumpul dan

---

<sup>24</sup> Nening Sofia Mahendra, "Mahalnya Sebuah Kepercayaan" dalam Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 381 dan 393.

<sup>25</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 134.

bersepakat untuk membentuk kelompok Studi Proklamasi. Mereka sepakat mengadakan pertemuan setiap hari Minggu di rumahnya untuk berdiskusi dan berdebat. Di antara mereka yang terlibat dalam kelompok ini adalah Budhy Munawar Rachman, Denny J.A., Muhammad Asrun, Jonminofri, Elza Feldi Taher dan lain-lain. Dalam forum ini Djohan hanyalah menjadi fasilitator dan ia lebih banyak memerankan dirinya sebagai pendengar. Dia membiarkan anak-anak muda itu untuk berdiskusi secara bebas mengenai apa saja.<sup>26</sup>

Pada tahun 1983/1984 Djohan tidak lagi membiarkan mereka hanya berdiskusi tetapi juga mengarahkan teman-teman mudanya untuk terjun ke lapangan untuk mewawancarai tokoh-tokoh besar dan menulis hasilnya menjadi artikel. Dengan cara ini anak-anak muda yang dibinanya ini dapat menyerap pikiran-pikiran tokoh-tokoh yang diwawancarai dan kemudian merumuskan gagasan dalam bentuk tulisan dari hasil wawancara tersebut. Belakangan anak-anak muda ini kemudian dapat mengembangkan sendiri kegiatan ini dan ia tetap berdiri di belakang mereka. Dalam waktu kurang lebih dua tahun, 1984-1986, Kelompok Diskusi Proklamasi ini berhasil menerbitkan 4 buah buku yang diolah dari hasil wawancara sejumlah tokoh.<sup>27</sup>

Pada tahun 1986, Kelompok Studi Proklamasi ini telah memiliki aset berupa perlengkapan kantor, dukungan dana dari The Asia Foundation, dan nama besar sebagai kelompok diskusi yang paling kritis terhadap pemerintah. Kelompok ini juga berhasil membangun jaringan dengan kalangan IAIN seperti Saiful Mujani dan Ihsan Ali Fauzi yang juga menjadi binaan Djohan. Namun ironisnya seiring perkembangannya, pada saat yang sama kelompok diskusi ini mengalami penyusutan dan perpecahan. Penyusutan peserta diskusi ini terjadi karena pikiran-pikiran yang berkembang dalam diskusi itu terlalu berat dan idealis sehingga sebagian besar peserta merasa berat dan memilih untuk keluar. Kondisi ini kemudian diperparah dengan munculnya perpecahan di kalangan internal peserta diskusi terutama dari dua tokoh utama penggerak kelompok diskusi ini,

---

<sup>26</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 147-151; lihat juga Barton, *Gagasan Islam Liberal*, h. 197-198.

<sup>27</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 154.

yaitu Denny J.A. dan Budhy Munawar Rachman. Denny lebih cenderung pada tema-tema politik dan pembangunan sementara Budhy cenderung pada tema-tema filsafat dan agama. Keduanya masing-masing memiliki pendukung dan tidak bisa diselesaikan. Akhirnya, forum diskusi ini pecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Lembaga Studi Indonesia yang dipimpin Denny dan kelompok Lembaga Kajian Masyarakat Indonesia yang dipimpin oleh Budhy.<sup>28</sup>

Di samping membina anak muda di Kelompok Studi Proklamasi, Djohan juga membina satu kelompok studi yang lain di rumahnya. Peserta diskusi ini datang ke rumahnya seminggu sekali pada malam hari. Peserta diskusi ini kebanyakan berasal dari IAIN seperti Ilham Masykuri, Fauni Hidayat, Faruq dan lain-lain. Kelompok ini lebih memfokuskan diri pada kajian Alquran dan warisan ulama-ulama Nusantara. Mereka membahas ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan tema pluralisme dan juga membaca kitab-kitab Melayu seperti kitab *al-Durr al-Nafis* karya Muhammad Nafis al-Banjari.<sup>29</sup>

Pada dekade 1980-an, Djohan banyak menggeluti pemikiran Muhammad Iqbal seorang pembaru asal Pakistan. Pengaruh Iqbal banyak memengaruhi pandangan sufistiknya. Karena pengaruh itu pula ia menyebut dirinya sebagai Iqbalian. Kecintaannya pada pemikiran Iqbal mendorongnya untuk mendirikan Iqbal Society. Hanya saja, forum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan mengembangkan pemikiran-pemikiran Iqbal ini tidak berkembang dan tidak memiliki pengikut selain dirinya sendiri. Djohan menjadi pemain tunggal dalam Iqbal Society, ia menjadi pendiri, ketua, sekaligus anggota forum ini.<sup>30</sup>

Minatnya terhadap Iqbal sebenarnya telah tumbuh sejak ia masih menjadi mahasiswa. Walaupun menyebut dirinya Iqbalian, bukan berarti ia adalah pengikut Iqbal sepenuhnya sebagaimana juga halnya dengan keterlibatannya dengan kelompok Ahmadiyah tidak dengan sendirinya ia dapat diklaim sebagai pengikut Ahmadiyah. Ia hanyalah orang yang memiliki

---

<sup>28</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 154-156.

<sup>29</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 156.

<sup>30</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 256

minat yang besar terhadap keduanya dan memiliki pengetahuan yang dalam mengenai keduanya.<sup>31</sup> Seorang sahabatnya, Sofyan Lamardy mengatakan bahwa Djohan bukan anggota Ahmadiyah. Ia hanya pernah berinteraksi dan belajar mengenai Ahmadiyah secara mendalam.<sup>32</sup>

Sepanjang dekade 80-an, Djohan sang Iqbalian, banyak menulis tentang pemikiran Iqbal baik dalam bentuk buku, artikel maupun makalah seminar. Di antara tulisannya tentang Iqbal sepanjang dekade 80-an adalah *Iqbal: Sekilas tentang Hidup dan Pikiran-pikirannya* (terjemah dari *Karta Bilgrami*) yang diterbitkan oleh Bulan Bintang tahun 1982; *Iqbal: Pemikir Sosial dan Sajak-sajaknya* disunting bersama dengan Abdul Hadi W.M. dan diterbitkan oleh Pantja Simpati tahun 1986; *Iqbal, Tasawuf dan Revitalisasi Penghayatan Agama*, disampaikan oleh Djohan pada seminar Sastra, Kebudayaan dan Agama. Memperingati ‘Allamah Mohammad Iqbal di Graha Bhakti Budaya TIM, 28-29 Desember 1989; *Iqbal: Pembela Rakyat Tertindas*, paper yang disampaikan oleh Djohan pada Diskusi Kajian Pemikiran Iqbal yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Yogyakarta tanggal 21 September 1989.<sup>33</sup>

Meski Djohan bekerja sebagai peneliti di Departemen Agama dan Mukti Ali tidak lagi menjadi menteri agama, sepanjang dekade 1980-an ia tetap diperbantukan sebagai penulis pidato di Sekretariat Negara. Baginya bolak-balik Depag-Sekneg sudah merupakan kegiatan rutinnnya. Banyak naskah pidato presiden yang ditulisnya dan dalam beberapa kesempatan ia juga menulis naskah pidato Wakil Presiden Sudharmono. Kumpulan naskah pidato yang ditulisnya bersama yang lain kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang dicetak sampai ratusan ribu eksemplar. Kumpulan naskah pidato yang diolah oleh Djohan untuk diterbitkan adalah *Agama dalam Pembangunan: Himpunan Sambutan Presiden Soeharto* di terbitkan oleh CV Kuning Mas Jakarta pada tahun 1984. Meski ia tidak mendapat ‘imbalan’

---

<sup>31</sup> Barton, *Gagasan Islam Liberal*, h. 178-179.

<sup>32</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 216.

<sup>33</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 256-257.

yang semestinya dari pekerjaan sampingannya ini dan juga belum ditempatkan secara resmi di Sekneg, namun ia tidak kecewa dan memang tidak memikirkannya. Baginya, kesempatan menyampaikan ide melalui pidato presiden jauh lebih berharga daripada imbalan materi yang memang tidak pernah dipikirkannya. Karena itu ia tidak pernah meminta atau meminta apapun meski sekadar uang pengganti transport bus kota.

Meski memerlukan waktu yang lama pihak Sekneg untuk mau menghargai Djohan, akhirnya pihak Sekneg menariknya untuk menjadi pejabat struktural di Sekneg. Moerdiono yang sering berurusan dengannya dalam masalah penulisan naskah pidato presiden memintanya untuk menjadi staf resmi di Sekneg. Ia tidak memiliki alasan untuk menolak, apalagi ia memang tidak memiliki jabatan penting di Departemen Agama setelah dipecat sebagai Kepala Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan pada tahun 1982. Ia menerima tawaran itu dan kemudian dilantik sebagai pejabat struktural di Sekneg pada tahun 1987. Di Sekneg ia memegang jabatan sebagai Pembantu Asisten Menteri/Sekretaris Negara



Urusan Khusus di Bidang Penelitian dan Pengembangan. Ia bekerja di Sekneg sebagai pejabat struktural hingga tahun 1994.

Rutinitasnya menjadi penulis naskah pidato presiden dan sambutan-sambutan menteri sepanjang dekade 1980-an, tidak membuat Djohan terhambat untuk melahirkan tulisan lain seperti makalah untuk keperluan seminar, publikasi tulisan dalam bentuk buku dan jurnal atau artikel surat kabar.

Selain buku dan tulisannya tentang Iqbal sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Djohan juga memiliki tulisan lain diantaranya: *The Contextual Understanding of The Holy Qur'an* (1983), *Menyimak kembali Modal Dasar (Pesantren, 1984), Keterbatasan, kebebasan dan Tanggung Jawab Manusia: Sebuah Tinjauan tentang Masalah Takdir dari Perspektif Teologi Islam* (bagian skripsi tahun 1970 yang diterbitkan ulang di *Prisma Ekstra*, 1984), *Islam and the Industrial & Post Industrial Era* (1985), *Keagamaan Kaum Belia* (Prisma, 1985), *Mens' Limitations, Freedoms and Responsibilities: a Review of the Question of 'Takdir' from an Islamic Perspective* (Prisma, 1985), *Toward of Theology of Harmony* (1986), *Konsep-konsep Teologis dalam Al-Qur'an* (KKA Yayasan Paramadina, 1987), dan *Bintang di Langit Zaman: Abu Bakar, Lambang Penyelamat Umat (Pelita, 1990)*. Beberapa tulisan ini hanyalah sekelumit tulisan dari Djohan. Pada tahun 1982 saja ia telah menulis 4 buah buku kecil dan 24 artikel dan jumlahnya semakin besar pada dekade 1990-an.

#### **F. Menjadi APU (Ahli Peneliti Utama), Tokoh Pluralis dan Kepala Litbang Depag (1991-1998)**

Pada awal dekade 1990-an Djohan telah menerbitkan 7 buah buku dan 144 artikel. Pada awal dekade ini sebelum ia dikukuhkan sebagai APU, ia juga menulis beberapa tulisan diantaranya *Tasawuf Al-Qur'an tentang Perkembangan Jiwa Manusia* (bagian skripsi 1970 yang diterbitkan di *Ulumul Quran*, 1991), *Sufisme: Esensi dan Masa Depan Agama* (makalah Simposium, 1991), *ICMI dan BMI: Ratu Adil Umat? (Media Indonesia, 1992)*. Tidak lama setelah dikukuhkan sebagai APU, Djohan juga menulis makalah yang berjudul *The Contribution of the Islamic Partiesto the Decline of Democracy in 1950's* yang disajikan pada Konferensi tentang Demokrasi Indonesia tahun 1950 dan 1990 di Monash University, Melbourne (Desember 1992). Pada tahun 1993 Djohan menjadi editor sekaligus salah satu kontributor buku *Sufisme dan Masa Depan Agama* (Pustaka Firdaus, 1993). Lahirnya tulisannya ini menunjukkan bahwa ia tetap produktif dan tetap konsisten untuk menulis.

Pada awal tahun 1990-an, perhatian Djohan terhadap dialog antariman atau antaragama semakin meningkat. Wacana tentang pluralisme yang berkembang pada saat itu juga menjadi perhatiannya. Pada tahun 1991, ketika lembaga Dialog Antariman (DIAN) *Interfaith Dialogue* (Interfidei) didirikan di Yogyakarta dimana Djohan juga ikut bergabung dan terlibat di dalamnya. DIAN/Interfidei menghimpun para aktivis dari berbagai agama baik kalangan senior maupun junior yang memiliki perhatian besar terhadap kehidupan dan hubungan umat beragama di Indonesia. Lembaga ini memfasilitasi pertemuan-pertemuan berbagai kalangan agama untuk berbagi pengalaman iman dan melakukan riset mengenai konflik agama serta mempromosikan toleransi dan pluralisme.<sup>34</sup> Perhatiannya di bidang ini telah digelutinya sejak tahun 70-an ketika Mukti Ali menjadi Menteri Agama. Intensitas Djohan di bidang dialog antar agama secara konsisten tidak berkurang hingga dekade 90-an. Karena keseriusan dan konsistensinya itu pada dekade ini ia menjadi salah satu tokoh pluralis terkemuka Indonesia yang banyak membela hak-hak minoritas dan memprakarsai dialog antariman.

Pada tahun 1992, Djohan mencapai puncak karir sebagai peneliti. Pada tanggal 23 September 1992 dia dikukuhkan sebagai Ahli Peneliti Utama (APU) yang pertama di jajaran Departemen Agama. Pengukuhan ini dihadiri oleh tiga orang menteri yaitu Moerdiono, Munawir Sjadzali, dan Sarwono Kusumaatmadja. Dalam pengukuhannya ia menyampaikan pidato ilmiah dengan judul *Pembangunan dan Kehidupan Beragama dalam Perspektif Negara Pancasila*. Pengukuhan sebagai APU pertama Departemen Agama tidak justru membuat Djohan merasa nyaman di Departemen Agama. Sebaliknya, setelah pengukuhannya ia merasa harus menjauh dari Departemen Agama. Isi pidato pengukuhannya ternyata menimbulkan persoalan. Pengakuan Djohan terhadap Khonghucu sebagai agama yang berhak hidup di Indonesia dan kritiknya terhadap anggapan bahwa di Indonesia hanya ada lima agama resmi yang diakui menuai masalah. Seorang pejabat Departemen Agama meminta agar masalah Khonghucu

---

<sup>34</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 172-173.

dihapuskan dari naskah pidatonya. Namun ia menolak meski kemudian ia tidak membaca bagian itu dalam pidato pengukuhanannya. Sejak itu ia dianggap berbahaya dan menjadi *unwanted person* di Departemen Agama. Teman-temannya yang menjadi pejabat mengisyaratkan agar tidak dikunjungi oleh Djohan. Kondisi ini membuatnya bersumpah untuk tidak menginjakkan kakinya di Departemen Agama untuk sementara waktu.<sup>35</sup>

Pada tahun 1994, Djohan bersama Gusdur, Bondan Gunawan, dan Habib Chirzin dan Abdul Halim berangkat ke Israel untuk menghadiri Seminar tentang Indonesia, Israel dan Islam yang diselenggarakan oleh Institut Truman dari Universitas Hebrew. Selain mengikuti seminar mereka juga mendapat undangan dari Presiden Yitzhak Rabin untuk menghadiri penandatanganan Traktat Perdamaian antara Israel dan Yordania. Dalam kunjungan itu ia juga berkesempatan bertemu dengan orang-orang Arab Israeli. Selagi mereka masih di Israel itulah, berita kunjungan mereka ke sana diketahui oleh kalangan organisasi Islam dan memprotes keras kunjungan mereka. Setelah mengunjungi Israel, Djohan berangkat ke Italia untuk menghadiri Persidangan Sedunia *World Conference of Religions for Peace* (WCRP) sebagai peninjau.<sup>36</sup>

Kunjungan Djohan ke Israel yang memicu kemarahan ormas Islam itu menimbulkan masalah. Ketika ia pulang ke Indonesia dan tiba di Jakarta, ia dihadapkan pada tim yang dibentuk oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara merangkap Sekretaris Kabinet, Saadillah Mursyid untuk memeriksanya. Kepada tim yang memeriksanya ia mengatakan bahwa kunjungan itu tidak merugikan negara. Apalagi yang disaksikannya adalah penandatanganan perdamaian. Ia tidak mau mengatakan bahwa kepergiannya telah mendapat izin dari Moerdiono. Setelah tim mengetahui bahwa kepergiannya atas izin atasan, pemeriksaan selesai dan ia tidak tahu apa hasil kesimpulan pemeriksaan itu.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Barton, *Gagasan Islam Liberal*, h. 198-199 (lihat catatan kaki no. 25) dan Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 134-135.

<sup>36</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 142-145.

<sup>37</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 144.

Tidak lama setelah kunjungan ke Israel yang menggemparkan itu, Djohan mendapat tawaran beasiswa S3 dari Universitas Deakin, Australia. Ia menerima tawaran itu dan untungnya Moerdiono mengizinkannya untuk melanjutkan studi di Australia. Pada tanggal 31 Desember 1994, ia berangkat bersama kedua anaknya, Yorna dan Doda yang juga belajar di sana kemudian disusul sang istri enam bulan kemudian. Para pengkritiknya mengira bahwa kepergiannya ke Australia merupakan hukuman atas kunjungannya ke Israel padahal tidak. Ia sendiri memang memiliki keinginan untuk belajar ke sana. Apalagi sebelum berangkat ke Israel, ia telah pergi ke Australia untuk memenuhi undangan seminar kehidupan Islam di kalangan mahasiswa Indonesia di Universitas Deakin. Bahkan, jauh sebelum itu, sejak tahun 1976, ketika ia mengikuti kursus bahasa Inggris di Sidney Australia sudah terbetik keinginannya untuk menjadi penduduk tetap di Australia. Harapan ini kemudian terwujud pada tahun 1997. Meski demikian kunjungan ke Israel dan keretakan hubungannya dengan Depag setelah Munawir Syadzali diganti semakin memperkuat tekadnya untuk pergi ke Australia.<sup>38</sup>

Pada tahun 1995 Djohan terlibat dalam kegiatan aktivis muda antaragama yang menjelma menjadi MADIA (Masyarakat Dialog Antar Agama) di Jakarta. Dalam MADIA terhimpun para aktivis yang berasal dari berbagai lembaga keagamaan seperti Paramadina, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia), IAIN Jakarta, dan aktivis agama lainnya (Budha, Khonghucu dan lainnya) yang masuk belakangan. MADIA menggelar dialog mengenai persoalan teologis dan filosofis masing-masing agama. Dengan cara seperti ini mereka dapat belajar memahami tradisi spiritualitas dan warisan teologi pihak lain.<sup>39</sup>

Pada tahun 1996, Djohan datang ke Indonesia untuk menjadi saksi ahli kasus gugatan perkawinan pasangan Khonghucu di Surabaya yang dibatalkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya dengan alasan bahwa Khonghucu bukan agama. Kedua pasangan yang bergama Khonghucu tersebut

---

<sup>38</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 145 dan 266.

<sup>39</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 173-174.

mengadukan KCS Surabaya ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Djohan hadir dalam persidangan itu sebagai pembela kedua pasangan tersebut.<sup>40</sup> Tindakannya ini hanyalah salah satu bentuk perjuangannya untuk membela eksistensi agama Khonghucu di Indonesia. Perjuangannya ini tidak sia-sia karena beberapa tahun berikutnya akhirnya Khonghucu diakui sebagai agama.

Pada tahun 1997, setelah baru dua tahun mengikuti studi S3 di Deakin, Djohan secara resmi menjadi penduduk Australia. Dia tinggal di Geelong bersama anak dan istrinya. Di sana ia melakukan kegiatan sosial menghimpun keluarga besar Indonesia di Geelong. Kemudian atas prakarsanya dibentuk Perhimpunan Indonesia Australia yang anggotanya tidak hanya terbatas pada warga Indonesia tetapi juga warga Australia yang tertarik dengan Indonesia. Pada tahun pertama di Universitas Deakin, ia membantu membuka studi bahasa Indonesia di Geelong. Ia juga sempat mengajar bahasa Indonesia kepada mahasiswa baru dan juga khusus untuk guru-guru bahasa Indonesia di Geelong.<sup>41</sup>

Rumah Djohan di Geelong Australia tidak pernah sepi dari tamu. Selalu ada warga Indonesia dan warga Australia yang berkunjung ke rumahnya. Demikian pula dengan teman-temannya di Indonesia yang berkunjung ke Australia juga sering datang berkunjung dan menginap di rumahnya. Tidak hanya sekedar menerima tamu, sebagai penduduk Geelong, ia dan istrinya juga ingin mencari nafkah di Australia. Berawal dari hobi memasak sang istri, sekitar tahun 1998, Djohan dan istrinya membuka restoran dengan nama Batavia Café. Ketika restoran ini didirikan Djohan telah diangkat sebagai Kepala Litbang Departemen Agama saat Malik Fadjar menjadi Menteri Agama.

Pada beberapa bulan paruh pertama tahun 1998 ketika Djohan memasuki tahun ketiga studinya di Universitas Deakin, Gerakan reformasi yang menuntut Presiden Soeharto mundur mencapai puncaknya. Demonstrasi mahasiswa merebak dimana-mana dan kerusuhan pun datang silih berganti. Krisis politik mencapai puncaknya pada bulan Mei setelah terjadi kerusuhan

---

<sup>40</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 224.

<sup>41</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 266-267.

besar yang melanda Jakarta pada tanggal 12-15 Mei 1998. Tanda-tanda kejatuhan Soeharto dan Rezim Orde Baru semakin terlihat, apalagi tuntutan untuk mundur semakin keras. Djohan yang hanya menyaksikan peristiwa demi peristiwa melalui televisi merasa tidak puas kalau ia tidak melihat langsung kondisi Jakarta. Malik Fadjar yang dihubunginya malah memintanya datang ke Jakarta. Pada tanggal 17 Mei 1998, ia tiba di Jakarta dan melihat langsung bekas-bekas kerusuhan dan suasana yang masih mencekam. Selama di Jakarta, ia lebih banyak berdiam di rumah Malik Fadjar berkumpul bersama tokoh-tokoh reformasi yang merupakan sahabat-sahabatnya seperti Amien Rais, Nurcholish Madjid, Emha Ainun Nadjib, Utomo Dananjaya, Syafii Ma'arif, Amidhan dan lainnya. Tanggal 19 Mei 1998 sejumlah tokoh Islam (cendekiawan, budayawan dan ulama) seperti Malik Fadjar (Muhammadiyah), Gusdur (NU), Emha (budayawan), Nurcholish Madjid (Yayasan Paramadina), Ali Yafie (MUI), KH. Cholil Baidowi (MI), Sumarsono (Muhammadiyah), Achmad Bagja (NU), KH. Ma'ruf Amin (NU) dan Yusril Ihza Mahendra (Guru Besar Hukum dan Tata Negara UI) dipanggil menghadap presiden untuk meminta masukan mengenai desakan dirinya untuk mundur. Keesokan harinya, pada malam tanggal 20 Mei, Djohan dan bersama tokoh-tokoh reformasi telah mendapat berita dari Yusril Ihza Mahendra bahwa Soeharto akan mengundurkan diri besok hari dan posisinya akan digantikan oleh B.J. Habibie. Keesokan harinya, 21 Mei 1998, Presiden Soeharto membacakan surat pengunduran dirinya di Istana Merdeka dan menyerahkan pemerintahan kepada wakilnya B.J. Habibie untuk masa transisi.<sup>42</sup>

Ketika Presiden Habibie mengumumkan komposisi kabinet, nama Malik Fadjar tercantum sebagai Menteri Agama. Saat memulai tugasnya, Malik Fadjar mengajak Djohan untuk mengunjungi beberapa tokoh-tokoh agama dan aktivis dialog antar agama baik di Jakarta maupun di Yogyakarta. Tidak hanya itu, pada bulan Oktober 1998, Malik Fadjar mengangkat Djohan sebagai Kepala Litbang Jakarta. Penunjukannya sebagai Kepala Litbang Jakarta merupakan awal kembalinya dirinya ke

---

<sup>42</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 180-182.

Departemen Agama sebagai pejabat struktural sejak dipecat oleh Alamsyah sebagai Kepala Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan tahun 1981. Ia sendiri selama belasan tahun merasa dirinya bukan orang Depag akibat beberapa kasus yang menimpanya. Namun demikian, ia tetap terkait dengan Depag karena namanya masih tercantum sebagai anggota Kelompok Pemikir Masalah-masalah Keagamaan Depag dan tetap diminta untuk menulis sambutan-sambutan Menteri Agama Munawir Sjadzali (1983-1993). Bahkan, di tahun 1992 dia diangkat sebagai APU oleh Depag.<sup>43</sup>

Sebagai Kepala Litbang, tentu saja Djohan harus tinggal di Jakarta. Karena itu, ia harus tinggal sendiri di Jakarta karena seluruh keluarganya tinggal di Australia. Masalah lainnya adalah ia tidak memiliki tempat tinggal di Jakarta karena rumahnya telah dijual. Untuk tinggal di Jakarta ia memilih ruang kantornya menjadi tempat tinggal. Apalagi ruangnya baru direnovasi dan di dalamnya tersedia kamar tidur dan kamar mandi. Ia tidak mau menyewa rumah atas biaya kantor yang ditawarkan oleh pegawai Balitbang. Begitu pula dengan masalah makan dan mencuci baju, ia harus memasak dan mencuci sendiri.

Mengawali tugasnya di Litbang Depag, Djohan melakukan langkah-langkah. Pertama, melakukan observasi dan pembacaan situasi sistem administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi. Tindakan ini dilakukan untuk menata sistem penyelenggaraan administrasi. Kedua, pengembangan kualitas penelitian dan pengembangan agama. Setelah melakukan observasi, wawancara dan *coffee morning* setiap seminggu sekali dicapai penataan dan pengembangan kelompok peneliti yang berkonsentrasi pada keahlian di bidang pendidikan agama dan keagamaan, agama dan hak asasi manusia, agama dan gender, kerukunan umat beragama dan kelekturan. Kelompok peneliti ini dipimpin oleh peneliti yang tidak memiliki jabatan struktural sementara pejabat struktural tidak diperkenankan memimpin penelitian. Ketiga, mengembangkan keahlian para peneliti dengan cara menawarkan kepada mereka untuk meningkatkan

---

<sup>43</sup> Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 183.

jenjang pendidikan ke S2 atau S3 di universitas terkemuka dengan beasiswa Balitbang. Selain itu juga peneliti tidak boleh rangkap jabatan sekaligus sebagai pejabat struktural. Keempat, memberi kesempatan kepada peneliti yang tidak memiliki kesempatan studi untuk bersaing mendapatkan dana penelitian kompetitif yang cukup besar. Kelima, melibatkan peneliti-peneliti lintas agama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Balitbang Agama terhadap agama-agama non-Islam. Keenam, mengembangkan penelitian partisipatori untuk mengembangkan kerukunan.<sup>44</sup>

Tampaknya, Djohan memang ditakdirkan untuk mendapat jabatan struktural di Depag hanya dalam waktu singkat. Setelah setahun lebih menjabat sebagai Kepala Balitbang Depag, Djohan diganti pejabat lain ketika Departemen Agama dipimpin oleh menteri agama yang baru, Tolchah Hasan. Pada tahun 1999, Djohan meninggalkan kantornya dan takdir lain telah menunggunya.

---

<sup>44</sup> Ahmad Syafii Mufid, "Asketisme Cendekiawan Birokrat" dalam Gaus, *Sang Pelintas Batas*, h. 346-349.

## **BAB V**

### **KIPRAH DAN KETOKOHAN HASAN BASRI, IDHAM CHALID DAN DJOHAN EFFENDI**

Jika beberapa bab terdahulu mengupas seputar biografi Hasan Basri, Idham Chalid dan Djohan Effendi secara terpisah, pada bab ini ketiganya akan dikaji lintas tokoh secara deskriptif-komparatif menyangkut kiprah dan ketokohan mereka. Bab ini berusaha menganalisis kiprah ketiga tokoh ini dalam tiga bidang, yaitu bidang politik, bidang sosial keagamaan, dan bidang intelektual. Pada bidang politik juga dilengkapi dengan analisis mengenai relasi mereka dengan kekuasaan.

Kiprah di dunia internasional juga akan disajikan secara ringkas sebagai pelengkap. Tambahan ini disajikan untuk memperlihatkan bahwa dampak ketokohan mereka secara nasional merembet pada keterlibatan mereka dalam dunia internasional. Selanjutnya pada bagian akhir bab ini akan menganalisis secara komparatif latar belakang dan ketokohan ketiga elite muslim Banjar ini dalam beberapa aspek.

#### **A. Kiprah di Bidang Politik dan Relasi dengan Kekuasaan**

Hasan Basri dan Idham merupakan dua sahabat yang pada mulanya sama-sama bergerak di bidang politik melalui SERMI, Dewan Banjar dan Masyumi. Mereka berdua telah bergerak di bidang politik sejak kedatangan Belanda pasca proklamasi kemerdekaan 1945. Mereka bergerak di Kalimantan Selatan melalui SERMI dan kemudian bergabung dalam Dewan Banjar. Keduanya sama-sama memperjuangkan agar Kalimantan Selatan masuk menjadi bagian dari Republik Indonesia yang saat itu berkedudukan di Yogyakarta. Keduanya juga menolak

gagasan bentuk negara federal yang disebut Negara Borneo bagi Kalimantan.

Pada masa Orde Lama mereka secara bersamaan menjadi anggota Parlemen RI dalam Fraksi Masyumi. Keduanya sama-sama memperjuangkan Piagam Jakarta sebagaimana yang diperjuangkan oleh Masyumi dan sama-sama gigih melawan PKI. Pada perkembangan berikutnya, Idham kemudian lebih memilih bergabung bersama NU sebagai partai politik yang terpisah dari Masyumi sementara Hasan Basri tetap setia pada Masyumi.

Pada era Orde Lama (1950-1966), Hasan Basri berkiprah di bidang politik melalui Masyumi dan berhasil duduk di parlemen selama dua periode (1950-1955 dan 1955-1960). Bersama dengan tokoh-tokoh Masyumi ia memperjuangkan Piagam Jakarta dan Islam sebagai dasar negara. Peran dan ketokohnya di bidang politik pada era ini memang kurang menonjol. Sepanjang dekade 50-an ia tidak memiliki jabatan dalam pemerintahan Soekarno. Sejumlah jabatan menteri yang menjadi jatah Masyumi antara tahun 1950-1957 tidak satupun yang pernah dipercayakan kepadanya. Bukan hanya ia, tokoh-tokoh utama Masyumi juga terlempar dari pemerintahan Orde Lama akibat memburuknya hubungan Masyumi dengan Soekarno. Bahkan pada awal dekade 60-an, rezim Orde Lama membubarkan Masyumi dan DPR hasil pemilu 1955. Akibatnya, sejak itu karier politiknya di parlemen terhenti. Meski tersingkir, ia masih beruntung tidak ditangkap dan dipenjarakan oleh rezim Orde Lama sebagaimana yang menimpa tokoh-tokoh Masyumi lainnya. Antara tahun 1960-1967, ia bergerak di bidang dakwah dan gerakan masjid. Ia juga bergabung dengan DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia) yang didirikan oleh tokoh-tokoh Masyumi. Aktivitas dakwah dan gerakan masjid yang dilakukannya sebenarnya bagian dari upaya Masyumi untuk mencapai tujuan politik melalui cara-cara nonpolitik

melalui jalur kultural. Ia tampaknya memperjuangkan dan mengamalkan apa yang diucapkan Muhammad Natsir, “Kita tak lagi mengadakan dakwah dengan cara-cara politik, tetapi terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik dengan cara-cara dakwah. Hasilnya akan sama.”<sup>1</sup>

Pada periode awal Orde Baru (1967-1970), Hasan Basri gagal kembali dalam dunia politik praktis. Upayanya bersama dengan tokoh Masyumi lainnya untuk merehabilitasi Masyumi gagal pada tahun 1967. Demikian pula dengan keterlibatannya untuk mendirikan partai baru pengganti Masyumi tahun 1968-1970, juga gagal mengembalikannya ke kancah dunia politik. Meski Parmusi berhasil didirikan, namun tokoh-tokoh Masyumi seperti Hasan Basri gagal masuk sebagai bagian dari pimpinan partai. Resistensi yang begitu besar dari Orde Baru terhadap keterlibatan tokoh Masyumi dalam kepemimpinan Parmusi membuatnya kehilangan minat untuk kembali ke dunia politik.

Dengan gagalnya Hasan Basri berperan secara politis di Parmusi dan pengunduran dirinya dari dunia politik membuat karir dan kiprah politiknya benar-benar terhenti. Karena itu, tidak banyak yang dapat ia lakukan di bidang politik baik pada era Orde Lama maupun pada era Orde Baru. Ia tersingkir dari arena politik bersama dengan tokoh-tokoh Masyumi lainnya. Meski tersingkir dari gelanggang politik, baginya keadaan itu bukanlah merupakan akhir dari segalanya. Baginya, banyak jalan menuju sorga. Politik hanyalah salah satu dari sekian banyak jalan untuk memperjuangkan Islam. Setelah tidak lagi berpolitik, ia menjadi aktivis masjid dan berdakwah sebelum akhirnya ia mengabdikan diri di MUI pada era Orde Baru. Berdirinya MUI pada tahun 1975 memberi

---

<sup>1</sup> Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 498.

ruang bagi mantan-mantan tokoh Masyumi seperti dirinya untuk ikut berkiprah di dalamnya.

Jika pada masa Orde Lama era Demokrasi Terpimpin dan periode awal Orde Baru (1967-1970) Hasan Basri tersingkir dan gagal menjalin relasi dengan kekuasaan, maka sejak ia aktif di MUI yang berdiri atas restu pemerintah Orde Baru, ia berhasil menjalin relasi dengan kekuasaan. Tentu saja sikap akomodatif tidak bisa dihindarkan, bagaimanapun MUI harus mengakomodasi kebijakan pemerintah termasuk ketika pemerintah menerapkan kebijakan Asas Tunggal pada setiap partai dan organisasi sosial pada dekade awal 80-an. MUI menjadi salah satu organisasi ulama yang menerapkan Asas Tunggal Pancasila meski ditambah dengan dasar akidah Islamiyah.

Meski di bawah kontrol pemerintah, MUI dijadikan oleh Hasan Basri sebagai wadah dan alat untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam. Melalui MUI, ia bisa bergerak ke bawah (umat) dan ke atas (penguasa) untuk mengomunikasikan dan mendialogkan kepentingan umat dan kepentingan penguasa terkait dengan Islam. Sementara pihak pemerintah juga memiliki kepentingan dengan adanya MUI, Pemerintah menjadikan MUI sebagai forum efektif untuk menjalin komunikasi dengan ulama dan umat Islam.

Posisi sebagai orang terdepan di MUI (1985-1998) dalam menjalin relasi dengan pihak penguasa dengan sendirinya membuat dirinya menjadi elite muslim yang menjadi salah satu mitra penting pemerintah dan menjadi orang yang dekat dengan penguasa Orde Baru. Kedekatan inilah yang membuat ia kadang mendapat pujian dan juga kritik. Di satu sisi ia dianggap sebagai pemimpin MUI yang berhasil menjalin kerjasama dengan pemerintah, namun di sisi lain ia juga dikritik sebagai ulama yang membawa MUI menjadi sekadar 'penerjemah' kebijakan pemerintah dan tidak menunjukkan sikap yang tegas dan independen

dengan pemerintah. Misalnya, dalam kasus Porkas dan SDSB, kehati-hatiannya dalam mengeluarkan pernyataan mengenai Porkas dan SDSB serta keengganannya untuk menyatakan secara gamblang di depan publik mengenai keharaman Porkas dan SDSB sebagai judi yang diharamkan membuat dirinya dikritik sebagai ulama yang tidak tegas, tidak berani mengatakan yang haram itu haram dan memosisikan dirinya sebagai ulama pendukung pemerintah. Ia dianggap tidak berani mengkritik pemerintah secara terbuka.

Kritik terhadap MUI yang dipimpin Hasan Basri pada era Orde Baru misalnya dikemukakan oleh Burhanuddin sebagai berikut:

MUI dalam perkembangannya sangat kuat berada di bawah pengaruh Orde Baru, Bukannya memfasilitasi komunikasi dua-arah, MUI bertindak lebih untuk menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam bahasa yang dipahami umat Islam. MUI muncul sebagai lembaga berorientasi negara. Sebagian besar fatwa MUI dibuat untuk dibuat dalam rangka memberi justifikasi Islam bagi kebijakan-kebijakan pemerintah. Akibatnya, kepentingan politik pemerintah senantiasa menjadi pertimbangan penting dari fatwa-fatwa MUI.<sup>2</sup>

Namun harus dipahami bahwa karakter Hasan Basri bukanlah orang yang suka berbicara terang-terangan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap suatu pendapat tertentu, apalagi itu adalah keputusan pemerintah. Dia bukanlah pengkritik terbuka yang keras dan kasar. Ia bukan tipe ulama 'pemberontak'. Dia selalu berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Kebijakan dan keputusan pemerintah yang tidak sejalan dengan pandangan MUI akan

---

<sup>2</sup> Jajat Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2012), h. 391.

disampaikan secara langsung dengan cara baik-baik tanpa harus dipublikasikan dan mempermalukan pemerintah. Bagaimanapun sebagai pimpinan MUI yang berfungsi sebagai penghubung antara umat dan penguasa ia tetap harus menjaga hubungan harmonis antara umat, ulama dan umara. Tidak terbayangkan dalam dirinya menjadikan MUI sebagai oposisi pemerintah, di mana satu sama lain saling berhadapan sebagai lawan. Apalagi rezim Orde Baru yang kuat tidak bisa di lawan dan ditantang secara terbuka dan kasar. Apalagi, tidak bisa dipungkiri bahwa kelancaran program-program MUI juga tidak terlepas dari bantuan pemerintah. Karena itu, sulit baginya untuk menjaga independensi MUI secara total.

Jika Hasan Basri tersingkir di era Orde Lama dan awal Orde Baru, sebaliknya, Idham yang tidak lagi berada di Masyumi sejak tahun 1952 justru meningkat karirnya dan kiprahnya di bidang politik sangat menonjol. Pilihannya untuk ikut bagian dari Partai NU yang pada saat itu diremehkan dan dianggap ‘kecil’ membawa berkah tersendiri baginya. Idham bersama Kiyai Abdul Wahab Chasbullah berhasil membesarkan NU sebagai sebuah partai Islam yang sejajar dengan Masyumi. Bahkan, ketika Masyumi tersingkir dalam pemerintahan Orde Lama akibat sikap oposan dan konfrontatifnya, NU justru dapat bekerjasama dengan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno. Beberapa kebijakan Soekarno diakomodasi oleh NU baik terkait dengan Dekrit Presiden 1959, Pembubaran DPR hasil Pemilu 1955, Pembentukan DPR GR maupun Demokrasi Terpimpin dan Nasakom. Idham Bersama Kiyai Wahab Chasbullah dan tokoh penting NU lainnya memainkan peran penting dalam mengatur strategi menghadapi *move* politik Soekarno. Atas sikap akomodatifnya ini NU kemudian dirangkul oleh Soekarno untuk mewakili unsur agama sebagai salah satu pilar dari Nasakom. Masuknya NU dalam kabinet yang dibentuk Soekarno bukan sekadar persoalan jatah menteri (terutama

menteri agama) tetapi juga berkait dengan perjuangan politik NU melawan pengaruh PKI dalam pemerintahan Soekarno. Sebagai ketua PBNU dan pejabat negara yang memegang jabatan penting, Idham berusaha mengamankan NU sebagai organisasi agar tidak dibubarkan dan pada saat yang sama membuka peluang bagi NU untuk mendapat 'jatah' terhormat di pemerintahan sambil melakukan perlawanan terhadap PKI yang sering merongrong umat Islam.

Kemampuan Idham untuk menyesuaikan diri dengan kondisi politik yang dihadapinya dan keberhasilannya untuk bekerjasama dengan rezim Orde Lama membuatnya mendapat posisi-posisi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Ia menjelma menjadi tokoh muda yang langsung melejit dengan sejumlah jabatan penting. Sejak tahun 1956 hingga tumbanganya Rezim Orde Lama, ia telah menduduki jabatan-jabatan penting seperti Wakil Perdana Menteri, anggota DPAS, Menko Kesra dan lainnya. Ia juga mampu membawa NU pada posisi yang aman dari tekanan kekuasaan dan rongrongan PKI yang membuatnya selalu dipercaya untuk tetap menduduki posisi ketua umum PBNU. Namun politik akomodatif terhadap Rezim Soekarno membuat dirinya dicap sebagai Soekarnois terutama jika dilihat dari pembelaannya terhadap Demokrasi Terpimpin. Bagaimanapun Idham mengagumi dan menghormati Soekarno, sebagai proklamator dan tokoh bangsa, dan pada saat yang sama ia membenci PKI yang dilindungi oleh Soekarno. Meski menghormati Soekarno, ia tampaknya menyesalkan sikap Soekarno yang terus melindungi PKI dari desakan pembubaran.

Politik akomodatif kembali dilakukan Idham ketika NU berhadapan dengan penguasa baru, Jenderal Soeharto dengan rezim Orde Barunya. Idham lebih suka membawa NU sebagai mitra penguasa daripada menjadikannya sebagai oposan. Meski mengetahui bahwa Rezim Orde

Baru tidak demokratis dan menggunakan cara-cara tidak *fair* dalam mempertahankan kekuasaan, ia melihat bahwa NU belum siap dan belum saatnya untuk berkonfrontasi dengan pemerintah baru itu. Karena itu ia berusaha menghindarkan NU berkonfrontasi dengan penguasa dan membawa NU agar mampu menyesuaikan diri dengan pemerintah yang baru. Akibatnya, oleh pengkritiknya, ia dicap sebagai pemimpin yang hanya bertujuan mencari selamat dan cari aman. Sekelompok anak muda progresif dan radikal mengkritiknya sebagai pemimpin yang tidak punya tujuan dan pendirian yang jelas. Pemuda Ansor bahkan menyebutnya sebagai politisi garbus lantaran sikapnya yang selalu mengambang di atas.

Di dalam tubuh NU sendiri muncul dua kubu dalam tubuh NU menyikapi kondisi politik yang ada, yaitu kubu radikal yang dimotori oleh anak-anak muda NU yang dipimpin oleh Subchan ZE dan kubu konservatif dimana Idham berada. Kubu radikal cenderung kritis terhadap pemerintah Orde Baru dan menentang secara terbuka tindakan dan kebijakan pemerintah yang menurut mereka tidak adil. Sebaliknya, kubu konservatif cenderung berhati-hati dalam bersikap guna menghindari konsekuensi politik yang bisa merugikan NU. Kemunculan tokoh radikal jelas mengganggu politik akomodatif yang dijalankan Idham. Adanya radikalisme ini membuat NU menjadi berwajah ganda, disatu sisi menjadi mitra pemerintah dan di sisi lainnya NU adalah oposisi pemerintah. Wajah ganda NU politik ini membuat Idham berada dalam posisi dilematis. Tidak mungkin 'memukul' kawan sendiri yang 'nakal' dalam tubuh NU karena pasti akan menimbulkan konflik internal yang membahayakan soliditas NU sendiri, tetapi pada saat yang sama juga tidak mungkin 'memukul tembok besar' yang sedang menjelma menjadi kekuatan politik raksasa yang ujungnya juga akan membahayakan eksistensi NU.

Sikap akomodatif Idham sendiri mendapat imbalan dari penguasa. Selama 15 tahun masa Orde Baru ia mendapat jatah sejumlah jabatan mulai dari menteri, ketua MPR/DPR hingga Ketua DPA. Namun pada saat yang sama ia tidak dapat membendung manuver politik kelompok radikal yang terus melakukan sikap oposisi terhadap Orde Baru. Manuver kubu radikal ini membuat Orde Baru tidak nyaman. Puncaknya adalah ketika politisi NU dalam fraksi PPP melakukan *walkout* dalam sidang MPR tahun 1978 dan 1980. Batas kesabaran Soeharto, pemimpin Orde Baru, telah mencapai batasnya. Penyingkiran kelompok radikal ini pun dimulai. Ia tidak mampu membendung tindakan ini. Melalui tangan J. Naro pemimpin PPP saat itu, Orde Baru mulai mengurangi pengaruh NU di PPP dan menyingkirkan politisi NU yang tidak disenangi pemerintah. Akibat tindakan ini, kemarahan warga NU tidak hanya diarahkan pada Naro tetapi juga kepada Idham sebagai ketua umum PBNU dan Presiden PPP yang dianggap tidak mampu melindungi kepentingan NU. Buntut dari tekanan pemerintah terhadap NU menciptakan konflik baru yang membelah tubuh NU menjadi kubu Cipete dan Situbondo. Inilah titik awal proses kejatuhan Idham baik di NU maupun di pemerintahan.

Pada awal dekade 80-an kiprah politik Idham mulai mengalami penurunan seiring dengan menurunnya kesehatannya dan semakin kuatnya sikap oposisi kaum muda NU dan ulama senior NU terhadap gaya kepemimpinannya. Kondisi ini diperparah ketika pada tahun 1983, Orde Baru mulai meninggalkannya sebagai mitra dan lebih berpihak pada kubu Khittah 1926 yang ingin menarik diri dari politik praktis. Orde Baru berpihak pada kubu Khittah setelah mendapat jaminan ulama senior NU menerima Asas Tunggal Pancasila. Keputusan ulama senior ini jelas dianggap lebih menguntungkan secara politis dan akan mengakhiri oposisi NU di Parlemen dengan sendirinya.

Muktamar Situbondo tahun 1984 kemudian mengakhiri masa kepemimpinan Idham yang panjang di PBNU dan disusul kemudian posisinya sebagai Presiden Partai 'diusik' oleh Naro di PPP tahun 1985. Pada Pemilu 1987 perolehan suara PPP menurun secara drastis karena tindakan 'penggembosan' yang dilakukan oleh elite NU yang kecewa dengan Naro. Nama Idham sendiri mulai tenggelam.

Sikap Idham yang luwes, akomodatif dan berusaha menyesuaikan diri dengan rezim kekuasaan sebenarnya dihadapkan pada kenyataan bahwa NU pada saat dipimpin olehnya menghadapi dua kekuatan raksasa, yaitu rezim Orde Lama dan Orde Baru. Bersikap konfrontatif dan oposan terhadap dua kekuatan ini sama artinya membentur tembok tebal yang kokoh dan keras yang ujungnya hanya akan menyakiti diri sendiri. Karena itu, baginya menghindari mudharat yang lebih besar lebih baik daripada mengambil manfaat. Jika salah bersikap, intimidasi dan ancaman pembubaran selalu siap datang setiap saat. Tampaknya ia menerapkan beberapa kaidah fiqih dalam menghadapi kedua kekuatan raksasa ini yang selama ini diterapkan oleh tokoh-tokoh NU sekelas Kiyai Abdul Wahab Chasbullah ketika menghadapi rezim Soekarno. Diantara kaidah fiqih yang sering digunakan untuk menghadapi situasi politik yang sulit itu adalah (1) *idza ta'aradha mafsadatani ru'iya a'dhamuhuma dhararan bi irtikabi akhaffihima (akhaffu al-dhararayn)* (apabila dihadapkan kepada dua masalah yang keduanya mengandung *mafsadah*, maka harus dihindari yang lebih berat *mafsadah*-nya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya); (2) *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* (menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan); (3) *ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh* (sesuatu yang tidak bisa dicapai

secara keseluruhan tidak boleh ditinggal keseluruhannya).<sup>3</sup> Kaidah fiqih ini digunakan Idham sebagai dasar ijtihad politiknya. Meski tampak pragmatis, ijtihad politik semacam ini berhasil membawa NU keluar dari berbagai krisis politik dan pilihan sulit.

Dibanding dengan Hasan Basri, sejak tahun 1985 popularitas Idham menurun dengan drastis. Berbanding terbalik dengan Hasan Basri yang popularitasnya semakin menanjak dan relasinya dengan penguasa semakin kuat. Padahal pada masa Orde Lama, Idham mengalami masa keemasannya baik di NU maupun di pemerintahan sementara Hasan Basri justru tersingkir. Kalau pada pertengahan dekade 80-an karier Idham menurun, sebaliknya masa ini merupakan masa keemasan pertama Hasan Basri baik sebagai ketua MUI maupun semakin mitra pemerintah. Demikian juga pada dekade 90-an karier dan popularitas Hasan Basri tetap menanjak seiring semakin kuatnya kemitraannya dengan penguasa, sementara karier dan popularitas Idham semakin menurun seiring dengan semakin surutnya karier politik dan melemahnya kemitraannya dengan pemerintah.

Fenomena Djohan agak berbeda dengan Hasan Basri dan Idham. Djohan tidak pernah terlibat politik praktis. Meski pada masa awal (1950-an) Djohan merupakan pendukung Masyumi dan mengagumi tokoh Masyumi terutama yang berasal dari PERSIS, namun dia tidak pernah masuk menjadi anggota Masyumi sebagaimana Hasan Basri dan Idham. Pada dekade 60-an, sikapnya justru berbalik, dari yang asalnya mendukung Masyumi berubah menjadi kelompok pemuda yang justru menentang rehabilitasi Masyumi dan berusaha keras menghilangkan pengaruh Masyumi pada HMI. Sikap

---

<sup>3</sup> Lihat contoh penggunaan kaidah fiqih ini pada M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 159-169.

Djohan ini membuatnya tidak disenangi oleh anggota HMI lainnya. Buntutnya, ia mengundurkan diri dari HMI bersama Ahmad Wahib. Tidak hanya pada Masyumi, secara umum ia tidak suka dengan Islam politik yang berusaha mendirikan negara Islam dan penerapan syariah Islam sebagaimana yang diusung oleh Masyumi. Ia lebih mendukung bentuk negara Pancasila. Negara Pancasila menurutnya adalah pilihan yang sangat tepat dan bijak yang ditemukan oleh para pendiri bangsa ini. Bentuk negara Pancasila menurutnya merupakan jalan keluar terbaik dan sekaligus telah menghilangkan kerumitan dalam memilih dua pilihan sulit, yakni memilih negara agama atau negara sekuler. Dukungannya yang kuat terhadap Pancasila sebagai dasar negara telah dikumandangkannya sejak akhir dekade 60-an dan dukungannya ini secara konsisten tetap dipertahankannya hingga dekade 90-an.

Jika Idham aktif di partai politik dalam waktu lama, Hasan Basri dalam waktu relatif singkat, Djohan malah tidak pernah sama sekali terlibat dalam partai politik, apalagi partai Islam. Pada era Orde Lama, pada awal dekade 60-an, ia hanyalah pegawai negeri biasa di Kerapatan Qadhi Amuntai dan kemudian menjadi mahasiswa yang tengah bertarung dengan berbagai ideologi dan pencarian intelektual pada pertengahan hingga akhir dekade 60-an. Yang jelas, dalam catatan hidupnya tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa ia tertarik menjadi politisi dan berjuang melalui partai politik termasuk partai Islam. Sikapnya sejalan dengan slogan Nurcholish Madjid, “Islam *Yes*, Partai Islam, *No*” Ia lebih suka memilih menjadi intelektual nonpolitisi dan menjadi pegawai negeri di Departemen Agama.

Sebagai pegawai negeri tentu ia harus loyal pada pemerintah tanpa mengorbankan idealisme intelektualnya. Karena itu, ketika menjadi penulis pidato presiden selama 20 tahun (1975-1995), ia selalu memasukkan ide-idenya

dalam konsep pidato yang dibuatnya. Ia memasukkan apa yang disetujuinya dan apa yang dipikirkannya. Bahkan ia juga menulis mengenai apa yang ingin dikritiknya. Tentu saja, tidak semua yang dituliskannya langsung lolos begitu saja untuk dibaca oleh Presiden Soeharto. Pihak Sekneg tentu terlebih dahulu memeriksa hasil tulisannya dan menyensor pikiran yang tidak layak sebelum dibaca oleh presiden, tentu saja ada beberapa bagian tulisannya yang dihapus, diganti dan diperbaiki. Yang jelas diterimanya dirinya sebagai salah satu penulis pidato di Sekneg menunjukkan bahwa pemikirannya diterima di lingkungan Sekneg. Diduga kuat penerimaannya terhadap Pancasila sebagai dasar negara, bukan agama, dan ketidaksetujuannya pada Islam politik serta kecenderungannya pada modernisasi sejalan dengan keinginan dan kebijakan penguasa.

Sebagai penulis pidato presiden, tentu Djohan tidak mungkin membuat kritik terbuka terhadap pemerintah dalam konsep pidato yang dibuatnya. Jika ini dilakukan posisinya sebagai pegawai negeri jelas terancam. Pembelaannya terhadap Ahmadiyah dan eksistensi Khonghucu sebagai agama yang harus diterima di Indonesia saja telah membuat dirinya menjadi *unwanted person* di Departemen Agama, apalagi kalau ia menjelmakan dirinya sebagai pengkritik Orde Baru yang pada saat itu tengah kuat-kuatnya. Djohan tampaknya setuju dengan perlunya modernisasi Indonesia dan sepakat dengan proyek kerukunan beragama yang dilancarkan oleh pemerintah Orde Baru sejak dekade 70-an. Ia sendiri termasuk orang yang bersemangat terlibat dalam proyek ini sejak dekade 70-an meski pada dekade 80-an ia harus keluar dari proyek itu karena sejumlah faktor, salah satunya adalah pergantian kebijakan akibat pergantian menteri.

Sebagai penulis pidato, peran Djohan tidak tampak dipermukaan. Dalam kekuasaan Soeharto perannya berada dibalik layar. Ia hanya menyusupkan ide-idenya dalam

setiap naskah yang ditulisnya untuk dibacakan oleh Soeharto kepada rakyat Indonesia. Melalui posisinya sebagai penulis naskah pidato presiden selama dua puluh tahun (1975-1995) membuat dirinya memiliki relasi yang unik dengan Presiden Soeharto. Sekilas tampak bahwa ia memiliki kedekatan dengan Soeharto. Tetapi sebenarnya tidak. Selama hidupnya ia hanya pernah satu kali bersalaman dengan Soeharto sebagai tanda bahwa ia tidak memiliki kedekatan personal dengan sang presiden. Ia hanya memiliki hubungan dekat secara tidak langsung dengan sang presiden. Melalui perantaraan Sekneg, tulisan dan pikirannya tersebar luas melalui mulut sang presiden yang membacakan naskah pidato hasil tulisannya. Berbeda halnya dengan Hasan Basri dan Idham Chalid yang dikenal sangat baik oleh Soeharto, ia mungkin tidak dikenal oleh Soeharto. Padahal ia adalah salah satu penulis penting naskah-naskah pidatonya. Meski sulit diukur pengaruh tulisannya terhadap kebijakan presiden, tetapi jelas ia telah memainkan perannya di balik layar. Karena banyak bermain di balik layar itulah yang membuat ia kurang dikenal. Tidak seperti Hasan Basri dan Idham yang tampil sebagai tokoh terkemuka dalam organisasi yang mereka pimpin, ia justru tidak banyak tampil di depan publik.

## **B. Kiprah di Bidang Sosial Keagamaan (Pendidikan, Dakwah dan Kehidupan Umat Beragama)**

Pada awal karirnya di Kalimantan Selatan, Hasan Basri dan Idham menjadi seorang guru agama (Islam). Setelah studinya selesai di Zuama Muhammadiyah, Hasan Basri telah mengabdikan menjadi guru agama di Marabahan meski hanya dalam waktu pendek. Demikian pula Idham, setelah studinya selesai di Gontor ia telah diangkat menjadi guru di Pondok Pesantren Gontor dan kemudian menjadi pimpinan di Normal Islam Ma'had Rasyidiyah di Amuntai. Ia bahkan menjadi ketua umum IMI yang membawahi sejumlah madrasah di Kalimantan Selatan. Posisinya

sebagai ketua IMI tidak hanya membangkitkan kembali Ma'had Rasyidiyah yang sempat vakum tetapi juga membangkitkan kembali madrasah-madrasah yang terbengkalai ketika Jepang menduduki wilayah Hulu Sungai. Tidak kalah dengan Hasan Basri dan Idham, ternyata Djohan setelah lulus dari PHIN juga pernah menjadi guru Madrasah Aliyah Ma'arif Amuntai sebagai guru Ushul Fiqh dan SMA Negeri Amuntai sebagai guru Antropologi. Meski statusnya adalah pegawai Kerapatan Qadhi Amuntai (1960-1962) namun kesibukan ini tidak menghalanginya menjadi guru. Apalagi, menjadi guru bukanlah hal yang asing baginya karena ia adalah lulusan PGAP (Pendidikan Guru Agama Pertama) di Banjarmasin.

Meski kiprah mereka sebagai guru pada awal karir mereka tidak panjang, namun pada masa berikutnya ketika mereka telah menjadi elite muslim di tingkat nasional, kiprah mereka di dunia pendidikan ternyata tidak berhenti. Kiprah Hasan Basri di bidang pendidikan dapat dilihat dari keterlibatannya di YPI (Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar) sejak dipimpin oleh Hamka. Ia bahkan menggantikan Hamka memimpin YPI dan terlibat dalam meningkatkan dan mengembangkan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan YPI. Di masanya, lembaga pendidikan al-Azhar menjadi sekolah favorit dan menjadi sekolah unggulan. Selain itu, ketika ia menjadi ketua umum MUI, salah satu program unggulannya adalah tarbiyah Islamiyah yang secara konkret direalisasikan dalam bentuk pendidikan kader ulama yang dilaksanakan sejak tahun 1989. Sementara Idham meski telah menjadi politisi NU yang terkenal dan memiliki sejumlah jabatan penting, kiprahnya di bidang pendidikan terus dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten. Setelah pindah ke Jakarta sebagai anggota parlemen pada awal dekade 50-an, namun ia tidak pernah berhenti mengelola Normal Islam Ma'had Rasyidiyah. Bahkan ia tetap didaulat sebagai dewan pimpinan meski tidak lagi tinggal di Amuntai.

Sambil tetap mengelola Normal Islam yang kemudian menjadi PP Rasyidiyah Khalidiyah, ia juga membuka lembaga pendidikan di Jakarta dan di Cisarua Bogor pada masa Orde Lama. Di Jakarta ia membuka Perguruan Darul Ma'arif dan di Bogor ia membuka Perguruan/Pendidikan Yatim Darul Quran. Ia mengabdikan perguruan yang didirikannya ini untuk kepentingan pendidikan anak-anak kelas menengah ke bawah. Karena itulah ia menolak menjadikan perguruan yang didirikannya ini menjadi sekolah favorit yang berbiaya mahal. Dampaknya pada era Orde Baru perguruan ini sering mengalami kendala dana dalam pengembangannya. Di sinilah Idham menghabiskan usianya ketika ia tidak lagi memimpin NU dan tidak lagi memiliki jabatan penting di pemerintahan.

Jika Hasan Basri dan Idham tetap berkiper dalam dunia pendidikan, Djohan ternyata juga tidak kalah setianya dalam berkiper di dunia pendidikan. Setelah pindah ke Jakarta dan bekerja di Departemen Agama, Djohan menjadi Dosen di sejumlah perguruan tinggi swasta seperti Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (1974-1994) sebagai dosen Islamologi, STIE IBII Jakarta sebagai dosen agama (1993) dan Universitas Trisakti (1995) sebagai dosen agama (Islam, Katolik, Hindu dan Budha). Disamping menjadi dosen di perguruan tinggi, ia juga membimbing sejumlah anak muda melalui Kelompok diskusi Proklamasi yang dilakukan di rumahnya pada dekade 80-an. Ia memang tidak seperti Nurcholish Madjid yang berhasil merintis perguruan tinggi dan kemudian menjadi Rektor perguruan tinggi yang dirintisnya, Universitas Paramadina Mulya. Kiperahnya di bidang pendidikan hanyalah menjadi dosen yang aktif mengajarkan agama-agama. Ia mengajarkan agama dengan menggunakan pendekatan fenomenologi agama, filsafat agama, atau filsafat perennial. Meski tahun 1995 ia melanjutkan studi ke Australia, namun hubungannya dengan pendidikan tetap berlanjut. Selain tetap mengajar di Indonesia, pada tahun pertama studinya di

Universitas Deakin Australia, ia juga membantu membuka studi bahasa Indonesia di Geelong. Dia bahkan sempat mengajar bahasa Indoensia kepada mahasiswa baru dan juga khusus untuk guru-guru bahasa Indoensia di Geelong.

Di bidang dakwah, Hasan Basri dan Idham merupakan dai yang telah berkiprah sejak mereka berada di Kalimantan Selatan pada masa penjajahan. Keduanya memiliki bakat berpidato sejak kecil. Hasan Basri sudah terbiasa berpidato dihadapan orang banyak sejak kecil dan saat ia madrasah tsanawiyah ia telah didaulat untuk tampil berpidato mewakili madrasahnyanya ketika Hamka berkunjung ke sana. Demikian pula dengan Idham, ia sudah mampu berpidato sejak ia bersekolah di Amuntai. Setelah mereka menyelesaikan studi di Jawa dan kembali ke daerah asal, Hasan Basri dan Idham menjadi dai terkenal di wilayah mereka masing-masing. Mereka kadang harus berkeliling untuk memenuhi undangan berceramah. Idham terkadang harus bermalam dua sampai tiga malam untuk memenuhi undangan berdakwah di tempat-tempat yang jauh. Pada masa pergerakan melawan NICA mereka menjadi orator yang menggelorakan semangat perjuangan di hadapan massa yang banyak. Hasan Basri memiliki gaya yang kalem dalam berpidato, suaranya berat dan tenang, dia bukan tipe orator yang berbicara menggelegar atau berapi-api. Sementara Idham merupakan gaya dai yang lincah, banyak menggunakan logika, puitis dan humoris.

Berbeda dengan Hasan Basri dan Idham, Djohan tampaknya bukanlah tipe orator, dia bahkan bukan pembicara yang memiliki daya tarik yang tinggi dari segi kemampuannya meyampaikan gagasannya secara lisan. Kemampuannya menulis lebih baik dari kemampuannya berbicara. Apalagi ia terkenal pendiam. Walaupun ia sering tampil sebagai pembicara dalam berbagai forum, namun ia bukanlah seorang dai sebagaimana yang dipahami sekarang ini. Di Amuntai ketika ia bekerja di Kerapatan Qadhi, tidak

ada informasi yang menunjukkan bahwa ia pernah menyampaikan ceramah, khutbah, dan kegiatan sejenisnya di masyarakat. Di Yogyakarta ketika ia bergabung dengan ISMC Ahmadiyah ia pernah menyampaikan ceramah di Masjid Syuhada. Ketika ia menjadi anggota HMI ia sering menjadi instruktur dalam training-training yang diadakan HMI Yogya. Tampaknya pada kedua aktivitas itu, ia lebih banyak memerankan dirinya sebagai narasumber sebagaimana kita kenal sekarang daripada sebagai seorang penceramah. Meski demikian, di dalamnya tetap mengandung pesan-pesan dakwah. Pada dekade 70-an, Djohan pernah bergabung bersama A.M. Fatwa dalam KODI (Koordinator Dai Indonesia). Di sini ia menempati posisi sebagai sekretaris KODI. Ini membuktikan bahwa ia juga terlibat dalam dunia dakwah meski tidak intensif.

Djohan tidak menonjol di bidang dakwah. Karena itu, ia tidak dikenal sebagai dai tetapi lebih menonjol sebagai intelektual. Kalaupun ia dikaitkan dengan dunia dakwah, maka ia dapat dikaitkan dengan dakwah intelektual melalui tulisannya yang banyak menyerukan ajakan untuk bersikap toleran, pluralis dan menghargai perbedaan. Sementara Hasan Basri dan Idham ketika telah menjadi tokoh nasional tetap menjadi penceramah di mana-mana. Keduanya tidak jarang menyampaikan ceramah agama dalam berbagai upacara keagamaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Begitu pula di tengah masyarakat mereka tetap memenuhi undangan untuk berdakwah sepanjang mereka dapat lakukan.

Aktivitas dakwah Hasan Basri semakin meningkat ketika ia tidak lagi menjadi anggota parlemen dan tidak lagi sibuk di Masyumi yang telah dibubarkan. Pada dekade 60-an, gelar kiyai haji mulai melekat pada namanya. Bahkan pada dekade 70-an ia telah mulai berdakwah di televisi melalui acara Mimbar Agama di TVRI. Pada dekade 80-an dan 90-an, aktivitas dakwahnya tidak hanya di dalam negeri

tetapi sudah merambah ke luar negeri di berbagai kedutaan RI di berbagai negara. Posisinya sebagai ketua umum MUI dimanfaatkan oleh Hasan Basri untuk memprioritaskan dakwah Islamiyah sebagai salah satu program kerja pentingnya. Ia kemudian bekerjasama dengan pemerintah untuk mengirim sejumlah dai ke daerah transmigrasi di sejumlah daerah di Indonesia. Melalui MUI pula ia menggalakkan dakwah *bi al-hal*, yaitu dakwah Islamiyah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup rakyat secara keseluruhan.

Sebagaimana Hasan Basri, Idham juga merupakan ulama yang sering berdakwah baik dalam posisinya sebagai ketua umum PBNU, menteri maupun ulama pimpinan perguruan Darul Maarif Cipete. Setelah tidak lagi menjadi ketua umum PBNU dan tidak lagi mendapat jabatan penting, Idham mengosentrasikan dirinya untuk mendidik dan berdakwah baik dalam sejumlah perayaan keagamaan maupun dalam bentuk pengajian agama.

Dalam kehidupan keagamaan ketiganya memiliki peran yang berbeda-beda, meski tetap terkait dengan masalah keagamaan. Dalam kapasitasnya sebagai ketua umum MUI, Hasan Basri banyak mengusahakan terciptanya ukhuwwah Islamiyah di kalangan intern umat Islam dan berusaha menghimpun ulama yang berasal dari berbagai organisasi Islam untuk kepentingan bersama umat Islam. Ia juga mencoba menciptakan hubungan baik dan toleransi antarpenganut agama di Indonesia meski mewakili kepentingan umat Islam. Ia ikut mendorong adanya regulasi yang mengatur masalah misi penyebaran agama di Indonesia. Di sini ia berusaha melindungi umat Islam dari upaya Kristenisasi. Berbeda dengan Hasan Basri yang memiliki jangkauan yang luas sebagai ketua umum MUI, Idham dalam kapasitasnya sebagai ketua umum PBNU baik pada era Orde Lama dan Orde Baru lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan internal di kalangan NU dan

hubungan politis NU dengan pemerintah. Konsentrasinya dalam mengatasi berbagai masalah dalam tubuh NU membuatnya tidak memiliki peran berarti dalam hubungan antarumat beragama. Dibanding Hasan Basri dan Idham, Djohan merupakan elite muslim Banjar yang paling aktif dan militan dalam bidang hubungan antaragama dan dialog antariman. Ia mengungguli Hasan Basri dan Idham dalam hal yang satu ini. Ia telah berkiprah di bidang ini sejak ia bekerja di Departemen Agama di Jakarta pada dekade 70-an. Bahkan ia pernah memimpin proyek kerukunan keagamaan pada dekade 70-an. Pada dekade 90-an ia menjadi tokoh pluralis dan aktivis dialog antaragama yang militan. Ia banyak membela hak-hak kebebasan beragama kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, Khonghucu dan beberapa agama lokal. Untuk kepentingan itu, ia terlibat di DIAN/Interfidei (Dialog Antariman/Interfaith dialogue) sejak tahun 1991 dan MADIA (Masyarakat Dialog Antar Agama) sejak tahun 1995. Ia juga mengikuti kegiatan dan seminar WCRP (World Conference of Religions for Peace) untuk forum tingkat internasional sejak dekade 80-an. Dalam forum dan organisasi ini ia bersama aktivis dialog antaragama lainnya tidak hanya memperjuangkan kebebasan beragama dan toleransi beragama tetapi juga mendiskusikan teologi dan filosofi masing-masing agama dan kepercayaan termasuk di dalamnya masalah iman masing-masing agama.

### **C. Kiprah di Bidang Intelektual**

Bidang intelektual yang dimaksud di sini berkaitan dengan penyampaian gagasan-gagasan intelektual yang dituangkan dalam bentuk karya tulis. Sebagaimana diketahui bahwa Hasan Basri, Idham dan Djohan masing-masing menghasilkan karya tulis yang memuat pikiran atau gagasan mereka. Hanya saja sesuai dengan latar belakang sosial-intelektual mereka, masing-masing menulis sesuai dengan posisi mereka. Hasan Basri sebagai aktivis

organisasi sosial, aktivis masjid dan dakwah lebih banyak mengembangkan gagasannya di seputar posisinya itu. Idham sebagai seorang politisi menulis beberapa tulisan di seputar politik sebagai respon terhadap kondisi politik pada saat itu. Posisinya sebagai ulama membuatnya tidak mungkin mengenyampingkan sisi keulamaannya. Karena itu selain masalah politik ia juga menulis gagasan intelektualnya di bidang keislaman. Sementara Djohan sebagai seorang intelektual, birokrat dan peneliti memiliki perbedaan yang cukup menyolok dibanding Hasan Basri dan Idham Chalid. Ia menulis banyak hal. Tulisannya pada dekade 60-an berkaitan dengan sikap opologisnya ketika bergabung dengan Ahmadiyah dan kemudian berubah menyerukan gagasan pembaruan dan modernisasi Islam. Dekade 70-an ia banyak berbicara tentang toleransi dan relasi Pancasila dengan agama. Pada dekade 80-an ia banyak menulis tentang Iqbal, dan dekade 90-an Djohan menjelma menjadi tokoh pluralisme sehingga gagasannya banyak berkaitan dengan itu. Banyaknya aspek yang ditulis Djohan terkait erat dengan pergumulan dan pencarian intelektualnya yang cukup panjang.

Hasan Basri mulai menulis dan memublikasikan beberapa karya intelektualnya pada dekade 1970-an. Masa produktivitasnya dalam menulis terjadi pada dekade 80-an dan dekade 90-an. Secara keseluruhan, karya intelektualnya berupa tulisan-tulisan pendek berupa artikel yang dimuat dalam majalah dan surat kabar. Majalah dan surat kabar yang menjadi langganannya memublikasikan karya intelektualnya adalah *Majalah Mimbar Ulama*, *Majalah Suara Masjid*, *Majalah Mihrab*, *Serial Khutbah Jumat*, *Harian Suara Karya*, *Harian Merdeka*, *Harian Terbit*, *Harian Pikiran Rakyat*. Di antara majalah dan surat kabar itu, *Mimbar Ulama* merupakan majalah yang paling banyak memuat tulisannya. Ini tidak mengherankan karena *Mimbar Ulama* merupakan majalah bulanan yang diterbitkan oleh MUI Pusat. Tulisan-tulisan pendeknya yang dimuat dalam

majalah dan surat kabar sebagiannya kemudian dibukukan. Ada dua buku yang merupakan kumpulan tulisannya dalam berbagai kesempatan, yaitu *Risalah Islamiyah Rahmat Bagi Alam Semesta* dan *Etika Bermasyarakat*.

Idham telah memublikasikan tulisannya sejak sejak tahun 1949. Buku pertamanya *Bertamasja Ke Cakrawala* terbit tahun 1949. Tahun 1951 ia menulis tentang Parlemen yang berjudul *Parlemen, Organisasi dan Tjara Bekerdjanja*. Tahun 1965, buku kecil tulisannya terbit dengan judul *Islam dan Demokrasi Terpimpin*. Selain menulis buku, ia juga menulis artikel untuk *Duta Masyarakat* koran milik Nahdlatul Ulama. Salah satu tulisannya di koran ini adalah artikel yang berjudul *Haluan Politik*. Kumpulan pidatonya juga dibukukan dengan judul *Mendajung dalam Taufan* (1966). Tulisan Idham lainnya yang beredar adalah ringkasan *Dala'il al-Khairat* dalam bentuk buku saku tipis. Dari segi produktivitas menulis, Idham tampaknya masih kalah dengan Hasan Basri yang secara konsisten menulis sejak dekade 70-an hingga ia wafat (1998). Produktivitas Idham dalam menghasilkan tulisan hanya terjadi pada era Orde Lama. Pada era Orde Baru produktivitas tulisannya malah sangat menurun.

Dari ketiga elite muslim Banjar ini, yang paling produktif melahirkan karya intelektual adalah Djohan Effendi. Ia boleh kalah dari segi kemampuan berpidato tetapi dalam masalah menulis ia lebih unggul dari keduanya. Djohan telah menulis sejak dekade 60-an. Pada tahun 1992 saja ia telah memiliki daftar karya intelektual sebanyak 150 buah yang terdiri dari buku dan artikel. Itu tidak termasuk naskah-naskah pidato yang ditulisnya selama dua puluh tahun untuk presiden, wakil presiden dan sejumlah menteri. Dapat dikatakan, kelebihan Djohan dibanding Hasan Basri dan Idham ada pada produktivitasnya melahirkan tulisan yang berbobot dan

kontribusi intelektualnya dalam bidang pemikiran keagamaan.

#### **D. Kiprah di Dunia Internasional**

Hasan Basri, Idham Chalid dan Djohan Effendi pernah terlibat dalam beberapa pertemuan internasional. Sebagai tokoh nasional dan menonjol di jalurnya masing-masing, mereka memiliki kesempatan untuk ikut berbagai pertemuan internasional. Terlepas dari besar-kecilnya kontribusi mereka, yang jelas pertemuan internasional yang mereka ikuti menjadi indikasi bahwa mereka juga ikut berkiprah untuk dunia internasional meski kehadiran mereka dalam rangka kepentingan Indonesia.

Sejak dekade 50-an, Hasan Basri telah berkunjung ke luar negeri (RRC) dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR. Pada dekade 70-an ia juga menghadiri pertemuan internasional dunia Islam yaitu Mukhtamar VIII Lembaga Penelitian Islam di Mesir. Di sini ia hadir bersama HAMKA dan beberapa tokoh Islam Indonesia lainnya. Dekade 80-an ia juga pernah menghadiri pertemuan internasional. Pada tahun 1981 ia menghadiri Mukhtamar Menteri Wakaf di Makkah dan pada tahun 1983 ia bersama Wakil Presiden RI menghadiri KTT OKI di Casablanca (Maroko). Pertemuan internasional yang bergengsi yang dihadiri oleh Hasan Basri adalah sidang Majelis Inter-Action di Roma pada bulan Maret 1987. Dalam pertemuan ini, Hasan Basri tidak dalam kapasitas sebagai ulama yang bertugas mewakili Indonesia, tetapi dalam kapasitas tokoh agama (Islam) yang mewakili dunia Islam. Di sini ia menjadi salah seorang pembicara bersama dengan tokoh politik (mantan pemimpin negara), agamawan (dari berbagai agama besar dunia) dan intelektual dari berbagai negara. Dalam pertemuan ini ia dipanggil sebagai Profesor Basri. Beberapa pertemuan ini hanyalah beberapa contoh pertemuan internasional yang ia hadiri.

Idham Chalid telah mewakili Indonesia sebagai delegasi Indonesia dalam rangka negoisasi biaya haji di Arab Saudi. Ia bersama KH. Soedja (Ketua Panitia Hadji Indonesia) diutus oleh Menteri Agama Abdul Wahid Hasjim ke berbagai negara untuk memperoleh bahan-bahan masukan mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan perjalanan haji masing-masing negara. Selama empat bulan, ia mengunjungi beberapa negara, diawali dari Singapura kemudian ke Thailand, India (Mombay), Pakistan, Mesir dan terakhir ke Arab Saudi.

Idham juga mendapat penghormatan melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir sekaligus mendapat gelar doktor honoris causa dari Universitas al-Azhar. Pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 1957 bertempat di aula Universitas al-Azhar dilangsungkan penganugerahan doctor honoris causa kepadanya. Pada kesempatan itu ia menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul *al-Tadhamun fi al-Islam* (Solidaritas dalam Islam) dalam bahasa Arab. Penganugerahan gelar dan pidato ilmiahnya ini dihadiri oleh para ulama besar, sarjana dan staf pengajar Universitas al-Azhar juga mahasiswa yang berasal dari berbagai negara.

Pertemuan internasional penting yang dihadiri oleh Idham adalah Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandung. Pertemuan ini untuk mengimbangi perkembangan solidaritas komunis yang semakin kuat. KIAA ini diadakan pada tanggal 6-14 Maret 1965 yang dihadiri oleh 155 orang delegasi mewakili 33 negara dan 4 negara peninjau. KIAA kemudian memilih Lajnah Tandzimiyah dimana Idham dipilih sebagai presidennya.

Dunia internasional juga menganggap Idham sebagai tokoh penting Indonesia. Beberapa penghargaan dari beberapa negara telah diberikan kepadanya. Misalnya, Bintang Aljumhuriyah (Mesir), Bintang Groot Cruis van O.N. (Belanda), Bintang Croot Cruit Ber Croon Orde Belgia) dan Bintang Gwang Hua (Korea Selatan).

Djohan Effendi juga sering melakukan kunjungan keluar negeri dan mengikuti sejumlah konferensi dan seminar internasional. Sejak dekade 70-an ia telah berkeliling ke beberapa negara dan pernah mengikuti kursus di Australia. Pada tahun 1992, ia tercatat telah melakukan 46 kali melakukan kunjungan ke luar negeri. Itu tidak termasuk kunjungannya ke Israel pada tahun 1994 dan kunjungannya ke Italia untuk menghadiri Persidangan Sedunia *World Conference of Religions for Peace (WCRP)*. Sebelum ke Israel, ia juga berangkat ke Australia untuk memenuhi undangan seminar kehidupan Islam di kalangan mahasiswa Indonesia di Universitas Deakin. Baginya, pertemuan internasional baik itu dalam bentuk konferensi, seminar dan pertemuan lainnya merupakan hal yang sudah biasa dalam kehidupannya. Yang jelas, ia dikenal dunia internasional sebagai salah seorang tokoh pluralis yang militan memperjuangkan kebebasan beragama dan aktif dalam dialog antariman. Karena itu, forum internasional seperti WCRP merupakan forum yang telah lama diikutinya sejak dekade 80-an.

### **E. Berbandingan Latar Belakang dan Ketokohan**

Dilihat dari segi latar belakang kehidupan, ketiganya memiliki beberapa kesamaan. Dilihat dari segi kondisi sosial, politik dan religius daerah asal mereka, Hasan Basri, Idham dan Djohan hidup di lingkungan masyarakat kota meski diantaranya ketika kecil ada yang pernah hidup di daerah pedesaan. Di sekitar mereka terutama di wilayah Banjarmasin, Amuntai dan Kandangan merupakan wilayah yang maju pertumbuhan lembaga pendidikannya, baik lembaga pendidikan umum maupun agama. Dengan demikian akses pendidikan bagi mereka tidak menjadi masalah berarti. Selain itu, di Banjarmasin, Amuntai dan Kandangan merupakan pusat-pusat gerakan organisasi keagamaan dan politik baik yang bersifat lokal maupun nasional. Di Banjarmasin (1930-1950) telah

muncul organisasi Islam seperti Sarikat Islam, NU, Muhammadiyah, Musyawaratutthalibin, SERMI, SKI dan lainnya yang gerakannya juga berkembang hingga Kandangan dan Amuntai. Kondisi ini memungkinkan mereka untuk berkiprah di organisasi-organisasi yang ada. Di samping itu, arus informasi melalui koran dan buku-buku bacaan juga telah berkembang dan menyebar ke berbagai daerah. Kondisi ini memungkinkan mereka untuk mengikuti perkembangan dunia luar dan perkembangan pengetahuan agama yang berkembang pada saat itu. Buku-buku kaum reformis-modernis telah berkembang tidak hanya menjadi bacaan kalangan pendukung pembaruan tetapi juga dibaca secara diam-diam oleh kalangan pengikut Islam tradisional. Melalui bacaanlah, Djohan memilih paham keagamaan PERSIS meski pada saat itu tidak ada cabang PERSIS di Kalimantan Selatan. Majalah dan buku PERSIS yang beredar di Kalimantan Selatan memungkinkannya untuk mengenal PERSIS dengan baik.

Kondisi politik saat mereka hidup secara bersamaan masih dibawah penjajahan (1920-1945) dan masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan (1945-1950). Hasan Basri dan Idham saat itu menjadi pejuang di medan politik dan mensupport kelompok gerilyawan ALRI Divisi IV ketika muncul perlawanan terhadap kembalinya NICA yang ingin menjajah kembali Indonesia. Idham bahkan ditangkap dan masuk penjara. Sementara Djohan sendiri pada saat itu belum bisa berbuat apa-apa karena masih kecil dan ikut menjadi pengungsi bersama keluarganya ketika konflik berkecamuk. Ketika Hasan Basri dan Idham telah menjadi tokoh lokal, Djohan baru memulai masa pendidikannya. Sementara pada jaman Jepang (1942-1945) ketiganya belum menunjukkan kiprah yang berarti karena Hasan Basri dan Idham baru saja menyelesaikan pendidikan mereka masing-masing. Sementara Djohan pada saat itu belum menjadi apa-apa, dia masih balita.

Stuasi keagamaan masyarakat Banjar pada saat mereka tumbuh dibayangi oleh konflik pemahaman antara kaum *tuha* (muslim tradisional) dan kaum muda (kaum modernis), antara Islam tradisional dan kelompok pembaru. Saat itu, Islam tradisional merupakan *mainstream* paham keagamaan masyarakat Banjar secara luas. Arus utama ini kemudian merasa terganggu dengan masuknya kaum muda yang menyerukan pembaruan dengan menyerang tradisi keagamaan kaum *tuha*. Kelompok tradisional yang umumnya didukung kuat oleh para ulama alumni Haramain gigih mempertahankan diri dari kelompok pembaru yang menyerukan ajaran pemurnian dan pembaruan yang terinspirasi dari ajaran Muhammad Abduh (Mesir) dan Wahhabi (Hijaz). Maraknya gerakan pembaruan ini dengan cepat menyebar tidak hanya di Banjarmasin tetapi juga hingga masuk lebih jauh ke wilayah Hulu Sungai terutama Kandangan dan Amuntai. Karena itu, Idham kecil sudah menyaksikan konflik pemahaman ini di Amuntai. Pengaruh kaum *tuha* yang begitu kuat di Amuntai membuatnya lebih terpengaruh pada paham keagamaan *mainstream* di daerahnya. Idham tetap setia pada garis pemikiran kaum *tuha* meski ia pernah menempuh studi di Pesantren Modern Gontor. Pilihan ini kemudian dikuatkan dengan masuknya Idham menjadi anggota NU. Demikian juga Hasan Basri, dia tidak hanya melihat tetapi juga sempat terseret dalam konflik itu karena pilihannya menjadi bagian dari Muhammadiyah, organisasi pembaru, membuatnya dianggap sebagai ‘orang lain’ dalam masyarakat muslim tradisional. Meski memilih Muhammadiyah sebagai wadah aktivitas organisasi dan pendidikannya, Hasan Basri tetap menghormati arus utama tradisi keagamaan masyarakat Banjar. Apalagi pada masa kecilnya, ia juga mendapat pendidikan tentang ajaran kaum tradisional di kampungnya. Djohan lebih kompleks lagi, karena dia hidup di tengah keluarga yang mengikuti dua pemahaman keagamaan yang berkembang saat itu, ada yang berkiblat

pada Islam tradisional dan menjadi anggota NU dan adapula yang berkiblat pada Islam reformis dan ikut menjadi anggota Muhammadiyah. Di sisi lain ayahnya yang merupakan muslim tradisional-moderat berlangganan majalah Islam yang diterbitkan oleh PERSIS dan kelompok Modernis. Djohan sendiri tertarik pada pemikiran kaum Islam modernis dan tidak tertarik pada kelompok Islam tradisional. Karena itu, meski kakeknya pendukung fanatik kaum *tuha* dan ayahnya pengikut kaum *tuha* yang moderat, namun pilihannya tidak pada pemikiran kaum *tuha* dan tidak pula pemikiran modernis Muhammadiyah. Pilihannya justru pada pemikiran PERSIS yang diperolehnya dari bahan bacaan yang disimpan ayahnya.

Dilihat dari segi pilihan paham keagamaan, paparan di atas menunjukkan bahwa sebelum ketiga tokoh ini menjadi elite muslim di tingkat nasional ketiganya telah memilih paham keagamaan yang berbeda di tingkat lokal. Hasan Basri memilih paham Islam modernis (kaum muda) dan menjadi anggota Muhammadiyah; Idham mengikuti *mainstream* paham keagamaan masyarakat Banjar yaitu paham keagamaan kaum *tuha* (Islam tradisional) dan kemudian menjadi anggota NU melalui Anshor; Djohan muda memilih paham keagamaan PERSIS yang menurutnya lebih keras daripada Muhammadiyah dalam memerangi TBC (Takhyul, Bid'ah dan Churafat). Dengan mengikuti paham PERSIS Djohan menjadi lebih puritan dalam beragama. Berbeda dengan Hasan Basri dan Idham yang tetap konsisten dengan pilihan paham keagamaannya hingga masa tua mereka, pilihan Djohan terhadap PERSIS hanya bersifat sementara dalam fase pencarian dan pembentukan intelektualnya.

Dalam perkembangannya, Hasan Basri menjelma menjadi muslim modernis yang moderat. Meski ketika masa awal berkiprah di Masyumi era Orde Lama, ia memperjuangkan negara Islam namun seiring dengan

dinamika politik era Orde Baru ia dapat menerima Indonesia sebagai negara yang berdasar pada Pancasila. Saat ia menjabat sebagai Ketua MUI, meski ia adalah kader Muhammadiyah namun dalam posisinya sebagai pimpinan MUI pusat ia harus mampu berdiri di tengah-tengah berbagai organisasi keagamaan yang ada. Karena itu ia tidak menonjolkan kemuhammadiyahannya. Meski demikian, garis-garis perjuangan Masyumi dalam bentuk Islam kultural tetap dijalaninya dengan setia bersama dengan tokoh-tokoh Masyumi lainnya. Begitu juga dengan Idham, pilihannya pada Islam tradisionalis tetap dipegangnya dengan kuat. Ia rela meninggalkan Masyumi untuk berpindah ke Partai NU yang merupakan wadah organisasi kaum tradisionalis ketika NU menyatakan diri keluar dari Masyumi. Apalagi ketika ia menjabat sebagai ketua Tanfidziyah PBNU dia telah menjelma sebagai NU sejati dan tidak meninggalkannya ketika ia diturunkan dengan cara-cara yang tidak biasa.

Berbeda dengan Hasan Basri dan Idham, pilihan Djohan pada PERSIS tidak bersifat permanen. Ketertarikannya pada cara keberagamaan PERSIS yang puritan menurun dengan cepat ketika ia mulai terpengaruh dengan Ahmadiyah yang apologis. Sikapnya terhadap Ahmadiyah juga berubah ketika ia menjadi anggota HMI. Di HMI Djohan tertarik pada sekulerisme, modernisme dan sosialisme Islam. Pada fase ini ia menjelma sebagai salah satu penggerak pemikiran pembaruan di kalangan intelektual muda saat itu. Pada fase ini, ia sudah jauh meninggalkan sikap puritannya dan sebaliknya bersikap liberal dalam beragama. Liberal dalam arti tidak mau terikat dengan paham atau mazhab apapun. Baginya dia adalah muslim atau Islam tanpa label apapun. Pada dekade 70-an dan 80-an ia ia telah menjadi pejuang toleransi beragama yang militan dan pada dekade 90-an ia menjelma sebagai tokoh pluralisme dan salah satu jajaran tokoh yang dipandang liberal di Indonesia.

Dari segi latar belakang keluarga ketiganya sama-sama dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama dan memiliki perhatian terhadap pendidikan. Meski ayah Hasan Basri telah wafat sejak dia masih kecil namun kakeknya, Haji Abdullah, memiliki perhatian terhadap keberlangsungan pendidikannya. Sang kakek tidak hanya mendidiknya waktu kecil tetapi juga membiayai kehidupannya bersama saudara dan ibunya. Kondisi ini mendukungnya untuk melanjutkan pendidikan di Banjarmasin hingga Yogyakarta. Demikian juga dengan Idham. Ayahnya, Muhammad Chalid, adalah seorang penghulu dan pedagang yang memiliki pengetahuan agama yang baik dan taat beribadah. Ayah Idham sangat memperhatikan keberlangsungan pendidikannya. Sang ayah menginginkan Idham kelak menjadi ulama. Masalah biaya tidak begitu menjadi masalah bagi sang ayah. Karena itu studi Idham sejak di sekolah dasar hingga menyelesaikan studi di Madrasaturrasyidiyah di Amuntai dan Pesantren Gontor di Jawa Timur semuanya berjalan lancar. Hal yang sama juga terjadi pada Djohan. Kakek dan ayahnya adalah muslim tradisional yang taat. Keduanya merupakan pedagang yang cukup berhasil. Karena itu masalah biaya untuk studinya di Kandungan, Banjarmasin dan Yogyakarta tidak mengalami kendala berarti dari segi pembiayaan. Apalagi, studinya di PHIN dan IAIN Sunan Kalijaga dibiayai dari dana beasiswa dari pemerintah.

Dari segi pendidikan sebagaimana telah disinggung ketiganya telah mendapat pendidikan yang layak untuk ukuran masa itu. Hanya saja ketiganya memiliki kecenderungan dan pilihan yang berbeda dalam menempuh pendidikannya. Hasan Basri lebih memilih menempuh pendidikan di lembaga pendidikan kaum modernis yaitu sekolah Muhammadiyah (Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah dan Zuama Muhammadiyah); Idham memilih menempuh pendidikan di Madrasaturrasyidiyah, lembaga pendidikan yang dipengaruhi oleh arus pemikiran

muslim tradisional dan pengaruh alumni al-Azhar yang lebih terbuka. Idham juga menempuh pendidikan di pesantren modern Gontor Ponorogo yang bersifat netral dalam paham keagamaan. Sementara Djohan menempuh pendidikan di lembaga pendidikan yang diselenggarakan pemerintah (PGAP dan PHIN) dan lebih cenderung pada pemikiran pembaruan (IAIN Yogyakarta). Dari ketiga tokoh ini hanya Djohan yang mencapai gelar sarjana dan menikmati pendidikan di perguruan tinggi hingga S3.

Dengan modal pendidikan yang tinggi untuk ukuran masa itu (1940-1960) membuat mereka memiliki kesempatan untuk menjadi elite-elite muslim di tingkat lokal mengingat belum banyak orang yang mendapat pendidikan yang tinggi pada saat itu. Tidak lama setelah menyelesaikan studinya di Zuama Muhammadiyah Hasan Basri mendapat kepercayaan menjadi guru dan qadhi di daerahnya dan tampil sebagai tokoh masyarakat dalam usianya yang masih muda. Demikian juga dengan Idham. Ketika pulang ke kampung halamannya di Amuntai dia langsung diminta memimpin Normal Islam Ma'had Rasyidiyah yang mati suri ketika Jepang datang. Kemahirannya dalam bahasa Jepang, Belanda dan Inggris menjadi prestise tersendiri karena sulit sekali, kalau tidak satu-satunya, orang yang mampu menguasai ketiga bahasa itu di daerahnya. Karena itu, sebagai muslim terpelajar dan menonjol, Idham segera menjadi tokoh masyarakat yang berpengaruh pada usianya yang masih sangat muda. Berbeda dengan Djohan, ketika menyelesaikan studinya di PHIN Yogyakarta dia langsung ditempatkan sebagai pegawai di Kerapatan Qadhi. Pada tahap ini, Djohan belum menonjol dan hanya menjadi pegawai biasa. Karena itu, pada masa mudanya ia belum dikenal sebagai tokoh lokal yang terkenal. Apalagi kiprahnya di *banua* sangat singkat, hanya dua tahun. Kalau ketokohan Hasan Basri dan Idham di tingkat lokal kemudian mengantarkan mereka ke tingkat nasional, Djohan tidak mengalami hal yang sama.

Ketokohnya justru mulai tumbuh ketika ia kuliah di Yogya dan pindah ke Jakarta.

Tidak bisa dipungkiri, selain faktor-faktor di atas, faktor organisasi berskala nasional, relasi yang luas, dan faktor Jakarta menjadi faktor selanjutnya yang cukup menentukan ketokohan mereka secara nasional. Tanpa ketiga faktor ini sulit bagi mereka menjadi tokoh nasional. Masuknya Hasan Basri sebagai anggota Muhammadiyah mengantarkannya masuk dalam jaringan kader Muhammadiyah yang mempertemukannya dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Hamka. Demikian juga ketika ia menjadi bagian dari Masyumi dan GPII di tingkat pusat membuat dirinya masuk dalam barisan tokoh-tokoh terdepan Masyumi dan GPII. Di sini ia bertemu dengan Muhammad Natsir, Anwar Harjono, EZ. Muttaqien dan lainnya dan menjalin relasi dan jaringan dengan mereka sehingga menjadikan dirinya menjadi bagian dari jajaran tokoh nasional. Relasi dan jaringan inilah yang kemudian mengantarkannya ke posisi puncak di MUI. Di sini relasi dan jaringan Hasan Basri semakin luas, tidak hanya di kalangan Masyumi dan Muhammadiyah, tetapi juga organisasi-organisasi keagamaan lainnya seperti NU dan relasinya dengan pemerintah semakin kuat.

Keterlibatan Idham di NU yang berskala nasional juga membuat dirinya masuk dalam jaringan organisasi dan relasi yang luas di kalangan NU. Relasinya dengan tokoh-tokoh NU terutama ulama-ulama NU berpengaruh membuat namanya terangkat dan menyebar. Dua tokoh penting yang mendorong Idham menjadi tokoh penting di NU adalah KH. Abdul Wahid Hasyim dan KH. Abdul Wahab Chasbullah. Kedua tokoh NU inilah yang memiliki peran dalam peningkatan karir Idham di NU. Ketika Idham menjadi pimpinan NU dengan sendirinya menjadikan dirinya sebagai tokoh nasional mengingat lingkup skala organisasi NU yang menasional. Relasinya semakin luas

ketika ia sebagai tokoh NU menjalin relasi dengan pihak penguasa. Faktor NU sangat menentukan masuknya Idham dalam jajaran pemerintahan baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru.

Ketokohan Djohan Effendi di tingkat nasional tidak terlepas dari keterlibatannya di HMI pada dekade 60-an. Melalui HMI-lah ia menjalin relasi yang lebih luas dengan tokoh-tokoh HMI lainnya. HMI mempertemukan ia dengan Dawam Rahardjo Nurcholish Madjid, Ahmad Wahib, dan lainnya. Meski akhirnya ia keluar dari HMI namun HMI telah mengubah cara pandanginya. Di HMI-lah gagasan-gagasan pembaruannya mulai ia sampaikan secara terbuka. Dari sini ia mulai menjelma sebagai salah satu tokoh pembaruan Indonesia, meski belum dikenal luas. Tidak kalah pentingnya adalah keterlibatannya dalam kelompok diskusi *Limited Group* yang mempertemukannya dengan Mukti Ali, salah satu tokoh pembaruan Islam di Indonesia. Relasinya dengan Mukti Ali yang kemudian menjadi menteri agama dan ia menjadi sekretaris pribadinya membuatnya dapat berkiprah lebih banyak di Departemen Agama dan berkenalan dengan berbagai tokoh lintas agama. Mukti Ali tidak hanya membuka dan mengembangkan cara berpikirnya di Yogya tetapi juga memberinya posisi yang layak di Departemen Agama di Jakarta.

Selain Mukti Ali, relasi Djohan dengan Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan tokoh-tokoh progresif lainnya termasuk kalangan intelektual muda yang dibimbingnya membuatnya menjadi salah satu intelektual progresif dan liberal yang menjadi figur panutan tokoh-tokoh muda progresif. Greg Barton memasukkannya sebagai salah satu tokoh Neo-modernis Islam di Indonesia yang memiliki pemikiran humanistik dan pluralis.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Lihat simpulan Barton atas pemikiran Djohan: Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 248-249.

Relasinya kemudian semakin luas ketika Djohan banyak berinteraksi dengan tokoh lintas agama dalam berbagai forum dialog antaragama baik tingkat nasional maupun internasional. Keterlibatan Djohan di Dian/Interfidei, MADIA dan WCRP serta ICRP semakin memperkuat dan memperluas relasi dan jaringannya yang sudah terbentuk sebelumnya dengan tokoh-tokoh lintas agama. Relasi dan jaringan semacam inilah yang membuatnya tidak hanya menjadi salah satu tokoh pembaruan Islam di Indonesia tetapi juga menjadikannya sebagai salah satu tokoh pluralis yang militan di Indonesia.

Selain organisasi dan relasi, faktor Jakarta juga ikut menentukan proses perjalanan mereka menjadi tokoh nasional. Tanpa tinggal dan hidup di Jakarta, agak sulit dibayangkan mereka akan menjelma menjadi tokoh nasional. Hasan Basri dan Idham Chalid telah tinggal di Jakarta sejak tahun 1950 sementara Djohan baru pindah ke Jakarta tahun 1970. Dengan berada di pusat kekuasaan dan pusat pemerintahan mereka memiliki akses yang lebih luas untuk memperoleh posisi-posisi strategis yang memiliki lingkup skala nasional, seperti menjadi ketua umum MUI untuk Hasan Basri dan Ketua Umum PBNU untuk Idham Chalid, serta Kepala Litbang Pusat untuk Djohan atau Menteri Sekretaris Negara pada era Presiden Gusdur.

Tentu saja tidak hanya faktor-faktor eksternal yang mendukung ketokohan mereka, tetapi faktor internal yakni karakter masing-masing ketiga tokoh ini turut pula mendukung ketokohan mereka. Ketiga elite muslim Banjar yang menjadi tokoh di tingkat nasional ini memiliki kesamaan dan perbedaan karakter. Dari sisi kesamaannya adalah ketiganya merupakan figur-figur yang *low profile* sebagaimana lazim menjadi sikap umum masyarakat Banjar. Mereka adalah tokoh-tokoh yang ramah, rendah hati, sederhana, dan berhati-hati dalam bertindak dan bersikap. Meski demikian mereka adalah elite muslim yang

memegang teguh prinsip masing-masing dan memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap jalur hidup yang mereka pilih.

Hasan Basri adalah sosok yang ramah, lemah lembut, tenang, cenderung pendiam dan bukan sosok pembicara lantang dan keras. Dia tidak suka mengemukakan kritik secara terbuka dan lebih mementingkan ukhuwah ketika berhadapan dengan masalah khilafiyah. Hadariansyah menyebutkan beberapa karakter kepemimpinan Hasan Basri, yaitu (1) selalu mengedepankan musyawarah dan kebersamaan, (2) bijaksana dan berhati-hati dalam bertindak, (3) berhati-hati dalam masalah uang, (4) sabar dalam menghadapi masalah, (5) banyak memberi teladan dan sedikit bicara, (5) selalu menjaga hubungan baik dengan penguasa.<sup>5</sup>

Idham Chalid merupakan sosok yang peramah, lemah lembut, suka menyenangkan orang lain, humoris, pandai bergaul dan luwes dalam bertindak dan bersikap. Menurut KH, Nuril Huda karakter Idham yang menonjol adalah (1) dia adalah ulama intelek yang rendah hati terutama kepada ulama senior, (2) memiliki keikhlasan yang tulus, (3) sangat pandai bergaul, mudah akrab dan tidak mau menunjukkan muka yang tidak menyenangkan kepada siapapun, (4) rajin melaksanakan ibadah sunnah dan *qiyam al-lail*. Sementara Danial Tanjung menyebutkan bahwa Idham itu (1) selalu menyesuaikan diri dengan orang yang dipimpin dan orang yang dihadapinya, (2) hidup sederhana, (3) pandai menempatkan diri, egaliter dan tidak sentralistik dalam memimpin, (4) pandai mengambil hati.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hadariansyah, A.B., *KH. Hasan Basri (1920-1998) Tokoh Majelis Ulama dari Kalimantan*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), h. 221-241.

<sup>6</sup> Arief Mudatsir Mandan, (ed.), *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid: Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2008), h. 400-403.

Satu lagi karakter Idham yang menonjol di mata pengikut dan sahabat-sahabat dan orang-orang yang pernah bergaul dengannya, yaitu dia adalah ulama yang memiliki sense humor yang lumayan tinggi. Baik saat bercengkerama maupun menyampaikan ceramah dia selalu menyelipkan humor-humor.

Karakter Djohan yang menonjol adalah kesederhanaan hidupnya dan tidak tergantung pada materi. Kesederhanaannya tercermin dari gaya hidupnya mulai ketika dia menjadi pegawai biasa hingga menjadi pejabat tinggi negara, gaya asketisme-nya tidak pernah berubah. Karena itu, gaya hidupnya jauh dari kehidupan mewah bahkan terlalu sederhana bagi orang yang pernah menduduki jabatan penting seperti Kepala Litbang Depag dan Menteri Sekretaris Negara meski hanya singkat. Djohan juga dikenal sebagai sosok pendiam dan tidak suka menonjolkan diri. Dia tidak banyak bicara dan bukan pembicara publik yang mahir. Kalau dia berbicara dihadapan publik suaranya datar, hampir tidak ada intonasi dan menjemukan bagi sebagian orang. Dia lebih suka menghemat bicara dan lebih banyak mendengar. Meski sedikit bicara namun dia banyak berbuat untuk kepentingan orang lain dan terkadang mengabaikan kepentingan diri sendiri dan keluarga. Sikapnya yang tidak suka menonjolkan diri terlihat dari perannya yang lebih banyak dilakukan di balik layar. Dampaknya, karya dan pemikirannya jarang terlihat oleh orang lain dan dia jarang sekali tampil di media. Tampaknya ia sama sekali tidak tertarik dengan popularitas dan barangkali tidak terbayang olehnya menjadi orang yang populer. Sikap ini selaras dengan gaya hidupnya yang sederhana. Ia juga merupakan sosok yang inklusif dalam beragama dan selalu menempatkan diri sebagai seorang pencari jalan kebenaran (*salik*) yang tidak pernah berhenti. Karena itulah dia tidak pernah berhenti belajar dan selalu banyak membaca. Di balik penampilannya yang kalem dan sederhana, ia

memiliki idealisme yang kuat dan tegas. Dia bahkan berani menentang arus dan berani menyampaikan kritik melalui tulisan-tulisannya meski akan membawa dampak buruk bagi karir dan kehidupannya.

Dari berbagai karakter yang ada menunjukkan bahwa ketiga tokoh ini merupakan sosok yang *low profile* dan sama-sama menunjukkan sosok yang sederhana dan rendah hati. Mereka bukanlah elite muslim yang suka melancarkan kritik terbuka dan terang-terangan. Hasan Basri merupakan tipe yang ulama yang selalu berhati-hati dalam bersikap dan berusaha bersikap arif dalam menghadapi perbedaan. Idham selalu berusaha bersikap fleksibel, adaptif dan berusaha mengakomodasi berbagai kepentingan yang mungkin bisa disatukan meski untuk sementara. Djohan lebih suka tidak melakukan apa yang tidak disetujuinya daripada membantah mesti ia diperintah untuk melakukannya oleh orang yang lebih berkuasa daripada dirinya.

Beberapa karakter Hasan Basri, Idham Chalid dan Djohan Effendi di atas di satu sisi tidak hanya menunjukkan akan kelebihan mereka tetapi juga di sisi lain kelemahan mereka. Misalnya, sikap Hasan Basri yang selalu hati-hati dalam berbicara dan bersikap memang menyelamatkan dirinya dari sikap represif Orde Lama terhadap tokoh Masyumi dan membuatnya mampu menjalin relasi dan kemitraan dengan penguasa Orde Baru dalam rentang waktu yang lama. Namun dengan karakter ini pula ia dikritik sebagai pemimpin MUI yang kurang tegas kepada pemerintah. Watak Idham yang fleksibel dan akomodatif membuat ia mampu bertahan dari berbagai perubahan politik baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Namun dengan karakter ini pula ia dikritik sebagai politisi yang tidak memiliki pendirian yang jelas dan hanya mencari selamat. Sikap Djohan yang terlalu sederhana dan tidak suka menonjolkan diri membuat dirinya menjadi

intelektual yang jujur, sederhana dan apa adanya. Namun karakter ini pula yang membuat ia kurang dikenal oleh publik.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dalam perjalanan hidupnya (1920-1998), Hasan Basri tumbuh di lingkungan Islam modernis, Muhammadiyah. Ketika muda ia menjadi politisi Masyumi sampai Masyumi dibubarkan. Kesetiaannya pada Masyumi tidak luntur meski Orde Lama dan rezim Orde Baru menyingkirkan tokoh-tokoh Masyumi dari arena politik. Ia kemudian berkiprah di bidang non-politik, yaitu pendidikan, dakwah dan gerakan masjid. Kiprahnya di bidang sosial-kultural ini sebenarnya merupakan bagian dari garis perjuangan non-politik Masyumi yang menjadi aktivitasnya setelah tidak lagi terlibat dalam politik praktis. Kemudian ia menemukan wadah perjuangan yang cocok dengan garis perjuangannya, yaitu MUI. Kiprahnya di MUI inilah yang menjadi posisinya yang paling fenomenal dan bersejarah. MUI-lah yang mengangkat dan membesarkan namanya sebagai pemimpin ulama di tingkat nasional bahkan internasional sekaligus menjadikannya sebagai elite muslim yang disegani. MUI pula yang membuat dirinya menjadi mitra penting pemerintah Orde Baru hingga ia wafat tahun 1998. Melalui MUI pula ia berkiprah untuk memajukan umat Islam di Indonesia dan mewujudkan impiannya untuk menyatukan umat Islam dan organisasi Islam di Indonesia dalam bingkai ukhuwwah Islamiyah.

Dalam perjalanan hidupnya, Idham Chalid tumbuh di lingkungan Islam tradisional (kaum *tuha*) meski ia juga mendapat pendidikan modern. Sebagai generasi terdidik dan memiliki kemampuan dalam beberapa bahasa, ia menjadi tokoh muda yang disegani di *banua* dalam usianya yang masih muda. Kariernya dimulai sebagai guru dan kemudian bergerak di bidang politik untuk melawan Belanda. Kesetiaannya pada Islam tradisional membuatnya memilih NU daripada Masyumi sebagai wadah kiprah politiknya. Pilihannya untuk berkiprah di NU membawa berkah baginya.

Dalam usia 30-an ia telah menjadi Ketua Umum PBNU dan beberapa kali menjadi Wakil Perdana Menteri pada era Orde Lama. Di bawah kepemimpinannya, NU menjadi partai yang disegani dan berhasil masuk ke pemerintahan Soekarno. Sikapnya yang akomodatif dan adaptif membuat NU juga mendapat posisi di pemerintahan era Orde Baru. Politik akomodatifnya tidak terlepas dari aplikasi kaidah fiqih yang selama ini diterapkan oleh NU sejak masa Orde Lama. Baginya, sangat penting untuk menjaga eksistensi NU dan membawa NU memiliki peran di pemerintahan dengan menggunakan politik akomodatifnya. Ia tidak ingin NU yang dipimpinnya disakiti dan disingkirkan.

Kehadiran kubu radikal di tubuh NU kemudian secara perlahan membuat politik akomodatifnya tidak mampu menahan upaya depolitisasi NU pemerintah Orde Baru. Akibatnya, ia tidak hanya tersingkir dari NU tetapi juga karir politiknya menurun drastis. Idham juga menjadi 'korban' dari depolitisasi itu. Pada pertengahan dekade 80-an, namanya secara perlahan tenggelam dan tidak lagi memiliki peran politik yang berarti. Ia hanya mengkonsentrasikan dirinya untuk mengembangkan perguruan dan jam'iyah tarikat NU yang telah berdiri sejak dekade 50-an.

Dalam perjalanan hidupnya, Djohan tumbuh di lingkungan masyarakat yang ketika itu terbelah dalam kelompok kaum *tuha* yang berafiliasi ke NU dan kaum muda yang berafiliasi ke Muhammadiyah. Meski lingkungan keluarganya menerapkan tradisi Islam tradisional dan kerabatnya yang lain memilih menjadi Muhammadiyah, ia justru tidak memilih keduanya. PERSIS dan Ahmadiyah adalah pilihannya ketika muda. HMI kemudian mengubah orientasi keagamaannya. Ia mendukung pembaruan dan modernisasi Islam. Sejak ia menjadi pegawai negeri di Departemen Agama pada dekade 70-an perhatiannya tercurah pada proyek kerukunan beragama. Pada dekade 80-an ia menjadi peneliti, penulis pidato presiden, dan intelektual yang produktif. Dekade 90-an ia menjadi salah satu tokoh pluralis yang giat mendorong tumbuhnya tradisi dialog antariman di kalangan umat beragama. Ia kemudian terlibat

dalam sejumlah lembaga dan forum yang giat mempromosikan dialog antariman dan kebebasan beragama seperti DIAN/Interfidei, MADIA dan WCRP.

Dilihat dari kiprah politik, ketiganya memiliki kiprah politik dalam kadarnya masing-masing. Idham Chalid memiliki pengalaman panjang dan prestasi yang lebih menonjol dalam bidang politik daripada Hasan Basri dan Djohan Effendi. Hasan Basri hanya sempat terlibat dalam politik praktis pada dekade 50-an dan kemudian menurun pada dekade 60-an, sementara Djohan tidak pernah terlibat dalam politik praktis malah ketika ia berada di HMI ia menentang Islam politik dan ide pendirian negara Islam.

Di lihat dari sisi relasinya dengan penguasa, Idham Chalid menggunakan jalur politik untuk menjalin relasi dengan penguasa baik penguasa Orde Lama dan Orde Baru. Kelihaiannya dalam berpolitik, membuatnya selalu dapat menjalin kemitraan dengan pemerintah. Hasan Basri menjalin relasi dengan penguasa melalui jalur kultural setelah melalui jalur politik gagal. Meski gagal menjalin relasi dengan kekuasaan pada masa Orde Lama, namun pada masa Orde Baru kondisinya berbeda. Melalui MUI ia menjalin relasi dan kemitraan yang erat dengan kekuasaan sampai masa Orde Baru berakhir. Sementara Djohan menjalin relasi dengan kekuasaan melalui jalur birokrasi. Sebagai pegawai negeri secara otomatis ia menjadi bagian dari aparat pemerintahan. Perannya sebagai penulis pidato presiden membuatnya memiliki relasi yang unik dengan penguasa Orde Baru itu.

Di bidang sosial keagamaan, ketiganya juga memiliki kiprah pada jalurnya masing-masing. Kiprah Hasan Basri di bidang ini baik pendidikan, dakwah dan kehidupan keagamaan tersalur melalui YPI, IKMI, DMI, DDII dan MUI. Idham melalui NU dan perguruan yang didirikannya, sementara Djohan berkiprah melalui Departemen Agama, DIAN, Interfidei, MADIA dan posisinya sebagai peneliti, dosen dan penulis. Di bidang intelektual, Djohan Effendi harus diakui lebih menonjol dibanding Hasan Basri dan Idham Chalid. Djohan secara konsisten memproduksi

gagasannya melahirkan tulisan sejak dekade 60-an. Idham hanya produktif pada era Orde Lama dan Hasan Basri produktif pada era Orde Baru. Namun dari segi kuantitas dan kualitas tulisan, Djohan mengungguli keduanya.

Dari aspek karakter, ketiganya merupakan elite muslim yang *low profile*. Karakter mereka di satu sisi tidak hanya menunjukkan akan kelebihan mereka tetapi juga di sisi lain kelemahan mereka. Misalnya, sikap Hasan Basri yang selalu hati-hati dalam berbicara dan bersikap memang menyelamatkannya dari penangkapan rezim Orde Lama dan turut menjaga relasinya dengan penguasa Orde Baru dalam rentang waktu yang lama. Namun dengan karakter ini pula ia dikritik sebagai ulama yang tidak tegas terhadap pemerintah. Watak Idham yang fleksibel dan akomodatif memang membuat ia mampu bertahan dalam setiap perubahan politik baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Namun karakter ini juga membuat ia dikritik sebagai politisi yang tidak memiliki pendirian yang jelas dan hanya mencari selamat. Sikap Djohan yang terlalu sederhana dan tidak suka menonjolkan diri membuat dirinya menjadi figur intelektual yang jujur, sederhana dan apa adanya. Namun karakter ini pula yang membuat ia menjadi intelektual yang kurang populer di banding koleganya yang lain.

## **B. Rekomendasi**

Penelitian ini terbatas pada rentang waktu hingga 1998. Karena itu, karier Djohan yang juga sangat penting pada era reformasi seperti posisinya sebagai Sekneg era Presiden Abdurrahman Wahid dan ketua ICRP tidak disinggung di sini. Demikian juga dengan beberapa karyanya yang diterbitkan sejak tahun 2000-an tidak mendapat tempat di sini. Perjalanan hidup dan intelektual Djohan yang terputus ini dapat diteruskan kembali oleh peneliti berikutnya.

Tidak kalah pentingnya juga adalah Idham Chalid yang wafat pada 11 Juli 2010 dan setahun kemudian (2011) dianugerahi oleh negara sebagai pahlawan nasional bersama Hamka (tokoh Muhammadiyah dan Masyumi). Kisah singkat dirinya saat wafat dan proses penetapannya sebagai pahlawan

nasional tentu saja tidak bisa menjadi bagian dari penelitian ini mengingat rentang waktu yang ditetapkan penelitian ini (1998) dengan sendirinya telah membatasinya.

Penelitian ini masih bersandar pada sumber tertulis karena penelitian ini hanya membatasi diri pada penyusunan biografi kolektif sehingga tidak terlalu mewajibkan dirinya menulis masing-masing tokoh secara panjang lebar sebagaimana biografi individual yang memerlukan sumber yang lebih luas. Untuk tema-tema berikutnya yang membutuhkan informasi yang lebih luas dapatkan memanfaatkan sumber-sumber lisan. Demikian juga penelitian ini lebih menonjolkan deskripsi dan narasi karena itu tidak menonjolkan adanya analisis-teoritik atau penjelasan-penjelasan teoritik. Kekurangan ini diharapkan dapat ditutupi peneliti berikutnya.

*Penutup*

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Choirul. 2010. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. tt.: PT Duta Aksara Mulia.
- Anshary, H.M. I. 1989. *KH. Hasan Basri Ulama Indonesia di Mata Dunia*. Jakarta: Media Dakwah, 1989.
- Azra, Azyumardi dan Saiful Umam (eds.). 1998. *Menteri-menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*. Jakarta: PPIM.
- Barton, Greg. 1999. *Gagasan Islam Liberal Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*. Penerjemah: Nanang Tahqiq. Jakarta: Paramadina dan Pustaka Antara.
- Burhanuddin, Jajat. 2012. *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Effendi, Djohan, et. al., (eds.). 1984. *Agama dalam Pembangunan: Himpunan Sambutan Presiden Soeharto*. Jakarta: CV Kuning Mas.
- Fadeli, Soeleiman dan Muhammad Subhan. 2007. *Antologi NU Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah*. Surabaya: Khalista.
- Fathoni, Khoirul dan Muhammad Zein. 1992. *NU Pasca Khittah Prospek Ukhuwwah dengan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Media Widya Mandala.
- Fealy, Greg. 2011. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LkiS.
- Feillard, Andree. 1999. *NU Vis-à-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. Yogyakarta: LkiS.
- Gaus, Ahmad. 2009. *Sang Pelintas Batas: Biografi Djohan Effendi*. Jakarta: ICRP dan Kompas.

- Hadariansyah, A.B. 2009. *KH. Hasan Basri (1920-1998) Tokoh Majelis Ulama dari Kalimantan*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Haidar, M. Ali. 1994. *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hakim, Loekman. 1993. *Perjalanan Mencari Keadilan dan Persatuan: Biografi Dr. Anwar Harjono, S.H.* Jakarta: Media Dakwah.
- Handrianto, Budi. 2007. *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*. Jakarta: Hujjah Press.
- Harahap, Syahrin. 2006. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. Jakarta/Medan: Istiqamah Mulya Press.
- Hidayat, Kamarul. Tth. *Apa dan Siapa dari Utarra: Profil dan Kinerja Anak Banua*. Jakarta: CV Surya Garini.
- Ideham, M. Suriansyah, et. al., (eds.). 2007. *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Balitbanda Propinsi Kalimantan Selatan.
- Kartodirjo, Sartono. 1981. *Elite dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Latif, Yudi. 2005. *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*. Bandung: Mizan.
- Ma'arif, Ahmad Syafii. 1996. *Islam dan Politik Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mahfoedz, Maksoem. 1982. *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*. Surabaya: Kesatuan Umat.

- Mandan, Arief Mudatsir. 2008. *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid: Tanggung Jawab Politik Nudalam Sejarah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Mardjoned, Ramlan. 1990. *KH. Hasan Basri 70 Tahun: Fungsi Ulama dan Peranan Masjid*. Jakarta: Media Dakwah.
- Marijan, Kacung. 1992. *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ma'shum, Saifullah (ed.). 1998. *Karisma Ulama Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*. Bandung: Mizan.
- Mimbar Ulama*. No. 215/Juli 1996.
- Mohyiddin, Abdul Muthalib *et. al.* 1972. *50 Tahun Perguruan Islam Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Amuntai Kalimantan Selatan 1922-1972*. Yayasan Pemelihara Perguruan Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan.
- Muhajir, Ahmad. 2007. *Idham Chalid, Guru Politik Orang NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Muhtadi, Asep Saeful. 2004. *Komunikasi Politik Nahdhatul Ulama Pergolakan Politik Radikal dan Akomodatif*. Jakarta: LP3ES.
- Muthalib, Zainal Abidin A. dan Amir Husaini Zamzam (eds.). 2010. *KH. DR. Idham Chalid dalam Pandangan Umat*. Amuntai: Syndicate 23.
- Prodjokusumo, H.S., *et. al.*, (eds.). 1990. *15 Tahun Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indoensia.
- Rahman, Jamal D. *et.al.* (eds). 1997. *Wacana Baru Fiqih Sosial 70 Tahun K.H. Ali yafie*. Bandung: Mizan, 1997.
- Ridwan, Nur Khalik. 2010. *NU dan Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Sjamsuddin, Heliuss. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Taher, Elza Peldi (ed.). 2009. *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: ICRP.
- Tim Penulis. 2005. *Ensiklopedi Islam Jilid I*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Tim Redaksi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka.
- Van Bruinessen, Martin. *NU: Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. (Versi Notepad, Pdf)
- Yusuf, Slamet Effendi, et.al. 1983. *Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU*. Jakarta: CV Rajawali.